

# PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2017

### **TENTANG**

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017

## **DAFTAR ISI**

Daftar Isi		
Daftar Ta	ıbel	
Daftar Ga	ambar	
BAB I	PEND	AHULUAN
	1.1.	Latar Belakang
	1.2.	Dasar Hukum Penyusunan
	1.3.	Hubungan Antar Dokumen
	1.4.	Sistimatika Penyusunan Dokumen RKPD
	1.5.	Maksud dan Tujuan
BAB II		UASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN IIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Gambaran Umum Kondisi Daerah
	2.	1.1. Aspek Geografi Dan Demografi
		2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
		2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
		2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana
		2.1.1.4. Demografi
	2.	1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
		2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
		2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
		2.1.2.3. Fokus Seni dan Budaya
	2.	1.3. Aspek Pelayanan Umum
		2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
		2.1.3.2. Fokus Layanan Ururan Pilihan
		2.1.3.3. Fokus Layanan Fungsi Penunjang
	2.	1.4. Aspek Daya Saing
		2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
		2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
		2.1.4.3. Iklim Investasi
		2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia
	2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Daerah Sampai Tahun Berjalan
	2.3.	Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB III		CANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN ANGAN DAERAH	
	3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	86
	3.	1.1. Arah Kebijakan Perekonomian Nasional	86
	3.	1.2. Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat	89
	3.	1.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Solok Selatan	93
	3.	1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	97
	3.2.	Arah Kebijakan Umum Keuangan Daerah	97
	3.2	2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	98
	3.2	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	102
		3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	102
		3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	104
		3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	106
BAB IV	PRIO	RITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	108
	4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018	110
BAB V	RENG	CANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	129
BAB VI	PENU	JTUP	185

## **DAFTAR TABEL**

Tabel. 2.1.	Perbandingan Luas Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan
Tabel. 2.2.	Peruntukan Kawasan di Kabupaten Solok Selatan
Tabel. 2.3.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2016
Tabel. 2.5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012-2016
Tabel. 2.6.	PDRB Kabupaten Solok Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)
Tabel. 2.7.	Laju Pertumbuhan Tiap Sektor PDRB Atas Harga Konstan dan Harga Berlaku Serta Tingkat Inflasi Tahun 2012-2016
Tabel. 2.8.	Nilai dan Kontribusi Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Rp. Juta)
Tabel. 2.9.	Nilai dan Kontribusi Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Konstan Tahun 2012-2016 (Rp.Juta)
Tabel. 2.10.	Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.11.	Perkembangan Jumlah Kasus dan Kasus yang Terselesaikan dan Angka Kriminalitas di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.12.	Perkembangan APK Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.13.	Perkembangan APM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.14.	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)
Tabel. 2.15.	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Solok Selatan 2012-2015
Tabel. 2.16.	Perkembangan Indikator Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.17.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.18.	Perkembangan Angka Putus Sekolah Penduduk Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.19.	Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Siswa Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.20.	Perkembangan Angka Melanjutkan Penduduk Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.21.	Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.22.	Perkembangan Indikator Pelayanan Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.23.	Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Tahun 2012-2016 .
Tabel. 2.24.	Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

Tabel. 2.25.	Perkembangan Akses Air Minum Layak, Sanitasi Layak dan Akses Rumah Berlistrik di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.26.	Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.27.	Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP dan Pembinaan Politik Daerah di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012–2016
Tabel. 2.28.	Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Sosial di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.29.	Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.30.	Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.31.	Perkembangan Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.32.	Perkembangan Indikator Kinerja Pelayanan Urusan Pertanahan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.33.	Perkembangan Indikator Kinerja Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.34.	Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012–2016
Tabel. 2.35.	Perkembangan Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2016
Tabel. 2.36.	Perkembangan Jumlah Kendaraan Angkutan Umum, Jumlah Arus Penumpang Umum, Rasio Izin Trayek dan Jumlah Terminal di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.37.	Perkembangan Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum, Lama dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.38.	Perkembangan Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2016
Tabel. 2.39.	Perkembangan Kinerja Koperasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.40.	Perkembangan UMKM di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.41.	Perkembangan Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.42.	Perkembangan Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.43.	Perkembangan Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016
Tabel. 2.44.	Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2016

Tabel. 2.45.	Perkembangan Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016	58
Tabel. 2.46.	Perkembangan Kinerja Urusan Kearsiapan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2016	59
Tabel. 2.47.	Perkembangan Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Solok SelatanTahun 2012-2016	59
Tabel. 2.48.	Perkembangan Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016	60
Tabel. 2.49.	Perkembangan Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016	61
Tabel. 2.50.	Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016 (Dalam Ton/Tahun)	61
Tabel. 2.51.	Perkembangan Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016 (Dalam Ton)	62
Tabel. 2.52.	Perkembangan Jumlah Ternak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016 (Dalam Ekor)	62
Tabel. 2.53.	Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016	63
Tabel. 2.54.	Perkembangan Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016	64
Tabel. 2.55.	Perkembangan Kinerja Fungsi Penujang Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016	65
Tabel. 2.56.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Solok Selatan Periode 2010-2015 (Rata-rata per bulan)	66
Tabel. 2.57.	Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan untuk Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastrutktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016	67
Tabel. 2.58.	Perkembangan Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016	68
Tabel. 2.59.	Perkembangan Indikator Infarstruktur Dasar Wilayah di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016	69
Tabel. 2.60.	Perkembangan Indikator Urusan Penataan Ruang untuk Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016	69
Tabel. 2.61.	Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016	70
Tabel. 2.62.	Perkembangan Indikator Fokus Sumberdaya Manusia di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016	71
Tabel. 2.63.	Hasil Analisis Gambaran Kondisi Umum Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2016	71
Tabel. 3.1.	Per;kembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2012-2016 dan Target 2017-2018	94
Tabel. 3.2.	Laju Pertumbuhan Tiap Sektor PDRB Atas Harga Konstan dan Harga Berlaku Serta Tingkat Inflasi Tahun 2012-2016	95
Tabel. 3.3.	Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2012-2016	99

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten	
Solok Selatan Tahun 2014-2019 (Rp Juta)	101
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten	
Solok Selatan Tahun 2014-2019 (Rp Juta)	105
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten	
Solok Selatan Tahun 2014-2019 (Rp Juta)	107
Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Solok Selatan	109
Prioritas Pembangunan Daerah	111
Penjabaran Prioritas Daerah Dalam Program Pembangunan	
Daerah	112
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Perkiraan Maju	
Tahun 2019 Berdasarkan OPD/Bidang Urusan Pemerintahan	
Daerah dan Program/Kegiatan	130
	Solok Selatan Tahun 2014-2019 (Rp Juta) Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014-2019 (Rp Juta) Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014-2019 (Rp Juta) Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Solok Selatan Prioritas Pembangunan Daerah Penjabaran Prioritas Daerah Dalam Program Pembangunan Daerah Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Berdasarkan OPD/Bidang Urusan Pemerintahan

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1.	Peta Batas Wilayah Kabupaten Solok Selatan	7
Gambar 2.2.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten	
	Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	18
Gambar 2.3.	Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Solok Selatan,	
	Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	24
Gambar 2.4.	Perbandingan Indek Gini Kabupaten Solok Selatan,	
	Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	25
Gambar 2.5.	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten	
	Solok Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016	27
Gambar 2.6.	Perkembangan RLS dan HLS Penduduk Kabupaten Solok Selatan	29
Gambar 2.7.	Rata-rata NTP. It dan Ib Bulanan Solok Selatan Tahun 2015	67

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 berisikan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2016.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Evaluasi mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Proses penyusunan RKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD tahun 2018 secara kontekstual dan subtantif dalam mekanisme perencanaan mengintegrasikan program-program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun program-program hasil penjaringan aspirasi yang diformulasikan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2017.

RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 disusun untuk menjadi acuan bagi seluruh stake holder di daerah dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 pada instansi

bersangkutan, sehingga proses perencanaan mulai dari penampungan aspirasi sampai kepada penyusunan perencanaan dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran.

Dokumen RKPD tahun 2018 ini disusun dengan mempedomani Arah Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 - 2021, RTRW Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2031, Arah dan prioritas RPJM Nasional tahun 2015-2019, RKP Nasional tahun 2018, RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, serta memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya.

#### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2018 adalah:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
   Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana
   Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2031;

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021.
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

#### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Tahun 2018 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun dan merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021. RKPD disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2018.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan kabupaten yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2018 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat, dokumen perencanaan tingkat provinsi dan dokumen perencanaan tingkat kabupaten serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan teknis Organisasi Perangkat Daerah, sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

#### 1.4. Sistimatika Penyusunan Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Dasar, Hukum Penyusunan Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan, Maksud danTujuan.

### Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

#### 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun 2016.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 2016 dan perkiraan pencapaian indikator Tahun 2017 terhadap pencapaian indikator RPJMD Kabupaten Solok Selatan.

#### 2.3. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.

## BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3. 1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang kondisi perekonomian nasional dan regional serta tantangan dan prospek perekonomian tahun 2018

#### 3. 2. Arah Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

#### BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

#### 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang merupakan landasan penetapan landasan prioritas pembangunan daerah.

#### 4. 2. Prioritas dan Pembangunan Daerah

Menjelaskan program prioritas pembangunan pembangunan tahun 2018 beserta target kinerja dan Organisasi Perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pencapaian target kinerja tersebut.

#### BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD tahun 2018, instansi pelaksana, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

#### **BAB VI** Penutup

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

#### 1.5. Maksud danTujuan

RKPD tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan yang operasional untuk jangka periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, RKPD ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan; mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan; mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **BABII**

## EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

#### 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

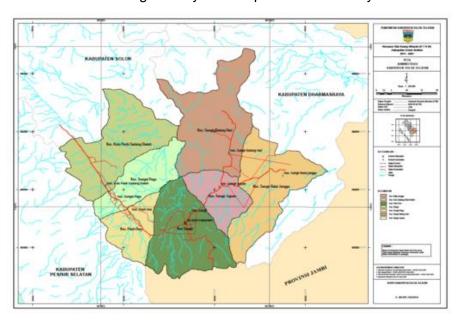
#### 2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

#### 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. dan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Solok. Kabupaten Solok Selatan adalah salah satu dari tiga kabupaten pemekaran yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2031. Secara geografis daerah ini berada pada 01° 17′ 13″ - 01° 46′ 45″ Lintang Selatan dan 100° 53′ 24″ - 101° 26′ 27″ Bujur Timur. Tepatnya berada di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- > Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sebelah Timur dengan wilayah Kabupaten Dharmasraya



Gambar 2.1. Peta Batas Wilayah Kabupaten Solok Selatan

Ibu Kota Kabupaten Solok Selatan berkedudukan di Padang Aro, yang berjarak 166 kilometer dari Kota Padang. Secara administratif, sejak tahun 2007 Kabupaten Solok Selatan terdiri dari tujuh kecamatan yaitu Sangir, Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo, Sangir Batang Hari, Sungai Pagu, Pauh Duo dan Koto Parik Gadang Diateh. Saat ini Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 39 nagari dan 269 Jorong.

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2003 yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Solok Selatan luas wilayah luas wilayah adalah 3.346,20 KM². Angka ini berbeda dengan yang tercantum dalam Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 berdasarkan digitasi peta Topografi AD yang menetapkan luas wilayah Kabupaten Solok Selatan 3.590,15 Km². Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan mengaskan kembali luas wilayah mendekati UU Nomor 38 Tahun 2003. Sampai saat ini BPS tetap menggunakan data luas wilayah Kabupaten Solok Selatan adalah 3.346,2 KM².

Tabel. 2.1.
Perbandingan Luas Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan

No	Kecamatan	Luas (Km²)			
140	Recalliatali	UU No.38/2003	Perda No. 8/2012		
1	Sangir	632,99	632,13		
2	Sungai Pagu	596,00	358,41		
3	Koto Parik Gadang Diateh	524,10	672,66		
4	Sangir Jujuan	278,06	278,63		
5	Sangir Batang Hari	280,01	751,66		
6	Pauh Duo	348,10	265,31		
7	Sangir Balai Janggo	686,94	631,35		
	Jumlah	3.346,20	3.590,15		

Sumber: UU Nomor 38 Tahun 2003 dan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Solok Selatan 2012-2032 (diolah)

Secara topografis 60% dari wilayah Kabupaten Solok Selatan berada pada kelerengan di atas 40% yang tergolong sangat curam dan rawan terhadap bahaya longsor. Kabupaten Solok Selatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) kategori wilayah topografis:

- (1) kawasan dataran tinggi bergelombang yang menempati wilayah bagian Timur, mulai dari Lubuk Malako di Kecamatan Sangir Jujuan ke arah Utara sampai ke wilayah Kecamatan Sangir Batang Hari;
- (2) kawasan perbukitan, lebih dominan menutupi wilayah Kabupaten Solok Selatan. mulai dari bagian Utara sampai bagian tengahnya;
- (3) kawasan lembah kaki pegunungan yang menempati wilayah bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan bagian Selatan, yang merupakan kaki Gunung Kerinci.

Rata-rata pemukiman penduduk berada pada ketinggian 300-950 meter di atas permukaan laut, dengan topografi (bentang alam) bervariasi antara dataran lembah bergelombang, berbukit dan gunung yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan yang membujur dari Utara ke Selatan di sepanjang Pantai Barat Sumatera

Secara *geologis*, Kabupaten Solok Selatan berada pada Sistem Patahan Besar Sumatera yang dikenal dengan Patahan Semangka yang masih aktif sampai sekarang. Zona tumbukan lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Benua Eurasia ini masih aktif, dengan laju pergerakan tanah 7 cm/tahun. Jika terjadi pergerakan yang cukup besar akan berpotensi menimbulkan gempa bumi. Di sisi lain berdasarkan peta geologi terlihat adanya potensi sumber daya mineral. Sumber daya mineral tersebut antara lain terdiri dari (a) mineral logam berupa tembaga, emas dan perak (b) potensi panas bumi yang ditandai oleh munculnya mata air panas dan (c) bahan galian berupa batu gamping, pasir, batu sungai dan batu akik.

Dari sisi *vulkanologis*, kabupaten ini terletak di antara dua gunung berapi yang masih aktif yang berada di luar Kabupaten Solok Selatan yaitu Gunung Talang di Kabupaten Solok dan Gunung Kerinci di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Kerinci. Jika terjadi aktivitas vulkanik dan seismik kedua gunung berapi tersebut akan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat di Kabupaten Solok Selatan.

Dilihat dari jenis tanahnya, Kabupaten Solok Selatan terdiri atas tanah *Andosol* dan *Litosol*. Jenis tanah seperti ini memiliki tingkat hara yang tinggi dan sangat subur. Oleh karena itu daerah ini sangat cocok untuk pengembangan kegiatan pertanian, terutama tanaman holtikultura dan perkebunan. Berdasarkan peta kesesuaian lahan diperoleh informasi, bahwa disamping tanaman pangan, komoditas perkebunan yang lebih sesuai dengan potensi lahan adalah jenis tanaman dataran tinggi seperti teh, kakao dan kopi daripada tanaman karet dan kelapa sawit.

Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumber daya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga pengembangan sumber daya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. Pengembangan sumber daya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumber daya alam selain berdampak pada degradasi sumber daya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan.

Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi air yang berasal dari air permukaan. Di Kabupaten ini terdapat 18 (delapan belas) aliran sungai. Sebanyak 5 (lima) terdapat di

Kecamatan Sangir, 3 (tiga) di Sungai Pagu dan 10 (sepuluh) di kecamatan lainnya masing-masing diantaranya terdapat dua (2) sungai. Sungai-sungai besar yang mengalir pada umumnya mempunyai kedalaman yang cukup, bersifat permanen dan memiliki arus yang cukup deras. Dengan bentangan alamnya yang berbukit-bukit serta dilalui oleh banyak sungai seperti itu, menjadikan Kabupaten Solok Selatan rawan terhadap bahaya banjir dan longsor. Di samping itu, Kabupaten Solok Selatan merupakan hulu (daerah tangkapan-catchment area) Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Batang Hari yang sebahagiannya adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan kawasan Hutan Lindung. Dengan demikian, Kabupaten Solok Selatan mempunyai nilai ekologis yang sangat tinggi karena merupakan salah satu dari 4 kabupaten yang termasuk daerah yang berada pada bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari yang mengalir ke Pantai Timur.

Kabupaten Solok Selatan secara umum beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 20°C hingga 33°C dengan curah hujan cukup tinggi yaitu 1.600-4.000 mm/tahun. Dengan kelembaban udara berkisar 80%, Kabupaten Solok Selatan mempunyai iklim tropika basah. Pada umumnya musim penghujan berlangsung pada bulan Januari s/d Mei dan September s/d Desember, sedangkan musim kemarau pada bulan Juni s/d Agustus. Angin pada umumnya bertiup dari arah Barat Daya-Tenggara.

Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Solok Selatan termasuk dalam kategori tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut secara langsung dapat mengakibatkan penjenuhan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu pemicu (trigger factor) terjadinya bencana yaitu banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan.

Kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Solok Selatan tahun 2016 berdasarkan persentase yaitu 36.53% berstatus Hutan Negara, 19.09% Hutan Rakyat. Sementara itu untuk kawasan budidaya berupa persawahan seluas 9.540 ha (2.85%), perkebunan seluas 45.105 ha (13.48%), untuk tegal/ladang 15.275 ha (4.56%), dan lahan yang tidak diusahakan seluas 59.068 ha (19.09%). Sementara untuk peruntukan kawasan sesuai arahan kebijakan dalam Perda RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel. 2.2.
Peruntukan Kawasan di Kabupaten Solok Selatan

PERUNTUKAN KAWASAN BERDASARKAN ARAHAN TATA RUANG	(Ha)	%
Hutan Lindung	84.259,65	23,47
Hutan Konservasi	66.273,25	18,46
Hutan Produksi	12.242,24	3,41
Hutan Produksi Terbatas	53.600,19	14,93
Hutan Poduksi yang Dapat Dikonversi	19.350,64	5,39
JUMLAH KAWASAN HUTAN	235.725,97	65,66
Perkebunan	95.137,65	26,50
Pertanian	14.575,81	4,06
Pertambangan	12.349,94	3,44
Permukiman	1.220,63	0,34
JUMLAH KAWASAN BUDIDAYA	123.284,03	34,34
LUAS WILAYAH	359.010,00	100,00

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032

Pola pemanfaatan lahan Kabupaten Solok Selatan diarahkan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya sendiri dibagi atas kawasan budidaya kehutanan dan non kehutanan. Kawasan budidaya kehutanan diarahkan untuk mengembangkan kegiatan pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Sementara kawasan non kehutanan diarahkan untuk mengembangan kegiatan budidaya pertanian/perkebunan, permukiman dan kegiatan budidaya lainnya. Adapun dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Solok Selatan kurang terkendali. Sebagian besar perubahan yang terjadi berupa alih fungsi lahan dari kawasan hutan ke perkebunan dan permukiman.

#### 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Solok Selatan ditetapkan menjadi kawasan stategis. Kegiatan pembangunan pada kawasan strategis akan menjadi prioritas penanganannya karena kawasan ini mempunyai karakteristik yang spesifik khususnya dalam memacu pengembangan wilayah di Kabupaten Solok Selatan maupun untuk pertimbangan strategis lainnya. Dengan menggarap suatu kawasan strategis secara multisektor dan terintegrasi diharapkan akan terjadi pengembangan wilayah sesuai karakteristiknya sehingga secara umum akan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

Kawasan strategis ditetapkan dalam RTRW dimaksudkan untuk:

- Mengarahkan perhatian seluruh pihak terhadap perlunya pemusatan sumberdayasumberdaya pembangunan yang ada. baik dari level Pusat hingga Daerah, maupun sumber-sumber donor lain yang memungkinkan. kekawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis. secara terintegrasi sehingga mampu memicu efek pengganda bagi perekonomian wilayah secara menyeluruh;
- 2) Memusatkan perhatian para pemangku kepentingan pembangunan daerah pada kawasan-kawasan strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunannya melihat potensi dan permasalahan yang ada.

Selain itu, optimalisasi lahan produktif merupakan upaya ekonomisasi wilayah agar tercapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan melalui kreatifitas penyelenggaraan sumber daya buatan yang ramah lingkungan. Perlindungan TNKS dan hutan lindung sebagai upaya penjaminan kelangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di lingkungan wilayah Kabupaten Solok Selatan serta wilayah hilir, terkait dalam hal dukungan penyediaan sumber daya alam. Dukungan untuk pengembangan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Solok Selatan hanya mungkin terjadi kalau aset alam yang ada sekarang ini mendapat perlindungan sebaik mungkin.

Perencanaan pengembangan Wilayah Kabupaten Solok Selatan diarahkan ke dalam tiga wilayah pengembangan yang didasarkan oleh karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah tersebut:

- a. Kecamatan Sangir yang berpusat di Padang Aro sebagai pusat pengembangan I dengan *growth point* pelayanan pemerintahan, pelayanan umum dan perdagangan.
- b. Kecamatan Sungai Pagu, Pauh Duo dan Koto Parik Gadang Diateh sebagai pusat pengembangan II yang dipusatkan di Muara Labuh dengan *growth point* pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata dan sentra produksi tanaman pangan.
- c. Kecamatan Sangir Batang Hari, Sangir Jujuan dan Sangir Balai Janggo sebagai pusat pengembangan III dengan *growth point* sektor perkebunan.

Sekaitan dengan zonasi tersebut, maka pengembangan kawasan strategis di Wilayah Kabupaten Solok Selatan yang akan diangkat meliputi:

1) Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi; Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan adalah kawasan Muara Labuh-Padang Aro, kawasan agropolitan serta kawasan kerjasama regional dan perbatasan.

- 2) Kawasan strategis untuk kepentingan sosio-kultural; Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan sosio-kultural di Kabupaten Solok Selatan adalah Kawasan situs Nagari Seribu Rumah Gadang di Koto Baru, Kawasan Rumah Gadang Panjang di Abai dan RPC, Monumen PDRI di Bidar Alam, Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muara Labuh dan daerah sekitarnya, Kawasan RTH Padang Aro dan sekitarnya, dan Kawasan Petilasan Rumah Gadang Rajo Balun dan Kawasan Petilasan Mesjid Anam Puluah Kurang Aso di Kecamatan Sungai Pagu.
- 3) Kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan adalah Kawasan delapan belas (18) Daerah Aliran Sungai di tujuh (7) kecamatan, Kawasan Pegunungan Kerinci di Kecamatan Sangir, Kawasan TNKS, Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Kawasan penambangan emas di Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir, Kawasan Penambangan Biji Besi di Kecamatan KPGD, Kawasan HPH PT. Andalas Merapi Timber (AMT), Kawasan Lahan Kritis di Ulu Suliti Kecamatan KPGD, Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Nagari.

#### 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Solok Selatan telah ditetapkan menjadi kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan budidaya ataupun lindung yang memiliki potensi resiko degradasi lingkungan dan bencana alam. Melihat kedudukan Kabupaten Solok Selatan yang berada pada suatu Sistem Patahan Besar dan jalur gunung api yang masih aktif sampai sekarang serta banyaknya dataran yang bergelombang dan curam menyebabkan sebagian besar daerahnya merupakan daerah rawan bencana baik gempa bumi, longsor maupun banjir. Secara kewilayahan, wilayah-wilayah kritis lingkungan di Kabupaten Solok Selatan meliputi lahan kritis, erosi, bencana tanah longsor dan banjir.

Secara garis besar pengelompokan daerah rawan bencana di Kabupaten Solok Selatan adalah:

- 1. **Gerakan Tanah.** Gerakan tanah disebabkan oleh sesar yang ada di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Dari kedudukan wilayah Kabupaten Solok Selatan yang berada pada sistem Patahan Besar yaitu sistem Patahan Semangka, yang meliputi sebahagian besar daerah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dan Sungai Pagu.
- Gempa Bumi dan Gunung Api. Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Walaupun sebenarnya Kabupaten Solok Selatan secara

administrasi daerah tidak memiliki gunung api, tetapi sebahagian besar wilayah kaki Gunung Kerinci berada diwilayahnya. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah akan terkena imbas yang tidak langsung dari letusan dari gunung tersebut (awan panas dan lahar dingin) seperti wilayah Sangir, Pauh Duo dan Sungai Pagu. Sedangkan untuk potensi bahaya gempa cukup besar hal ini mengingat pulau Sumatera secara umum berada di daerah tektonik aktif dimana lempeng Samudera Hindia bergerak ke Utara menghujam secara menyerong terhadap lempeng Benua Eurasia yang bergerak ke Selatan dengan laju pergerakan mencapai 7 cm/tahun. Jika terjadi pergerakan yang cukup besar maka akan menyebabkan pergeseran lempeng benua mikro (*mikro plate*) yang berada di antara Jalur Tumbukan (Palung) dan Zona Patahan Semangka. Pergerakan terebut akan memicu pergerakan sesar/patahan yang ada di wilayah Solok Selatan dan juga dapat menyebabkan pergerakan tanah. Daerah-daerah yang akan terkena dampak langsung jika terjadi pergeseran Patahan Sumatera akibat gempa bumi meliputi daerah sepanjang Balun, Muara Labuh sampai dengan Pekonina yang berada di sekitar zona Patahan Sumatera.

- 3. Longsor. Longsor umumnya terjadi pada daerah perbukitan yang bertebing terjal dan daerah tebing sungai terutama pada daerah cut of slope seperti pada daerah berlereng dengan kelerengan >15%, daerah perbukitan bergelombang, daerah perbukitan terjal dan daerah kaki pegunungan. Daerah ini meliputi sebahagian besar wilayah Kabupaten Solok Selatan.
- 4. Banjir. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang dialirkan melalui sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Selain itu juga daerah cekungan-cekungan dapat juga terjadi genangan yang menyebabkan banjir. Daerah yang perlu diwaspadai (berpotensi) rawan banjir terdapat di sepanjang Sungai Batang Hari, Sungai Batang Bangko, Sungai Batang Suliti, Sungai Batang Liki dan sepanjang Sungai Batang Sangir. Upaya penanganan banjir dilakukan secara terpadu dengan mengkoordinasikan kerjasama lintas wilayah administratif dan lintas sektoral yang meliputi kegiatan normalisasi sungai, rehabilitasi lahan pada daerah hulu yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, rehabilitasi lahan kritis yang terletak di sekitar jalur lintas air serta koordinasi antar pihak yang terlibat.

Kebijaksanaan pengamanan kawasan lindung ditentukan sesuai dengan tujuan pemantapannya yaitu mencegah terjadinya bencana (lahan kritis, longsor dan banjir). meningkatkan fungsi hidrologis dan menjaga kelestarian kawasan bawahan maupun disekitarnya sendiri. Pengendalian dan pengarahan kegiatan yang ada dan berkembang di kawasan tersebut untuk menjaga fungsi kawasan serta pemantapan kawasan lindung.

Pengurangan atau relokasi penduduk pada kawasan rawan bencana, pemantauan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi lindung

#### 2.1.1.4. Demografi

Manusia (penduduk) merupakan salah satu modal dalam pembangunan. Daya guna dari modal tersebut ditentukan oleh berbagai kondisi yang meliputi kuantitas, kualitas dan distribusinya. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan periode 2012-2016 terus mengalami peningkatan yaitu dari 150.885 jiwa pada tahun 2012 menjadi 162.724 jiwa pada tahun 2016. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Solok Selatan menunjukkan *trend* penurunan per tahunnya. LPP pada tahun 2012 senilai 2.04 % dan terus mengalami penurunan hingga 1.83% pada tahun 2016.

Jika ditinjau dari rasio jenis kelamin (sex ratio) atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan selama kurun waktu 2012-2016, sex ratio cenderung meningkat meski tidak mengalami perubahan yang cukup besar. Pada tahun 2012 sex ratio berkisar 101.18% dan cendrung mengalami peningkatan hingga 101.90% pada tahun 2016. Rasio jenis kelamin lebih dari 100% ini menggambarkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Keadaan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.3.

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk (jiwa)	150.885	153.943	156.901	159.796	162.724
Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	42.03	42.89	43.70	44.51	45.33
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2.04	2.02	1.92	1.85	1.83
Sex Ratio (%)	101.18	101.20	101.59	101.57	101.90

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Tingkat kepadatan penduduk tahun 2016 berdasarkan luas wilayah yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Solok Selatan adalah 45,33 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Pagu (89,79 jiwa/km²), menyusul Kecamatan Sangir (64.88 jiwa/km²), Pauh Duo (56.58 jiwa/km²), Sangir Jujuan (47,17 jiwa/km²), Koto Parik Gadang Diateh (35,02 jiwa/km²), Sangir Batang Hari (27,50 jiwa/km²), dan Kecamatan Sangir Balai Janggo tercatat mempunyai kepadatan terendah (27,17 jiwa/km²).

Tabel. 2.4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2016

			Penduduk	Perda No.	Kepadata	
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	8/2012	(jiwa/km²)
1	Sangir	20,847	20,166	41,013	632.13	64.88
2	Sungai Pagu	15,651	16,531	32,182	358.41	89.79
3	Koto Parik Gadang Diateh	11,849	11,706	23,555	672.66	35.02
4	Sangir Jujuan	6,630	6,513	13,143	278.63	47.17
5	Sangir Batang Hari	10,465	10,205	20,670	751.66	27.50
6	Pauh Duo	7,479	7,531	15,010	265.31	56.58
7	Sangir Balai Janggo	9,205	7,946	17,151	631.35	27.17
	Jumlah	82.126	80.598	162,724	3,590.15	45.33

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan (Diolah).

Ditinjau dari klasifikasi kepadatan penduduk. Kabupaten Solok Selatan tergolong daerah yang berpenduduk tidak padat (Undang-Undang Nomor: 56/PRP/1960 membagi empat klasifikasi kepadatan penduduk. yaitu: tidak padat. dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa/Km²; kurang padat antara 51-250 jiwa/Km²; cukup padat 251-400 jiwa/Km²; dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/Km²).

Sebaran keadaan penduduk menurut kelompok usia (umur) di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2016 dapat dilihat Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu dari 59,12%, 58,80 tahun 2015 menjadi 58,50 pada tahun 2016, namun rasio tersebut masih berada diatas rasio ketergantungan Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2016 rasio ketergantungan Kabupaten Solok Selatan sebesar 57,92 berarti setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 57-58 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat memiliki tanggungan lebih sedikit yaitu 55,25 orang pada tahun yang sama.

Tabel. 2.5.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2012-2016

Kelompok Umur (Tahun)	2012	2013	2014	2015	2016
0-4	15.296	17.970	18.152	18.218	18.256
5-9	15.030	16.588	16.911	17.245	17.557
10-14	15.652	15.551	15.742	15.991	16.297
15-19	14.315	13.110	13.368	13.619	13.801
20-24	11.709	12.446	12.521	12.628	12.838
25-29	11.146	13.758	14.036	14.218	14.312
30-34	11.148	12.334	12.521	12.743	13.033
35-39	10.410	11.480	11.633	11.791	11.909
40-44	9.283	9.608	9.873	10.119	10.386
45-49	8.337	8.118	8.305	8.509	8.742
50-54	7.625	6.829	6.960	7.103	7.243
55-59	6.296	5.519	5.775	5.987	6.200
60-64	4.108	3.975	4.282	4.594	4.887
65-69	2.864	2.466	2.552	2.686	2.861
70-74	2.331	1.937	1.978	2.013	2.024
75 +	2.885	2.254	2.292	2.332	2.378
Jumlah	148.437	153.943	156.901	159.798	162.724

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

#### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

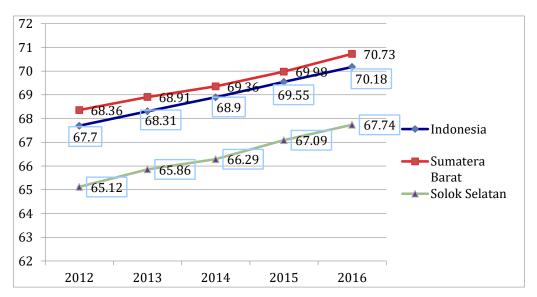
#### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

#### A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Dalam konsep ini, manusia dipandang sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan dan didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan serta merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia suatu daerah. Jika dilihat dari perkembangan Indeks pembangunan Manusia selama tahun 2012-2016 dapat dilihat bahwa indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan menunjukan trend yang cendrung mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 65,12 pada tahun 2012 menjadi 67,74 pada tahun 2016. Namun, meskipun mengalami peningkatan dari tahun ketahun namun angkanya masih dibawah rata-rata provinsi yaitu 70,73 pada tahun 2016 dan rata-rata nasional yaitu 70,18. Angka Indeks Pembangunan

Manusia Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat berada pada rangking 15 berada diatas Kabupaten Sijunjung, Pasaman Barat, Pasaman dan Kepulauan Mentawai.



Gambar 2.2. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

#### B. Pertumbuhan PDRB dan Inflasi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ialah berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB dapat menggambarkan dominasi sektor-sektor pembentuk ekonomi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit usaha yang ada pada suatu wilayah.

Jika dilihat dari perkembangan PDRB Kabupaten Solok Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) periode 2012-2016 mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari Rp. 3.090.219,6 juta pada tahun 2012 menjadi Rp.4.593.324,5 juta, atau mengalami peningkatan rata-rata 9,27% pertahun. Peningkatan ini terjadi juga pada PDRB Kabupaten Solok Selatan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yaitu dari Rp 2.759.897,9 juta pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 3.432.743,6 juta pada tahun 2016 dengan peningkatan rata-rata 5,62% pertahun.

Meskipun mengalami pertumbuhan disetiap tahunnya namun tingkat pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK terus mengalami perlambatan terutama dari tahun 2014-2016. Untuk PDRB ADHB mengalami perlambatan pertumbuhan dari 11,11% menjadi 8,52%, sedangkan PDRB ADHK mengalami perlambatan 5,90 menjadi 5,05%. Perlambatan pertumbuhan ini seiring dengan penurunan dari pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Tabel. 2.6.

PDRB Kabupaten Solok Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan
Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB (harg	jaberlaku)	PDRB (harga konstan tahun)				
	Jumlah (juta Rp)	Pertumbuhan	Jumlah (juta Rp)	Pertumbuhan			
2012	3.090.219,6	9,18	2.759.897,9	6,04			
2013	3.434.160,7	8,92	2.929.009,3	6,13			
2014	3.889.024,0	11,11	3.101.897,4	5,90			
2015	4.224.476,6	8,63	3.267.781,8	5,34			
2016*	4.593.324,5	8,52	3.432.743,6	5,05			

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara umum dapat diketahui dari pertumbuhan PDRB ADHK. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung melambat, yaitu berturut-turut sebesar 6,04% (tahun 2012); 6,13% (tahun 2013); 5,90% (tahun 2014); 5,34% (tahun 2015) dan 5,05%. Jika ditinjau pertumbuhan ekonomi perlapangan usaha, dapat dilihat hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam pembentukan berada pada sektor perekonomian sekunder dan tersier seperti Jasa lainnya, Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Pendidikan, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Konstruksi. Sedangkan perkembangan kontribusi sektor primer terus mengalami perlambatan pertumbuhan hal ini disebabkan karena terjadinya perlambatan pertumbuhan dari sektor pertanian.

Sedangkan untuk tingkat inflasi di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi, dan cendrung mengalami penurunan. Meskipun dari tahun 2012-2013 terus mengalami penurunan dari 5,05 % menjadi 4,71% pada tahun 2013 namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 6,93%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 3,11% dan meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 3,31. Jika dikaitkan dengan tingkat inflasi daerah dapat dilihat posisi pertumbuhan ekonomi terbaik berada pada tahun 2013 yaitu di kala pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan relatif meningkat cukup tinggi yang diikuti oleh penurunan tingkat inflasi.

Tabel. 2.7.

Laju Pertumbuhan Tiap Sektor PDRB Atas Harga Konstan dan Harga Berlaku Serta

Tingkat Inflasi Tahun 2012-2016

Tingkat Inflasi Tanun 2012-2016											
Kategori	Uraian	20	12	20	13	2014		201	5	2016*	
Kalegori	Oralali	НВ	нк	НВ	нк	НВ	нк	НВ	нк	НВ	нк
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.33	3.91	9.79	3.42	14.26	5.51	6.67	3.42	7.55	2.90
В	Pertambangan dan Penggalian	11.45	5.46	15.14	5.76	24.97	5.85	14.58	7.03	6.11	6.30
С	Industri Pengolahan	10.85	8.05	8.12	5.70	7.62	3.17	5.65	2.98	4.62	2.32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.31	3.41	(3.93)	4.74	14.62	6.92	32.06	5.17	16.93	10.22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.79	2.58	3.49	6.69	15.82	6.63	12.43	3.99	8.76	3.31
F	Konstruksi	14.49	8.35	15.92	10.96	13.12	7.87	13.73	7.27	8.14	6.83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.20	6.67	8.55	6.83	8.06	5.48	10.93	5.49	11.15	5.50
Н	Transportasi dan Pergudangan	12.65	8.49	16.88	9.30	14.78	7.63	8.51	7.41	9.35	7.61
ı	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.59	6.34	8.88	2.48	14.71	7.82	15.89	5.39	12.84	5.98
J	Informasi dan Komunikasi	16.53	12.41	5.59	13.53	15.22	8.74	10.96	10.73	10.68	9.00
К	Jasa Keuangan dan Asuransi	16.40	9.27	12.91	6.55	10.68	5.31	7.72	3.77	10.48	6.85
L	Real Estate	8.45	5.41	10.97	4.96	12.58	3.58	11.92	5.90	8.91	4.56
M,N	Jasa Perusahaan	12.68	6.40	10.91	5.05	13.53	6.94	10.03	5.67	9.11	4.78
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.61	2.64	11.20	2.35	8.75	3.62	(0.38)	4.71	8.98	4.45
Р	Jasa Pendidikan	12.39	6.28	17.03	7.16	13.66	6.33	10.07	7.54	12.63	8.64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19.95	10.58	17.03	7.51	12.27	7.91	4.69	5.27	6.86	3.96
R,S,T,U	Jasa lainnya	12.29	6.10	19.17	6.85	13.27	7.47	9.75	6.46	17.08	10.57
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.40	6.04	11.13	6.13	13.25	5.90	8.63	5.35	8.52	5.05
	TINGKAT INFLASI	5.	05	4.	71	6.9	93	3.1	1	3.	31

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

\*) Angka Sementara

Jika ditinjau dari kontribusi PDRB per sektor, terlihat bahwa kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor penyumbang terbesar atas PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar Harga konstan sampai tahun tahun 2016, yaitu sebesar 33,70% dan 32,21%. Sedangkan kontribusi PDRB terkecil berasal dari lapangan usaha sektor listrik dan gas, serta jasa jasa perusahaan sebesar 0,05% dan 0,01%. Berdasarkan dari kecenderungan perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2012-2016 per sektor (sektor primer, sekunder, dan tersier) maka dapat dilihat dominasi kelompok sektor primer, namun mulai bergeser ke arah kelompok sektor sekunder dan tersier. Pergeseran ini seiring dengan perlambatan pertumbuhan sektor primer terutama sektor

pertanian, kehutanan, dan perikanan dan Pertambangan dan Penggalian. Penurunan ini lebih disebabkan karena pertumbuhan dari sektor skunder dan tersier lebih cepat dari pada sektor primer, seperti sektor Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Tabel. 2.8. Nilai dan Kontribusi Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Rp. Juta)

Katagari	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016*	
Kategori	Oralan	Nilai	%								
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,075,471.4	34.80	1,180,788.9	34.38	1,349,138.2	34.69	1,439,152.8	34.07	1.547.843,4	33,70
В	Pertambangan dan Penggalian	259,537.2	8.40	298,823.3	8.70	373,434.5	9.60	427,883.9	10.13	454.047,7	9,88
С	Industri Pengolahan	192,128.9	6.22	207,726.9	6.05	223,554.0	5.75	236,195.0	5.59	247.111,9	5,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	578.4	0.02	555.7	0.02	636.9	0.02	841.1	0.02	1.217,4	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,434.9	0.05	1,484.9	0.04	1,719.8	0.04	1,933.7	0.05	2.103,1	0,05
F	Konstruksi	327,160.0	10.59	379,243.2	11.04	428,991.4	11.03	487,906.9	11.55	527.613,0	11,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	576,220.7	18.65	625,492.9	18.21	675,887.6	17.38	749,784.6	17.75	833.381,5	18,14
Н	Transportasi dan Pergudangan	171,030.1	5.53	199,897.0	5.82	229,438.1	5.90	248,966.5	5.89	272.233,0	5,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21,202.7	0.69	23,084.5	0.67	26,479.6	0.68	30,687.0	0.73	34.626,8	0,75
J	Informasi dan Komunikasi	135,995.5	4.40	143,592.7	4.18	165,451.9	4.25	167,046.8	3.95	184.882,2	4,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	26,733.9	0.87	30,184.0	0.88	33,408.9	0.86	35,989.1	0.85	39.759,6	0,87
L	Real Estate	25,052.5	0.81	27,802.5	0.81	31,300.2	0.80	35,032.3	0.83	38.154,3	0,83
M,N	Jasa Perusahaan	441.6	0.01	489.7	0.01	556.0	0.01	611.8	0.01	667,5	0,01
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	152,475.7	4.93	169,553.5	4.94	184,395.9	4.74	183,690.9	4.35	208.907,6	4,55
Р	Jasa Pendidikan	59,724.5	1.93	69,894.4	2.04	79,443.2	2.04	87,444.4	2.07	94.485,6	2,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33,875.1	1.10	38,419.6	1.12	43,132.7	1.11	45,154.0	1.07	48.250,1	1,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	31,156.5	1.01	37,127.9	1.08	42,055.0	1.08	46,155.8	1.09	54.039,9	1,18
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3,090,219.6	100.0	3,434,161.6	100.0	3,889,023.9	100.0	4,224,476.6	100.0	4.593.324,5	100,0

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan
\*) Angka Sementara

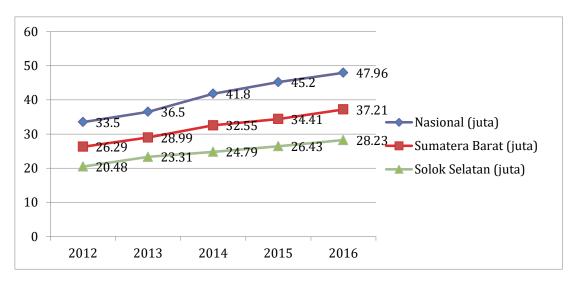
Tabel. 2.9. Nilai dan Kontribusi Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Konstan Tahun 2012-2016 (Rp.Juta)

				2013				2015		2016*	
Kategori	Uraian	Nilai	%								
А	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	952,241.3	34.50	984,766.1	33.62	1,038,990.6	33.50	1,074,531.0	32.88	1.105.701,0	32,21
В	Pertambangan dan Penggalian	226,078.4	8.19	239,092.0	8.16	253,079.4	8.16	270,860.6	8.29	287.919,2	8,39
С	Industri Pengolahan	174,924.4	6.34	184,900.7	6.31	190,760.9	6.15	196,445.8	6.01	200.968,4	5,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	571.5	0.02	598.6	0.02	640.0	0.02	673.1	0.02	797,0	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,426.0	0.05	1,521.5	0.05	1,622.4	0.05	1,687.2	0.05	1.743,1	0,05
F	Konstruksi	292,446.6	10.60	324,505.1	11.08	350,050.4	11.29	375,511.2	11.49	401.161,4	11,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	513,669.8	18.61	548,742.1	18.73	578,787.8	18.66	610,559.6	18.68	644.120,9	18,76
Н	Transportasi dan Pergudangan	160,066.6	5.80	174,952.2	5.97	188,302.6	6.07	202,263.9	6.19	217.646,6	6,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19,634.9	0.71	20,121.0	0.69	21,694.5	0.70	22,864.3	0.70	24.231,6	0,71
J	Informasi dan Komunikasi	125,623.1	4.55	142,624.0	4.87	155,096.0	5.00	171,736.9	5.26	187.194,6	5,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	24,187.6	0.88	25,772.4	0.88	27,141.1	0.87	28,165.2	0.86	30.094,6	0,88
L	Real Estate	23,367.4	0.85	24,526.6	0.84	25,404.6	0.82	26,903.9	0.82	28.129,9	0,82
M,N	Jasa Perusahaan	410.0	0.01	430.8	0.01	460.8	0.01	486.9	0.01	510,2	0,01
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	132,526.6	4.80	135,645.7	4.63	140,550.0	4.53	147,174.2	4.50	153.730,0	4,48
Р	Jasa Pendidikan	54,087.8	1.96	57,958.8	1.98	61,626.5	1.99	66,271.9	2.03	71.998,3	2,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	29,996.9	1.09	32,249.4	1.10	34,801.6	1.12	36,634.6	1.12	38.084,5	1,11
R,S,T,U	Jasa lainnya	28,638.8	1.04	30,601.5	1.04	32,888.2	1.06	35,011.4	1.07	38.712,3	1,13
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2,759,897.7	100.0	2,929,008.5	100.0	3,101,897.4	100.0	3,267,781.7	100.0	3.432.743,6	100,0

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan
\*) Angka Sementara

#### C. PDRB Perkapita

Besarnya PDRB per kapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, pendapatan per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Solok Selatan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.



Gambar 2.3.Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

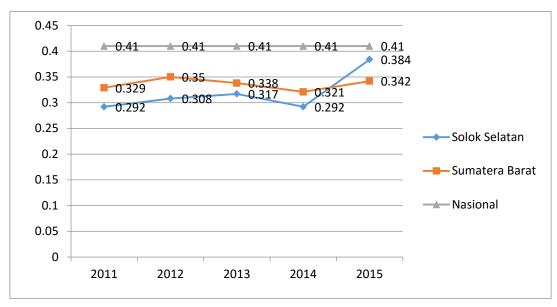
Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Pada tahun 2012 PDRB per kapita Kabupaten Solok Selatan masih mencapai angka sebesar Rp 20,48 Juta, tahun 2016 sudah menjadi Rp 28,23 Juta atau naik sebesar 9,46% tiap tahun. Meskipun mengalami rata-rata peningkatan yang cukup tinggi, seiring dengan pertumbuhan PDRB Provinsi dan Nasional, Namun pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Solok Selatan selalu lebih rendah dengan selisih yang semakin melebar dengan tingkat pertumbuhan juga lebih rendah. Pada tahun 2012, selisih keduanya sekitar Rp. 5.81 juta dengan Provinsi dan Rp. 13,02 Juta dengan Nasional, kemudian terus bertambah pada tahun 2016 hingga menjadi Rp. 8,98 juta dengan Provinsi dan 19,73 dengan Nasional.

#### D. Indeks Gini

Koefisien indeks gini digunakan sebagai alat ukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan distribusi pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut definisinya, koefisien gini adalah perbandingan luas daerah antara kurva lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat

tersebut. Hal ini berarti semakin besar indeks gini berarti kesenjangan kesejahteraan (dari aspek pendapatan) semakin besar, sehingga dapat terjadi kerawanan/kecemburuan sosial.



Gambar 2.4.Perbandingan Indek Gini Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan data BPS, indeks gini Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015 cenderung mengalami kenaikan sampai tahun 2015 yaitu berturut-turut; 0,292 pada tahun 2011 dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2015 menjadi 0,384. Peningkatan ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Solok Selatan semakin tidak merata atau dengan kata lain gap antara penduduk pendapatan tertinggi dengan terendah semakin besar namun masih kategori ketimpangan sedang karena indeknya masih berada diatas 0,3 dan dibawah 0,5 ( $0.3 \le G \le 0.5$ ). jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi sampai tahun 2014 Indeks Gini Kabupaten Solok Selata lebih baik, Namun pada tahun 2015 Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan meningkat cukup tinggi melebihi provinsi yaitu menjadi 0,384.

#### E. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah isu yang kompleks dan multidimensional, karena banyaknya pendekatan yang dilakukan terhadap kondisi yang disebut miskin, maka banyak definisi tentang kemiskinan. Menurut Bank Dunia (2000), pada umumnya definisi kemiskinan mengacu kepada ide dasar bahwa kemiskinan adalah masalah "kekurangan" dalam "kesejahteraan". Di lain pihak Badan Pusat Statistik (BPS) secara lebih spesifik mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai

pengeluaran per kapita selama sebulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standar minimum ini digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Pertumbuhan jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan suatu daerah. Jika pertumbuhan ekonominya tinggi, serta diiringi distribusi pendapatan yang merata, maka hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua warganya. Angka kemiskinan diartikan sebagai suatu perbandingan antara persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Jumlah penduduk miskin ini bervariasi sesuai dengan jumlah unit yang menghitungnya, serta kriteria yang ditetapkan. Rincian Indikator kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:.

Tabel. 2.10.

Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016

Talluli 2012-2010									
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016				
Tingkat Kemiskinan (%)	9,38	8,12	7,36	7,52	7,35				
Jumlah Penduduk Miskin (000 Orang)	14,00	12,60	11,56	11,95	11,91				
Indeks Kedalam Kemiskinan (P1)	1,24	1,21	0.75	1,06	1,23				
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,24	0,26	0.15	0.22	0,31				
Garis Kemiskinan (Rp)	235.018	252.018	268.902	292.292	326.733				

Sumber BPS Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2015

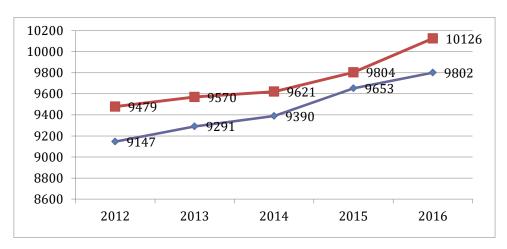
Dilhat dari perkembangan indikator kemiskinan dari tahun 2012-2016 pada Tabel 2.10, pekembangan indikator kemiskinan kabupaten Solok Selatan cendrung mengalami penurunan yang cukup tinggi, meskipun pada tahun 2015 sempat mengalami peningkatan, yaitu dari 9,38% tahun 2012 hingga 7,36% pada tahun 2014, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 7,52% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 7,35%. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2015 merupakan salah satu dampak negatif yang timbul sebagai akibat komitmen pemerintah untuk pemberantasan *illegal mining* yang telah merusak lingkungan.

Namun penurunan angka kemiskinan kurang diikuti oleh indikator kemiskinan lainya yaitu indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Meskipun sampai tahun 2014 trennya cendrung mengalami persamaan namun pada tahun 2016 penurunan angka kemiskinan diikuti oleh kenaikan dari indikator P1 dan P2, dari 1,06 dan 0,22 pada tahun 2015 menjadi 1,23 dan 0,31 pada tahun 2016. Peningkatan Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) berarti semakin menurunnya kesejahteraan penduduk miskin

atau kata lain besaran rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Sedangkan peningkatan Indeks keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan ketimpangan pengeluaran antara penduduk sangat miskin dan miskin semakin membesar.

#### F. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita menggambarkan berapa rata-rata pengeluaran penduduk dalam pemenuhan kebutuhannya baik kebutuhan berupa makanan maupun non makanan. Jika dilihat dari pertumbuhanya rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2012-2016 dapat dilihat terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari Rp. 9.147.000,- menjadi Rp.9.802.000,-. Namun jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat Pengeluaran Perkapita penduduk Kabupaten Solok Selatan tahun 2016 masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat yaitu Rp 10.126.000,- dengan jarak yang semakin melebar jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2015



Gambar 2.5. Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Solok Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

#### G. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Jumlah kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi setiap tahunnya dan cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 92 kasus pada tahun 2012 menjadi 632 kasus 2016. Kasus-kasus yang terjadi diantaranya pembunuhan, aniaya berat,

pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, curanmor, pencurian biasa, narkotika, penipuan perjudian, pencurian kayu, perkosaan dan lain- lain. Jika dilihat penyelesaian kasus pada tahun 2012-2015, terjadi fluktuasi persentase kasus yang terselesaikan penurunan kasus terselesaikan terjadi pada tahun 2015 yaitu 29,23%, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 47,15%.

Untuk melihat tingkat keamanan masyarakat maka dapat dilihat dari perkembangan angka kriminalitas yang tertangani. Perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Solok Selatan cendrung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan namun pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi 38,84 per 10.000 penduduk. Ini dapat diartikan tingkat keamanan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan semakin menurun seiring dengan meningkatnya angka kriminalitas di kabupaten Solok Selatan. Secara rinci terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.11.

Perkembangan Jumlah Kasus dan Kasus yang Terselesaikan dan Angka Kriminalitas di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016						
Jumlah Kasus Kriminal	92	580	539	301	632						
ditangani	92	360	559	301	032						
Persentase Kasus yang	55,43	56,20	56,40	29,23	47,15						
Terselesaikan	55,45	50,20	50,40	29,23	47,13						
Jumlah Penduduk	148.437	153.943	156.901	159.798	162.724						
Angka Kriminalitas (per 10.000	6,20	37,68	34,35	18,84	38,84						
penduduk)	,	,	,	,	,						

Sumber: BPS dan Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan

#### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

#### A. Angka Melek Huruf

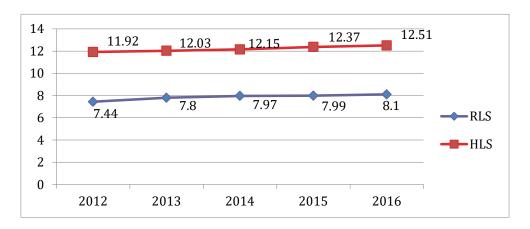
Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Selama periode 2012-2016, capaian angka melek huruf di Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2012 AMH sebesar 97,63%, tahun 2013 sebesar 97,72%, tahun 2014 sebesar 97.80%, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016 menjadi 98.87% dan 99,01%. Ini berarti upaya pemberantasan buta huruf baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal berdampak positif bagi pengurangan penderita buta huruf di Kabupaten Solok Selatan, namun meskipun demikian angka tersebut menunjukkan bahwa masih tersisa sebesar 0,99% penduduk yang berusia 15 kahun keatas penderita buta huruf. Atas keberhasilan ini Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2015 mendapatkan penghargaan Penuntasan Buta Aksara Tingkat Pratama dari Presiden RI.

### B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Untuk melihat rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat melalui Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau lamanya sekolah yang diharapkan dan dirasakan oleh anak yang berusia 7 tahun keatas yang akan bersekolah dan menamatkan sekolah dimasa mendatang.

Jika dilihat dari perkembangan Angka RLS, terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Solok Selatan yaitu dari 7,44 tahun pada tahun 2012 menjadi 8,20 tahun pada tahun 2016. RLS Kabupaten Solok Selatan sebesar 8,10 yang berarti rata-rata pendidikan yang ditamatkan setara kelas 2-3 SMP. Lambatnya peningkatan rata-rata lama sekolah antara lain disebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia diatas 40 tahun dan relatif banyaknya penduduk yang telah menamatkan pendidikan tinggi cendrung mencari pekerjaan diluar Kabupaten Solok Selatan.

Sedangkan untuk Angka Harapan Lama Sekolah menunjukan adanya peningkatan yaitu dari 11,92 tahun pada tahun 2012 menjadi 12,51 tahun pada tahun 2016. Ini berarti rata rata harapan lama sekolah penduduk yang akan masuk sekolah (usia 7 tahun) dapat bersekolah sampai tingkat SMA-D1. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perubahan kebijakan pendidikan dari pendidikan dasar sembilan tahun menjadi pendidikan universal (12 tahun) serta hampir meratanya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah.



Gambar 2.6.Perkembangan RLS dan HLS Penduduk Kabupaten Solok Selatan Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

### C. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partispasi Kasar (APK) yang merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. Sedangkan Angka

Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut (usia sekolah).

Tabel. 2.12.
Perkembangan APK Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

		•				
No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	PAUD	41,87	44,91	64,26	64,26	63,87
2	SD/MI	108,23	108,22	114,13	112,54	107,9
3	SMP/MTs	86,95	90,48	94,43	108,94	104,91
4	SMA/SMK/MA	67,23	70,81	74,91	94,30	94,16

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

Tabel. 2.13.
Perkembangan APM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI/Paket A (%)	95,64	97,75	98,23	97,43	97,43
2	SMP/MTs/Paket B (%)	73,45	71,85	78,78	80,62	80,62
3	SMA/SMK/MA/Paket C (%)	55,58	62,24	65,40	70,02	70,02

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

Jika dilihat dari perkembangan APK dan APM di berbagai tingkat pendidikan berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2016 terjadi penurunan APK pada semua jenjang pendidikan, penurunan ini disebabkan karena kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap penerimaan murid sekolah SD/MI minimal usia 7 Tahun. APK perjenjang pendidikan berada diatas 100 masih mungkin terjadi disebabkan karena adanya murid berusia diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang sedang ditempuhnya. Sedangkan APM dibawah 100 maksudnya masih terdapat penduduk usia sekolah tertentu bersekolah pada jenjang pendidikan yang tidak seharusnya. Idealnya baik APK maupun APM berada pada angka 100%.

## D. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-1 Tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah angka yang menunjukan banyaknya kematian ibu hamil, melahirkan sampai nifas per 100.000 kelahiran hidup. AKB dan AKI merupakan

tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel. 2.14.
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

	J	- 7	,	9		,
No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran	3,7	11,9	8,7	5,2	6,43
	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran	290	252,7	188,2	161,2	153,2
3	Balita gizi Buruk	0,17	0,08	0,05	0,04	0,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan

Dari Tabel 2.14 dapat dilihat bahwa perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Solok Selatan cukup berfluktuatif meskipun pada tahun 2013 indikator AKB menalami kenaikan yang cukup signifikan dari 3,7 pada tahun 2012 menjadi pada tahun 11,9 per 1000 kelahiran, namun kembali mengalami penurunan sampai tahun 2015 menjadi 5,2 per 1000 kelahiran dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 6,43 per 1000 kelahiran. Sedangkan untuk Angka Kematian Ibu (AKI) terus mengalami penurunan tiap tahunnya yaitu dari 290 per 100.000 kelahiran menjadi 153,2 per 100.000 kelahiran.

Sedangkan perkembangan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2012-2016 mengalami penurunan yaitu dari 0,17% pada tahun 2012 menjadi 0,04% pada tahun 2015, dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 0,05%. Namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan menurut standar WHO (<1%) maka persentase balita gizi buruk di Kabupaten Solok Selatan masih dibawah standar WHO.

# E. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator kesehatan yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka harapan hidup adalah rata-rata usia tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu di suatu daerah. Dilihat dari perkembangan AHH penduduk Kabupaten Solok Selatan pada periode 2012-2016 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun yaitu pada tahun 2012 adalah 65,99 tahun, tahun 2013 menjadi 66,02 tahun, tahun 2014 menjadi 66,04 tahun, tahun 2015 menjadi 66,64 tahun dan pada tahun 2016 menjadi 66,78 tahun, atau naik sebesar 0,79 tahun dari tahun 2012.

### F. Rasio Penduduk yang Bekerja

Aspek ketenagakerjaan dapat dilihat dari dua indikator pokok yaitu Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan persentase angkatan kerja yang telah bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan keterlibatan penduduk dalam kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan proporsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. Dilihat dari perkembangan TPAK Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2015 cendrung mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun 2012 (62,6%) menjadi 2013 (61,17%). Namun pada periode 2013-2015 TPAK terus mengalami peningkatan dari 61,17% menjadi 67,18%.

Tabel. 2.15.
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
'	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	-	61,17	65,3	67,18
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,33	3,6	4,93	6,3

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase penduduk yang aktif mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. TPT bermanfaat untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja). Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya (contoh: kriminalitas).

Dilihat dari perkembangannya, TPT Kabupaten Solok Selatan periode 2012-2015 cukup fluktuatif. Pada tahun 2013 menalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 3,6%, namun pada tahun 2014-2015 terus mengalami peningkatan hingga menjadi 6,3%. Peningkatan dari TPT ini sebagai akibat dari menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2013 dari 6,13 % tahun menjadi 5,35 % tahun 2015, sehingga pertumbuhan lapangan kerja lebih lambat dari pertumbuhan angkatan kerja.

#### 2.1.2.3. Fokus Seni dan Budaya

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan nasional bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan

masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dilihat dari perkembangan pembangunan seni budaya dan olahraga periode tahun 2012-2016 cendrung mengalami penurunan kecuali jumlah klub olahraga (per 10.000 penduduk) yang mengalami peningkatan pada tahun 2016. Penurunan ini lebih disebabkan karena pertambahan penduduk tidak diiringi oleh peningkatan jumlah Group Kesenian, dan Gedung Olahraga. Sedangkan untuk ketersediaan Gedung Kesenian masih belum ada karena sampai tahun 2016 kabupaten Solok Selatan belum memiliki Gedung Kesenian

Tabel. 2.16.
Perkembangan Indikator Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016

No			2013	2014	2015	2016
1	Rasio Group Kesenian per 10.000 penduduk	5,25	5,16	5,16	5,13	5,10
2	Rasio Gedung Kesenian per 10.000 penduduk	-	-	-	ı	-
3	Rasio Klup Olahraga per 10.000 penduduk	8,42	8,12	7,97	7,82	8,91
4	Rasio Gedung Olahraga per 10.000 penduduk	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49

Sumber: Dinas Pariwisata & Kebudayaan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

# 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

# 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

### A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

### 1. Urusan Wajib Pendidikan

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masyarakat terutama kemampuan memecahkan masalah.

Berikut ini diuraikan gambaran perkembangan indikator kinerja di Urusan Wajib Pendidikan Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016:

1. Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Solok Selatan sepanjang periode 2012-

2016 cenderung meningkat. APS penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2012 sebesar 94,85 dan terus meningkat secara bertahap hingga 99,99 pada tahun 2016. Sementara APS penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun juga memiliki pola yang sama yaitu cenderung meningkat secara signifikan. Untuk APS penduduk usia 13-15 tahun mengalami peningkatan dari 89,40 pada tahun 2012 menjadi 96,40 pada Tahun 2016. Sedangkan APS penduduk usia 16-18 tahun juga mengalami peningkatan yaitu dari 80,53 tahun 2012 menjadi 86,39 pada tahun 2016.

Tabel. 2.17.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI	94,85	97,02	98,94	99,88	99,99
2	SMP/MTs	89,40	90,33	92,72	96,73	96,40
3	SMA/SMK/MA	80,53	83,29	85,48	82,79	86,39

Sumber Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

2. Perkembangan Angka Putus Sekolah periode tahun 2012-2016 di berbagai jenjang pendidikan mengalami fluktuasi dari tahun ketahun namun cendrung terjadinya peningkatan meskipun pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015. Jika pada tahun 2012 APS SD/MI berada di posisi 0,11%, mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,35%. Sedangkan APS SMP/MTs juga mengalami kenaikan yaitu dari 0,11% pada tahun 2012 menjadi 0,16 pada tahun 2016. Sedangkan APS SMA/SMK/MA cendrung mengalami penurunan, meskipun dari tahun 2012-2015 mengalami peningkatan dari 1,27% pada tahun 2012 menjadi 3,17 pada tahun 2015, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup tinggi menjadi 0,10%.

Tabel. 2.18.

Perkembangan Angka Putus Sekolah Penduduk Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016				
1	SD/MI	0,11	0,34	0,22	0,39	0,35				
2	SMP/MTs	0,11	1,27	0,14	0,18	0,16				
3	SMA/SMK/MA	1,27	3,31	0,52	3,17	0,10				

Sumber Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

3. Untuk Angka kelulusan (AL), pada periode 2012-2016 terdapat peningkatan untuk tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTs terutama dari tahun 2014-2016 yaitu 100%. Sedangkan untuk pendidikan SMA/MA meskipun pada tahun 2015 mencapai 100% namun pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 99,9%.

Tabel. 2.19.

Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Siswa Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs	98,99	99,96	100	100	100
3	SMA/SMK/MA	99,28	98,87	99,10	100	99,9

Sumber Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

4. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2012-2016 mengalami kenaikan yaitu dari 98,99% menjadi 100% ini berarti seluruh tamatan SD/MI melanjutkan pendidikannya ke SMP/MTs. Sementara Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA selama periode 2012-2016 berflutuasi, penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 1,85% namun pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi 98,63%.

Tabel. 2.20.
Perkembangan Angka Melanjutkan Penduduk Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI ke SMP/MTs	98,99	100	96,74	96,03	100
2	SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98,57	98,04	98,26	96,41	98,63

Sumber Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

5. Jika dilihat perkembangan indikator pelayanan pendidikan Kabupaten Solok Selatan di setiap tingkatan pendidikan cendrung mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari rasio ketersediaan sekolah, ketersediaan bangunan sekolah, rasio guru terhadap murid, dan kualifikasi guru. Meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan standar rata-rata seperti rasio guru per murid (43,47 per 1000 murid /1 guru : 23 murid) dan ketersediaan ruang kelas (rata-rata 23 murid per ruang kelas) rasio tersebut masih berada diatas standar pelayanan pendidikan. Sedangkan untuk indikator Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, meskipun terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun namun belum memenuhi standar pelayanan minimum pendidikan yaitu tingkat pendidikan minimal guru adalah S1/D4.

Tabel. 2.21.
Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
Α	SD/MI					
1	Rasio ketersediaan Sekolah (per 10.000 penduduk usia sekolah)	69,28	76,87	74,31	72,25	72,25
2	Persentase bangunan Sekolah Berkondisi Baik	96,35	92,47	93,84	93,84	93,84
3	Rasio Guru Per Murid (per 1000 siswa)	51,85	52,20	60,98	65,23	57,49
4	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	33,53	58,85	59,13	62,98	62,98
В	SMP/MTs					
1	Rasio ketersediaan Sekolah (per 10.000 penduduk usia sekolah)	57,47	64,91	53,80	62,67	62,67
2	Persentase bangunan Sekolah Berkondisi Baik	100	100	100	100	100
3	Rasio Guru Per Murid (per 1000 siswa)	62,25	64,56	58,36	60,21	62,54
4	PersentaseGuru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80,50	90,07	87,79	83,94	83,94
С	SMA/SMK/MA					
1	Rasio ketersediaan Sekolah (per 10.000 penduduk usia sekolah)	22,71	26,69	22,97	20,50	20,50
2	Persentase bangunan Sekolah Berkondisi Baik	100	100	100	100	100
3	Rasio Guru Per Murid (per 1000 siswa)	64,25	64,40	81,19	73,56	76,36
4	PersentaseGuru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	66,36	98,10	99,65	95,16	95,16

Sumber Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

# 2. Urusan Wajib Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan pelayan dasar yang harus diperoleh masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas dari sarana dan pelayanan masyarakat sangat menentukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Wajib Kesehatan Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.22 yang diuraikan sebagai berikut:

- 1. Rasio jumlah posyandu per satuan balita (per 1000 balita) dari tahun 2012-2016 berfluktuasi. Walaupun mengalami penurunan sampai tahun 2015 menjadi 14,77, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan rasio ideal pelayanan 1 unit posyandu melayani balita adalah antara 75–100 balita, maka cakupan pelayanan posyandu Kabupaten Solok Selatan masih dibawah rasio ideal yaitu 1 unit posyandu melayani 66-67 balita. Meskipun secara rasio pada tahun 2012-2016 mengalami penurunan namun jumlah posyandu mandiri pada tahun 2012-2016 mengalami peningkatan yaitu dari 4,47% pada tahun 2012, naik menjadi 6,02% dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu menjadi 60,07% posyandu pada tahun 2016.
- Sedangkan rasio jumlah puskesmas untuk per satuan penduduk di Kabupaten Solok
   Selatan dari tahun 2012-2016 mengalami kenaikan yaitu dari 0,053 tahun 2012

menjadi 0,055 pada tahun 2016 atau 1 puskesmas melayani 18.080 penduduk. Dilihat dari cakupan pelayanan puskesmas terjadi juga peningkatan yakni dari 114,29% pada tahun 2012 menjadi 128,57% pada tahun 2016. Dengan rasio puskesmas untuk per satuan penduduk dan cakupan pelayanan puskesmas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sarana pelayanan kesehatan setingkat puskesmas sudah mencukupi (standar rasio 1 puskesmas per 30.000 penduduk. Dan untuk cakupan 1 puskesmas per 1 kecamatan). Begitu pula dengan cakupan pelayanan puskesmas pembantu yang standar pelayanannya 1 per desa (nagari), sudah berada diangka 125%, dengan jumlah puskesmas pembantu 49 unit. Namun jika ditinjau dari sebaran penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Solok Selatan yang tidak merata dan dominan perbukitan dengan tingkat aksesbilitas yang rendah maka dalam memenuhi pelayanan kesehatan pada masyarakat diperlukan peningkatan fasilitas sarana kesehatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

- 3. Untuk capaian rasio tenaga medis (dokter) dan paramedis (perawat, bidan) per 1000 penduduk secara umum belum terpenuhi yang tersebar di seluruh Puskesmas, Pustu dan Poskesdes. Pada tahun 2016 rasio dokter sebanyak 0,28 per 1000 penduduk / 1 dokter melayani 3571 penduduk (standar 0,4 per 1000 penduduk/ 1 : 2500 penduduk). Sementara itu untuk medis (perawat dan bidan) rasionya baru mencapai 3,1 per 1000 penduduk atau 1 tenaga medis melayani 323 penduduk.
- 4. Dilihat dari perkembangan kelahiran balita tahun 2012-2016 di Kabupaten Solok Selatan yang dibantu oleh tenaga kesehatan/medis, yaitu dokter, bidan, mantri kesehatan, dan tenaga paramedis lainnya cendrung mengalami peningkatan yaitu dari 67% pada tahun 2012 menjadi 82% pada tahun 2016. Meskipun mengalami peningkatan masih terdapat proses kelahiran yang masih ditolong oleh tenaga nonmedis seperti dukun bayi, paraji, famili dan sendiri sebesar 18% pada tahun 2016. Peningkatan ini diikuti oleh peningkatan cakupan pelayanan komplikasi kebidanan yang ditangani menjadi 100% pada tahun 2016.
- 5. Perkembangan cakupan Desa/Kelurahan Universal Child ImmunizationI) di Kabupaten Solok Selama periode 2012-2016 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari 72,3% tahun 2012 menjadi 93,3%. Cakupan Desa/Kelurahan Universal ChildImmunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di Desa/Kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Meskipun masih terjadi kasus gizi buruk/gizi kurang, namun semua kasus tersebut dapat dilayani yang ditandai dengan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan mencapai 100%.
- 6. Untuk melihat tingkat pelayanan kesehatan terutama penanganan penyakit menular terbanyak dapat dilihat dari dua indikator penyakit yaitu DBD dan TBC BTA. Dilihat

- Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD di Kabupaten Solok Selatan adalah 100% ini berarti seluruh kasus DBD yang ditemukan/dilaporkan masyarakat mendapat penindakan secara medis. Sedangkan untuk kasus penyakit TBC BTA cendrung berfluktuatif hal ini disebabkan karena tidak semua penderita TBC BTA yang mau melaporkan dan mendapatkan tindakan medis.
- 8. Perkembangan cakupan kunjungan bayi selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Cakupan kunjungan bayi tahun 2012 sebesar 45,69%, mengalami peningkatan hingga tahun 2014 sebesar 88,0% dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 74,6% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 82,5%.
- Selama periode 2012-2016 pelayanan RSUD Kabupaten Solok Selatan belum optimal disebabkan standar pelayanan RSUD baru akreditasi C. Hal ini terlihat pada capaian BOR yang masih rendah yaitu pada tahun 2012 40,9%, tahun 2013 42,7%, tahun 2014 44,7%, tahun 2015 46,7% dan tahun 2016 menjadi 50,98%.

Tabel. 2.22.
Perkembangan Indikator Pelayanan Kesehatan Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016

1anun 2012-2016								
No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Rasio posyandu per 1000 balita	16,54	16,56	14,82	14,77	14,94		
2	Persentase Posyandu Mandiri		5,9	53,2	60,1	61,3		
3	Rasio puskesmas per 1000 penduduk	0,053	0,052	0,051	0,050	0,055		
4	Rasio puskesmas pembantu per 1000 penduduk	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30		
5	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,0066	0,0065	0,0064	0,0063	0,0061		
6	Rasio dokter per 1000 penduduk	0,26	0,17	0,30	0,29	0,28		
7	Rasio tenaga medis per 1000 penduduk	2,78	2,86	2,70	3,16	3,10		
8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	23	93	100	100	100		
9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	67	75	84	77	82		
10	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	72.3	79.2	86.9	92.2	93.3		
11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100		
12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	28	51	38	63	36,26		
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100		
14	Cakupan kunjungan bayi	45.69	53.4	88.0	74.6	82.5		
15	Cakupan puskesmas	114,29	114,29	114,29	114,29	128,57		
16	Cakupan pembantu puskesmas	125,64	125,64	125,64	125,64	125,64		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan

# 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Gambaran kinerja pelayanan sub Urusan Wajib Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.23 dan Tabel 2.24 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 (empat) sepanjang periode 2012–2016 di Kabupaten Solok Selatan mengalami perkembangan cukup baik. Pada tahun 2012 sepanjang 2.049,41 km, meningkat menjadi 2.331,30 km pada tahun 2016, atau mengalami peningkatan sepanjang 281,89 Km. Penambahan panjang jalan ini diikuti oleh peningkatan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (aspal kondisi baik) di Kabupaten Solok Selatan periode 2012-2016 berfluktuasi, yaitu dari 12,35% menjadi 18,97%. Ini berarti lebih dari 81,02% dari jaringan jalan di Kabupaten Solok Selatan dalam kondisi rusak (ringan, sedang atau berat).

Tabel. 2.23.
Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Tahun 2012-2016

No.	Jenis Jalan					
NO.	Jeilis Jaiaii	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jalan Nasional	-	-	-	99,22	99,22
2.	Jalan Propinsi	348,25	250,16	250,16	153,44	153,44
3.	Jalan Kabupaten	1.701,16	1.830,62	1.952,23	1.980,58	2078,64
	Total	2.049,41	2.080,78	2.202,39	2233,24	2331,30

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangKabupaten Solok Selatan

- 2. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air di Kabupaten Solok Selatan masih sangat rendah, meskipun mengalami perkembangan pada setiap tahunnya. Ini terlihat pada tahun 2012 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air pada tingkat 0,61% kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,80%. Namun kondisi ini belum memenuhi kondisi jalan yang kondusif bagi masyarakat terutama bagi pejalan kaki, dan pencegahan banjir atau genangan air pada badan jalan.
- 3. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainya di Kabupaten Solok Selatan selama tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi irigasi yang berkondisi baik. Dari luas jaringan irigasi teknis 7609,87 hektar, yang dalam kondisi baik pada tahun 2012 adalah 4.458,92 hektar (58,59%) dan meningkat menjadi 7040,4 hektar (92,52%) pada tahun 2016.

Tabel. 2.24.

Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

	Tabulpaton Colott Colatan Tanan 2012 2010								
No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	14,86	18,75	18,82	20,51	21,28			
2	Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	15	18	25	46	45			
3	Rasio Jaringan Irigasi	55	65	65	68	50			
4	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	253,05	343,16	367,41	406,21	442,32			
5	Persentase Jalan memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	0,61	0,61	0,61	0,80	0,80			
6	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	58,59	60,81	70,22	77,10	92,52			
7	Luas Irigasi Teknis (Ha)	7609,87	7609,87	7609,87	7609,87	7609,87			

Sumber Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan

Selanjutnya gambaran kinerja pelayanan sub urusan penataan ruang Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2012 ditetapkan Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 dan di tahun 2014 telah tersusun dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang RDTR) Kawasan Kota Padang Aro, dan Kajian Pengembangan Kawasan Kandis yang merupakan dokumen turunan dari RTRW Kabupaten
- Pada tahun 2014 Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat telah memfasilitasi penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Ekowisata Teluk Air Putih. Kawasan ini merupakan salah kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan.
- 3. Pada tahun 2015 telah disusunnya dokumen rencana/desain Eks Pasar Lama Muara Labuh yang merupakan salah satu kawasan strategis cepat tumbuh.
- 4. Pada tahun 2016 telah tersusun 2 Dokumen RDTR yaitu RDTR Muaralabuh dan RDTR Abai serta 1 dokumen RTBL yaitu RTBL Kawasan Seribu Rumah Gadang
- 5. Pengendalian dan pemeliharaan kualitas tata ruang dan lingkungan di Kabupaten Solok Selatan juga tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau (RTH) yang dikelola di Kabupaten Solok Selatan sampai tahun 2016 masih sekitar 0,0010% dari luas wilayah, terdiri dari taman kota di Pasar Muaralabuh, keadaan ini memang kelihatan sangat rendah, namun bila dilihat dari kondisi daerah Kabupaten Solok Selatan yang memiliki kawasan hutan ± 60%, secara garis besar ruang terbuka hijau di Kabupaten Solok Selatan telah lebih dari 30%. Pada tahun 2015, juga telah dimulai pembangunan RTH Padang Aro. Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Solok Selatan juga telah disusun oleh Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015, bersamaan dengan beberapa

- Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat.
- 6. Selama tahun 2013-2016 telah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dengan Keputusan Bupati Solok Selatan yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Sekretariatnya berada di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah yang melaksanakan urusan tata ruang.

# 4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.25 yang diuraikan sebagai berikut:

- 1. Untuk aspek tempat tinggal, diketahui bahwa rumah tinggal yang bersanitasi layak di Kabupaten Solok Selatan mengalami perkembangan selama periode 2012–2016. Tahun 2012, rumah tinggal bersanitasi layak baru sekitar 19,23% dari total rumah tinggal yang ada, kemudian di tahun 2016 menjadi 30,56%. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi (1) Fasilitas air bersih (2) Pembuangan tinja (3) Pembuangan air limbah (4) Pembuangan sampah. Walaupun terjadi peningkatan kinerja, namun hal ini menunjukkan bahwa sebagian pembangunan rumah tinggal di Kabupaten Solok Selatan masih belum memenuhi aspek dasar yang dibutuhkan.
- 2. Perkembangan cakupan rumah tangga pengguna air minum layak di Kabupaten Solok Selatan cukup meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2012 rumah tangga pengguna air minum layak sudah mencapai 39,39%, dan terus meningkat di tahun 2016 menjadi 54,73%. Selain peningkatan dari akses air minum yang bersumber dari PDAM, pelaksanaan program PAMSIMAS yang telah dimulai tahun 2008 dan tetap berlanjut sampai dengan tahun 2016 dan memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap peningkatan cakupan rumah tangga pengguna air minum di Kabupaten Solok Selatan. Jumlah rumah tangga pelanggan PDAM tahun 2016 sebanyak 9.197 sambungan rumah (rumah tangga) melayani 39.548 jiwa atau 24,75 % dari jumlah penduduk. Khusus untuk layanan PAMSIMAS dari 102 lokasi sebanyak 99 lokasi telah berfungsi dan dikelola BP-SPAM dengan total sambungan 9.114 SR dengan akses 23,87% dari jumlah penduduk.
- Dalam hal penggunaan listrik, jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN dan Non PLN selama periode 2012-2016 di Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan.
   Jika pada tahun 2012 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik berjumlah

- 92,58%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar 97,47%.
- 4. Dilihat dari perkembangan rumah tidak layak huni di Kabupaten Solok Selatan pada periode 2012-2016 cendrung mengalami yaitu dari 707 rumah pada tahun 2012 terus mengalami kenaikan sampai tahun 2015 menjadi 1800 rumah dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1618 rumah. Penurunan ini seiring dengan komitmen pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan daerah melalui pengurangan biaya hidup penduduk miskin yang salah satu programnya adalah bedah rumah bagi penduduk miskin.

Tabel. 2.25.
Perkembangan Akses Air Minum Layak, Sanitasi Layak dan Akses Rumah Berlistrik di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016					
Akses Air Minum Layak (%)	39,39	40,54	42,11	52,72	54,73					
Akses Sanitasi Layak (%)	19,23	21,46	21,67	27,45	30,56					
Akses Rumah Berlistrik (%)	92,58	93,12	93,37	93,57	97,47					
Rumah Tidak Layak huni	707	903	903	1800	1618					

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

# 5. Urusan Wajib Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Gambaran kinerja pelayanan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar, Kesbangpol Linmas, dan Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.26:

Tabel. 2.26.
Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

No	Indikatas		Perken	nbangan	(Tahun)	
No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	12,33	11,89	11,41	9,30	9,34
2.	Jumlah Linmas	0	0	0	0	0
3.	Peresentase Jorong Memiliki Pos Kamling	na	na	na	24	28
4.	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	83	90	100	80	80
5.	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Siaga Tribun dan Tramas)	1	1	1	0.014	0,014
6.	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten	n.a	n.a	13	15	12
7.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	64	71	71	71	71
8.	Cakupan layanan WMK	28,57	42,86	42,86	42,86	42,86
9.	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	86	80	74	88	88
10	Persentase Nagari Tangguh Bencana	0	0	15,38	17,94	28,20
11	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai dengan Kapasitas Bencana	100	100	100	70	100

Sumber: BPBD dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan

Data pada tabel diatas menunjukan beberapa indikator kinerja aspek ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mengalami peningkatan selama periode tahun 2012-2016, persentase jorong yang memiliki poskamling dari 24% tahun 2015 menjadi 28% pada tahun 2016, persentase cakupan layanan bencana kebakaran dari 64% tahun 2012 meningkat menjadi 71% tahun 2016, kemudian pencapaian tingkat waktu tanggap *(response time rate)* dari 86% pada tahun 2012 meningkat menjadi 88% pada tahun 2016. Peningkatan ini merupakan dampak dari peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran serta peningkatan kompetensi personil dalam melaksanakan tugas setelah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan.

Kemudian indikator kinerja aspek ketertiban umum yang mengalami penurunan dan tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu menurunnya rasio jumlah polisi pamong (PNS) praja per 1.000 Jumlah penduduk, kemudian terbatasnya jumlah patroli Satpol PP, masih rendahnya tingkat penyelesaian kasus K3 ditingkat kabupaten dan belum terdatanya secara akurat jumlah personil Linmas dan Poskamling di tingkat Nagari dan Jorong.

Selanjutnya dapat pula digambarkan kinerja pelayanan sub urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2012-2016 seperti terdapat pada Tabel 2.27:

Tabel. 2.27.
Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP dan Pembinaan Politik Daerah di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012–2016

				Tahun		
No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Penyuluhan wasbang					
	a) Pelaksanaan (kali)	1	1	1	1	1
	b) Peserta (orang)	70	70	70	70	70
2	FKUB					
	a) Pelaksanaan (kali)	4	4	4	4	4
	b) Peserta (orang)	21	21	21	23	21
3	Sosialisasi P4GN					
	a) Pelaksanaan (kali)	7	1	1	1	1
	b) Peserta (orang)	350	200	150	100	150
4	Pendidikan Politik bagi warga Negara	-				
	a) Pelaksanaan (kali)	-	1	-	1	-
	b) Peserta (orang)	-	36	-	39	-
5	Pembinaan Politik Daerah					
	a) Jumlah Parpol	38	38	12	12	12
	b) Parpol yang mendapat bantuan	12	12	11	11	11
	c) Jumlah LSM / Ormas	20	17	17	26	17
6	Bakorpullahdasila/Kominda					
	a) Anggota KOMINDA (orang)	20	25	25	25	25
	b) Pelaksanaan Rapat (kali)	4	3	4	4	4
	c) Opservasi Lapangan (kali)	1	-	-	-	-

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten. Solok Selatan

### 6. Urusan Wajib Sosial

Dilihat dari perkembangan PMKS di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2016 masih di dominasi oleh fakir miskin (20.375 orang), keluarga berumah tidak layak huni (1.618 KK), wanita rawan sosial ekonomi (1.394 orang), Lanjut Usia (1.245 orang), Korban akibat bencana alam & musibah lainnya (811 Orang), penyandang cacat (191 orang), dan anak terlantar (170 orang). Disamping itu, data penyadang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang harus menjadi perhatian meskipun masih dalam angka relatif kecil yaitu masalah penderita HIV/AIDS, anak nakal korban narkoba dan anak yang menjadi korban kekerasan atau perlakuan salah.

Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Sarana sosial seperti panti asuhan hingga tahun 2016 berjumlah 2 unit. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga kini terus diupayakan dengan berbagai cara, salah satunya pemberian bantuan, pendampingan serta pemberian pekerjaan agar menjadi produktif.

Gambaran kinerja pelayanan urusan sosial Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat dari Tabel 2.28:

Tabel. 2.28.
Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Sosial di Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah PMKS	13.857	9.542	10.716	24.227	33.106
2	Persentase Cakupan Pelayanan PMKS	10	15	20	25	66
3	Ketersediaan Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	2	3	3	3	3
4	Persentase Ketersediaan Tenaga Pendamping (minimal 66 orang)	75	78	82	84	87

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan

# B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

### 1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Ketengakerjaan Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.29 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2012-2016 berfluktuasi namun cendrung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya persentase penduduk usia kerja Kabupaten Solok Selatan yang terlibat dalam kegiatan produktif. Jika pada tahun 2012 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar (62,60%), 2013 (61,17%), 2014 (65,30%) dan pada tahun 2015 mengalami

- kenaikan menjadi 67,18%.
- 2. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Solok Selatan dari waktu ke waktu fluktuasi dan cendrung mengalami peningkatan terutama pada periode 2013-2015. Jika pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,33%, tahun 2013 sebesar 3,60%, tahun 2014 sebesar 4,93% pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan secara signifikan menjadi 6,30%. Meningkatnya aktivitas perekonomian pada beberapa sektor perekonomian Kabupaten Solok Selatan, belum mampu menjadi faktor pendorong (driving forces) dalam penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, terutama pada sektor-sektor primer dan industri pengolahan.
- 3. Sedangkan perkembangan tingkat kapatuhan perusahaan terhadap aturan dapat dilihat dari indikator pemenuhan tingkat keselamatan dan Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dapat dilihat pada periode 2012-2016 persentase perusahaan yang menerapkan standar keselamatan dan perlindungan tidak mengalami perubahan yaitu 83% sedangkan untuk Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur terus mengalami peningkatan dari 1,3% menjadi 3,4%.

Tabel. 2.29.

Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	62,60	61,17	65,30	67,18	nd
2	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	0,8	1,1	1,6	2,7	2,9
3	Tingkat pengangguran terbuka	7,33	3,60	4,93	6,30	nd
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan standar Keselamatan dan perlindungan	Na	83%	83%	83%	83%
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	1,3 %	1,6 %	1,9 %	2,4 %	3,4 %
6	Persentase kasus tenaga kerja yang ditangani	na	na	na	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan

# 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.30 yang diuraikan sebagai berikut:

 Perkembangan indeks pemberdayaan gender kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2012-2015 terus mengalami peningkatan yaitu dari 65,93 pada tahun 2012 menjadi 71,53 pada tahun 2015. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Solok Selatan dapat dikatakan cukup baik karena nilainya lebih besar dari pada Indeks Pembangunan Manusia.

- 2. Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan. Jika dilihat perkembangannya pada tahun 2012-2016 partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi namun cendrung mengalami peningkatan, namun masuk kategori rendah. Jika pada tahun 2012 tingkat partisipasi berada di posisi 31,24% mengalmi peningkatan hingga tahun 2015 menjadi 37,47% dan mengalami penurunan pada tahun 36,35%. Pola penurunan dan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita seperti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu terkait dengan ketersediaan lapangan kerja baru dan tingginya kecenderungan wanita melanjutkan penddikan terutama pada pendidikan tinggi keguruan selama tahun 2012-2016. Peningkatan partisipasi angkatan kerja wanita ini diikuti oleh pertumbuhan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah yaitu dari 44,41% pada tahun 2012, menjadi 48,68% pada tahun 2016.
- 3. Penanganan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2012-2016 berfluktuasi tergantung jenis kasus yang ditangani, dari Tabel 2.30 terlihat pada tahun 2012 penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindakan kekerasan berada pada tingkat 33 %, meningkat tajam pada tahun 2016 yaitu berada pada angka 100%. Jka ditinjau dari rasio kasus KDRT per rumah tangga dapat dilihat angka rasio KDRT berflukutasi, jika dibandingkan dari tahun 2012 rasio KDRT mengalami peningkatan sebesar 0,009 per 100 rumah tangga pada tahun 2016

Tabel. 2.30.

Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Indek Pembangunan Gender	65,93	68,73	70,30	71,53	na
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	31,24	36,33	36,62	37,47	36,35
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	44,41	44,88	47,02	47,46	48,68
4	Rasio KDRT	0,017	0,055	0,040	0,021	0,026
5	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	33	65	87	100	100
6	Persentase Keluarga Sejahtera	88,19	89,03	90,19	90,19	90,02

Sumber: Dinas P2KB&P3A Kabupaten Solok Selatan

### 3. Urusan Wajib Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya

pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan pangan adalah ada atau tidaknya peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan lain sebabagainya, kemudian ketersediaan pangan utama yang dihitung dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun. Kondisi kinerja urusan pangan di Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 memperlihatkan masih kurangnya jumlah regulasi pangan. Selama periode ini belum ada produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pangan, yang ada hanyalah Peraturan Bupati tentang pangan.

Sementara itu, dari Tabel 2.31 dapat terlihat tingkat ketersediaan bahan pangan utama mengalami peningkatan. Peningkatan ini diikuti oleh terjadinya diversifikasi pangan yang ditandainya bergesernya ketersediaan pangan utama dari padi ke ubi jalar, ubi kayu dan jagung. Sedangkan ketersediaan bahan pangan hewani, cendrung mengalami penurunan. Oleh karena itu, dimasa datang kelembagaan dan personil aparatur yang melaksanakan urusan pangan perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya, apalagi saat ini kedaulatan pangan menjadi isu dan prioritas nasional.

Tabel. 2.31.

Perkembangan Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Satuan			nbangan (1		
NO.	IIIdikatoi	Satuati	2012	2013	2014	2015	2016
	Regulasi Ketahanan Pangan, dalam bentuk:						
1	Peraturan Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-
ı	Peraturan Bupati	Dokumen	1	-	-	-	-
	Keputusan Bupati	Dokumen	-	-	-	-	-
	Lain-lain	Dokumen	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Pangan Utama, berupa:						
	Padi		135.648	121.939	124.501	131.437	125.903
	Jagung	]	31.486	19.551	8.739	54.074	59.344
	Kacang Hijau		88	66	34	0	0
	Kacang Tanah	ton	1.036	809	468	1.025	5.592
2.	Kedelai	]	223	117	83	59	669
۷.	Ubi Jalar	]	5.546	3.080	2.976	2.650	30.011
	Ubi Kayu	]	5.608	4.241	4.016	4.522	43.747
	Pangan Hewani						
	Daging		3,773	4,489	5,264	3,123	771
	Telur	ton	1,940	1,617	1,670	1,164	167
	Susu	ton	-	-	-	-	415
	• Ikan	]	4,386	3,781	3,085	3,029	2.063
3	Penguatan Cadangan pangan	Ton	nd	nd	nd	182	183
4	Skor Pola Pangan harapan	%	nd	nd	nd	51,6	51,8

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan

### 4. Urusan Wajib Pertanahan

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat dari perkembangan jumlah tanah bersertifikat seperti pada Tabel 2.32 dibawah ini:

Tabel. 2.32.

Perkembangan Indikator Kinerja Pelayanan Urusan Pertanahan di Kabupaten Solok
Selatan Tahun 2012-2016

	Uraian	Satuan	Tahun					
No			2012	2013	2014	2015	2016*	
Α	Jumlah tanah yang bersertifikat yang dikeluarkan	bidang	1.177	1.548	1.050	1.922	2.186	
1	Hak Milik	bidang	1.173	1.527	1.032	1.889	2.111	
2	Hak Guna Bangunan	bidang	1	18	8	21	39	
3	Hak Guna Usaha	bidang	0	0	0	0	15	
4	Hak Pakai	bidang	3	3	10	12	21	
5	Girik	bidang	0	0	0	0	0	

Sumber: BPN dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa selama tahun 2012-2016 jumlah sertifikat yang dikeluarkan berfluaktuasi dengan tren meningkat, yaitu dari 1.173 bidang tanah menjadi 2.186 bidang tanah pada 2016. Fluaktuasi jumlah sertifikat yang dikeluarkan dipengaruhi oleh jumlah kegiatan sertifikat prona yang dibiayai oleh pemerintah pusat, sementara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum memiliki kegiatan khusus untuk mendorong percepatan jumlah tanah yang bersertifikat. Seiring dengan banyaknya kasus-kasus dan sengketa pertanahan, maka untuk lima tahun kedepan, sangat diperlukan peningkatan jumlah kegiatan untuk memfasilitasi pensertifikatan tanah yang didanai melalui APBD berbentuk program replikasi sertifikat prona di daerah. Secara teoritis, kepemilikan sertifikat tanah tidak hanya terkait dengan aspek kepastian hukum, akan tetapi juga berdampak terhadap peningkatan ekonomi, karena bagi dunia usaha terutama pelaku UMKM, kepemilikan sertifikat dapat dijadikan anggunan untuk mendapatkan kredit permodalan usaha dari perbankan.

## 5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Solok Selatan harus mendapat perhatian khusus. Bila dilihat dari sudut pandang pemberian layanan (service provider) di Kabupaten Solok Selatan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 162.724 orang terlihat dari persentase capaian kinerja layanan persampahan masih sangat rendah. Meskipun terjadi peningkatan cakupan sampah yang tertangani dari tahun 2014 yaitu

dari 0,85% menjadi 7,39% pada tahun 2015 dan menjadi 11% pada tahun 2016 dimana bisa terlayani sebanyak 360,36 m³/minggu dibandingkan dari target baru 3.276m³/minggu. Hal ini tidak terlepas dari persoalan daya tampung dan daya angkut yang belum optimal dimana belum adanya lokasi TPS dan TPA yang permanen serta masih kurangnya sarana prasarana pengangkutan persampahan. Dimana rasio daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk (rasio tempat pembuangan sampah (TPS) pada tahun 2016 baru 0,92 per 1000 penduduk atau baru 150 m<sup>3</sup>. Untuk mengatasi hal tersebut dalam meningkatkan cakupan layanan persampahan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah diupayakan penambahan sarana dan prasarana persampahan melalui pembebasan tanah untuk lokasi TPA dan telah terealisasi pada tahun 2015 dengan pembebasan tanah sebesar 4,2 Ha di Jujutan Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir. Selain itu sudah dimulai proses rencana pembebasan 2 (dua) lokasi untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Jorong Sungai Siriah Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu dan di Jorong Taratak Baru Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan. Selain itu dilaksanakan pula penambahan mobil dan kontainer sampah dan pengangkatan petugas-petugas kebersihan pada jalan utama kawasan perkotaan (Padang Aro dan Muara Labuh).

- 2. Capaian kinerja program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dilihat dari cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL adalah 32%. Meskipun cakupan pengawasan terhadap AMDAL masih rendah namun dengan berkat kerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, penegakan hukum lingkungan yang dapat dilihat dari persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dapat ditindak lanjuti seluruhnya yaitu 100%.
- 3. Capaian kinerja program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dapat dilihat dari tingkat pencemaran status mutu air adalah 75%. Tingginya tingkat pencemaran satus mutu air ini terjadi di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Batang Hari yang disebabkan karena penambangan liar

# 6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.33 yang diuraikan sebagai berikut:

 Capaian rumah tangga di Kabupaten Solok Selatan yang memiliki Kartu Keluarga mengalami peningkatan dari tahun ketahun, hal ini dapat dilihat dari Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) yaitu dari 48,05% pada tahun 2012 menjadi 92,06 pada tahun 2016

- 2. Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Solok Selatan pada pada tahun 2012-2016 cendrung mengalami kenaikan yaitu dari 74,51 pada tahun 2012 sebesar 74,51% menjadi 75,48 tahun 2016. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2013-2014 yang disebabkan karena masih terdapatnya data ganda yang disebabkan penerapan KTP Nasional berbasis NIK, yang mulai terlaksana tahun 2012. Namun berkat konsolidasi melalui pembersihan dan penghapusan data ganda serta peningkatan pelayanan, persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP mengalami peningkatan menjadi 75,48%.
- 3. Untuk kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2012 baru sebesar 33,33%, menangalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 31,94% dan selanjutnya mengalami peningkatan hingga menjadi 47,00% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus akte kelahiran terutama untuk bayi yang baru lahir.
- 4. Sedangkan untuk rasio pasangan yang berakte perkawinan (ditujukan bagi pasangan non muslim) yang diukur dari jumlah pasangan nikah berakte perkawinan sampai dengan 2015 baru sebesar 4,22%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 5%

Tabel. 2.33.

Perkembangan Indikator Kinerja Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

	· onoutation orbit of transporter outsit of the first of								
No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	48,05	56,31	46,29	89,21	92.06			
2	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	74,51	71,19	63.17	73,07	75.48			
3	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran	33,33	31,94	37,08	44,01	47.00			
4	Persentase Penduduk yang memiliki akte perkawinan	na	na	na	4,22	5.00			

Sumber: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan

### 7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah proses pembangunan sosial, budaya dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pencapaian kinerja urusan ini terkait dengan kegiatan dan program lintas OPD yang berada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Dinas Kesehatan.

Jika dilihat dari kinerja pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 pada Tabel 2.34 dapat dilihat indikator kinerja yang mengalami peningkatan yaitu jumlah kelompok binaan PKK, persentase PKK aktif, jumlah LSM yang aktif dan posyandu aktif. Sedangkan untuk jumlah LPMN, Nagari Berprestasi cendrung stagnan.

Capaian Indikator kinerja yang mengalami penurunan adalah Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat. Fenomena ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi setelah selesainya program PNPM Mandiri Pedesaan yang menyebabkan nilai kontribusi masyarakat dalam program pemberdayaan sulit untuk diukur.

Tabel. 2.34.

Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012–2016

	ai Nabapaton Goldia Goldian Tanan 2012 2010								
No.	Indikator	Satuan		Perkem	bangan (	(Tahun)			
NO.	iliuikatoi	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat nagari (LPMN)	lembaga	39	39	39	39	39		
2.	Jumlah kelompok binaan PKK	Klp	1.050	1.575	1.775	1.775	1.775		
3.	LSM yang aktif	%	10	17	17	26	26		
4.	LPM Berprestasi	Lembaga	1	1	1	1	1		
5.	PKK Aktif	%	35	35	35	35	40		
6.	Posyandu Aktif	%	100	99,62	100	98,53	100		
7	Nagari Berprestasi tingkat Prov	Nagari	1	1	1	1	1		
8	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	18	20	17	10	10		

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Dinas Kesehatan

# 8. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Meningkatnya kualitas individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh peningkatan kualitas institusi keluarga. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang saling asih, bergotong royong dan terdorong untuk maju. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.35 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Jika dilihat perkembangannya akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Solok Selatan cenderung mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2012, akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif sebesar 26,66% dan 45,64%, mengalami peningkatan sampai tahun 2016 menjadi 65,44% dan 56,86. Peningkatan ini berakibat terhadap menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga yaitu dari 3,47 orang menjadi 3,46 orang.

2. Sedangkan persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2012 sebesar 34,04% menjadi 32,36% pada tahun 2016, hal ini menunjukkan dimana terjadi penurunan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 menjadi keluarga sejahtera.

Tabel. 2.35.
Perkembangan Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2016

Indikator		Perkemb	angan (T	gan (Tahun)			
ilidikatoi	2012	2013	2014	2015	2016*		
Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,47	3,55	3,41	3,47	3,46		
Rasio akseptor KB (%)	46,66	44,37	66,80	65,65	65,44		
Cakupan peserta KB aktif (%)	45,64	40,39	48,90	51,25	56,86		
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	34,04	33,25	32,77	32,95	32,36		

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan, Dinas P2KB&P3A, Dinas Kesehatan (Data diolah)

# 9. Urusan Wajib Perhubungan

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.36 dan Tabel 2.37 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Belum terdapat transportasi umum yang representatif di Kabupaten Solok Selatan, selain itu volume kendaraan angkutan penumpang dalam jangka waktu tahun 2012-2016 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Layanan angkutan umum masih didominasi oleh kendaraan yang tidak resmi dan tidak terdaftar yang beroperasi dan melayani angkutan penumpang di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Untuk menunjang pelayanan arus penumpang ke daerah yang belum memiliki moda transportasi angkutan umum, maka Perum DAMRI memberikan bantuan armada perintis yaitu rute: Padang Aro-Letter W, Padang Aro-Lubuk Malako-Sungai Kunyit-Sungai Rumbai dan Padang Aro-Lubuk Malako-Abai.

Tabel. 2.36.
Perkembangan Jumlah Kendaraan Angkutan Umum, Jumlah Arus Penumpang Umum,
Rasio Izin Trayek dan Jumlah Terminal di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

No	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)						
NO	indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum (Angkutan penumpang)	Unit	11	11	11	11	11		
2.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	49.143	51.367	51.672	52.351	52.351		
3.	Rasio Izin Trayek/jumlah penduduk	Rasio	0,741	0,715	0,701	0,688	0,676		
4.	Jumlah Terminal Bis	Unit	1	1	2	2	2		
5	Jumlah Dermaga	Unit	1	1	1	1	1		
6	Jumlah angkutan Sungai	Unit	305	320	310	351	315		
7	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Sungai	Orang	1010	1300	1200	1750	1350		

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

2. Kinerja pada urusan perhubungan juga dapat dilihat dari cakupan layanan terhadap kendaraan umum. Persentase jumlah kendaraan angkutan umum yang memilik KIR terus mengalami peningkatan sampai tahun 2015, yaitu 72% tahun 2012 menjadi 86% pada tahun 2015, namun pada tahun 2016 persentase kepemilikan KIR angkutan Umum mengalami penurunan hingga 78,14%. Data ini menunjukan bahwa bahwa tingkat kesadaran pemilik kendaraan angkutan umum penumpang/barang dalam melakukan uji kelayakan kendaraannya sesuai ketentuan yang berlaku masih rendah.

Tabel. 2.37.
Perkembangan Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum, Lama dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di Kabupaten Solok SelatanTahun 2012-2016

No.	Indikator	Satuan			Perkembar	gan (Tahun)	
NO.	IIIUIKALOI	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	72	81	84	86	78,14
2.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Kendaraan /Menit	20	20 20 20		20	20
	Biaya KIR:						
3.	PNP	Rp.	43.500 51.000 (ganti Buku)	43.500 51.000 (ganti Buku)	43.500 51.000 (ganti Buku)	43.500 51.000 (ganti Buku)	43.500 61.000 (Ganti buku)
	Bus dan Barang	Rp.	53.500 61.000 (Ganti Buku				

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

## 10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Gambaran kinerja pelayanan urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat dari perkembangan jumlah Jaringan Telekomunikasi, Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk, Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal, Jumlah Penyiaran Radio /TV Lokal, Website Milik Pemerintah Daerah, Pameran/Expo, Jumlah OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi layanan Publik, Dari 7 indikator kinerja bidang komunikasi dan informatika pada umumnya tidak mengalami peningkatan kecuali jumlah OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi layanan Publik yang mengalami peningkatan yaitu dari 2 OPD pada tahun 2012 menjadi 6 OPD pada tahun 2016. OPD yang telah mengaplikasikan Sistem informasi tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (e KTP), Badan Kepegawaian (SIMPEG), Dinas Penanaman Modal dan PTSP (SIPADU), Badan Pengelolaan Keuangan (SIMDA), Sekretariat Daerah (e-Monev dan e-Procurement), Bappeda (SIPPD). Perkembangan kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada Tabel 2.38 dibawah ini:

Tabel. 2.38.
Perkembangan Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 - 2016

	ui Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 - 2010											
				Pe	erkemban	gan (Tahu	ın)					
No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016					
1.	Jumlah Jaringan Telekomunikasi	Operator/ Provider	6	6	6	6	6					
2.	Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk	Rasio	1/1.600	1/1.600	1/2.200	1/2.400	1/2.400					
3.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	Surat Kabar	17	17	17	17	17					
4.	Jumlah Penyiaran Radio /TV Lokal	Stasiun	2	2	2	2	2					
5.	Website Milik Pemerintah Daerah	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					
6.	Pameran/Expo	Kegiatan	3	3	3	3	3					
7	Jumlah OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi layanan Publik	OPD	2	3	4	5	5					

Sumber: Dinas Komimfo Kabupaten Solok Selatan

# 11. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.39 dan Tabel 2.40 yang diuraikan sebagai berikut:

Secara umum keberdaan Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal, sehingga kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, secara kuantitas jumlah koperasi aktif di Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan, jika pada tahun 2012 koperasi aktif 52,1 %, maka pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 40,6%. Sedangkan untuk indikator jumlah koperasi Aktif yang melakukan RAT mengalami peningkatan sampai pada tahun 2015 menjadi 39 koperasi, namun pada tahun 2016 menurun menjadi 32 Koperasi. Permasalahan secara umum dalam pengembangan koperasi di Kabupaten Solok Selatan adalah: (1). Pilihan bidang usaha koperasi kurang prospektif, (2). Rendahnya kualitas SDM dan komitmen pengurus koperasi.

Tabel. 2.39.

Perkembangan Kinerja Koperasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

	- onto mountain garri tamon ja respersas an reas aparem content contain remain 2012 2010										
No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)								
NO.	ilidikatoi	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016				
1.	Jumlah Koperasi Berbadan Hukum	Unit	117	125	130	130	131				
2.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	61	60	66	63	65				
3.	Persentase Koperasi Aktif	%	52,1	48,0	50,8	48,5	40.6				
4.	Jumlah Koperasi Aktif yang RAT	Unit	31	32	36	39	21				
5.	Persentase Koperasi Aktif yang RAT	%	50,8	53,3	54,5	61,9	32				

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Solok Selatan

2. Selain Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Perkembangan UMKM di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016 seperti pada Tabel 2.40 dibawah ini:

Tabel. 2.40.

Perkembangan UMKM di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)						
NO.	indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Jumlah UKM Non BPR/LKM	Unit	310	458	554	1.342	3.375		
2.	Jumlah BPR/LKM	Unit	5	5	5	5	5		
3.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	%	91,3	94,1	95,1	97,5	96,36		

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Solok Selatan

### 12. Urusan Wajib Penanaman Modal

Perkembangan kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2012-2016 dapat dilihat dari pertumbuhan investasi yang ditanamkan di Kabupaten Solok Selatan. Jika dilihat perkembangan investasi pada tahun 2015-2016 pada Tabel 2.41, nilai investasi yang berasal dari PMA yang ditanamkan mengalami penurunan yang cukup tinggi, yaitu dari Rp dan \$82.000 ribu pada tahun 2015 menjadi \$10.606 ribu, sedangkan yang berasal dari PMDN mengalami peningkatan yaitu dari Rp,15.384 juta menjadi Rp. 56.072 juta. Gambaran kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat dari perkembangan investasi selama tahun 2012-2014.

Tabel. 2.41.

Perkembangan Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Satuan		Perk	embanga	an (Tahun)					
140.	Illulkatoi	Jatuan	2012	2013	2014	2015	2016				
1.	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintahan	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				
	Jumlah nilai investasi berskala nasional:										
	> PMDN	Rp (juta)	na	na	na	15.384	56.072				
	➤ PMA	\$ (ribu)	na	na	na	82.000	10.606				
3	Rata-rata lama pelayanan perizinan	Hari	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5				
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan

## 13. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah. Perkembangan kinerja pelayanan Urusan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 seperti terlihat pada Tabel 2.42 dibawah ini:

Tabel. 2.42.
Perkembangan Kinerja Urusan Pemuda dan OlahragaKabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016

		Perkembangan (Tahun)						
No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	10	10	10	10	10		
2.	Jumlah Organisasi Olahraga	24	25	34	34	34		
3.	Rasio Gelanggang/ Balai Remaja (per 10.000 penduduk)	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061		
4.	Rasio Lapangan Olahraga (per 10.000 penduduk)	2,10	2,00	1,97	1,87	1,85		
5.	Peringkat PORPROV	13	-	18	-	11		

Sumber: Dinas Budparpora Kabupaten Solok Selatan

Kebutuhan akan sarana kepemudaan, seperti balai remaja hingga saat ini dirasakan masih belum optimal. Oleh karena itu, bantuan dalam penyediaan balai karang taruna masih perlu ditingkatkan. Dalam penyediaan sarana olahraga, diketahui bahwa perkembangan jumlah lapangan olahraga per satuan penduduk di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2012-2016 mengalami penurunan. Jika pada tahun 2012 lapangan olahraga per 10.000 penduduk sebesar 2,10, maka di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1,85. Sedangkan untuk prestasi di bidang Olahraga terjadi peningkatan prestasi, hal ini dapat dilihat pada event PORPROV Sumatera Barat terjadi peningkatan ranking Kabupaten Solok Selatan yaitu dari peringkat 13 tahun 2012, peringkat 18 tahun 2014 dan peringkat 11 tahun 2016. Kondisi ini seiiring dengan peningkatan jumlah alokasi APBD Kabupaten Solok Selatan dalam pengelolaan dan pembinaan kegiatan olahraga prestasi selama tahun 2012-2016.

## 14. Urusan Wajib Statistik

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Statistik Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 adalah disusun dan diterbitkannya dokumen/buku statistik sebagai berikut:

- 1. Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka (DDA) Kabupaten Solok Selatan selama periode 2012-2016 dokumen ini selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Solok Selatan dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan.
- Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan.

Tabel. 2.43.
Perkembangan Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Perkembangan (Tahun)							
NO.	Illulkator	2012	2013	2014	2015	2016			
1.	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada			
2.	Buku "PDRB kabupaten"	ada	ada	ada	ada	ada			

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan

## 15. Urusan Wajib Persandian

Selama periode tahun 2012-2016 penyelenggaraan Urusan Persandian belum dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan, demikian juga perangkat daerah daerah yang melaksanakannya tidak ada.

# 16. Urusan Wajib Kebudayaan

Gambaran kinerja pelayanan urusan kebudayaan Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat dari jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya dan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, Jumlah sanggar Budaya yang berprestasi. Dari tahun 2012-2016 Kabupaten Solok Selatan rutin menyelenggarakan festival seni dan budaya yang disebut dengan Festival Sarantau Sasurambi. Kegiatan ini berupa pementasan potensi seni dan budaya anak nagari dan pameran atau bazar usaha-usaha kecil dan menengah serta produk-produk kerajinan dan kuliner kabupaten Solok Selatan. Selain sampai tahun 2016 Kabupaten Solok Selatan sudah mempunyai 1 kawasan cagar budaya yang sudah diakui oleh provinsi dan nasional yang ditandainya dengan disusunnya RTBL Kawasan Seribu Rumah Gadang untuk pengembangan kawasan seribu rumah gadang di kenagarian Koto Baru. Pencapaian kinerja Urusan Kebudayaan dapat dilihat dari Tabel 2.44 dibawah ini:

Tabel. 2.44.

Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2016

	di Nasapaten Golok Gelatan Tanun 2012 - 2010										
No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)								
NO.	Illulkator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016				
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	1	1	1	1				
2.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	3	3	4	3	3				
3.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	17	17	17	17	17				
4	Jumlah sanggar Budaya yang berprestasi	sanggar	8	4	3	3	3				

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Solok Selatan

### 17. Urusan Wajib Perpustakaan

Hingga saat ini, peran perpustakaan dirasa masih kurang dalam rangka menarik minat baca masyarakat agar mau membaca di perpustakaan. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai serta makin mudahnya akses internet dan pesatnya perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu penyebab makin rendahnya pengunjung perpustakaan.

Jika dilihat perkembangan indikator di bidang perpustakaan, terlihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan yang mengalami peningkatan dari 556 orang pada tahun 2012 menjadi 2.694 orang pada tahun 2016. Peningkatan ini diiringi oleh peningkatan rasio koleksi buku perpustakaan di perpustakaan daerah dari 0,33 buku pada tahun 2012 menjadi 0,34 pada tahun 2016. Meskipun mengalami peningkatan namun cakupan perpustakaan yang dibina cendrung mengalami penurunan. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perpustakaan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016 dapat dilihat melalui sebagaimana terdapat pada Tabel 2.45 dibawah ini:

Tabel. 2.45.
Perkembangan Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)						
NO.	ilidikatoi	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Jumlah Perpustakaan yang dibina	Unit	52	52	52	50	39		
2.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	556	521	637	598	2.694		
3.	Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah								
	Jumlah Judul	Judul	2.411	2.538	2.538	2.922	4.002		
	Jumlah Buku	Buah	7.232	7.614	7.614	8.764	11.474		

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan,

## 18. Urusan Wajib Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Gambaran kinerja pelayanan urusan kearsipan Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat melalui indikator persentase pengelolaan arsip secara baku, peningkatan SDM pengelola kearsipan. Dari Tabel 2.46 dapat dilihat bahwa pengelolaan arsip secara baku masih relatif rendah dan baru dilakukan pada tahun 2015. Sampai tahun 2016 Pengelolaan Arsip secara baku baru dilaksanakan pada 7 nagari dan 2 OPD. Peningkatan pengelolaan kearsipan ini terus ditingkatkan melalui peningkatan kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan yang diperuntukan oleh pengelola Arsip OPD, Nagari dan Sekolah.

Tabel. 2.46.
Perkembangan Kinerja Urusan Kearsiapan di Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)							
NO.	ilidikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016			
1.	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	-	-	-	3,03	6,06			
2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	-	-	-	1	3			

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Solok Selatan.

# 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi perikanan darat yang cukup menjanjikan, karena didukung oleh banyak sungai dan daerah ini juga dikenal dengan sebutan sebagai Nagari Seribu Sungai yang keberadaan debit airnya cukup terjamin dengan terlindunginya Taman Nasional Kerinci Seblat. Disamping potensi sungai, juga terdapat beberapa potensi embung yang salah satunya berfungsi untuk lahan budidaya perikanan darat. Kemudian, pola budidaya perikanan berupa kolam, empang dan juga mina padi juga telah dilakukan oleh masyarakat di kawasan pertanian.

Namun pada sisi lain, kegiatan pengembangan budidaya perikanan belum berkembang dengan baik, antara lain dapat dilihat dari masih besarnya impor kebutuhan ikan dari luar daerah untuk konsumsi Kabupaten Solok Selatan. Data menunjukkan bahwa impor ikan yang masuk ke Kabupaten Solok Selatan, untuk jenis ikan tawar berasal dari Maninjau Kabupaten Agam dan Koto Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota, Singkarak Kabupaten Solok dan daerah-daerah lain yang membudidayakan ikan tawar (perikanan darat). Sedangkan untuk jenis ikan laut berasal dari Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016 dapat dilihat dari Tabel 2.47 dibawah ini:

Tabel. 2.47.

Perkembangan Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

No	Indikator Kinerja Pembangunan		Capaian Kinerja					
	Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	
	Capaian Produksi perikanan	%	96,09	98,61	89,81	93,41	94,00	
1	Jumlah produksi Ikan	Ton	344,98	448	668,29	677,88	874,19	
2	Cakupan bina perikanan	%	80,00	80,47	72,46	72,30	33,00	
3	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (sungai)	%	65,46	73,66	69,29	82,46	86.9	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

#### 2. Urusan Pilihan Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi menjadi alternatif pilihan untuk dikembangkan dimasa depan, ditopang oleh ketersediaan wisata alam Kabupaten Solok Selatan yang masih alami serta potensi kearifan lokal di sektor kebudayaan yang relatif original dengan ikon **Nagari Seribu Rumah Gadang**. Pengembangan potensi pariwisata ini diawali dengan perubahan cara berfikir eksploitatif yang mengandalkan sektor perkebunan dan pertambangan menjadi berfikir konservasi produktif dengan menjadikan sektor pariwisata berbasis potensi alam dan budaya sebagai pendorong sektor ekonomi lain.

Dari sisi perkembangan Kunjungan Wisatawan dari tahun 2012-2016 terjadi peningkatan yang cukup pesat yaitu dari 1.674 orang pada tahun 2012 menjadi 31.193 orang pada tahun 2016. Peningkatan ini merupakan dampak peningkatan event-event promosi daerah dan meningkatnya pengelolaan objek wisata unggulan daerah seperti Objek Wisata Hot Waterboom Sapan Maluluang dan Kawasan Seribu Rumah Gadang. Selain Objek wisata unggulan daerah Kabupaten Solok Selatan juga mempunyai 63 objek wisata lainnya seperti: Air Terjun Tansi Ampek, Jalur Pendakian Gunung Kerinci terintegrasi dengan Bumi Perkemahan Camin Toran, dan Rumah Gadang Panjang, Goa Batu Kapal, Air terjun Baskom, Air Terjun Suliti.

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Pariwisata Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat dari Tabel 2.48 berikut ini:

Tabel. 2.48.
Perkembangan Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016

	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian Kinerja						
No		Satuan	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Kunjungan Wisatawan	Orang	1.674	1.862	1.890	2.750	31.193		
2.	Objek wisata unggulan yang dikelola	Objek	0	0	1	2	2		
3	Jumlah Objek wisata	Objek	0	0	0	64	65		
4	Persentase Objek Wisata yang dikelola oleh pokdarwis	Objek	0	0	0	10%	30%		

Sumber: Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Solok Selatan.

#### 3. Urusan Pilihan Pertanian

Kabupaten Solok Selatan merupakan Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat, dimana mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan dan subsektor perikanan. Dalam pembentukan struktur ekonomi, sektor ini merupakan sektor andalan Kabupaten Solok Selatan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB

Kabupaten Solok Selatan, yaitu sebesar 33,69% di tahun 2016 . Sub sektor yang paling dominan di sektor pertanian adalah sektor perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan tanaman hortikultura. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Pertanian Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.49 dibawah ini:

Tabel. 2.49.

Perkembangan Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016

Na	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
No	Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Produktivitas padi atau bahan pangan lainnya utama lokal	Ton/Ha	4,95	4,95	4,28	4,98	5.51	
2	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	34,80	34,38	34,69	34,07	33,69	
3	Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) terhadap PDRB	%	14,19	13,96	14,01	13.87	12,97	
4	Kontribusi sektor perternakan(tanaman keras) terhadap PDRB	%	2,59	2,60	2,51	2,56	2,50	
5	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	15,16	15,02	15,48	14.81	15,37	
6	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	0,91	0,91	0,85	0,82	0,85	
7	Cakupan bina kelompok petani	%	39,42	39,44	35,8	71,35	71,35	
8	Ketersediaan Penyuluh Pertanian	%	37,83	37,83	37,83	37,83	59,29	
9	Jumlah KSP Pertanian Tanaman pangan dan hortikultura	Kawasan	4	4	3	5	4	
10	Jumlah KSP Perkebunan	Kawasan	3	3	3	3	3	
11	Jumlah KSP Peternakan	Kawasan	2	3	3	1	1	
12	JumlahSentra Agrobisnis.	Kawasan	0	0	0	0	0	

Sumber: Dinas Pertanian dan BPS kabupaten Solok Selatan

Perkembangan produksi tanaman pangan kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.50 dibawah ini:

Tabel. 2.50.

Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016 (Dalam Ton/Tahun)

No	Komoditi	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Padi	135.648	121.939	124.501	131.437	113.208			
2	Jagung	31.486	19.551	8.739	54.074	37.304			
3	Kacang Hijau	88	66	34	0	307			
4	Kacang Tanah	1.036	809	468	1.025	5.600			
5	Kedelai	223	117	83	59	707			
6	Ubi Jalar	5.546	3.080	2.976	2.650	32.324			
7	Ubi Kayu	5.608	4.241	4.016	4.522	39.205			

Sumber Dinas Pertanakkan Kabupaten Solok Selatan

Perkembangan produksi buah-buahan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.51 dibawah ini:

Tabel. 2.51.

Perkembangan Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2016 (Dalam Ton)

No	Komoditi	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jeruk	2.687	4.501	4.591	805	4.786,9
2	Manggis	38	191	192	198	632,30
3	Pisang	605	121	196	202	1.016,4

Sumber: Dinas Pertanakkan Kabupaten Solok Selatan

Perkembangan jumlah ternak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel 2.52 dibawah ini:

Tabel. 2.52.
Perkembangan Jumlah Ternak di KabupatenSolok Selatan
Tahun 2012-2016 (Dalam Ekor)

No	Ternak	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sapi Potong	7.837	8.206	9.017	9.200	9.540
2	Sapi Perah	0	0	12	15	16
3	Kerbau	7.290	6.717	6.117	6.664	6.482
4	Kambing	8.467	8.429	8.442	8.635	8.729
5	Ayam Petelur	6.562	6.500	6.400	3.000	4.500
6	Ayam Pedaging	22.195	66.705	80.436	67.549	82.225
7	Ayam Buras	87.993	105.940	99.829	87.027	91.704
8	Itik	36.541	30.760	32.952	28.459	28.986

Sumber: Dinas Pertanakkan Kabupaten Solok Selatan

#### 4. Urusan Pilihan Perdagangan

Dilihat dari kecenderungan perkembangan urusan perdagangan selama tahun 2012-2016, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten menurun meskipun pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan yaitu 18,63% tahun 2012 menjadi 18,14% tahun 2016. Data ini memberikan arti bahwa pengelolaan sektor perdagangan belum menunjukan perkembangan yang diharapkan. Secara teoritis, untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam perspektif industrialiasi antara lain dilihat dari sejauh mana perkembangan kontribusi sektor jasa dan perdagangan terhadap PDRB suatu daerah. Sedangkan untuk cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal adalah mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 cakupan pembinaan kelompok pedagang/usaha informal yaitu 19,62% dan terus meningkat setiap tahun hingga menjadi 29,05% pada tahun 2016. Jika dirata-ratakan terjadi peningkatan cakupan pembinaan tahun 2012-2016 yaitu 9,32% atau rata-rata 2,33% per tahun. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perdagangan Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat dari Tabel 2.53 dibawah ini:

Tabel. 2.53.
Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

No	Indikator Kinerja Pembangunan		Capaian Kinerja						
	Daerah	Satuan	Satuan 2012	2013	2014	2015	2016		
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,65	18,21	17,38	17,35	18,14		
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	19,62	22,88	26,04	28,95	29,05		
3	Jumlah sarana perdagangan (pasar)  Pasar Kabupaten  Pasar Tradisonal		2 34	2 34	2 34	2 34	2 34		

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan BPS Kabupaten Solok Selatan

Dilihat dari kecendrungan perkembangan Urusan Perdagangan selama tahun 2012-2016 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten menurun meskipun pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan yaitu 18,63% tahun 2012 menjadi 18,14% tahun 2016. Data ini memberikan arti bahwa pengelolaan sektor perdagangan belum menunjukan perkembangan yang diharapkan. Secara teoritis, untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam perspektif industrialiasi antara lain dilihat dari sejauh mana perkembangan kontribusi sektor jasa dan perdagangan terhadap PDRB suatu daerah. Sedangkan untuk cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal adalah mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 cakupan pembinaan kelompok pedagang/usaha informal yaitu 19,62% dan terus meningkat setiap tahun hingga menjadi 29,05% pada tahun 2015. Jika dirata-ratakan terjadi peningkatan cakupan pembinaan tahun 2012-2016 yaitu 9,42 % atau rata-rata 2,35 % per tahun

## 5. Urusan Pilihan Perindustrian

Dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB cendrung mengalami penurunan dimana pada tahun 2012 berkontribusi 6,22% dan pada tahun 2015 menjadi 5,59%, penurunan ini lebih disebabkan karena terjadinya peningkatan yang lebih besar dari sektor lain terutama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan, dan konstruksi. Demikian juga dengan tingkat pertumbuhan industri juga mengalami penurunan yang cukup drastis, meskipun cakupan bina pengrajin mengalami kecendrungan peningkatan. Disamping akibat lesunya perekonomian nasional dan global, rendahnya tingkat pertumbuhan industri juga disebabkan oleh belum jelasnya fokus pengembangan sektor industri di Kabupaten Solok Selatan. Sesuai dengan potensi daerah, secara teoritis potensi sektor yang prospek adalah pengembangan industri berbasis pertanian, seperti pengolahan produk setengah jadi atau produk jadi dari hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Solok Selatan seperti manggis, jeruk, produk turunan dari sektor peternakan dan buah-buahan potensial lainnya. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perindustrian Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-

2016 dapat dilihat pada Tabel 2.54 dibawah ini:

Tabel. 2.54.
Perkembangan Kinerja Urusan Perindustrian
Pemerintah Kabupaten Solok SelatanTahun 2012-2016

	Indikator Kinaria Dambanguran		Capaian Kinerja						
No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	6,22	6,05	5,75	5,59	5,39		
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	3,11	3,05	2,73	2,58	2,51		
3.	Pertumbuhan Industri	%	10,6	15,3	0,8	1,6	12,64		
4.	Cakupan Bina Pengrajin	%	9,1	9,1	9,8	13,3	13,32		
1 h	Persentase IKM yang Mengekspor Produk ke luar Daerah		0,2	0,22	0,22	0,23	0,23		
6	Persentase IKM yang menerapkan Good Higiene		0,16	0,17	0,18	0,18	0,20		
7	IKM yang memiliki HAKI		0	1	1	2	4		
8	Persentase IKM memiliki Sertifikat Halal		0,02	0,02	0,01	0,03	0.04		

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan BPS Kabupaten Solok Selatan

## 6. Urusan Pilihan Transmigrasi

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Selama tahun 2012-2016 tidak ada kegiatan transmigrasi swakarsa. Kegiatan Urusan Transmigrasi hanya dalam bentuk fasilitas beberapa kegiatan pendukung perkembangan eks UPT transmigrasi yang dibangun sebelum tahun 2012 di Kabupaten Solok Selatan, yaitu dengan fokus pada penyelesaian masalah tanah dan pengembangan ekonomi warga UPT Dusun Tangah Kecamatan Sangir Batang Hari.

# 2.1.3.3. Fokus Layanan Fungsi Penunjang

Pelayanan Fungsi penunjang merupakan Fungsi pelayanan pemerintah yang bertugas atau menjalani tugas dan fungsi mengatur dan mengurus pelayanan urusan pemerintahan guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti ( operating core ). Fungsi penunjang ini terdiri atas 1). Perencanaan, 2). Keuangan, 3). Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, 4). Penelitian dan pengembangan, 5). Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gambaran kinerja pelayanan urusan perdagangan Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.55 dibawah ini:

Tabel. 2.55.
Perkembangan Kinerja Fungsi Penujang Pemerintahan
Kabupaten Solok SelatanTahun 2012-2016

·			ian Kine	rja	
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2012	2013	2014	2015	2016
Perencanaan					
Dokumen Perencanaan Rutin Tepat waktu	25	25	25	25	50
Jumlah Kerjasama Pembangunan antar Lembaga 2-dan Swasta yang disepakati 3.Nilai LAKIP/SAKIP		nd	nd	2	16
Nilai LAKIP/SAKIP	С	С	С	С	na
4. Nilai LKPJ/LPPD		Sedang	tinggi	Sedang	na
II Penelitian dan Pengembangan					
Penelitian dan Pengembangan  1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah		-	-	-	100
Keuangan					
Opini BPK atas Laporan Keuangan	discleamer	discleamer	WDP	WDP	WTP
Persentase Pencapaian Target PAD	96,92	78,14	77,02	110,34	114,95
Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	4,53	4,19	5.43%	5.86%	5,43
Kepegawaian					
Persentase Eselonering yang mengikuti Diklat Struktural					
- Eselon II	40	40	36	52	65
- Eselon III	34	38	45	44	21
- Eselon IV	23	27	22	15	18
Persentase Aparatur yang berijazah Sarjana dan Pasca Sarjana:					
- S1	47,29	48,24	49,80	55,12	58,23%
- S2	3,71	4,12	4,37	4,46	4,51%
- S3	0,40	0,40	0,06	0.10	0,11%
Persentase penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan Analisa Jabatan	na	na	na	na	na
Pelayanan Pemerintahan lainnya					
Persentase pencapaian SPM per-urusan	na	na	na	na	70
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	na	Baik	Baik	Baik	Baik
Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda	88	30	46	23	42
Jumlah Perda Inisiatif DPRD	0	0	0	0	0
Persentase OPD yang menerapkan SPIP	0	0	0	0	0
7. Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)		-	-	II dengan catatan -	II dengar catatan
Peringkat MTQ Nasional Tingkat Provinsi		14	-	17	-
	1 -				
	Perencanaan  Dokumen Perencanaan Rutin Tepat waktu  Jumlah Kerjasama Pembangunan antar Lembaga dan Swasta yang disepakati  Nilai LAKIP/SAKIP  Nilai LKPJ/LPPD  Penelitian dan Pengembangan  Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah  Keuangan  Opini BPK atas Laporan Keuangan  Persentase Pencapaian Target PAD  Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah  Kepegawaian  Persentase Eselonering yang mengikuti Diklat  Struktural  - Eselon III  - Eselon IV  Persentase Aparatur yang berijazah Sarjana dan Pasca Sarjana:  - S1  - S2  - S3  Persentase penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan Analisa Jabatan  Pelayanan Pemerintahan lainnya  Persentase pencapaian SPM per-urusan  Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik  Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda  Jumlah Perda Inisiatif DPRD  Persentase OPD yang meneriksa Internal Pemerintah (APIP)	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  Perencanaan  Dokumen Perencanaan Rutin Tepat waktu  25  Jumlah Kerjasama Pembangunan antar Lembaga dan Swasta yang disepakati  Nilai LAKIP/SAKIP  C  Nilai LKPJ/LPPD  Sedang  Penelitian dan Pengembangan  Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah  Keuangan  Opini BPK atas Laporan Keuangan  Persentase Pencapaian Target PAD  Appersentase Pencapaian Target PAD  Montribusi PAD Terhadap Belanja Daerah  Kepegawaian  Persentase Eselonering yang mengikuti Diklat  Struktural  - Eselon II  - Eselon III  - Eselon IV  Persentase Aparatur yang berijazah Sarjana dan Pasca Sarjana:  - S1  - S2  - S3  Persentase penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan Analisa Jabatan  Pelayanan Pemerintahan lainnya  Persentase pencapaian SPM per-urusan  na  Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik  Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda  Jumlah Perda Inisiatif DPRD  Persentase OPD yang menerapkan SPIP  Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   2012   2013	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   2012   2013   2014	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Sumber: Bappeda, Inspektorat, BPKD, BKSDM, Sekretariat Daerah, Sekwan

# 2.1.4. Aspek Daya Saing

# 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

# A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Angka Konsumsi RT Perkapita)

Perkembangan pengeluaran konsumsi masyarakat kabupaten Solok Selatan relatif cukup tinggi yaitu sekitar 19,19% pertahun. Namun jika dilihat dari peningkatan besaran pengeluaran perkapita penduduk (perbulan) masih relatif rendah yaitu dari Rp. 517.714, pada tahun 2012 menjadi Rp 915,226,- tahun 2015. Dari total pengeluaran tersebut rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga masih didominasi oleh konsumsi makanan dengan rata-rata 60% pertahun. Ini berarti jumlah penduduk yang berada pada kelas menengah keatas masih sedikit. Salah satu karakteristik menengah keatas yaitu meningkatnya pengeluarkan rumah tangga untuk kebutuhan non makanan.

Tabel. 2.56.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Solok Selatan Periode 2010-2015 (Rata-rata per bulan)

Transplater Color Colors Colors 2010 2010 (Transport Strain)										
Kolomnok Bongoluaran	Tahun									
Kelompok Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015					
Konsumsi Rumah Tangga	517.747	555.815	710.985	735.213	915.226					
Makanan	327.355	357.037	434.607	426.435	488.911					
Non Makanan	190.392	198.778	276.378	308.778	425.315					

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

### B. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani menjadi satu-satu indikator urusan pertanian untuk mengukur dari aspek daya saing daerah dilihat dari fokus kemampuan ekonomi daerah. Secara konseptual, yang dimaksud dengan nilai tukar petani merupakan indikator *proxy* kesejahteraan petani yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indek harga yang dibayarkan petani (Ib). Ini berarti semakin tinggi Nilai Tukar Petani maka semakin sejahtera petani. Jika dilihat dari perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2015 baru berada pada angka 106,60 dimana indeks yang diterima (It) petani sebesar 107,70 dan indek yang dbayar petani (Ib) sebesar 101,03. Dimana NTP terbesar adalah sub sektor peternakan yaitu 110.23 persen, diikuti oleh sektor hortikultura yaitu 109,51 dan subsektor tanaman pangan 105,73

Rata-Rata NTP, It, dan Ib Bulanan
Solok Selatan Tahun 2015

115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00

Interpretability of the selection of the

Gambar 2.7.

# 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

### A. Infratruktur Perhubungan

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur untuk urusan perhubungan dapat diukur melalui tiga indikator yaitu: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah barang/orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal pertahun. Perkembangan indikator urusan perhubungan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.57 dibawah ini:

Tabel. 2.57.

Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan untuk Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastrutktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Satuan	Tahun Tahun					
140.	markator	Jatuan	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Rasio Panjang Jalan per jumlah Kendaraan	Rasio	0,150	0,156	0,117	0,137	0.140	
2.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	6.645	6.725	6.520	6.020	6.024	
2.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	768.000	510.326	342.300	350.212	351.214	
3.	Jumlah orang melalui dermaga/ terminal per tahun	orang	6.321	6.457	6.132	5.435	5.440	
3.	Jumlah barang melalui dermaga/ terminal per tahun	Ton	589.100	478.990	311.114	320.109	320.110	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

Data tabel diatas dapat dilihat terjadi kecendrungan penurunan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun 2012-2016 yaitu dari 0,150 tahun 2015 menjadi 0,140 tahun 2016 meskipun dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan namun peningkatan tersebut belum bisa melebihi pencapaian pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,150. Peningkatan Rasio

rasio panjang jalan per jumlah kendaraan periode 2014-2016 diikuti penurunan indikator lainnya seperti Jumlah orang yang terangkut angkutan umum, Jumlah barang yang terangkut angkutan umum, Jumlah orang melalui dermaga/ terminal per tahun, Jumlah barang melalui dermaga/ terminal per tahun.

### B. Infrastruktur Prasarana Wilayah

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dapat diukur melalui empat indikator yaitu: jenis dan jumlah bank dan cabangnya, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabangnya, jenis, kelas dan jumlah restoran, jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel. Perkembangan indikatornya di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016 dapat dilihat dari Tabel 2.58 dibawah ini:

Tabel. 2.58.
Perkembangan Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Solok SelatanTahun 2012-2016

	di Nasapaten eele						
No.	Indikator	Satuan			Tahun		
	manator	Gataan	2012	2013	2014	2015	2016
	Jenis dan jumlah bank dan						
	cabangnya						
1.	Jumlah Bank	Buah	10	10	12	12	12
1.	Bank Umum	Buah	4	4	5	5	5
	Bank Syariah	Buah	2	2	2	2	2
	BPR	Buah	4	4	5	5	5
	Jenis dan jumlah perusahaan						
	asuransi dan						
2.	Jumlah perusahaan asuransi	Buah	2	2	3	3	3
	Asuransi jiwa	Buah	1	1	1	1	1
	Asuransl lainnya	Buah	1	1	2	2	2
	Jenis, kelas dan jumlah restoran						
3.	Restoran	Buah	-	-	-	-	-
٥.	Cafe	Buah	n.a	n.a	n.a	n.a	na
	Rumah Makan	Buah	22	25	45	33	32
	Jenis, dan kelas dan jumlah						
	penginapan/hotel						
4.	Jumlah Penginapan/Hotel	Buah	9	10	10	17	17
4.	Kelas Wisma	Buah	4	5	6	6	6
	Hotel Melati	Buah	4	4	4	5	5
	Hotel Bintang 1	Buah	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Penanaman modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur untuk urusan komunikasi, informatika dan energi dapat diukur melalui tiga indikator yaitu: rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dan jumlah daerah blank spot. Perkembangan indikator urusan komunikasi, informatika dan energi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.59 dibawah ini:

Tabel. 2.59.
Perkembangan Indikator Infrastruktur Dasar Wilayah di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
		Oatuan	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Rasio	62,31	64,02	67,68	68,57	68,57	
2	persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	92,58	93,12	93,37	93,57	97,47	
3	Jumlah Daerah Blank Spot	titik	14	14	14	14	14	

Sumber: Dinas Komimfo, BPS Kabupaten Solok Selatan dan Ranting PLN Muara Labuh

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur untuk urusan penataan ruang dapat diukur melalui enam indikator yaitu: ketaatan terhadap RTRW, Luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan. Perkembangan indikator urusan penataan ruang di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.60 dibawah ini:

Tabel. 2.60.

Perkembangan Indikator Urusan Penataan Ruang untuk Fokus Fasilitas
Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Indikator Satuan		Tahun				
NO.	ilidikatoi	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Ketaatan terhadap RTRW	%	n.a	38,41	45,65	46,36	46,71	
2.	Luas Wilayah Produktif	%	49,24	49,24	49,24	49,24	49,24	
3.	Luas Wilayah Industri	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0.01	
4.	Luas Wilayah Kebanjiran	%	5,00	5,40	5,40	5,50	5,40	
5.	Luas Wilayah Kekeringan	%	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
6.	Luas Wilayah Perkotaan	%	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan BPBD Kabupaten Solok Selatan

Sejalan dengan dilaksanakannya sosialisasi penyelenggaraan tata ruang sebagai kelanjutan dari penetapan RTRW Kabupaten Solok Selatan tahun 2012, maka ketaatan terhadap RTRW semakin meningkat. Setiap kegiatan pembangunan termasuk investasi yang terkait dengan pemanfaatan ruang diwajibkan mendapatkan rekomendasi BKPRD tentang kesesuaian tata ruang. Sampai dengan kondisi tahun 2016, tingkat ketaatan terhadap RTRW telah mencapai 46,71%. Artinya masih ada kegiatan pembangunan dan investasi yang belum mentaati RTRW, terutama kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat pada kawasan-kawasan yang dilarang oleh Perda RTRW seperti disepanjang sempadan sungai dan lain sebagainya.

### 2.1.4.3. Iklim Investasi

Untuk melihat fokus iklim berinvestasi dalam mengukur aspek daya saing daerah dilakukan dengan mengukur enam indikator yaitu: 1) angka kriminalitas, 2) jumlah demo, 3) lama proses perizinan, 4) jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, 5) jumlah perda

yang mendukung iklim investasi, dan 6) persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. Perkembangan fokus iklim berinvestasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.61 berikut ini:

Tabel. 2.61.

Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Satuan			Ta	hun	
NO.	indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio Angka kriminalitas,	per 10.000 penduduk	6,20	37,68	34,35	18,84	38,84
2.	Jumlah Demo	Kali/Tahun	3	4	3	1	1
3.	Lama Proses Perizinan,	Hari	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah						
4.	Jumlah Pajak Daerah	(Milyar Rp)	3,691	9,409	4,122	4,415	4,962
4.	<ul> <li>Jenis Pajak Daerah</li> </ul>	Jenis	13	13	9	9	9
	<ul> <li>Jumlah Retribusi Daerah</li> </ul>	(Milyar Rp)	5,267	9,196	11,369	1,536	1,164
	<ul> <li>Jenis Retribusi Daerah</li> </ul>	Jenis	38	38	15	21	14
5.	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi	Dokumen	0	0	0	0	0
6.	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	%	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56

Sumber: Kantor Kesbang Pol, BPKD, Dinas Penanaman modal dan PTSP dan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Solok Selatan

Untuk Perkembangan indikator fokus iklim investasi terkait dengan daya saing daerah rasio angka kriminalitas cendrung meningkat dari 6,20 per 10.000 penduduk tahun 2012 menjadi 38,84% tahun 2016. Tindakan kriminalitas yang menonjol adalah pencurian dan penganiayaan dengan kekerasan. Pencurian yang menonjol yaitu pencurian kendaraan bermotor dan pencurian ternak. Selama jangka waktu 2012 sampai 2016, didapatkan data tentang demontrasi yang berkaitan dengan kegiatan investasi dan pilkada.

Selanjutnya perkembangan jumlah pajak dan retribusi daerah mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan 2016, namun jika dianalisis lebih jauh peningkatannya tidak banyak dari kontribusi pengelolaan potensi daerah melalui penanaman investasi. Akan tetapi peningkatan yang terjadi pada retribusi daerah akibat peningkatan dari dana kapitasi jaminan kesehatan daerah. Untuk jumlah jenis pajak dan retibusi daerah yang dipungut tidak mengalami peningkatan (tetap), 13 jenis pajak daerah dan 38 jenis retribusi daerah.

### 2.1.4.4. Fokus Sumber daya Manusia

Untuk melihat fokus sumber daya manusia dalam mengukur aspek daya saing daerah diukur dari dua indikator yaitu rasio lulusan S1/S2/S3 dan rasio ketergantungan. Rasio lulusan S1/S2/S3 dihitung dengan cara membagi jumlah lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk kemudian dikali dengan 10.000 pada tahun tertentu. Sedangkan rasio ketergantungan dihitung

dengan cara membagi jumlah penduduk usia <15 tahun + usia >64 tahun dengan jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun di kali 100.

Perkembangan fokus sumber daya manusia di Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 sebagaimana terdapat pada tabel 2.62 berikut ini:

Tabel. 2.62.
Perkembangan Indikator Fokus Sumberdaya Manusia di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Tahun							
140.	ilidikatoi	2012	2013	2014	2015	2016			
1.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	0,21	0,20	0,26	0,27	0,41			
2.	Rasio Ketergantungan	59,3	58,9	59,12	58,80	58,50			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan

# 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Daerah Tahun 2012-2016 dan Target Kinerja Tahun 2017

Tabel. 2.63.

Hasil Analisis Gambaran Kondisi Umum Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/		<b>,</b>		apaian Kiner				
No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Target 2016	Target 2017
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1	Indek Pembangunan Manusia	Indeks	65,12	65,86	66,29	67,09	67,74	67,20	67,67
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,04	6,13	5,90	5,35	5,05	5,40	5,60
1.3	PDRB Harga Berlaku	Rp. Juta	3.090.219,6	3.434.160,7	3.889.024.0	4.224.476,58	4.593.324,5	4.646.924,24	5.111.616,66
1.4	PDRB per kapita (Harga Berlaku) per tahun	Jt	20,48	23,31	24,79	26,43	28,23	27,93	29,85
1.5	Pengeluaran Perkapita	Rp/Bulan	762.250	774.250	782.500	804.417	816.833	921.022	926.818
1,6	Indek Gini Ratio	Indek	0,308	0,317	0,292	0.384	nd	0,369	0,354
1.7	Investasi (ADHK)	Rp. Milyar	968,56	923,45	1047,27	1100,99	nd	1.178,06	1.260.52
1.8	Tingkat Pengangguran	%	7,33	3,6	4,93	6,30	nd	6,10	5,90
1.9	Tingkat Kemiskinan	%	9,38	8,12	7,36	7,52	7,35	7,32	7,12
1.10	Jumlah Daerah Tertinggal	Nagari	24	24	24	19	19	15	10
В	ASPEK PELAYANAN UMUM								
I	Pelayanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan								
1.1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,44	7,8	7,97	7,99	8,20	8,15	8,32
1.2	Angka harapan lama sekolah	Tahun	11,92	12,03	12,15	12,37	12,51	12,29	12,43
1.3	Angka Putus Sekolah a.SD/MI b.SMP/MTs c.SMA/SMK/MA	% % %	0,11 0,11 1,27	0,34 1,27 3,31	0,22 0,14 0,52	0,39 0,18 3,17	0,22 0,14 0,10	0,32 0,15 0,72	0,25 0,12 0.57
1.4	Angka Melek Huruf	%	97,65	97,72	97,,80	98,87	99,01	97,92	98,14
1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) a.SD/MI/SDLB/Paket A b.SMP/MTs/SMPLB/Paket B c.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	% % %	108,23 86,95 67,23	108,22 90,48 70,61	114,13 94,43 74,91	112,54 108,94 94,20	107,9 104.91 94,16	112,64 109,07 94,40	112,74 109,20 94,60

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/			С	apaian Kiner	ja			
No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Target 2016	Target 2017
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) a.SD/MI/SDLB/Paket A b.SMP/MTs/SMPLB/Paket B c.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	% % %	95,64 73,45 55,58	97,75 71,85 62,24	98,23 79,78 65,40	97,43 80,62 70,42	97,43 80,62 70,42	97,85 80,85 72,42	98,27 81,28 72,62
1.7	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah (per 1000) a.SD/MI b.SMP/MTs	Per 1000 Per 1000	6,9 5,7	7,6 4,4	7,4 5,3	7,2 6,2	7,2 6,2	7,2 6,2	7,2 6,2
2.	Kesehatan								
2.1	Meningkatnya Umur Harapan Hidup; (UHH)	Tahun	65,99	66,02	66,04	66,64	66,78	67,14	67,69
2.2	Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan	Orang per 100.000 KH	290	252,7	188,2	161,4	153,2	161,2	161
2.3	Menurunnya Angka Kematian Bayi;	Bayi per 1.000 KH	3,7	11,9	8,7	5,2	6,43	5,2	5,1
2.4	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita	%	0,17	0,08	0,05	0,04	0,05	0,04	0,03
2.5	Peningkatan Akreditasi Rumah Sakit (Versi JCI)	Nilai	60	60	60	60	60	64,17	72,50
2.6	Peningkatan Type Rumah Sakit	Туре	С	С	С	С	С	С	С
2.7	Rasio Puskesmas	Per 30.000 Penduduk	1,8	1,55	1,53	1,69	1,65	1,69	1,69
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	14,86	18,75	18,82	20,51	21,28	28,81	37,11
3.2	Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	%	15	18	25	46,73	45	50,93	55,61
3.3	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	39,39	40,54	42,11	54,73	54,73	45	50
3.4	Persentase Pembangunan sesuai dokumen perencanaan tata ruang	%	na	38,42	45,65	46,36	46,71	46,71	60
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman								
4.1	Akses Air Minum Layak	%	39,39	40,54	42,11	52,72	54,73	60,20	66,10
4.2	Akses Sanitasi Layak Persentase Rumah Tangga	%	19,23	21,46	21,67	27,45	30,56	36,15	44,85
4.3	Pengguna Listrik	RT	92,58	93,12	93,37	93,57	97,47	94,31	95,05
4.4	Jumlah Kawasan Kumuh	Kawasan	2	2	2	2	2	2	1
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Cakupan Siaga Tribun dan Tramas	Kali/Hari	1	1	1	0,14	0,14	0,17	1
5.2	Persentase Ketersediaan Satlinmas	%	0	0	0	0	0	0	100
5.3	Cakupan Layanan WMK	%	28,57	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86
5.4	Respon time	menit	na	40	40	40	40	30	30
5.5	Persentase Nagari Tangguh Bencana	%	0	0	15,38	17,94	28,20	28,20	46,15
5.6	Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana	%	100	100	100	70	100	71	72
6	Urusan Sosial								
6.1	Persentase Cakupan Pelayanan PMKS	%	10	15	20	25	66	26	30
6.2	Ketersediaan Tenaga Pedamping Sosial (Minimal 66 Orang)	%	75	78	82	84,85	87	84,85	100

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Capaian Kinerja				ja		į.		
No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Target 2016	Target 2017
6.3	Persentase Penduduk Bekerja yang membayar zakat melalui Baznas	%	na	na	na	6,03	6,05	6,03	7,00
7	Urusan Ketenagakerjaan								
7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,60	61,17	65,30	67,18	na	67,68	68,18
7.2	Persentase Kasus Tenaga Kerja yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat								
8.1	Indek Pembangunan Gender	%	65,93	68,73	70,30	71,53	na	71,78	72,03
8.2	Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Anak dan Perempuan	%	33	65	87	100	100	80	80
8.3	Persentase Keluarga Sejahtera	%	88,19	89,03	90,19	90,19	90,02	91,19	92,19
9	Urusan Pangan								
9.1	Penguatan Cadangan Pangan	ton	na	na	na	182	183	182	184
9.2	Skor Pola Pangan Harapan	%	na	na	na	51,6	51,8	57,16	62,72
10	Lingkungan Hidup								
10.1	Cakupan Layanan Persampahan	%	na	na	na	18,00	18,00	25,00	30
10.2	Persentase nagari yang memiliki Ruang Terbuka Hijau	%	na	na	na	17,95	17,95	30,77	43,59
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	na	na	na	50	na	55	60
10.4	Penghargaan Adipura	Buah	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Dugaan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Administrasi Penduduk dan pencatatan Sipil								
11.1	Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	%	48,05	56,31	46,29	89,21	92.06	100	100
11.2	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	74,51	71,19	63.17	73,07	75.48	100	100
11.3	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran	%	33,33	31,94	37,08	44,01	47.00	100	100
12	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
12.1	Persentase Pasangan Usia Subur yang mengikuti Program KB	%	45,64	40,39	48,90	51,3	56,86	52,5	53,9
12.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2.04	2,02	1,92	1,85	1,83	2,00	2,00
12.3	Persentase PUS sebagai Akseptor KB melalui Program Mandiri	%	na	na	na	20	25	25	35
13	Urusan Perhubungan								
13.1	Rasio Ketersediaan Angkutan Umum (Angkutan penumpang)	Per 10.000 penduduk	0,741	0,715	0,701	0,688	0,676	0,90	1,12
13.2	Ketersediaan Prasarana Fasilitas Perhubungan								
	- Terminal Angkutan Orang (4 Unit)	%	25	25	25	50	50	50	50
	Terminal Angkutan Barang (1 unit)	%	0	0	0	0	0	0	0
	- Dermaga (3 unit)	%	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
13.3	Persentase Angkutan Umum Laik Operasi	%	na	na	na	27,27	27,27	20	40

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/			С	apaian Kiner	ja			
No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Target 2016	Target 2017
14	Urusan Komunikasi dan Informasi								
14.1	OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Layanan Publik	OPD	2	3	4	5	5	2	4
14.2	Cakupan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	%	-	-	100	100	100	100	100
15	Urusan Kopersi dan Usaha Kecil Menengah								
15.1	Persentase Koperasi Aktif	%	52,1	48	50,8	48,15	40,6	52	56
15.2	Pertumbuhan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	%	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
15.3	Jumlah UMKM yang difasilitasi Permodalan	Unit	-		-	40	0	50	50
16	Urusan Penanaman Modal								
16.1	Jumlah Nilai Investasi (PMA)	US\$	n.a	n.a	n.a	15.384	56.072	15.384	38.461
16.2	Jumlah Nilai Investasi (PMDN)	Rp. Juta	n.a	n.a	n.a	82.000	10.606	82.000	120.000
16.3	Perizinan Tepat Waktu	(%)	n.a	n.a	n.a	90	90	90	95
17	Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
17.1	Jumlah Pemuda Berprestasi Tk Provinsi	Orang	n.a	n.a	n.a	n.a	0	2	2
17.2	Jumlah Wirausahawan Baru yang dipelopori Oleh Pemuda	Orang	n.a	n.a	n.a	10	10	10	10
17.3	Nagari yang memiliki gelanggang/ sarana olahraga (minimal 1 per nagari)	%	n.a	n.a	n.a	80	86	82	86
17.4	Persentase Organisasi Kepemudaan aktif	%	n.a	n.a	n.a	n.a	25	5	10
17.5	Peringkat PORPROV	Peringkat	13	-	18	-	11	14	-
17.6	Atlet yang berprestasi tingkat provinsi	orang	n.a	n.a	n.a	n.a	115	30	5
18	Urusan Statistik								
18.1	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100
19	Urusan Persandian								
	Persentase OPD yang menerapkan SOP Persandian	%	0	0	0	0	0	0	50
20	Urusan Kebudayaan								
20.1	Jumlah Cagar Budaya yang Direvitalisasi	СВ	0	0	0	0	0	0	5
20.2	Persentase Nagari yang memiliki Medan nan Bapaneh	%	0	0	0	0	0	0	5
20.3	Jumlah Sanggar Budaya Berprestasi	Sanggar	na	na	na	5	10	5	5
21	Urusan Perpustakaan								
	Jumlah Koleksi Buku								
	- Jumlah Judul Buku	Judul	2411	2532	2538	2.922	4082	2.922	3.422
	- Jumlah Buku	Buah	7232	7614	7614	8.764	11.474	8.764	10.264
20.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	556	521	657	598	2.694	600	600
21	Urusan Kearsipan								
21.1	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	%	-	-	-	3	5,1	13	17
21.2	Implementasi Data Base Informasi Kearsipan	(e-Arsip)	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Capaian Kinerja								
No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Target 2016	Target 2017
II	Urusan Pilihan								
1	Urusan Kelautan dan Perikanan								
1.1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	344,98	448	668,29	677,8	874,19	900	1.130
1.2	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kapita	na	na	na	20,30	20,30	20,30	20,80
2	Urusan Pariwisata								
2.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Orang	1.674	1.862	1.890	2.750	31.193	2.750	3.000
2.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	na	na	na	na	na	na	500
2.3	Jumlah Objek Wisata Unggulan	Objek	2	2	2	2	2	2	3
2.4	Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pokdarwis	Objek	-	-	-	1	3	5	11
3	Urusan Pertanian								
3.1	Jumlah Produksi Pertanian dan Perkebunan dan Peternakan Unggulan								
	- Padi	Ton	135.648	121.939	124.501	131.437	113.437	135.380	139.442
	- Jagung	Ton	31.486	19.551	8.739	54.074	54.074	55.696	57.367
	- Kopi	Ton	1.268	1.346	1.742	1.625	1,848	1.673	1.726
	- Kelapa sawit	Ton	4.580	4.752	1.307	2.577	2.633	2.654	2.734
	- Karet  - Ternak Besar (Sapi dan Kerbau)	Ton Ekor	11.235 15.127	15.215 14.923	11.827 15.146	12.027 15.879	12.019	12.388 16.494	12.760 17.336
	- Ternak Kecil (Kambing)	Ekor	8.467	8.429	8.442	8.635	8.729	8.628	8.720
	- Unggas	Ekor	153.291	209.905	219.617	186.035	207.415		120.014
3.2	Ketersediaan Penyuluh Pertanian	%	37,83	37,83	37,83	37,83	59,29	44,14	50,45
3.3	Berkembangnya KSP Pertanian Tanaman pangan dan hortikultura	Kawasan	4	4	3	3	4	3	6
3.4	Berkembangnya KSP Perkebunan	Kawasan	3	3	3	3	3	4	4
3.5	Berkembangnya KSP Peternakan	Kawasan	2	3	3	1	1	1	2
3.6	Berkembangnya Sentra Agrobisnis.	Kawasan	0	0	0	2	2	2	3
4	Urusan Energi Sumber Daya Mineral								
4.1	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	%	62,31	64,02	67,68	68,57	68,57	72,00	76,00
4.2	Persentase kelompok pemanfaat energi terbarukan aktif	%	na	na	na	62	62	62	67
5	Perdagangan								
5.1	Pengaduan Konsumen yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Pasar Kabupaten yang representatif	unit	0	0	0	0	0	0	2
6	Perindutrian								
6.1	Jumlah IKM yang Mengekspor Produk ke luar Daerah	IKM	4	6	7	7	9	2	4
6.2	Jumlah IKM yang menerapkan Good Higiene	IKM	5	7	9	15	23	N/A	1
6.3	IKM yang memiliki HAKI	IKM	1	2	2	8	8	10	15
6.4	IKM memiliki Sertifikat Halal	IKM	3	6	8	13	19	19	24
III	Fungsi Penunjang								
1	Perencanaan								
1.1	Sinkronisasi Perencanaan dengan Penganggaran	%	na	na	na	na	100	100	100

	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/		Capaian Kinerja						
No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Target 2016	Target 2017
1.2	Dokumen Perencanaan Rutin Tepat waktu	%	25	25	25	25	50	50	100
1.3	Persentase Pencapaian Kinerja	%	na	na	na	na	na	na	90
1.4	Jumlah Kerjasama Pembangunan antar Lembaga dan Swasta yang disepakati	MoU	0	0	0	2	16	2	2
2	Penelitian dan Pengembangan								
2.1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	%	0	0	0	100	100	100	100
3	Keuangan								
3.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	Discealmer	Discealmer	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP
3.2	Persentase Pencapaian Target PAD	%	96,92	78,14	77,02	110,34	114,95	100	100
3.3	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	%	4,53	4,19	5.43%	5.86%	5,43	6,36	6,87
4	Kepegawaian								
4.1	Persentase Eselonering yang mengikuti Diklat Struktural								
	- Eselon II	%	40	40	36	52	65	56	53
	- Eselon III	%	34	38	45	44	44	45	50
	- Eselon IV	%	23	27	22	15	15	25	35
4.2	Persentase Aparatur yang berijazah Sarjana dan Pasca Sarjana:								
	- S1	%	47,29	48,24	49,80	51	58,23	51	56
	- S2	%	3,71	4,12	4,37	3,00	4,51	3,00	4,32
	- S3	%	0,40	0,40	0,06	0,10	0,11	0,10	0,12
4.3	Persentase penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan Analisa Jabatan	%	na	na	na	na	na	na	45
5	Pelayanan Pemerintahan lainnya								
5.1	Nilai LAKIP/SAKIP	Nilai	С	С	С	С	n.a	С	CC
5.2	Nilai LKPJ	Nilai	sedang	sedang	Tinggi	sedang	n.a	Tinggi	Tinggi
5.3	Persentase pencapaian SPM per-urusan	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	70	75
5.4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indek	n.a	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5.5	Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda	%	88	30	46	23	42	100	100
5.6	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	Perda	0	0	0	0	0	2	2
5.7	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	%	0	0	0	0	0	0	20
5.9	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	Level	-	-	-	II dengan catatan	II dengan catatan	II dengan catatan	II
5.10	Peringkat MTQ Nasional Tingkat Provinsi	Peringkat	-	14	1	17	-	-	16
5.11	Tuan Rumah MTQ Nasional Tingkat Provinsi	Belum/ Sudah	-	Belum	-	Belum	-	-	Belum
С	ASPEK DAYA SAING								
1	Nilai Tukar Petani	Rasio	na	na	na	106,60	na	98	99
2	Produktifitas Total daerah	Rp. Juta	49,99	55,89	58,88	61,73	65,80	66,58	71,80
<u> </u>			10,00	30,00	30,00	31,73	00,00	30,00	7 1,00

# 2.3. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Aspek/Urusan		Permasalahan				
I	Aspek Kesejahteraan	1.	Kabupaten Solok Selatan masih termasuk ke dalam salah satu daaerah tertinggal dan akan dientaskan pada tahun 2019.				
	Masyarakat	2.	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Solok Selatan yang ditandai oleh capaian IPM masih dibawah rata-rata Provinsi (IPM Solok Selatan 67,74, Provinsi Sumatera Barat 70,18).				
		3.	Belum maksimalnya pengelolaan sumber-sumber ekonomi daerah yang ditandai oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi (dari 6,04% tahun 2012 menjadi 5,05% pada tahun 2016)				
		4.	Tingginya angka kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi, sulitnya mendapat pekerjaan, serta rendahnya kualitas dan terbatasnya keahlian tenaga kerja (Tingkat kemiskinan Solok Selatan 7,35%, P1 1,23 dan P2 0,31).				
		5.	Semakin meningkatnya ketimpangan pendapatan penduduk (indek gini 0,384 tahun 2015 )				
		6.	Sektor perekonomian masih tergantung pada sektor primer seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan (kontribusi pertanian 33,70% dan kontribusi pertambangan dan penggalian 99,88%)				
		7.	Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyar terutama untuk pencapaian target Nasional melalui RPJMN, SE seperti akses air minum dan sanitasi masyarakat, perumahan layak				
II	Aspek Pelayana	n Ur	mum				
Α	Fokus Pelayanaı	n Ur	usan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan	1.	Belum tuntasnya kebijakan pendidikan dasar 9 tahun yang dilihat dari rata-rata lama sekolah (7.99 Tahun pada tahun 2016).				
		2.	Masih rendahnya pemenuhan hak terhadap pelayanan dasar pendidikan yang bekualiatas yang ditandai dari masih rendahnya angka partisipasi sekolah				
		3.	Belum meratanya pendistribusian guru serta rendahnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge pada seluruh tingkatan pendidikan (dilihat dari persentase guru yang bersertifikasi pendidik dan nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik).				
		4.	Rendahnya ketersediaan, mutu dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (dilihat dari ketersediaan mobiler, alat peraga pendidikan, labor, pustaka, dan pagar; untuk mutu dan kualitas adalan ruang kelas, sanitasi sekolah dll) yang disebabkan rendahnya tata kelola pendidikan dalam menciptakan iklim dan motivasi.				
		5.	Belum adanya sistem rayonisasi sekolah sebagai akibat tidak meratanya kualitas sekolah yang akhirnya menyebabkan pendistribusian murid tidak merata.				
		6.	Masih terdapatnya lulusan sekolah di berbagai tingkatan pendidikan yang tidak melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi (ditunjukan oleh angka melanjutkan)				
		7.	Rendahnya daya saing lulusan SMA/SMK/MA yang dilihat dari lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri dan dunia usaha				
		8.	Terbatasnya kemampuan sekolah umum dalam menerapkan pendidikan inklusi pada berbagai tingkatan pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas dan PMKS				
		9.	Relatif tingginya biaya pendidikan yang dikeluarkan masyarakat				

No	Aspek/Urusan	Permasalahan					
		sebagai akibat rendahnya aksebilitas masyarakat kesarana pendidikan (akibat keterbatasan sarana perhubungan).  10. Rendahnya prestasi siswa baik di bidang intrakurikuler maupun					
		ekstrakurikuler.					
		<ol> <li>Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan di sekolah- sekolah madrasah swasta (MI, MTs, MA).</li> </ol>					
2	Kesehatan	Masih rendahnya angka harapan hidup penduduk (tahun 2016 yaitu 66,78 tahun)					
		Masih rendahnya rasio ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan (dokter dan tenaga keperawatan) terutama bagi fasilitas kesehatan tingkat I.					
		3. Rendahnya mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (fasilitas kesehatan tingkat I belum terakreditasi).					
		4. Belum Optimalnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai rujukan awal terutama perihal ketersediaan dokter spsesialis tetap serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan (RSUD masih tipe C).					
		5. Besarnya ketergantungan masyarakat terhadap jaminan kesehatan masyarakat yang berasal dari pemerintah yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat arti penting atau perlunya jaminan kesehatan (54,31% dari jumlah penduduk)					
		6. Masih tingginya Angka Kematian Ibu melahirkan dan Angka Kematian Bayi sebagai akibat masih tingginya kelahiran yang ditolong oleh tenaga nonmedis dan rendahnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya (pada tahun 2016 AKB sebesar 6,43 per 1000 dan AKI sebesar 153,2 per 100.000 kelahiran hidup)					
		7. Masih terdapatnya kasus Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), gizi buruk sebagai akibat rendahnya pemahaman keluarga terutama ibu tentang gizi anak (tahun 2015 sebesar 0,05% dari balita)					
3	Pekerjaan Umum dan	Masih banyaknya jalan dan jembatan dengan kondisi rusak dan kurang baik (jalan kabupaten/Prov/Negara/non status)					
	Penataan Ruang	2. Masih terdapat kawasan persawahan yang belum dilayani irigasi teknis dan hanya mengandalkan irigasi non teknis					
		3. Belum banyaknya saluran drainase (primer, sekunder, tersier) yang dibangun, sehingga terjadinya genangan air yang cukup tinggi					
		Belum adanya rencana pengembangan infrastruktur berbasis kawasan yang didasarkan pada pola ruang (termasuk kawasan ibukota kabupaten).					
		5. Belum optimalnya pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan pengaturan ruang.					
		6. Masih sering terjadi konflik pemanfaatan ruang (tumpang tindih izin antar perusahaan, antara perusahaan dan masyarakat, deforestasi).					
		7. Lemahnya sinkronisasi penataan ruang terhadap pelaksanaan pembangunan.					
		Masih ada beberapa daerah atau nagari yang terisolir karena tidak adanya dan rendahnya kualitas dari akses jalan dan jembatan					
		Belum tuntasnya masalah penegasan batas antara kabupaten, kecamatan dan nagari.					
4	Perumahan	Banyaknya terdapatnya rumah tidak layak huni (sebanyak 1.618 unit					
	Rakyat dan Pemukiman	pada tahun 2016).  2. Masih rendahnya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat					

No	Aspek/Urusan	Permasalahan					
		perumahaan (seperti tempat sampah, drainase lingkungan, septik tank komunal, IPAL komunal, jalan lingkungan perumahan	١.				
		Rendahnya akses air minum layak dan sanitasi layak (pada 2016 akses sanitasi layak 30,56% askses air minum layak 54,73					
		Rendahnya minat masyarakat untuk memiliki rumah sehat dan yang dibangun pengembang.	bersih				
		Kurangnya pengawasan dalam penertiban pembangunan perul (seperti lokasi rawan bencana, kelaikan fungsi bangunan gedung					
		Kurangnya penanganan kawasan kumuh.					
		Masih rendahnya ketersediaan RTH terutama dikawasan perkota	aan.				
5	Ketentraman,	Meningkatnya angka kriminalitas.					
	Ketertiban Umum dan Perlindungan	Belum efektifnya penegakan hukum dan peraturan daerah disebabkan rendahnya ketersediaan aparatur, sarana dan prasar					
	Masyarakat	Rendahnya koordinasi antar OPD dan instansi yang tekait d Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	dengan				
		Belum terkelolanya demokrasi yang sehat dan partisipasi masyarakat.	politik				
		Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM yang tekait o mitigasi bencana.	dengan				
		Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur temitigasi bencana dan penanganan bencana (pembentukan optimalisasi fungsi Destana dan KSB).					
		Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan bencana (banjir, longsor, gempa).	a alam				
6	Sosial	Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (F selain itu terdapatnya PMKS akibat penderita HIV/AIDS, anak korban narkoba dan anak yang menjadi korban kekerasar perlakuan salah).	nakal				
		Meningkatnya jumlah PMKS yang diakibatkan karena penin tingkat kemiskinan dan Bencana Alam.	gkatan				
		Belum Optimalnya penanganan masalah kesejahteraan masyarakat	sosial				
		Rendahnya jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesejah sosial.	nteraan				
В	Fokus Pelayanaı	usan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
1	Tenaga Kerja	Masih tingginya tingkat pengangguran yaitu 6,30% pada tahur yang disebabkan perluasan kesempatan kerja tidak sebanding certumbuhan angkatan kerja.					
		Belum optimalnya fungsi Bipartit ketenagakerjaan.					
		Kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap tenaga					
		penanganan permasalahan tenaga kerja hanya berdasarkan la dari tenaga kerja.	•				
		Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai keb pasar.	utuhan				
	Dambarda	Belum memadainya sistem informasi ketenagakerjaan.					
2	Pemberdayaan Perempuan dan	Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).					
	Perlindungan	Masih terdapatnya kasus kriminalisasi dan eksploitasi anak					
	Anak	Masih rendahnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.					
		Belum optimalnya peran lembaga pengarustaaan gender dar	n anak				

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. 5. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan.
		6. Kurangnya kebijakan daerah yang mengatur kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, sehingga implementasi kebijakan masih dilakukan secara parsial.
3	Pangan	<ol> <li>Kurang meratanya konsumsi bahan pangan utama terutama bahan- bahan pangan yang ketersediaannya tergantung pada lokasi geografis.</li> </ol>
		2. Belum beragamnya pola konsumsi pangan dan gizi masyarakat dapat dilihat dari pencapaian skor pola pangan harapan 51,8%.
		3. Belum terjaminya tingkat keamanan pangan masyarakat (berkaitan dengan zat kimia, pengawet dan kadaluarsa).
		4. Kurangnya regulasi daerah tentang ketahanan pangan dan lahan pertanian berkelanjutan.
4	Pertanahan	1. Rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik (persentase tentang luas tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik).
		2. Sulitnya sertifikasi tanah ex Erpacht untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.
		3. Penyelesaian konflik HGU dan tanah terlantar untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat (perubahan sertifikat HGU dan penerbitan sertifikat baru).
		4. Sulitnya proses pembebasan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum.
5	Lingkungan Hidup	<ol> <li>Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah rumah tangga.</li> </ol>
		2. Banyaknya kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan akibat Penambangan Tanpa Izin (PETI).
		3. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung, daerah tangkapan air, dan sumber air serta penanganan wilayah bencana.
		4. Kurangnya ketersediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup yang dapat diakses masyarakat.
		<ol> <li>Rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ol>
		<ol> <li>Belum lengkapnya regulasi tentang perlindungan dan pengelolaar lingkungan hidup.</li> </ol>
		7. Banyaknya ex lokasi investasi pertambangan, kehutanan yang belum dipulihkan/reklamasi.
		8. Belum optimalnya fasilitasi dan sinergi pemerintah daerah dengan komunitas penggiat lingkungan.
6	Administrasi Kependudukan	1. Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan terutama bagi daerah terpencil, perbatasan Kabupaten.
	dan Pencatatan Sipil	2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya pengurusan administrasi kependudukan.
		3. Rendahnya Aksesbilitas Masyarakat dalam Kepengurusan Dokumen Kependudukan.
		4. Belum terkoneksinya jaringan antaran pelayanan administrasi kependudukan dengan pelayanan PATEN di kecamatan.
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan daerah.

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		<ol> <li>Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan seiring menurunnya budaya gotong royong di masyarakat.</li> </ol>
		<ol> <li>Belum optimalnya partisipasi masyarakat diperantauan dalam mendorong kemajuan daerah dan nagari.</li> </ol>
		4. Masih rendahnya kapasitas dan sumberdaya lembaga pemberdayaan masyarakat dan perangkat nagari dalam pembangunan Desa/Nagari.
		<ol><li>Belum optimalnya pelayanan pemerintahan Nagari kepada masyarakat.</li></ol>
		<ol> <li>Peningkatan transfer dana desa belum berdampak banyak terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan daerah tertinggal</li> </ol>
		<ol> <li>Kurangnya kompetensi perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari.</li> </ol>
8	Pengendalian Penduduk dan	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber KB hal ini dapat dilihat dari rasio akseptoar KB dan Cakupan peserta KB Aktif
	Keluarga	2. Tingginya angka kelahiran terutama pada rumah tangga miskin.
	Berencana	3. Meningkatnya Rumah Tangga Pra Sejahtera
		4. Masih terbatasnya Kapasitas tenaga dan kelembagaan program KB.
		5. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB.
		6. Belum optimalnya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
		7. Rendahnya kepesertaan pasangan usia subur dalam ikut serta dalam program KB terutama partisipasi laki-laki.
9	Perhubungan	1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
		2. Berkurangnya kualitas prasarana perhubungan (rambu-rambu, marka jalan, pagar pengaman.
		3. Belum tersedianya sarana dan prasarana angkutan umum yang representative.
		<ol> <li>Moda transportasi AKDP illegal (travel liar) lebih diminati oleh masyarakat daripada moda transportasi AKDP legal (bus).</li> </ol>
10	Komunikasi dan	Masih terdapatnya Blank Spot Area di kawasan pemukiman.
	Informatika	2. Belum terintegrasi sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah antara SKPD Kabupaten, Kecamatan dan Nagari (e-Government).
		3. Masih minimnya infrastruktur telekomunikasi seperti jaringan telepon, fax, free wi-fi area pada kawasan tertentu.
		4. Kurangnya jumlah kelembagaan warung informasi dan telekomunikasi.
		5. Minimnya pemanfaatan website solselkab.go.id dalam penyebarluasan infomasi kebijakan pemerintah daerah dan promosi potensi daerah
		6. Kurangnya edukasi penggunaan IT kepada masyarakat.
		7. Belum adanya wadah pengaduan masyarakat dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan berbasis IT.
11	Koperasi, Usaha Kecil	Menurunnya jumlah koperasi yang aktif ( dari 61,9% tahun 2015 menjadi 40,6% tahun 2016)
	dan Menengah	2. Lemahnya kelembagaan koperasi, terutama menyangkut aspek legalitas usaha, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
		3. Rendahnya semangat kewirausahaan yang ditandai dengan relatif

No	Aspek/Urusan	Permasalahan					
		kecilnya jumlah UMKM.					
		4. Belum optimalnya kemitraan antara UMKM, koperasi dengan lembaga lainnya.					
		5. Masih rendahnya SDM dalam inovasi, diversifikasi dan pengembangan produk sesuai permintaan pasar (jaminan mutu, standarisasi).					
		<ol> <li>Masih kurangnya ketersediaan penunjang usaha, terutama pemasaran dan informasi pasar, ketersediaan bahan baku dan sarana teknologi produksi.</li> </ol>					
		7. Belum tersedianya Master Plan kawasan industry (One Village One Product/OVOP).					
12	Penanaman Modal	Rendahnya aksessibilitas, infrastruktur jalan yang terbatas untuk menghubungkan kantong-kantong potensi ekonomi dengan jalur utama.					
		<ol><li>Terbatasnya ketersediaan sarana pendukung penanaman modal seperti hotel, restoran, lembaga keuangan.</li></ol>					
		3. Belum <i>update-</i> nya SOP perizinan beberapa kewenangan sekaitan UU 23 Tahun 2014.					
		4. Masih lemahnya/ belum tepatnya pendekatan penggunaan berkaitan dengan status lahan (tanah ulayat).					
		5. Rendahnya kesadaran penanam modal memberikan laporan kegiatan penanaman modal, 8 dari 24 perusahaan, Tahun 2015.					
		6. Minimnya regulasi yang mengatur tentang Take over/ pemindahtanganan izin investasi.					
		Minimnya kepastian hukum dan jaminan keamanan dalam penanaman modal bagi investor.					
13	Kepemudaan dan Olahraga	Terbatasnya akses dan kesempatan bagi pemuda memperoleh pendidikan dan keterampilan.					
		Rendahnya pembinaan terhadap pengembangan kelompok usaha ekonomi pemuda produktif dari Pemerintah					
		3. Rendahnya jiwa kewirausahawan ( <i>enterpreneurship</i> ) generasi muda.					
		Meningkatnya angka pengangguran terutama pada usia produktif dan terdidik					
		<ol><li>Rendahnya partisipasi pemuda dan lembaga kepemudaan dalam proses pembangunan.</li></ol>					
		<ol><li>Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga.</li></ol>					
		7. Belum optimalnya peran pemerintah dan organiasi olahraga dalam pembinaan serta pembibitan atlet yang berpotensi.					
		Masih relatif rendahnya prestasi di bidang olahraga yang dilihat dari prestasi atlet daerah dalam POPROV dan PON.					
14	Statistik	<ol> <li>Lemahnya kemampuan aparatur di OPD, sehingga ketersediaan dan keakuratan data primer dan sektoral sangat rendah.</li> <li>Tidak tersedianya publikasi data untuk evaluasi, pengendalian dan</li> </ol>					
		perencanaan pembangunan pada waktu yang ditentukan (data tidak tersedia tepat waktu).					
15	Persandian	Belum adanya perangkat daerah yang mengelola urusan persandian.					
16	Kebudayaan	<ol> <li>Semakin melemahnya nilai solidaritas dan kekeluargaan, jiwa gotong royong serta nilai –nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari sebagai akibat mudahnya akses informasi teknologi yang tidak sesuai dengan adat budaya dan agama.</li> </ol>					
		2. Belum optimalnya pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan nilai					

No	Aspek/Urusan	Permasalahan					
		dan situs cagar budaya daerah.					
		<ol> <li>Rendahnya partisipasi generasi muda dalam pengembangan, dan pelestarian seni dan budaya.</li> </ol>					
17	Perpustakaan	Rendahnya minat baca masyarakat					
		<ol> <li>Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga perpustakaan dan buku bahan bacaan di perpustakaan baik pustaka daerah maupun nagari.</li> </ol>					
		3. Belum Optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen koleksi perpustakaan.					
		4. Kurangnya jumlah perpustakaan sekolah yang representatif.					
18	Kearsipan	Minimnya SKPD dan Nagari dalam pengelolaan arsip baku.					
		Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan.					
		<ol> <li>Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen dan ars daerah.</li> </ol>					
		4. Rendahnya penataan arsip dan dokumen OPD					
		. Terbatasnya sumber daya dalam pengelolaan kearsipan.					
С	Fokus Pelayanai	n Urusan Pilihan					
1	Kelautan dan Perikanan	<ol> <li>Belum optimalnya produksi hasil perikanan yang disebabkan belum maksimalnya pengelolaan perikanan budidaya.</li> </ol>					
		2. Rendahnya daya saing produk perikanan.					
		3. Terbatasnya sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan.					
2	Pariwisata	<ol> <li>Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan destinasi prawisata yang bersifat umum maupun berbasis keunikan dan kearifan loalk.</li> </ol>					
		2. Terbatasnya akses ke lokasi wisata					
		Belum optimalnya promosi pariwisata.					
		<ol> <li>Kurangnya sinergi pemerintah daerah, pelaku dan masyarakat dalam pengembangan objek pariwisata.</li> </ol>					
		5. Belum maksimalnya pengelolaan ikon wisata unggulan.					
		<ol><li>Belum adanya event wisata unggulan yang masuk kalender tingkat regional maupun nasional.</li></ol>					
3	Pertanian	Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian					
		Rendahnya nilai tambah produk pertanian					
		<ol> <li>Rendahnya kualitas SDM dan menurunnya minat anak muda dibidang pertanian dan perkebunan, karena penyelenggaran penyuluhan pertanian dan perkebunan belum optimal.</li> </ol>					
		4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian					
		<ol> <li>Lemahnya penguasaan inovasi teknologi pertanian dengan aspek- aspek sosial ekonominya, sehingga peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan masih rendah</li> </ol>					
		6. Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan daerah.					
		7. Belum adanya pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi.					
		Belum adanya kepastian serapan pasar produk pertanian dengan tingkat harga menguntungkan petani.					
		Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan					
		10. Rendahnya SDM dari kelompok tani dan pada umumnya kelembagaan petani yang belum berbentuk badan.					

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		11. Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang.
4	Perdagangan	<ol> <li>Terbatasnya sarana dan prasarana pasar tradisional/rakyat yang representatif.</li> </ol>
		2. Rendahnya aksesbilitas masyarakat ke pasar tradisional
		3. Belum optimalnya pengawasan dan perlindungan konsumen.
		<ol> <li>Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan untuk mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat secara merata.</li> </ol>
		5. Lambatnya pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan.
5	Perindustrian	Masih belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam proses industri, baik kecil maupun menengah karena belum ada standarisasi mutu hasil industri, sehingga daya saing masih rendah dibandingkan daerah lain.
		Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri.
6	Transmigrasi	<ol> <li>Kurang optimalnya perkembangan wilayah eks Unit Pemukiman Transmigrasi</li> </ol>
С	-	n Fungsi Penunjang
	Perencanaan Pembangunan	<ol> <li>Belum optimalnya SDM Perencana baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas.</li> </ol>
		<ol><li>Rendahnya sinkronisasi perencanaan OPD terhadap perencanaan yang lebih tinggi</li></ol>
		<ol> <li>Belum optimalnya pemanfaatan dan ketersediaan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan.</li> </ol>
		4. Belum optimalnya kegiatan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang
		<ol> <li>Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan dengan sistem informasi penganggaran dan sistem informasi pengendalian, monitoring dan evaluasi.</li> </ol>
	Keuangan	Masih rendahnya peran dari pendapatan asli daerah dalam penunjang pembiayaan pembangunan daerah.
		<ol> <li>Rendahnya penyerapan anggaran pembangunan sehingga pencapaian kinerja perencanaan rendah.</li> </ol>
		<ol> <li>Rendahnya pengelolaan asset daerah baik dari pemeliharaan dan mutu dari aset daerah</li> </ol>
		<ol> <li>Minimnya ketersediaan aparatur pengelola keuangan daerah dan OPD sesuai dengan bidang keilmuannya.</li> </ol>
	Penelitian dan Pengembangan	Belum tersedianya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas.
		2. Minimnya kertersediaan aparatur, sarana dan prasarana kelitbangan yang masih rendah.
		3. Minimnya pelibatan OPD penanggungjawab urusan kelitbangan dalam penyusunan kajian-kajian yang ada pada OPD lain.
		<ol> <li>Masih rendahnya keberpihakan alokasi anggaran daerah dalam bidang penelitian dan pengembangan.</li> </ol>
	Kepegawaian	Rendahnya kapasitas dan kapabilitas kinerja pegawai dan organisasi sehingga berdampak kepada kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah masih rendah.
		Penyelenggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai kebutuhan yang nyata

No	Aspek/Urusan	Permasalahan
		Rendahnya tingkat produktivitas PNS masih rendah yang disebabkan minimnya pendidikan dan pengembangan aparatur (diklat) baik diklat struktural maupun fungsional
		Manajemen kepegawaian yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme
	Penunjang Pemerintahan	Rendahnya nilai laporan kinerja pemerintah daerah (LAKIP/SAKIP dan LPPD)
	Lainnya	<ol> <li>Level Kapabilitas APIP masih dibawah standar seharusnya rendah (II dengan catatan)</li> </ol>
		3. Rendahnya respon dan tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan (TLHP) .
		<ol> <li>Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan pemerintah masih rendah.</li> </ol>
		5. Belum adanya OPD yang menerapkan SPIP
		6. Rendahnya ketersediaan aturan daerah dan ketepatan waktu penerbitan aturan daerah dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan.
		7. Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan bidang keagamaan, pembinaan organisasi serta kesejahteraan masyarakat.
		8. Masih terdapatnya OPD yang belum menyusun SOP pelayanan, sehingga masih terdapat tumpang tindih tupoksi antar OPD.

# BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dapat memberikan gambaran perkembangan ekonomi makro Kabupaten Solok Selatan baik dipengaruhi oleh faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global yang merupakan dasar dari pembiayaan pembangunan yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah harus diselaraskan dengan arah dan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Arah dan kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk menginplementasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan isu strategis daerah serta menjadi dasar dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

### 3.1.1. Arah Kebijakan Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III tahun 2016 adalah sebesar 5,4%, sejalan dengan perekonomian makro secara global terutama negara-negara berkembang tengah mengalami pertumbuhan yang melambat (Global growth disappointed) sedangkan negara ekonomi kuat (high income economic) tengah mengalami pemulihan ekonomi (continued recovery) seperti USA, Japan dan Uni Eropa. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan global yang melambat yang diawali oleh tekanan rendahnya harga komoditi dunia (lower globalcommodity price) sehingga menyebabkan defisitnya current account. Pertumbuhan ini didukung oleh semakin menguatnya permintaan konsumsi rumah tangga dan meningkatnya peranan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi, terutama dari investasi pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

Perkiraan Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016 sebesar 5,3% sampai 5,8% didorong oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga, berpasangan dengan pengeluaran investasi pemerintah. Volume ekspor diperkirakan masih dalam tahap *recovery*, pada kuartal keempat tahun 2015 tumbuh negatif sebesar 6,4% dan akan mengalami *recovery* sebesar 2% pada kuartal yang sama tahun 2016 dan diperkirakan pada tahun 2017 terus membaik sebesar

3,6%, impor juga akan mengalami *recovery* dari tumbuh negatif sebesar 8,1% pada kuartal keempat tahun 2015 mengalami *recovery* secara perlahan menjadi 2,3% pada kuartal yang sama di tahun 2016 dan diperkirakan menjadi 2,8% pada tahun 2017. Resiko mengandalkan pertumbuhan pada sisi konsumsi ini tentunya sangat besar, sejalan dengan menurunnya tekanan pada pengeluaran rumah tangga dan pertumbuhan investasi dari relatif ketatnya pemberian kredit dan menekan margin profit akan terus berlanjut yang akan membatasi aktifitas ekonomi. Hal ini dapat diatasi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur yang akan memperbaiki kinerja ekspor menjadi lebih kompetitif.

Pada sisi lain, terus berlanjutnya aliran masuk modal asing dan peningkatan pasokan valuta asing korporasi domestik mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Pada bulan Maret 2016 secara (y to y) nilai tukar Rupiah menguat sebesar 3,96% ke level Rp.13.260 per dollar AS. Penguatan tersebut didorong oleh persepsi investor terhadap perekonomian Indonesia yang terus membaik. Hal ini sejalan dengan penurunan BI rate dan paket kebijakan pemerintah untuk memperbaiki ilkim investasi serta percepatan implementasi proyek-proyek infrastruktur. Berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter dibeberapa negara maju, sehingga ke depan Bank Indonesia akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya.

Perlambatan ekonomi global mendorong berlanjutnya kebijakan pelonggaran moneter dibeberapa negara maju. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan lebih rendah dari proyeksi semula, karena belum kuatnya pemulihan ekonomi di sejumlah negara tujuan ekspor. Pemulihan ekonomi Eropa yang masih lemah dan mengalami deflasi, seiring dengan meningkatnya pesimisme konsumen dan investor mendorong berlanjutnya kebijakan moneter, termasuk penerapan suku bunga negatif. Kebijakan pelonggaran moneter di negara maju tersebut berpotensi meningkatkan likuiditas global dan aliran modal masuk ke negara berkembang. Di pasar komoditias, harga minyak dunia cenderung menurun, akibat tingginya supply di tengah permintaan yang masih lemah. Namun harga komoditas ekspor Indonesia, khususnya CPO dan karet mulai membaik. Rendahnya harga minyak dunia merupakan dukungan untuk terjadinya keseimbangan perdagangan (trade balance). Keseimbangan neraca pembayaran (balance of payment) Indonesia sejak tahun 2014 sangat kuat didorong oleh aliran investasi fortofolio. Defisitnya (current account) disebabkan defisitnya net ekspor, menurunnya investasi asing karena pemulihan ekonomi negara-negara ekonomi kuat, terutama negara OECD. Tetapi minat investasi dari negara ekonomi kuat lainnya terutama pada Jepang dan China semakin tinggi.

Dilihat pertumbuhan GDP Indonesia tahun 2016 berkisar 5,3% s/d 5,8% dari sisi permintaan di dorong oleh konsumsi masyarakat akan tumbuh sebesar 4,9% s/d 5,2%,

konsumsi pemerintah akan tumbuh sebesar 6,0% sampai dengan 6,1%, sedangkan ekspor akan tumbuh sebesar 2,0% sampai dengan 3,6%, dan impor akan tumbuh sebesar 0,2% sampai dengan 2,8%. Pada sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,3%-5,8% tahun 2016 itu akan didorong terutama oleh sektor transportasi dan komunikasi sebesar 9,6%-10% dan perdagangan hotel dan restoran sebesar 7,4%-7,8%, serta sektor konstruksi akan tumbuh sebesar 6,2%-6.6%, disusul oleh sektor pertanian sebesar 2,7%-3,1%, sedangkan industri pengolahan akan tumbuh sebesar 5,7%-6,1%.

Berdasarkan kondisi serta memperhatikan triwulan I tahun 2017, perekonomian Indonesia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan berkisar 5,0-5,4% pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh pertumbuhan ekspor yang diikuti perbaikan dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), meningkatnya investasi dan peningkatan konsumsi Rumah Tangga. Ekspor diperkirakan tumbuh cukup baik sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi global dan kenaikan harga dibeberapa komoditas global. Sedangkan untuk peningkatan investasi didorong oleh peningkatan investasi pemerintah dan swasta nasional.

Strategi pembangunan perekonomian nasional pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo terdiri dari 3 strategi utama yaitu menghadirkan negara yang berkerja, kemandirian yang mensejahterakan, dan revolusi mental. Kemandirian yang mensejahterakan dilakukan dengan perekonomian yang mandiri dan peningkatan daya saing dan produktifitas. Perekonomian yang mandiri itu adalah menuju kepada perekonomian mandiri yang terimplementasi pada 1). Kedaulatan Pangan, 2). Kedaulatan Energi, 3). Kedaulatan Keuangan, 4). Penguatan Teknologi. Sedangkan peningkatan daya saing dan produktifitas dilakukan melalui: 1). Pembangunan infrastruktur, 2). Pengembangan Pasar Tradisional dan Sentra Perikanan, 3). Iklim investasi yang mudah dan menarik, 4). Pembangunan BUMN sebagai agen pembangunan.

Sehubungan dengan program Nawacita Kabinet Kerja di atas, maka diambil sejumlah kebijakan untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi makro Indonesia. Kebijakan pajak dan revenue dilakukan dengan memperbaiki administrasi penerimaan pajak, memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan penerimaan pajak khususnya dalam pajak pendapatan, pajak peningkatan nilai tambah dan pajak barang mewah. Meningkatkan penegakan hukum melalui intensifikasi dan memperbaiki pengujian pembayaran pajak dan sektor bisnis tertentu yang dominan, memperluas tambahan subyek pajak yang baru dan mengoptimalkan (cost recovery) untuk minyak dan gas dengan memperbaiki sistem administrasi penerimaan negara bukan pajak.

Kebijakan untuk pengeluaran pemerintah dilakukan melalui peningkatan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kepada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan melalui kondisional transfer langsung, meningkatkan efektifitas dari target subsidi, mendukung pada penguatan pertahanan keamanan nasional, penguatan dukungan pada tatakelola sumberdaya alam dengan memperbaiki keamanan pangan, air dan energi. Memperluas akses dan kualitas pendidikan, memperbaiki pelaksanaan sistem keamanan sosial masyarakat melalui ketenaga kerjaan dan kesehatan, meminimkan dampak ketidakpastian melalui pelayanan perlindungan resiko fiskal.

Kebijakan moneter ditempuh melalui dukungan regulasi kebijakan BI rate yang responsive pada penyesuaian pada kondisi ekonomi makro, melakukan *fleksibilitas exchange rate* untuk memfasilitasi penyesusian eksternal, meningkatkan tatakelola aliran modal pasar finansial dan mengkoordinir kebijakan dengan pemerintah dan forum stabilisasi keuangan. Terdapat 3 (tiga kebijakan) dalam penguatan sektor finansial ini yakni: penguatan peran sektor finansial dalam mendorong aktifitas perekonomian, memperkuat daya tahan sektor finansial untuk memelihara stabilitas sistem finansial, dan memperkuat sektor finansial dalam memperbaiki ketimpangan ekonomi dan ekonomi daerah/lokal, seperti peningkatan intensitas program asuransi mikro bagi nelayan, petani komoditi unggulan dan asuransi kesehatan bagi kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah.

### 3.1.2. Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami kontraksi dari 5,85% tahun 2014 melambat menjadi 5,41%, akan mengalami *recovery* di tahun 2016 yang mencapai 5,8%, realisasi sampai dengan Triwulan III baru mencapai 4,83%. Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi nasional yang juga mengalami pertumbuhan melambat di tahun 2015 hanya mencapai 4,8%, bahkan menurut perkiraan World Bank (April 2016) pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016 nanti akan mencapai 5,2% sampai 5,6%,dan akan terjadi *recovery* tahun 2017 menjadi 5,3% dan perkiraan yang lebih optimis oleh Bank Indonesia mencapai 5,8%.

Sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama ini adalah pengeluaran konsumsi masyarakat, pembentukan modal tetap bruto dan kinerja net ekspor antar daerah yang semakin membaik, hal ini sejalan dengan kebijakan pelonggaran keuangan negaranegara tujuan ekspor dalam pemulihan ekonomi negara OECD, Jepang dan China yang menerapkan penetapan suku bunga negatif untuk memulihkan perekonomiannya, maka sumber pertumbuhan ekspor selama triwulan pertama tahun 2015 sebesar 0,07% menurun menjadi -

2,89% pada triwulan IV 2015 dan sampai pada kuartal pertama 2016 pertumbuhan ekspor menjadi 1,29% (BRS No: 28/5/13/Th XIX, 4 Mei 2016) dan pada kwartal III pada tahun 2016 menjadi . Pada sisi produksi, sumber recovery pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta transportasi dan pengudangan, informasi dan komunikasi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat pada tahun 2014 pada harga berlaku mencapai Rp 164,90 triliun terus meningkat pada tahun 2015 sebesar Rp 178,81 triliun, pada tahun 2016 sebesar Rp.195,68 trilyun. Jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2014 adalah sebesar 5,131 juta jiwa, tahun 2015 naik menjadi 5,19 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,26% sedangkan pada tahun 2016 jumlah penduduk Sumatera Barat sebesar 5,26 juta dengan laju pertumbuhan sebesar 1,20.% . Sehingga PDRB rill per kapita telah meningkat dari Rp. 32,14 juta menjadi Rp.37.21 juta pada tahun 2016. Struktur perekonomian Sumatera Barat sampai tahun 2016 masih didominasi oleh tiga sektor, yakni sektor pertanian (24,79%), sektor perdagangan hotel dan restoran (27,28%), dan sektor jasajasa (14,96%). Sehingga kontribusi ketiga sektor ini mencapai lebih dari 67,03%. Perkembangan ini memperlihatkan pentingnya peran sektor pertanian terutama sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan perikanan di samping sub sektor peternakan di dalam perekonomian daerah Sumatera Barat. Pembangunan sektor pertanian pada tahun 2018 tetap menjadi prioritas guna memperkuat kerangka pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan penduduk yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian ini. Pengembangan sektor pertanian pada tahun 2018 ini harus sudah diarahkan kepada pengembangan agrobisnis dan agroindustri terutama untuk agroindustri perkebunan, dan perikanan laut. Diharapkan pada tahun 2018 nanti, perkembangan sektor pertanian sudah harus melangkah ke sektor industri pengolahan di dalam daerah sendiri melalui pembangunan zona prosesing ekspor pada koridor ekonomi yang terbentuk untuk komoditi utama ekspor seperti karet, sawit, dan kakao. Tahun 2018 harus menjadi momentum untuk merintis terjadinya perubahan struktur perekonomian dengan meningkatkan peran sektor industri pengolahan sejalan dengan semakin maju dan berkembangnya sektor pertanian, karena output sektor pertanian haruslah menjadi input bagi sektor industri pengolahan. Artinya, transaksi antar sektor dalam pembangunan Sumatera Barat dapat diwujudkan.

Selanjutnya, dalam memperbaiki kinerja perekonomian di tahun 2018 nanti, dari sisi produksi, maka sektor pertanian, industri pengolahan, ekonomi kreatif, perdagangan hotel dan restoran, Jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi haruslah mendapat perhatian lebih besar, karena ke lima sektor inilah yang berkontribusi besar terhadap pembentukan nilai PDRB

Sumatera Barat selama ini. Diantara sektor pertanian yang memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat adalah sub sektor perkebunan, peternakan, tanaman pangan, dan perikanan. Ke empat sub sektor ini perlu dikembangkan ke arah peningkatan nilai tambah produknya dengan mendorongnya melangkah ke agroprosesing dalam pengembangan agro bisnis dan bahkan agroindustri.

Pada sisi pengeluaran, komponen konsumsi lembaga swasta yang dapat berupa investasi swasta dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat harus terus didorong agar peran investasi pihak swasta dalam pembangunan perekonomian Sumatera Barat akan terus mengalami perbaikan. Oleh karena itu, perbaikan superstruktur dan infrastruktur perekonomian agar pengeluaran lembaga swasta semakin menguat dalam sistem perekonomian Sumatera Barat ke depan. Usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor barang dan jasa luar negeri harus terus dilakukan melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, sehingga permintaan terhadap barang-barang domestik akan semakin tinggi. Besarnya konstribusi impor barang dan jasa terhadap pembentukan nilai PDRB ternyata berasal dari pembelian barangbarang golongan kertas/karton, mesin-mesin mekanik, keramik, serta barang barang dari besi dan baja. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Sumatera Barat harus mampu mengarah kepada perubahan struktural terutama mengembangkan industri penganti substitusi impor ini, sebab komponen konsumsi rumah tangga yang terus meningkat ternyata juga sejalan dengan peningkatan impor. Keadaan ini tentu memperlemah kinerja perekonomian Sumatera Barat di masa depan. Diperkirakan tahun 2017 pertumbuhan ekonomi yang semula melambat, perlahan-lahan akan kembali mengalami recovery berkisar antara 5,3 - 5,9 %, dapat diwujudkan dengan beberapa asumsi: pertama memperbaiki kinerja ekspor Sumatera Barat, Kedua peningkatan investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto, Ketiga: Peningkatan peran sektor pengolahan produk pertanian dan ekonomi kreatif pendukung kegiatan pariwisata, Keempat: Peningkatan peran konstruksi dalam perekonomian Sumatera Barat

Berdasarkan kepada kondisi dan arahan perekonomian nasional di atas, maka untuk perekonomian Sumatera Barat tentunya tidak akan jauh bergerak dari kondisi dan arah kebijakan ekonomi nasional itu. Dalam tahun 2018, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan sektor ekonomi yang kuat yang berbasis kepada sumberdaya daerah, peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif yang mendukung kegiatan pariwisata dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas melalui peningkatan peran investasi swasta dalam negeri (PMDN) dan swasta asing (PMA) serta investasi pemerintah serta BUMD melalui pembangunan infrastruktur

yang mendukung kepada kegiatan ekspor komoditi utama, serta mengurangi jumlah pengangguran dengan mengembangkan sistem pelayanan publik yang mendorong semakin berkembangnya investasi swasta, perluasan ekspor melalui pembentukan zona prosesing ekspor pada wilayah koridor ekonomi yang ada, pemberdayaan usaha mikro menengah, peningkatan kualitas teknis pengelola agribisnis dengan pengembangan klaster agrobisnis dan agro industri dalam konteks pengembangan kawasan agropolitan serta pengembangan agrowisata dan ekowisata, pengembangan balai-balai penelitian untuk tanaman komoditi unggulan daerah, peningkatan badan sertifikasi produk ekspor untuk melakukan standardisasi komoditi perdagangan terutama dalam menyesuaikan dengan blue print masyarakat ekonomi ASEAN (MEA, 2015), pengembangan kawasan sentra industri masyarakat, memperbesar peluang pasar untuk produk industri unggulan baik antar wilayah maupun eksternal wilayah, membangun konektifitas dengan pusat-pusat koridor ekonomi Sumatera, melalui perdagangan daerah terutama produk pertanian dan ekonomi kreatif. Adapun kebijakan yang dilakukan adalah:

- Meningkatkan nilai ekspor terutama dengan memanfaatkan kerjasama ekonomi melalui sosialisasi MEA dan integrasi ekonomi dengan koridor ekonomi Sumatera dan dengan negara-negara ASEAN dengan mengembangkan industri pengolahan produk pertanian unggulan dan memperluas negara tujuan ekspor kelompok negara-negara NAFTA dan mendorong peningkatan permintaan internal dan eksternal wilayah.
- Meningkatkan nilai tambah produk unggulan Sumatera Barat melalui pengembangan zona prosesing ekspor pada koridor ekonomi yang ada, kawasan agrobisnis, agropolitan dan kawasan unggulan industri pengolahan dan harus dapat terkoneksi dengan koridor ekonomi Sumatera.
- 3. Mengatasi penganguran dengan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif pada setiap kawasan utama, kawasan strategis dan kawasan potensial pariwisata daerah
- 4. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru dengan mendorong dilakukannya investasi yang padat karya, terutama dari pelaksanaan proyek-proyek APBN dan APBD, disamping proyek investasi lembaga swasta dalam negeri dan luar negeri.
- 5. Mengurangi konsumsi barang-barang impor dengan menggunakan produk dalam negeri sendiri melalui peningkatan perdagangan antar daerah, peningkatan penggunaan hasil kerajinan rumah tangga yang spesifik lokal
- 6. Mengembangkan produk komoditi ekspor yang berbasis ekonomi lokal seperti produk Hortikultura, perkebunan, perikanan, ternak besar dan kecil, industri kerajinan lokal, industri makanan tradisional dan industri garmen lokal.

- 7. Memperkuat jejaring bisnis lokal dengan badan usaha daerah (BUMD) melalui penyusunan kontrak-kontrak bisnis (contract framing) antara pengusaha lokal dan nasional dengan gabungan kelompok tani produsen komoditi unggulan, lembaga keuangan daerah, koperasi untuk menciptakan terjadinya persaingan di tingkat lokal dalam rangka menuju kepada keunggulan persaingan secara global.
- 8. Mengembangkan sistem pengaturan yang baik (good governance) dalam sistem pengelolaan pemerintah yang kondusif bagi peningkatan peluang investor dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan investasinya di Sumatera Barat.
- 9. Meningkatkan pembangunan SDM melalui pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembentukan karakter, sehingga sumber potensial tenaga kerja ahli di daerah perantauan.
- 10. Memprioritaskan pembangunan sumberdaya kelautan dan perikanan (maritime & marine) untuk mendukung kegiatan pariwisata, ekonomi kreatif dan industri kerajinan melalui pembangunan infrastruktur dasar pada kemaritiman dan konektifitas diantara destinasi pariwisata utama, strategis dan potensial.

### 3.1.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Solok Selatan

Perekonomian suatu daerah sangat tergantung dari sumber daya alam dan faktor produksi yang dimilikinya. Hal itu berarti besarnya PDRB atau perekonomian suatu daerah Kabupaten / Kota terbentuk dari berbagai macam aktivitas atau kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut.

Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Solok Selatan secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik walau pun mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi tahun-tahun sebelumnya yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan indikator-indikator lain yang terkait sebagai mana yang tergambar pada Tabel 3.1.

Jika Dilihat dari perkembangan PDRB Kabupaten Solok Selatan atas harga berlaku dalam kurun waktu tahun 2012-2016 meningkat tiap tahun, yaitu dari Rp 3.090.219,9 juta pada tahun 2012 menjadi Rp 4.593.324 juta pada tahun 2016. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ialah berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku. Selama periode 2012-2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan terus meningkat, namun peningkatannya berfluktuasi dari tahun ketahun. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Solok Selatan sebesar 6,04 persen, dan terus meningkat menjadi 6,13 persen pada tahun 2013. Meskipun pada tahun 2014 dan 2016 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan melambat menjadi 5,90 persen (tahun 2014) dan 5,35 persen (tahun 2015), 5,05 persen (tahun 2016).

Sedangkan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat dapat dilihat melalui PDRB Perkapita, Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB dapat masyarakatmelihat tingkat kesejahteraan masyarakat dilihar dari PDRB perkapita terus meningkat dari Rp 20.481 ribu pada tahun 2012 menjadi Rp 28.228 ribu pada tahun 2016.

Tabel.3.1.
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Solok Selatan
Tahun Anggaran 2012-2016 dan Target 2017-2018

ranan Anggaran 2012 2010 dan Tangot 2011 2010								
INDIKATOR			Realisasi			Target	Target	
INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
PDRB:								
Atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)	3.090.219,6	3.434.160,7	3.889.024,0	4.224.476,6	4.593.324,5	5.111.616,6	5.622.778,3	
Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	6,04	6,13	5,90	5,35	5,05	5,60	5,80	
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (jt)	20,48	23,31	24,79	26,44	28,23	29,85	31,76	

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Jika dilihat dari kontribusi sektor penunjang perekonomian daerah perlapangan usaha di Kabupaten Solok Selatan masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian dan pertambangan dan penggalian dengan kontribusi 43,58%. Berdasarkan dari kecenderungan perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Solok Selatan, jika dilihat dari kelompok sektor (sektor *primer*, *sekunder*, *dan tersier*) maka dominasi kelompok sektor primer mulai bergeser ke arah kelompok sektor sekunder dan tersier. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan dari sektor informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, transportasi dan pergudangan, konstruksi pada PDRB harga berlaku. Walaupun demikian karakternya masih dipengaruhi perekonomian primer (*agriculture*/pertanian). Kondisi ini sejalan dengan komposisi pemanfaatan lahan di Kabupaten Solok Selatan yang masih dominannya untuk kegiatan pertanian dan perkebunan (*primer*).

Tabel.3.2.

Laju Pertumbuhan Tiap Sektor PDRB Atas Harga Konstan dan Harga Berlaku Serta

Tingkat Inflasi Tahun 2012-2016

ringkat inflasi Tanu						12012-2016					
Kategori	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		НВ	нк	НВ	нк	НВ	нк	НВ	нк	НВ	нк
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.33	3.91	9.79	3.42	14.26	5.51	6.67	3.42	7.55	2.90
В	Pertambangan dan Penggalian	11.45	5.46	15.14	5.76	24.97	5.85	14.58	7.03	6.11	6.30
С	Industri Pengolahan	10.85	8.05	8.12	5.70	7.62	3.17	5.65	2.98	4.62	2.32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.31	3.41	(3.93)	4.74	14.62	6.92	32.06	5.17	16.93	10.22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.79	2.58	3.49	6.69	15.82	6.63	12.43	3.99	8.76	3.31
F	Konstruksi	14.49	8.35	15.92	10.96	13.12	7.87	13.73	7.27	8.14	6.83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.20	6.67	8.55	6.83	8.06	5.48	10.93	5.49	11.15	5.50
н	Transportasi dan Pergudangan	12.65	8.49	16.88	9.30	14.78	7.63	8.51	7.41	9.35	7.61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.59	6.34	8.88	2.48	14.71	7.82	15.89	5.39	12.84	5.98
J	Informasi dan Komunikasi	16.53	12.41	5.59	13.53	15.22	8.74	0.96	10.73	10.68	9.00
К	Jasa Keuangan dan Asuransi	16.40	9.27	12.91	6.55	10.68	5.31	7.72	3.77	10.48	6.85
L	Real Estate	8.45	5.41	10.97	4.96	12.58	3.58	11.92	5.90	8.91	4.56
M,N	Jasa Perusahaan	12.68	6.40	10.91	5.05	13.53	6.94	10.03	5.67	9.11	4.78
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.61	2.64	11.20	2.35	8.75	3.62	(0.38)	4.71	8.98	4.45
Р	Jasa Pendidikan	12.39	6.28	17.03	7.16	13.66	6.33	10.07	7.54	12.63	8.64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19.95	10.58	17.03	7.51	12.27	7.91	4.69	5.27	6.86	3.96
R,S,T,U	Jasa lainnya	12.29	6.10	19.17	6.85	13.27	7.47	9.75	6.46	17.08	10.57
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.40	6.04	11.13	6.13	13.25	5.90	8.63	5.35	8.52	5.05
	Tingkat Inflasi	5.05		4.71		6.93		3.11		3.31	
						l					

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Dilihat dari pertumbuhan indikator makro perekonomian Kabupaten Solok Selatan, tahun 2012-2016 perekonomian di Kabupaten Solok Selatan mengalami pertumbuhan antara 5,05% - 6,13%, dengan titik terendah pertumbuhan terjadi pada pada tahun 2016 (PDRB atas harga konstan). Seiring dengan perlambatan pertumbuhan perekonomian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan tahun 2014-2016 mengalami perlambatan (slow down), hingga 5,05% pada tahun 2016. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini diiringi juga oleh pelambatan pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku yaitu dari 13,25% pada tahun 2014 menjadi 8,52% pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi (PDRB atas harga konstan) kabupaten Solok Selatan diharapkan

kembali mengalami peningkatan menjadi 5,60%, dengan target PDRB atas dasar harga berlaku 11,28%, dengan target PDRB Perkapita sebesar Rp. 29,85 juta. Peningkatan ini didorong oleh melalui peningkatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah terutama investasi dibidang infrastruktur penunjang perekonomian serta peningkatan investasi swasta baik invetasi yang berasal dari PMDN maupun PMA terutama dibidang energi, perkebunan, pariwisata, industri menengah dan besar serta perdagangan. Peningkatan investasi ini juga diarahkan pada penciptaan petumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang didasarkan pada pemamfaatan sumberdaya daerah, pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata, pengembangan produk unggulan daerah serta pengembangan ekonomi kreatif.

Adapun kebijakan langkah- langkah yang ditempuh untuk mencapai target tesebut adalah :

- 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melalui penciptaan sektor ekonomi yang kuat, dinamis dan efektif melalui peningkatan peran investasi.
- 2) Mengembangkan sistem pengelolaan pemerintah yang baik dan kondusif *(good governance)*, memperkuat jaringan promosi dan informasi daerah, serta memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi.
- 3) Peningkatan peran UMKM melalui peningkatan produksi dan produktifitas, kemitraan dengan perusahaan besar, dan pemasaran hasil produksi yang pada akhirnya berdampak pada bertambahnya kesempatan kerja
- 4) Pengembangan komoditi unggulan daerah yang berbasis ekonomi lokal melalui peningkatan daya saing komoditi unggulan lokal melalui penerapan teknologi dan informasi serta efisiensi produksi yang berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki daerah.
- 5) Pengembangan kawasan agropolitan melalui pengembangan agrowisata, ekowisata dan pengembangan ekonomi kreatif.
- 6) Pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing yang pada akhirnya berdampak nilai ekonomis bagi masyarakat
- 7) Mendorong penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi serta pemamfaatan potensi alam dengan tetap mengedepankan aspek lingkungan.
- 8) Peningkatan investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian dan pelayanan dasar

# 3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Memperhatikan fakta dan kenyataan yang dialami selama lima tahun terakhir baik dari hasil observasi lapangan maupun dari data statistik yang tersedia serta analisis capaian hasil pembangunan daerah, maka diperoleh tantangan pokok di Kabupaten Solok Selatan:

- 1. Belum berkembangnya iklim usaha yang kondusif di daerah sehingga belum mampu menarik dan merealisasikan investasi skala menengah dan besar yang optimal.
- 2. Sektor perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor primer sehingga nilai tambah produk daerah yang dihasilkan relatif rendah
- Belum meluasnya budaya usaha di masyarakat, sehingga sektor perekonomian masyarakat masih sangat tergantung pada sektor primer yang akhirnya berakibat pada belum optimalnya kesempatan usaha ekonomi untuk peningkatan pendapatan dan daya beli.
- 4. Rendahnya ketersediaan sumber daya manusia yang kompetitif serta penggunaan teknologi dalam pengolahan produk unggulan daerah.
- 5. Rendahnya kualitas teknis pengelolaan agrobisnis dan agroindustri serta pengembangan pariwisata.
- 6. Peningkatan investasi lebih didorong oleh peningkatan investasi pemerintah dan swasta kecil, sehingga nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan kurang berdampak besar terhadap pertumbuhan PDRB.
- 7. Masih banyaknya rumah tangga beresiko sosial, meskipun sudah meningkat kesejahteraannya namun masih berada pada kelompok hampir miskin sehingga rentan terhadap gejolak ekonomi dan sosial.
- 8. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastuktur dasar terutama bagi penunjang perekonomian

### 3.2. Arah Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dimana sumber-sumber pembiayaan desentralisasi fiskal tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang sah. Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menghendaki pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Paraturan Daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari; *pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah*, yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

# 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan daerah merupakan uang dalam kas daerah dan uang pada bendahara penerimaan daerah dan bendahara pengeluaran daerah. Pendapatan daerah bersumber dari: (a). Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (b). Penerimaan pembiayaan yang meliputi: penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pelunasan piutang, (c). dan penerimaan daerah lainnya, termasuk penerimaan perhitungan pihak ketiga (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007).

Selain mempertimbangkan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta taat azas, maka pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format APBD *balance* (berimbang) antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit dan kalau perlu surplus.

Perkembangan dan realisasi APBD Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2012-2016 ditunjukkan pada Tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel.3.3.

Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Solok Selatan
Tahun Anggaran 2012 – 2016

Tahun	Uraian	Pondonatan	Polonia	Pembiayaan			
Tanun	Oralali	Pendapatan	Belanja	Penerimaan <b>Peneri</b>	Pengeluaran		
2012	Anggaran	474.383.633.205	532.125.849.564	62.952.964.632	1.363.000.000		
	Realisasi	461.402.661.175	487.389.724.518	62,902,716,896,	1.363.000.000		
	Pencapaian Target	97,26	91,59	99,92	100		
2013	Anggaran	541.263.913.578	576.751.339.190	35.552.653.000	0		
	Realisasi	515.127.843.434	530.578.741.208	35.934.744.836	0		
	Pencapaian Target	95,17	91,99	101,07	100		
2014	Anggaran	640.675.214.248	660.540.529.613	35.552.653.000	0		
	Realisasi	630.492.374.821	595.547.531.731	20,528,232,563,	0		
	Pencapaian Target	98,41	90,16	57,74	100		
2015	Anggaran	737.791.461.762	790.299.792.360	54.508.330.598	2.000.000.000		
	Realisasi	739.447.807.717	703.395.983.375	55.423.614.315	2.000.000.000		
	Pencapaian Target	100,22	89	101,68	100		
2016*	Anggaran	777.888.333.567	863.149.466.224	89.475.438.657	4.000.000.000		
	Realisasi	776.752.152.402	814.272.702.397	89.475.438.657	3.292.000.000		
	Pencapaian Target	99,85	94,34	100,00	82,30		
Rata-Rata Pencapaian Target		98,33	91,42	92,08	96,46		

Sumber Data: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja dari pencapaian dan realisasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Solok Selatan cukup baik dengan ratarata pencapaian pendapatan daerah sekitar 98,32% sedangkan realisasi belanja daerah 91,42%, penerimaan pembiayaan 92,08% dan realisasi pengeluaran pembiayaan 96,46%. Ini dapat bahwa target dari perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama periode 2012-2016 cukup realistis.

Jika dilihat dari perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2014-2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari Rp 630.492,37 juta pada tahun 2014 menjadi Rp 776.752,16 juta pada tahun 2016, dengan ratarata pertumbuhan 12.07 %. Jika dilihat dari Tabel 3.4, terlihat bahwa sumber pendapatan utama Kabupaten Solok Selatan masih bersumber dari dana perimbangan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan rata-rata 79,59% per tahun. Besarnya kontribusi dana perimbangan ini seiring peningkatan dari realisasi pendapatan dana

perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2014 realisasi dana perimbangan Rp. 509.850,54 juta atau berkontribusi terhadap pendapatan sebesar 81,55% dan mengalami terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 menjadi Rp. 620.289,94 juta dengan berkontribusi 79,85% dalam pembentukan pendapatan daerah.

Penurunan kontribusi dana perimbangan ini disebabkan oleh peningkatan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok Selatan pada 2014-2016 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,23% yaitu dari Rp. 32.342,60 juta pada tahun 2014 menjadi Rp. 51.377,20 juta pada tahun 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan dari pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu penerimaan dana Kapitasi Kesehatan yang berasal dari BPJS yang diterima oleh puskesmas serta penerimaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD. Sedangkan untuk pajak dan selama periode 2014-2016 hanya mengalami peningkatan sebesar Rp. 850,39 juta dan retribusi mengalami penurunan sebesar Rp. 10.024,55 juta. Penurunan kontribusi dari retribusi ini sebagai dampak pemindahan rekening dana kapitasi kesehatan yang awalnya berada pada rekening retribusi kerekening Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Jika dilihat dari kontribusi total pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap pembentukan pendapatan daerah masih relatif kecil namun terus mengalami peningkatan yaitu dari 5,1% pada tahun 2014 menjadi 6,6% pada tahun 2016. Hal ini berarti bahwa sumber pembiayaan pembangunan Kabupaten Solok Selatan masih sangat bergantung pada dana perimbangan terutama yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten Solok Selatan dari Pemerintah Pusat.

Rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah ini menggambarkan masih lemahnya aktifitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan objek pungut, serta belum tergalinya dan terkelolanya sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Penggalian sumber-sumber pendapatan dari aset dan potensi daerah yang dimiliki dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu terus ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, agar ketergantungan terhadap pemerintahan pusat dapat dikurangi. Penggalian sumber pendapatan tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (compliance) dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah, serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah.

Sedangkan untuk pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah sampai pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan rata-rata 15,63% pertahun yaitu dari Rp. 88.299,23 juta tahun 2014 menjadi Rp.128.359,88 juta pada tahun 2015, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp.105.085,02 juta yang disebabkan karena pemindahan penempatan rekening dana untuk sertifikasi dan tamsil guru yang awalnya berada pada pos alokasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berpindah pada dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus Non Fisik serta tidak adanya dana hibah untuk kegiatan mitigasi bencana yang didapat oleh Kabupaten Solok Selatan seperti tahun 2015. Namun untuk Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya terus mengalami kenaikan yaitu dari Rp. 28.605,45 juta pada tahun 2014 menjadi Rp. 35.223,39 juta pada tahun 2016

Tabel.3.4.

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2014 - 2019 (Rp Juta)

	Tanun 2014 2013 (NP data)							
NO	Uraian	2014	2015	2016	Target 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019	
A.	Pendapatan Asli Daerah	32.342,60	41.207,40	51.377,20	46.789,01	47.559,70	48.446,10	
1.	Pajak Daerah	4.112,08	4.415,20	4.962,47	8.285,47	8.887,45	9.109,60	
2.	Retribusi Daerah	11.369,25	1.538,46	1.164,70	1.687,00	1.855,70	1.948,50	
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg Dipisahkan	1.957,02	1.458,05	1.290,54	1.914,00	1.914,00	1.961,90	
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.904,25	33.795,69	43.959,49	34.902,54	34.902,55	35.426,10	
В	Dana Perimbangan	509.850,54	569.880,54	620.289,94	655.534,57	679.254,17	696.023,63	
1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.845,91	21.655,75	21.017,41	21.362,73	22.162,05	23.896,80	
2.	Dana Alokasi Umum	406.540,35	433.585,91	488.996,27	488.996,27	509.464,79	521.321,83	
3.	Dana Alokasi Khusus	72.464,28	114.638,88	110.276,26	145.175,57	147.627,33	150.805,00	
C	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	88.299,23	128.359,88	105.085,02	76.782,35	77.686,26	80.717,72	
1.	Pendapatan Hibah	2.490,74	20.035,15	780,00	5.200,00	4.200,00	4.305,0 0	
2.	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	
3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	28.605,45	33.724,01	35.223,39	36.156,23	38.060,14	40.986,60	
4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51.863,53	70.475,72	61.469,51	35.426,12	35.426,12	35.426,12	
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	5.339.51	4.125,00	7.612,12	0	0	0	
	TOTAL PENDAPATAN	630.492,37	739.447,81	776.752,16	779.105,93	804.500,13	825.187,45	

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2014-2016 dan APBD Tahun 2017 (Data diolah) Berdasarkan kinerja dari pendapatan daerah kabupaten Solok Selatan dari Tahun 2014-2016 dan dengan mempertimbangkan prinsip akrual base dan mempertimbangkan kondisi perekonomian Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Daerah maka pada tahun 2018, pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan ditargetkan menjadi Rp. 804.500,13 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 3,26% dari target 2017. Sumber pendapatan terbesar masih diharapkan berasal dari peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah diharapkan mengalami kenaikan sebesar 1,6%, kenaikan ini berasal dari kenaikan dari pendapatan yang bersumber dari pajak sebesar dan retribusi daerah yaitu 7,26% dan 10,00%,

Untuk penerimaan pada komponen dana perimbangan adalah merupakan alokasi DAU, DAK dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Penerimaan pada komponen ini merupakan alokasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan perkembangan perekonomian Nasional, target pendapatan negara serta kebijakan Nasional dalam percepatan pembangunan daerah terutama daerah tertinggal maka Dana Perimbangan Kabupaten Solok Selatan diharapkan mengalami kenaikan sebesar 3,62% dari target 2018.

#### 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah dapat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat yang diukur melalui penerimaan pendapatan daerah. Struktur pendapatan daerah terdiri dari:

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terkait dengan pajak dan retribusi yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Implementasi dari Undang-Undang di atas didukung dengan regulasi daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Solok Selatan yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu. Selain itu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan berasal dari Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan bagi hasil dari

penyertaan modal daerah pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan pendapatan lainlain Pendapatan Asli daerah yang sah

#### 2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan bersumber dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Pendapatan ini terdiri atas dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

#### 3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah

Terdiri dari dana hibah, dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang proporsi pembagiannya didasarkan pada ketentuan perundangan yang mengaturnya, serta bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintahan lainnya.

Berdasarkan Proyeksi Pendapatan daerah maka kebijakan daerah dalam upaya peningkatan pendapatan

- 1. Optimalisasi penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ektensifikasi pajak, peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana, pengawasan, penyempurnaan prosedur pembayaran pajak serta peningkatan akurasi data objek pajak dan wajib pajak.
- 2. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah disamping pajak, terutama dari pengelolaan kekayaan alam, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah
- 3. Meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional (penerimaan daerah bukan pajak) terutama yang berasal dari kekayaan alam, retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah.
- 4. Mengoptimalisasi pengunaaan Aset Daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah
- 5. Meningkatkan pelayanan dengan upaya meningkatkan SDM pengelola, sarana dan prasarana serta penyempurnaan dasar hukum dan mekanisme prosedur penerimaan.
- 6. Memberikan *reward* dan *punishment* terkait hak dan kewajiban petugas maupun wajib pajak/retribusi sesuai dengan aturan berlaku.
- 7. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan dan akurasi usulan kegitan perioritas ke pemerintah atasan baik Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan memberikan data akurat, cepat dan tepat baik dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bantuan keuangan bersifat khusus maupun hibah

8. Peningkatan penerimaan pembiayaan daerah melalui penghematan anggaran tahun sebelumnya tanpa mengganggu pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

#### 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut pemerintah daerah diamanatkan agar keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai implementasinya pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kekuatan (output) dan dampak hasil (outcome) diharapkan dari kegiatan dan program. serta mempertimbangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur hak dan kewajiban dari pemerintah daerah. Dengan demikian APBD tidak hanya berperan sebagai dokumen anggaran dan pelaksanaannya, namun merupakan alat kebijakan publik dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai semua kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maupun kegiatan penunjang, yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Tabel.3.5.

Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2014 - 2019 (Rp Juta)

NO	Uraian	2014	2015	2016	Target 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
Α	Belanja Tidak Langsung	279.031,06	334.145,49	384.063,27	379.598,28	397.069,77	406.757,47
1	Belanja Pegawai	255.551,42	287.956,99	298.098,17	284.268,66	300.367,22	309.378,23
2	Belanja Bunga	-	-		-	-	
3	Belanja Subsidi	-	•		•	-	
4	Belanja Hibah	2.775,74	14.652,50	7.395,84	5.251,60	6.551,60	5.896,44
5	Belanja Bantuan Sosial	1.305,00	1.015,00	15,00	636,63	636,63	636,63
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1	-	347,04	1.134,93	1.074,31	1.105,81
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	17.721,66	29.542,17	76.152,86	87.306,47	87.440,01	88.740,36
8	Belanja Tidak terduga	1.677,24	978,83	2.054,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
В	Belanja Langsung	316.516,48	369.250,50	430.209,43	435.476,38	434.160,91	440.673,32
1	Belanja Pegawai	17.959,00	17.647,49	21.008,55	19.680,99	20.584,06	21.215,05
2	Belanja Barang dan Jasa	114.714,91	136.144,11	162.340,39	176.584,58	184.468,20	189.446,60
3	Belanja Modal	183.842,57	215.458,90	246.860,49	239.210,81	229.108,65	230.011,67
	TOTAL BELANJA	595.547,54	703.395,99	814.272,70	815.074,66	831.230,68	847.430,79

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dan APBD tahun 2017 (Data diolah)

Dari Tabel 3.5 dapat dilihat perkembangan realisasi belanja dan perkiraan perkembangan belanja daerah Kabupaten Solok Selatan dengan tetap mempertimbangkan prinsip keseimbangan antara ketersediaan anggaran dengan belanja daerah, diperkirakan untuk tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan belanja daerah dari Rp. 815.074,66 juta pada tahun 2017 menjadi Rp.831.230,68 juta pada tahun 2018 dan 847.430,79 juta pada tahun 2019.

Berdasarkan hal diatas secara umum kebijakan belanja daerah periode tahun 2018 diarahkan untuk:

- Pemenuhan belanja wajib mengikat terutama pada belanja pemenuhan kebutuhan aparatur (Gaji dan tunjangan, pendidikan dan pelatihan aparatur) dan operasional pelayanan dasar pemerintahan (belanja operasional kantor), pendidikan (20% dari APBD) dan kesehatan (10% dari APBD setelah dikurangi gaji)
- 2. Pemberian belanja hibah dan bantuan sosial yang ditujukan pada program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan serta penyelenggaraan organisasi sosial diatur oleh

- undang-undang dan tetap mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Hibah dan bansos.
- 3. Pemenuhan kewajiban penganggaran keuangan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa.
- 4. Pemenuhan penganggaran belanja tidak terduga yang penggunaanya untuk penanganan masalah darurat dan kebencanaan
- 5. Peningkatan belanja daerah dialokasikan untuk peningkatan pelayanan umum pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
- 6. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan yang berperan langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021, yang dituangkan kedalam 8 program prioritas.
- 7. Penerapan Anggaran Berbasis Program dan Kegiatan (*money follow program*) prioritas yang terukur (*output, outcome dan benefit*) serta transparansi penggunaan anggaran (*egovernance*) dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.

#### 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi/ SKPD, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek. Dalam hal ini Pembiayaan daerah dalam terdiri atas penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah, serta pengeluaraan pembiayaan terdiri dari penyertaan modal kepada BUMD, dan pada Bank Nagari.

Arah kebijakan pembiayaan daerah adalah:

- Penurunan SILPA, maka diupayakan untuk lebih kecil dari tahun sebelumnya melalui efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran sehingga dapat menyerap anggaran lebih besar.
- Untuk pos pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah belum perlu dilakukan, sehingga tidak direncanakan dianggarkan

- 3. Terhadap penyertaan modal kepada BUMD/Perusda dilaksanakan seefektif mungkin tergantung kebutuhan sedangkan penyertaan modal kepada Bank Nagari adalah dalam rangka memenuhi *car ratio* perbankan yang harus dipenuhi setiap tahunnya.
- 4. Untuk pos pembayaran pokok hutang dan pemberian pinjaman tahun depan dihindari sehingga tidak perlu dianggarkan.

Selanjutnya dapat dilihat alokasi realisasi dan perkiraan pembiayaan daerah sebagaimana tabel 3.6

Tabel.3.6.

Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2014 - 2019 (Rp Juta)

NO	Uraian	2014	2015	2016	Target 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
Α	Penerimaan Pembiayaan	20.528,23	55.423,61	89.475,44	38.968,71	34.730,55	30.243,34
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	20.528,23	55.423,61	89.475,44	38.968,71	34.730,55	30.243,34
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	1	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
В	Pengeluaran Pembiayaan	-	2.000,00	3.292,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan						
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	2.000,00	3.292,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-	-
4	Pembayaran Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	20.528,23	53.423,61	86.183,44	35.968,71	26.730,55	22.243,34

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2012-2016 dan APBD tahun 2017 (Data diolah)

# BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rancangan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021. Penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2016 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2017, masalah dan tantangan pembangunan merujuk pada prioritas pembangunan provinsi dan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN tahun 2015-2019.

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penyusunan prioritas pembangunan tahun 2018 tetap mengacu pada RPJMD tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya. Prioritas pembangunan daerah selanjutnya diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi. Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021 adalah:

### VISI TERWUJUDNYA MASYARAKAT SOLOK SELATAN YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sembilan butir sebagai berikut:

- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ajaran agama bagi masyarakat:
- Meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan dan martabat masyarakat;
- 3. Menurunkan angka kemiskinan;
- 4. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup;
- 5. Meningkatkan pengelolaan SDA secara profesional untuk peningkatan PAD;

- 6. Penegakkan supremasi hukum dan demokratisasi;
- 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar secara proporsional;
- 8. Meningkatkan kualitas SDM;
- 9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya.

Hubungan misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Solok Selatah dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Hubungan Misi, Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Solok Selatan

TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan masyarakat yang religius berdasarkan filosofi <i>adat</i>	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Masyarakat tentang Ajaran Agama.
kitabullah.	Meningkatnya kapasitas lembaga Agama dan Adat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.
Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas pendidikan.
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.	Meningkatnya pemerataan sumber daya dan manajemen kesehatan
-	Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat.
Mewujudkan pembangunan yang berpihak pada pemenuhan kesetaraan gender, responsif difabel, serta perlindungan anak dan perempuan.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Responsif difabel dan perlindungan anak dan perempuan
Menurunkan jumlah rumah tangga miskin dan angka pengangguran.	Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan program-program pengentasan kemiskinan ( <i>Poverty Alleviation</i> )
Meningkatkan partisipasi masyarakat (termasuk perantau) dan lembaga masyarakat dalam pembangunan.	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan dalam pembangunan.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi.	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan lembaga di bidang ekonomi.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial dan budaya.	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan lembaga di bidang sosial budaya.
Meningkatkan partisipasi	Meningkatnya partisipasi dibidang Lingkungan Hidup.
dan penanggulangan bencana.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi penanggulangan bencana.
Meningkatkan pengelolaan SDA	Meningkatnya pengelolaan sektor pertanian.
lingkungan, untuk meningkatkan	Meningkatnya pengelolaan sektor pariwisata.
pendapatan asli daerah.	Meningkatnya pengelolaan sektor jasa dan perdagangan.
	Mewujudkan masyarakat yang religius berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.  Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas.  Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.  Mewujudkan pembangunan yang berpihak pada pemenuhan kesetaraan gender, responsif difabel, serta perlindungan anak dan perempuan.  Menurunkan jumlah rumah tangga miskin dan angka pengangguran.  Meningkatkan partisipasi masyarakat (termasuk perantau) dan lembaga masyarakat dalam pembangunan.  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi.  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial dan budaya.  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.  Meningkatkan pengelolaan SDA secara profesional dan berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			Meningkatnya pengelolaan energi baru dan terbarukan.
		Meningkatkan pengelolaan produk hukum daerah, kesadaran hukum dan penegakkan hukum.	Meningkatnya penataan produk hukum daerah, kesadaran hukum, penegakkan serta kepastian hukum.
	Demographican ounremosi		Meningkatnya pemanfaat sistem informasi manajemen berbasis IT dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Penegakkan supremasi hukum dan demokratisasi.	Meningkatkan tata kelola pemerintah berbasis e-goverment menuju good and <i>clean</i> governance.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan pemanfaatan sistem informasi
		governance.	Meningkatnya fungsi pengawasan dan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar secara proporsional.		Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan kabupaten.
		Meningkatkan pembangunan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur keciptakaryaan.
		infrastruktur di bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pengairan/sumber daya air.
		dan Informatika, Energi dan Penanggulangan Bencana untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pembangunan kawasan strategis cepat tumbuh.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur perhubungan.
			Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika.
			Meningkatnya ketahanan energi.
			Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
	Meningkatkan kualitas	Mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas SDM dan berdaya saing.	Meningkatnya kualitas SDM dan daya saing masyarakat.
	SDM	Meningkatkan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki SDM berkualitas dan profesional.	Meningkatnya kualitas SDM dan profesionalitas ASN.
	Meningkatkan sarana	Mewujudkan sarana dana	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
	dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya.	prasarana pendidikan, kesehatan dan prasarana sosial lainnya yang	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kesehatan.
		berkualitas.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial lainnya.

### 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 prioritas pembangunan pada tahun 2018 adalah penguatan fondasi pembangunan daerah yang bertumpu pada pembangunan sarana dan prasarana dasar,

pembangunan SDM melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, gender dan keberpihakan pada difabel, dan pembangunan supremasi hukum didukung birokrasi professional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan peningkatan perekonomian daerah dengan tema: "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih Dan Baik (Good and Clean Governance) Untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah". Berdasarkan permasalahan, isu strategis, dan pencapaian dari visi dan misi kepala daerah maka dapat dilihat keterkaitan antara program prioritas pembangunan RPJMD dengan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Prioritas Pembangunan Daerah

	Program Prioritas Pembangunan Tahun Rencana (RPJMD)		Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1.	Mewujudkan masyarakat yang religius dengan	1.	Mewujudkan masyarakat yang religius dengan
	filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi		filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
	Kitabullah (ABS-SBK)		Kitabullah (ABS-SBK)
2.	Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan	2.	Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan
	prasarana dasar untuk menunjang		prasarana dasar untuk menunjang
	peningkatan perekonomian		peningkatan perekonomian
3.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	3.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4.	Peningkatan supremasi hukum dan	4.	Peningkatan supremasi hukum dan
	peningkatan kapasitas pemerintah daerah		peningkatan pelayanan pemerintah daerah
5.	Peningkatan partisipasi multistakeholder	5.	Peningkatan partisipasi multistakeholder
	dalam proses pembangunan		dalam proses pembangunan
6.	Peningkatan produktivitas dan daya saing	6.	Peningkatan produktivitas dan daya saing
	dalam pengelolaan SDA yang berwawasan		dalam pengelolaan SDA yang berwawasan
	lingkungan		lingkungan
7.	Penurunan tingkat kemiskinan dan angka	7.	Penurunan tingkat kemiskinan dan angka
	pengangguran serta pengentasan daerah		pengangguran serta pengentasan daerah
	tertinggal		tertinggal

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan diatas kemudian diwujudkan melalui program dan kegiatan yang tepat sehingga visi dan misi kepala daerah akan tercapai dengan baik. Program prioritas tersebut dilaksanakan atas dasar prioritas pembangunan ataupun urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Penjabaran Prioritas Daerah Dalam Program Pembangunan Daerah

	Penjabaran Prioritas Daeran Dalam Program Pembangunan Daeran  Kineria  ORD yang					
No	Program Pembangunan	Indikator	Target	OPD yang bertanggung Jawab		
Drio	ritas 1. Mewujudkan Masyarakat Yang Religiu			bertanggung dawab		
A	Urusan Pendidikan	is Deligali Filosofi Adat Basalidi Syarak	•			
	Program Peningkatan Pengamalan Nilai	% guru TPA/MDA bersertifikasi	72,12	Dinas Pendidikan,		
1	Agama	% TPA/MDA terakreditasi	26,46	Pemuda dan Olahraga		
В	Urusan Pemuda dan Olahraga					
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase pengurus remaja masjid dibina	36,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
2	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase kasus penyalahgunaan narkoba pada anak usia sekolah yang ditangani	100,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
С	Urusan Kebudayaan					
		% KAN yang dibina	100,00	Dinas Pariwisata dan		
1	Pengembangan Nilai-nilai Budaya	% LKAAM yang dibina	100,00	Budaya		
		% Bundo kanduang dibina	100,00	,		
		jumlah Lomba/Festival	4,00			
2	Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	5,00	Dinas Pariwisata dan		
_	· ongolouun notugumum 2000, u	Persentase nagari yang meiliki Medan nan Bapaneh	20,00	Budaya		
3	Pengelolaan Kekayaan Budaya	jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi	5,00	Dinas Pariwisata dan		
3	Pengelolaan Nekayaan Budaya	jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional	2,00	Budaya		
D	Urusan Penunjang Pelayanan Pemerintahan					
1	Program Peningkatan Pemahaman Penghayatan Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama	Jumlah kegiatan lomba-lomba keagamaan	6,00	Sekretariat Daerah		
'		Jumlah masyarakat yang berprestasi dibidang keagamaan tingkat provinsi	2,00	Sekielanal Daeran		
	ritas 2. Pembangunan Infrastruktur, Sarana d	an Prasarana Dasar untuk Menunjang P	eningkatan P	erekonomian		
Α	Urusan Pekerjaan Umum					
1	Program Peningkatan Sarana dan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	75,00	Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang dan		
	Prasarana Aparatur	Persentase Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan (Full Desain)	50,00	Pertanahan		
2	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan Kabupaten Yang ditingkatkan Menjadi Jalan Aspal	18,92	Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang dan Pertanahan		
0	Program Rehabiitasi / Pemeliharaan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik	45,41	Dinas Pekerjaan		
3	dan Jembatan	Persentase Jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	60,28	Umum,Tata Ruang dan Pertanahan		
4	Program Peningkatan Sarana Kebinamargaan	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana kebinamargaan	30,00	Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang dan Pertanahan		
	Program Pengembangan kinerja	Akses Sanitasi Layak	57,00	Dinas Pekerjaan		
5	pengelolaan air minum dan air limbah	Akses Air Minum Layak	74,73	Umum,Tata Ruang dan Pertanahan		
6	Program Pembangunan Saluran Drainase /	Drainase dalam Kondisi Baik	80,00	Dinas Pekerjaan		
0	Gorong - Gorong	Panjang Drainase dibangun (km)	5,00	Umum,Tata Ruang dan Pertanahan		
7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Daerah Irigasi Kondisi baik (%)	55,00	Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang dan Pertanahan		
8	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah Embung di bangun (Lokasi)	2,00	Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang dan Pertanahan		

		OPD yang		
No	Program Pembangunan	Indikator	Target	bertanggung Jawab
9	Program Poroncopoan Tota ruong	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang RDTR/RRTR	1,00	Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang dan
9	Program Perencanaan Tata ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang RTBL	1,00	Pertanahan
10	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum	100,00	Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang dan Pertanahan
11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan tata ruang	65,00	Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang dan Pertanahan
В	Urusan Pertanahan			
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase kesediaan lahan untuk pembangunan	100,00	Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang dan Pertanahan
С	Urusan Perumahan			
		Penataan perumahan dan kawasan permukiman (Kawasan)	2,00	
1	Program Pengembangan Perumahan	Pengembangan infrastruktur dan kawasan permukiman (lokasi)	25,00	Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Jumlah Lampu PJU yang diberi meteran (Titik)	7,00	g.can.gam maap
	Program poningkatan kasinggan dan	Jumlah Hidran pada fasilitas Publik	10,00	Dinas Perumahan
2	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase ketersediaan sarana proteksi kebakaran pada gedung/kantor pemerintah	10,00	Pemukiman dan Lingkungan Hidup
D	Urusan Perhubungan			
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	% Terminal yang beroperasi	50,00	Dinas Perhubungan
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	% Prasarana dan Fasilitas Transportasi dan LLAJ dalam kondisi baik	55,00	Dinas Perhubungan
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rasio Ketersediaan Angkutan umum (per 10.000)	1,34	Dinas Perhubungan
		% Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		
		Terminal Angkutan Orang (4 Terminal)	50,00	
4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terminal Angkutan Barang (1 Terminal)	-	Dinas Perhubungan
	S	Halte (15 Halte)	39,90	
		Dermaga Sampan Bermotor (3 Dermaga)	33,33	
5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Solok Selatan	60,00	Dinas Perhubungan
6	Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase angkutan umum yang melaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor	60,00	Dinas Perhubungan
7	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	% ketersediaan tanah untuk terminal dan demaga	60,00	Dinas Perhubungan
Е	Komunikasi dan Informatika			
1	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi layanan publik berbasis IT	6,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan media masa	Cakupan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

		Kinerja	OPD yang	
No	Program Pembangunan	Indikator	Target	bertanggung Jawab
3	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik	Persentasi pelayanan publik yang bisa diakses oleh masyarakat	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
F	Urusan Perdagangan			
1	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pasar yang representatif (unit Pasar Kabupaten)	2	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM
G	Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangu	ınan		
1	Program Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar	Jumlah Perencanaan Prasarana Wilayah Perkotaan (dokumen)	1,00	Bappeda
	ritas 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya	Manusia		
Α	Urusan Pendidikan	A solve a satisfa set DALID (0)	70.40	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi PAUD (%)	72,12	Dinas Pendidikan,
		Jumlah guru TK bersertifikasi	26,46	Pemuda dan Olahraga
		APK		
		- SD/MI	112,84	
		- SMP/MTs	109,33	
		APM		
		- SD/MI	98,69	
		- SMP/MTs	81,31	
		Rasio Siswa dan guru		
		- SD/MI	55,51	
		- SMP/MTs	56,69	
		Angka Kelulusan (%)		
		- SD/MI	100,00	
		- SMP/MTs	100,00	
		Peningkatan nilai rata-rata UN		D. D
2	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	- SD/MI	64,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	-	- SMP/MTs	57,00	Periluda dari Olahlaga
		Akreditasi Sekolah		
		- SD	100,00	
		- SMP	100,00	
		Angka Melanjutkan		
		- SD/MI	98,01	
		- SMP/MTs	97,31	
		Angka putus sekolah maksimal	0.,0.	
		- SD/MI	0,18	
		- SMP/MTs	0,09	
		Persentase kelulusan	0,00	
		- SD/MI	100,00	
		- SMP/MTs	100,00	
		APK SMA/SMK/MA	94,80	Dinas Pendidikan,
3	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA	72,82	Pemuda dan Olahraga
		Angka Melek Huruf (%)	98,36	ziii zizi zizii zizii zizii zizi
4	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah penyelenggara pendidikan Non Formal (KF, dan Pengelola PKBM) (unit)	14,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		% guru yang berpendidikan minimal S1		
		- SD/MI	82,59	
5	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan	- SMP/MTs	96,82	Dinas Pendidikan,
-	Tenaga Kependidikan	Nilai Rata-Rata Kompetensi Guru		Pemuda dan Olahraga
		- TK	63,86	
		- SD/MIN/SDLB	61,57	

NI-	Day was Day barran	Kinerja	OPD yang	
No	Program Pembangunan	Indikator	Target	bertanggung Jawab
		- SMP/MTs	63,66	
		% guru yang bersertifikasi pendidik		
		- TK	26,37	
		- SD/MIN/SDLB	70,34	
		- SMP/MTs	74,10	
		Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi tingkat provinsi (orang)	2,00	
		Ketersediaan kurikulum nasional dan lokal	100,00	
		Keterlaksanaan kurikulum nasional dan lokal	100,00	
6	Program Manjemen Pelayanan Pendidikan	% lulusan pendidikan vocasional yang diterima pada dunia usaha, industry dan mandiri (Akademi Komunitas)	80,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah SD yang menerapkan pendidikan inklusi	4,00	
		Jumlah SMP yang menerapkan pendidikan inklusi	5,00	
В	Urusan Pemuda dan Olah raga	-		
		Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam PORPROV	10,00	
		Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam POPDA	7,00	
		Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam O2SN SD	11,00	
1	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam O2SN SMP	6,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam O2SN SMA	7,00	
		Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam O2SN SMK	13,00	
		Atlet Kabupaten Solok Selatan yang berprestasi Tingkat provinsi	50,00	
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi	2,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
С	Urusan Kesehatan			
1	Program obat dan perbekalan	% Ketersediaan obat	100,00	Dinas Kesehatan
		Kunjungan rata-rata masyarakat ke pelayanan kesehatan (visite rate)	2,00	
2	Program upaya kesehatan masyarakat	% Praktek tenaga kesehatan swasta yang memenuhi standar kesehatan	100,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya umur harapan hidup	68,19	
3	Program pengawasan obat dan makanan	% Toko obat, apotik dan toko komestik yang memenuhi standar kesehatan	100,00	Dinas Kesehatan
	3 - 1 - 3	% Industri rumah tangga yang memenuhi standar kesehatan	95,00	3-
4	Program pengembangan obat asli industri	Bahan baku yang dihasilkan dan dipergunakan untuk industri farmasi	1,00	Dinas Kesehatan
	Program promosi kesehatan dan	% Kebijakan PHBS	30,00	
5	pemberdayaan masyarakat	% Desa yang memamfaatkan dana desa 10% untuk UKBM	20,00	Dinas Kesehatan
6	Program perbaikan gizi masyarakat	% Gizi buruk	0,03	Discould be
	5 · , · · · · · · · · · · · · · · · · ·	% Balita stunting	9,00	Dinas Kesehatan

		Kinerja	OPD yang	
No	Program Pembangunan	Indikator	Target	bertanggung Jawab
		% Ibu hamil KEK	0,11	
		% Ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah	90,00	
		% Bayi usia kurang 6 bulan yang mendapat ASI eklusif	89,00	
		% Remaja putri yang mendapat tablet tambah darah	25,00	
		% BBLR	0,68	
		% Pendudukakses jamban sehat	81,3	
		% Pendudukakses air minum sehat	90,00	
7	Program pengembangan Lingkungan Sehat	% tempat pengelolaan makanan yang memenuhi standar kesehatan	75,00	Dinas Kesehatan
		Pengahargaan tatanan Kabupaten/Kota sehat		
		% jorong ODF	41,2	
		% Puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui program MTBS	100,00	
		% Keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate)	100,00	
8	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	% Anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	96,00	Dinas Kesehatan
		Angka Penemuan Acude Flacid Paralysis (per 100.000 penduduk usia < 15 Tahun)	1,9	
		Prevalensi Kasus HIV < 0,4 per 1.000 penduduk	0,13	
		% Puskesmas yang melaksanakan pengendalian penyakit Tidak Menular	30,00	
9	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	% Tempat belajar mengajar (sekolah) yang mempunyai peraturan dan bukti Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	40,00	Dinas Kesehatan
10	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	% jorong yang memiliki posyandu santun lansia	40,00	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup	5,1	
		Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100,000 Kelahiran Hidup	160,8	
11	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	% Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan kompilasi (P4K)	80,00	Dinas Kesehatan
		% Ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	85,2	
		% Kunjungnan neonatal lengkap	93,4	
12	Program kesehatan kerja dan olahraga	% Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dan olahraga	30,00	Dinas Kesehatan
10	Program peningkatan sumber daya manusia	Rasio tenaga medis dan tenaga paramedis per 100.000 penduduk (puskesmas, pustu, dan poskesdes)		Dings Koscheten
13	kesehatan	- Dokter	10,2	Dinas Kesehatan
		- Perawat	47,5	
		- Bidan	43,8	

		Kinerja	OPD yang	
No	Program Pembangunan	Indikator	Target	bertanggung Jawab
		% Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (kesling, kefarmasian, gizi, kesehatan masyarakat, dan analisi kesehatan)	100,00	
14	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase informasi kesehatan yang diselenggarakan	100,00	RSUD
15	Program pengadaan. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Jumlah sarana prasarana rumah sakit sesuai dengan standar rumah sakit tipe B	80,00	RSUD
16	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Terpeliharanya sarana dan prasarana Rumah Sakit	100,00	RSUD
		Persentase pemenuhan tenaga kesehatan di rumah sakit tipe B		
17	Program peningkatan mutu pelayanan	- Dokter spesialis (25 orng)	68,00	RSUD
17	rumah sakit	- Dokter umum (21 Orang)	70,00	KOOD
		- Perawat/Bidan ( 200 orang)	100,00	
		- kesiapan Akreditasi JCI (%)	100,00	
		Persentase persediaan darah di rumah sakit	100,00	2012
18	Program upaya kesehatan masyarakat	Ketersediaan opersional BLUD untuk memaksimalkan pelayanan rumah sakit	100,00	RSUD
19	Program koordinasi kesejahteraan sosial	PersentaseTersedianya tanah untuk pengembangan Rumah Sakit Umum	80,00	RSUD
D	Urusan Penunjang Perpustakaan			
	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase Perpustakaan Nagari yang dibina	60,00	
1		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	700,00	Dinas Perpustakaan
•		Penambahan koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah		dan Arsip
		* Jumlah Judul Buku	3.922,00	
		* Jumlah Buku	11.764,00	
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Budaya Baca	Meningkatnya angka melek huruf	99,26	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Е	Urusan Penunjang Kepegawaian			
		Persentase eselonering yang telah mengikuti Diklat Struktural		Badan Kepegawaian
1	Program Pendidikan Kedinasan	-Eselon II	57,00	dan Pembangunan
		-Eselon III	60,00	Sumber Daya Manusia
		-Eselon IV  Persentase Aparatur yang Berijazah Sarjana dan Pasca Sarjana	45,00	
2	Program Peningkatan Kapasitas sumber	- S1	59,00	Badan Kepegawaian
2	Daya Aparatur	- S2	5,74	dan Pembangunan Sumber Daya Manusia
		- \$3	0,14	Cumbor Baya Manada
			0,11	
Prio	ritas 4. Peningkatan Supremasi Hukum dan F	Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daer	ah	
Α	Urusan Pertanahan			
1	Program : Pembangunan Sistem Perdaftaran Pertanahan	Persentase Peningkatan Masyarakat yang mengajukan pendaftaran tanah	20,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan
2	Program : Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan

	Kinerja		OPD yang	
No	Program Pembangunan	Indikator	Target	bertanggung Jawab
В	Urusan Perumahan dan Permukiman			
1	Program pengelolaan areal pemakaman	Terlaksananya pengelolaan areal pemakamam umum (Lokasi)	1,00	Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
С	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dar			
		Rasio Ketersediaan PPNS (minimal 10 Orang)	60,00	
1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio Ketersediaan Satpol PP (Standar Minimal 150-250)	100,00	Satpol PP dan Damkar
		Cakupan Patroli Siaga Tibum dan Tranmas (kali/hari)	2,00	
2	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Satpol PP dan Damkar
3	Program pemberdayaan masyarakat untuk	Persentase Ketersediaan Satlinmas	100,00	Satpol PP dan Damkar
3	menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Satlinmas yang terlatih	40,00	Salpoi FF dan Dankai
4	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase kasus Penyakit Masyarakat yang tertangani	100,00	Satpol PP dan Damkar
5	Program peningkatan kesiagaan dan	Cakupan Layanan	70,00	Satpol PP dan Damkar
3	pencegahan bahaya kebakaran	Respon time (menit)	20,00	Salport i dan Danikai
6	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Rata-rata Parsentase keikut sertaan Satpol PP dalam pelaksanaan kemah bakti sosial	18,00	Satpol PP dan Damkar
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kriminalitas yang tertangani	53,00	Satpol PP dan Damkar
8	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Hari Besar Nasional yang diperingati ditingkat Kab, Kecamatan dan Nagari	56,75	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Situs PDRI yang direvitalisi	2,00	
0	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase penanganan dan penyelesaian konflik sosial	100,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase ORMAS yang aktif	73,33	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
D	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pen	nberdayaan masyarakat desa		
4	Program peningkatan kapasitas aparatur	Persentase aparatur nagari yang memperoleh pelatihan sesuai tupoksi	100,00	Dinas Sosial,
1	pemerintah desa	Jumlah Aparatur Nagari yang berprestasi tingkat Provinsi (orang)	1,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0	Program Pembinaan dan Fasilitasi	Persentase Nagari yang menyusun APB tepat waktu	100,00	Dinas Sosial,
2	Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Nagari yang menyusn Laporan Keuangan tepat waktu	100,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Nagari	Persentase Terlaksananya Profil Nagari Berbasis IT	100,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan
	Nagan	Nagari Berprestasi Tingkat Provinsi	1,00	Masyarakat dan Desa
Е	Urusan Tenaga Kerja			
1	Program Perlindungan Pengembangan	% Kasus perselisihan tenaga kerja yang diselesaikan	100,00	Dinas Tenaga Kerja dan
	Lembaga Ketenagakerjaan	% Kasus peselisihan hubungan industrial	3,5	Transmigrasi
F	Urusan pemberdayaan Perempuan dan Per	lindungan Anak		
1	Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	72,28	Dinas P3A dan P2KB

NI-	Barrer Brook and an and	Kinerja		OPD yang
No	Program Pembangunan	Indikator	Target	bertanggung Jawab
2	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase ketersediaan Perda/ Perbup/ SK KDH mengenai Pelaksanaan PUG dan Pemenuhan Hak Anak	45,00	Dinas P3A dan P2KB
3	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	80,00	Dinas P3A dan P2KB
G	Urusan Pengendalian Penduduk dan Kelua	rga Berencana		
1	Program penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana	% ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB	100,00	Dinas P3A dan P2KB
2	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling	persentase remaja 10 s/d pra nikah dan keluarga remaja yang mendapat pelayanan informasi dan konseling	40,00	Dinas P3A dan P2KB
3	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase pasasangan usia subur sebagai akseptor KB melalui program pemerintahan	55,00	Dinas P3A dan P2KB
4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase PUS sebagai Akseptor KB melalui program mandiri	45,00	Dinas P3A dan P2KB
5	Program Pengembangan Model Opersional BKB,Posyandu-PADU	Terbentuknya dan terbinanya Kelompok BKB Posyandu PADU di setiap Nagari (Kelompok)	80,00	Dinas P3A dan P2KB
Н	Urusan Administrasi Kependudukan dan Ca	atatan Sipil		
		Cakupan penerbitan kartu keluarga	100,00	
		Cakupan penerbitan KTP elektronik	82,00	
1	Program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	75,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Cakupan penerbitan kutipan akta perkawinan	75,00	
ı	Urusan Komunikasi dan Informatika			
1	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika	Persentase Aplikasi Informasi data yang diimplentasikan	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
J	Urusan Statistik			
1	Program Pengembangan data dan informasi statistik daerah	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral yang dipublikasikan	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
K	Urusan Persandian			
1	Program Pengelolaan Persandian Daerah	Persentase OPD yang menyusun SOP Persandian	75,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
L	Urusan Perdagangan			Dingo Dardara area
1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	persentasi pengaduan konsumen yang ditangani	100,00	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UMKM
М	Urusan Arsip			
		Jumlah Arsip daerah yang diselamatkan dan didokumentasikan	25	
1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen dan Arsip Daerah	Persentase OPD yang telah menerapkan Arsip Secara baku	30,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Persentase Nagari yang telah merapkan Arsip Secara baku	54,00	
2	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Implementasi data base informasi kearsipan (e-arsip)	Sudah	Dinas Perpustakaan dan Arsip
N	Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangu	nan		
1	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase Kelengkapan Data dan Informasi untuk Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Bappeda
<u> </u>	<u>L</u>	ı		

NI-	Kinerja		OPD yang	
No	Program Pembangunan	Indikator	Target	bertanggung Jawab
2	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Kerjasama Pembangunan antar lembaga dan swasta yang disepakati	2,00	Bappeda
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan rutin SKPD yang tepat waktu	100,00	Bappeda
		Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100,00	
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	100,00	Bappeda
		Persentase pencapaian kinerja perencanaan daerah	90,00	
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan Penganggaran	100,00	Bappeda
6	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dengan Penganggaran	100,00	Bappeda
		Tingkat Penghargaan Kabupaten Sehat		
7	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Terciptanya Sistem Perencanaan yang Terintegrasi antar Fungsi Pemerintah (dokumen)	2,00	Bappeda
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Konsistensi antara Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan	100,00	Bappeda
0	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengemb			
1	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah	100,00	Bappeda
Р	Fungsi Penujang keuangan			
		Opini BPK	WTP	
1	Program pengembangan pengelolaan	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran	100,00	Badan Pengelola
•	keuangan daerah	Persentase pelaporan keuangan nagari dan PPKD yang sesuai aturan	100,00	Keuangan Daerah
Q	Funnsi Danumiana Kanagawaian	Persentase pencapaian target PAD	100,00	
Q	Fungsi Penunjang Kepegawaian			
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai bidang keahlian berdasarkan analisa jabatan	60,00	Badan Kepegawaian dan Pembangunan
	, parata	Perentse penyelesaian Kasus pelanggaran disiplin	90,00	Sumber Daya Manusia
2	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas ASN	persentase aparatur purna tugas yang diberikan pembekalan	50,00	Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia
		Jumlah penyelesaian SK pensiun dan taspen	90,00	
R	Urusan Penunjang Pelayanan Pemerintahan			
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peringkat Camat Berprestasi tingkat provinsi	3,00	Sekretariat Daerah
2	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase layanan kedinasan KDH yang terfasilitasi	100,00	Sekretariat Daerah
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LAKIP / SAKIP	В	Sekretariat Daerah

	Kinerja		OPD yang	
No	Program Pembangunan	Indikator	Target	bertanggung Jawab
4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah penghargaan untuk mencapai ISO (17 Penghargaan)	17,00	Sekretariat Daerah
	Teknologi informasi	Jumlah ISO 9002		
5	Program Instensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan yang tertangani	100,00	Sekretariat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah tepat Struktur dan tepat Fungsi	100,00	
6	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah segmen batas kecamatan dan Dokumen batas	7,00	Sekretariat Daerah
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Jabatan Tepat Jumlah dan Tepat Kompetensi	90,00	Sekretariat Daerah
		Rata-rata Persentase Pencapaian SPM per urusan	80,00	
8	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik	Sekretariat Daerah
	i engawasan	Persentase Penetapan SOP pelayanan OPD	100,00	Sekretariat Daerah
9	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Administrasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Persentase pencapaian kinerja SKPD	95,00	Sekretariat Daerah
10	Program Penataan Peraturan Perundang-	Terfasilitasinya penyusunan Produk hukum daerah	100,00	Columbiat Down
10	undangan	Prestasi Kelompok Sadar Hukum tingkat provinsi	5,00	Sekretariat Daerah
11	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase stake holder barang dan jasa yag dibina	100,00	Sekretariat Daerah
		Persentase realisasi pengadaan		
		barang dan jasa	100,00	
	Program Pengembangan Pengadaan	Lelang Pengadaan Langsung	100,00	
12	Barang dan Jasa		100,00	Sekretariat Daerah
		Penunjukan langsung Swakelola		
			100,00	
13	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	E-Catalog  persentase media lokal yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	100,00	Sekretariat Daerah
14	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasi	100,00	Sekretariat Daerah
15	Program Pelayanan Protokoler Pemerintah daerah*)	Terfasilitasinya acara keprotokoleran	100,00	Sekretariat Daerah
16	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	persentase kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	60,00	Sekretariat Daerah
17	Program peningkatan kapasitas lembaga	Presentase Jumlah Ranperda usulan Pemda yang dibahas DPRD yang menjadi Perda	100,00	Sekretariat DPRD
	perwakilan rakyat daerah	Presentase Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD yang menjadi Perda (target 2 pertahun)	100,00	
18	Program peningkatan sumber daya aparatur	Persentase ketersediaan auditor dan P2UPD sebagai Auditor	57,17	Inspektorat
	Drogram popingkatan pangambangan sistem	Peningkatan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah	WTP	
19	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP/SAKIP	В	Inspektorat
	регаротан сараган кinerja dan keuangan	Persentase pelaporan keuangan nagari yang sesuai dengan aturan	100,00	

	Kinerja		OPD yang	
No	Program Pembangunan	Indikator	Target	bertanggung Jawab
20	Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan.	60,00	Inspektorat
21	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100,00	Inspektorat
22	Program peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	III dengan catatan	Inspektorat
23	fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase penyelesaian masalah- masalah pemerintahan kecamatan	100,00	Kecamatan
23	Fasilitasi dan Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase penyelesaian masalah- masalah ketentraman dan ketertiban	100,00	Kecamatan
25	Fasilitasi dan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penyelesaian masalah- masalah ekonomi dan pembangunan	100,00	Kecamatan
26	Fasilitasi dan Koordinasi Sosial dan Budaya	Persentase pelaksanaan kegiatan sosial budaya tingkat kecamatan	100,00	Kecamatan
27	Program Pelayanan administrasi Terpadu	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan tingkat kecamatan	100,00	Kecamatan
Drio	ritas 5. Peningkatan partisipasi multistakeho	alder dalam proces nombangunan		
A	Urusan Pemuda dan Olahraga	older dalam proses pembangunan		
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase organisasi kepemudaan aktif	15,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
В	Urusan Perumahan dan Permukiman			-
1	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Rata-rata persentase Swadaya masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar	10,00	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup
С	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Des			<u> </u>
	Program Peningkatan Keberdayaan	Persentase Rata -Rata Alokasi Dana Desa	10,00	Dinas sosial,
1	Masyarakat Perdesaaan	Perbandingan Teknologi tepat guna yang dimamfaatkan dan dihasilkan (%) % Kelompok BP-SPAM Aktif	20,00 80,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Kelompok swadaya masyarakat aktif	30,00	
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi	% KJKS Aktif	100,00	Dinas sosial, Pemberdayaan
	Pedesaan	% Kelompok SPP Aktif	100,00	Masyarakat dan Desa
		Persentase Nagari yang memiliki Badan Usaha Milik Nagari	51,28	
3	Program peningkatan partisipasi masyarakat	Persentase minimal Dana Nagari yang digunakan dengan pola partisipatif	60,00	Dinas sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
D	Urusan pemberdayaan Perempuan dan Per	lindungan anak		ļ
1	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	43,89	P3A,P2KB
Е	Urusan Penunjang Pelayanan Pemerintaha	n		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	100,00	Kecamatan
Dric	 <mark>ritas 6.   Peningkatan Produktivitas dan Daya</mark>	Saing Dalam Pengelalaan SDA yang Be	arwawasan Li	nakunaan
		Saling Dalam Fengelolaan SDA yang Be	erwawasan Lii	пукинуан
Α	Urusan Pemuda dan Olahraga			
1	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah wirausahawan baru yang dipelopori oleh pemuda	10,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Kewirausahaan Kecakapan Hidup Pemuda	dipelopori oleh pemuda	.5,50	Pemuda da

		Kinerja		OPD yang
No	Program Pembangunan	Indikator	Target	bertanggung Jawab
В	Urusan Lingkungan Hidup			
1	Program Pengembangan Kinerja	Jumlah timbulan sampah yang dikelola (M3)	28.000	Dinas Perumahan Pemukiman dan
	Pengelolaan Persampahan	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	45,00	Lingkungan Hidup
		Penghargan Adipura	-	
0	Program Pengendalian Pencemaran dan	Persentase Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan	17,00	Dinas Perumahan
2	Perusakan Lingkungan Hidup	% Tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	100,00	Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Persentase nagari yang mengikuti program kampung iklim (PROKLIM)	7,00	Dinas Perumahan
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	jumlah kawasan DAS yang ditangani	1,00	Pemukiman dan
	Gamson Bayar nam	Jumlah objek penggunan jasa lingkungan	1,00	Lingkungan Hidup
4	Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah kawasan yang direhabilitasi	1,00	Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan	% Sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi	13,00	Dinas Perumahan Pemukiman dan
	Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan data pokok LH	60,00	Lingkungan Hidup
6	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Ambang baku kualitas udara (Ambient)	65,00	Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
7	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi hutan	jumlah objek ekowisata dan jasa lingkungan	1,00	Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		jumlah kasus kebakaran hutan	0	Dinas Perumahan
8	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	ketersediaan sarana dan prasarana dasar pemadam kebakaran hutan	1,00	Pemukiman dan Lingkungan Hidup
9	Program Pengelolaan Ruang Terbuka hijau	Jumlah lokasi RTH	1,00	Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
С	Urusan Tenaga Kerja			
1	Program peningkatan kualitas dan	jumlah tenaga kerja terampil yang dibina (orang)	240,00	Dinas Tenaga Kerja dan
•	produktifitas tenaga kerja	Rata-rata RTM yang mendapat pelatihan keterampilan kerja (RTM)	50,00	Transmigrasi
2	Program peningkatan kesempatan kerja	Meningkatnya tingkat partisipasi angakatan kerja (TPAK) (%)	68,68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Trogram peningkatan kesempatan kerja	Menurunkan tingkat pengangguran (%)	5,70	
D	Urusan Kelautan Dan Perikanan			
1	Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi budidaya sebesar 20%/ tahun (ton)	1.340,00	Dinas Ketahanan
'	Tongombangan budidaya Felikalian	Rata-rata RTM penerima bantuan usaha ekonomi di bidang perikanan	20,00	Pangan dan Perikanan
		jumlah kelembagaan dan kelompok Perikanan :		
2	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Pokmaswas	12,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	- Cinalian	Pokdakan	25,00	Pangan dan Perikanan
		Orang pelaku usaha	110,00	

		Kinerja		OPD yang
No	Program Pembangunan	Indikator	Target	bertanggung Jawab
3	Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan	Meningkatnya tingkat konsumsi ikan dan jaminan keamanan pangan produk perikanan (kg/kapita)	21,50	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Е	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan UMKM			
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	persentase koperasi aktif	60,00	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UMKM
2	Program penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif	Jumlah UMKM yang dibina	80,00	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UMKM
3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif UKM	Jumlah pengelola UMKM yang mengikuti pelatihan diklat dan bimtek (orang)	146,00	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UMKM
4	Program Pengembangan Sistem pendukung usaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan	50,00	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UMKM
F	Urusan Perindustrian			
4	Program Pengembangan Industri Kecil dan	Jumlah IKM	583,00	Dinas Perdagangan,
1	Menengah	Jumlah IKM yang mengekspor produk keluar daerah	6,00	perindustrian, Koperasi dan UMKM
		Jumlah IKM yang difasilitasi dalam peningkatan kemampuan teknologinya	5,00	
2	Program Peningkatan Kemampuan	Jumlah IKM yang telah menerapkan Good Hygiene Practices (GHP)	2,00	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi
2	Teknologi Industri	Jumlah IKM yang telah mendapat HAKI	20,00	dan UMKM
		Jumlah IKM yang telah mendapat Sertifikat Halal	29,00	
3	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah dokumen Database Industri Kabupaten	1,00	Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UMKM
G	Urusan Penanaman Modal			
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan	peningkatan Realisasi Investasi per tahun PMDN (Rp.juta)	180.000	Dinas Penanaman
'	Realisasi Investasi	peningkatan Realisasi Investasi per tahun PMDN PMA(\$ ribu)	76.922	Modal dan PTSP
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumah investor yang yang menanamkan investasi	2,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah dokumen potensi investasi	1,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Н	Urusan Energi, dan Sumber daya Mineral			
1	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	persentase kelompok pemamfaatan energi terbarukan aktif	71,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
ı	Urusan Pariwisata			
		objek wisata unggulan	3,00	
1	Pengembangan Destinasi Pariwisata	objek wisata yang dikelola oleh Nagari/Pokdarwis	16,00	Dinas Pariwisata
		event nasional	2,00	
		event internasional	2,00	
2	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	kunjungan wisatawan domestik (orang)	4.000	Dinas Pariwisata
		kunjungan wisatawan Internasional (orang)	600	
3	Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pokdarwis	16,00	Dinas Pariwisata

		Kinerja		OPD yang	
No	Program Pembangunan	Indikator	Target	bertanggung Jawab	
4	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tanah objek wisata yang bersertifikat	7,60	Dinas Pariwisata	
J	Urusan Pertanian				
		Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan unggulan			
		Produksi Padi	143.625		
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi Jagung	59.088	Dinas Pertanian	
	T GROBUIAN	Produksi Kopi	1.775		
		Produksi Tanaman Karet	13.142		
		Produksi Tanaman Sawit	2.815		
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Terjaminnya kecukupan pangan (swasembada pangan) (ton)	81.250	Dinas Pertanian	
		Meningkatnya produktifitas pertanian dan perkebunan unggulan			
		Padi (ton/ha)	5,02	Dinas Bertenies	
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Jagung (ton/ha)	3,71	Dinas Pertanian	
	i Citalilali/ i Ginebullali	Kopi (ton/ha)	0,71		
		Tanaman Karet (ton/ha)	0,80		
		Tanaman Sawit (ton/ha)	1,39	Dinas Pertanian	
4	Program Pemberdayaan Penyuluhan/ Perkebunan Lapangan	% Ketersediaan Peyuluh pertanian	56,76	Dinas Pertanian	
	Program peningkatan penerapan teknologi	Jumlah Produksi Daging (ton/tahun)	480,37	· ·	
5	petemakan	Telur (ton/tahun)	82,76	Dinas Pertanian	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah ternak besar (ekor)	18.179	Dinas Pertanian	
6		jumlah ternak kecil (ekor)	8.812		
		jumlah Unggas (ekor)	121.264		
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan di masyarakat dan menurunnya penyakit ternak menular	100	Dinas Pertanian	
	<del>-</del>	angka pengangguran serta pengentasa	n daerah tertii	nggal.	
Α	Urusan Pendidikan				
		Peningkatan sarana prasarana pendidikan SD/MI			
		% Bangunan SD/MI berkondisi baik	80,26		
		Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD/MI	1 : 18		
		% Ruang Kelas SD/MI berkondisi rusak berat	3,98		
		% sekolah yang memiliki Ruang Perpustakaan SD /MI	81,01		
1	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	% sekolah yang memiliki sarana olahraga SD/MI	64,99	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		% sekolah yang memiliki sarana sanitasi baik SD/MI	64,50	r cindda dan Ciamaga	
		Peningkatan sarana prasarana pendidikan SMP/MTs			
		% Bangunan SMP/MTs berkondisi baik	85,14		
		Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SMP/MTs	1 : 21		
		% Ruang Kelas SMP/MTs berkondisi rusak berat	7,86		

		Kinerja		OPD yang
No	Program Pembangunan	Indikator	Target	bertanggung Jawab
		% sekolah yang memiliki Ruang Perpustakaan SMP/MTs	92,10	
		% sekolah yang memiliki sarana olahraga SMP/MTs	80,01	
		% sekolah yang memiliki sarana sanitasi baik SMP/MTs	74,51	
		% sekolah yang memiliki tempat beribadah SMP/MTs	89,99	
		% sekolah yang memiliki Laboratorium IPA SMP/MI	80,55	
		Persentase Sekolah yang menerapkan proses belajar dengan menggunakan TIK	20,00	
В	Urusan Pemuda dan Olahraga			
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Nagari yang memiliki gelanggang/sarana olahraga	89,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
С	Urusan Kesehatan			
1	Program standarisasi Pelayanan Kesehatan	% Puskesmas yang terakreditasi	100,00	Dinas Kesehatan
		% Puskesmas rawatan	100,00	
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas. puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio Ketersediaan Puskesmas (Per 30.000 Penduduk)	1,69	
2		Rasio Ketersediaan Puskesmas Pembantu (Per 5.000 Penduduk)	1,37	Dinas Kesehatan
		Rasio Ketersediaan Poskesdes (Per.2.500 Penduduk)	2,3	
3	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	% masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan	90,00	Dinas Kesehatan
С	Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
1	Program : Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh	Keluar dari status daerah tertinggal	Belum	Dinas PU dan Tata Ruang
2	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kabupaten yang dibangun (KM) Jumlah Jembatan yang dibangun	10,00	Dinas PU dan Tata Ruang
		(Unit)	7,00	9
3	Program : Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Penambahan jalan Non Status yang dibangun (Km)	57,00	Dinas PU dan Tata Ruang
4	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan	Perkuatan Tebing (Titik)	8,00	Dinas PU dan Tata
7	Pengairan Lainnya	Pengendalian Banjir (Titik)	8,00	Ruang
D	Urusan Perumahan dan Pemukiman			
1	Program Pengembangan Perumahan	Rata-rata rumah tangga miskin yang mendapat bantuan bedah rumah (RTM)	300,00	Dinas Perumahan Pemukiman dna Lingkungan Hidup
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Kawasan Permukiman kumuh (Kawasan)	2,00	Dinas Perumahan Pemukiman dna
		Akses Sanitasi Layak	53,73	Lingkungan Hidup
3	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase rumah akibat bencana yang dibantu	100,00	Dinas Perumahan Pemukiman dna Lingkungan Hidup
Ε	Urusan Ketentraman, Ketertibang Umum da	n Perlindungan masyarakat		,
1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Nagari Tangguh Bencana	64,10	BPBD
2	Program peningkatan kesipsiagaan bencana	persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan benacana	81,00	BPBD

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pembangunan Menangkanan Parkir Miskin, Komunitas Adat Tereponi (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Masalah Sosial (PMKS) Lalinnya (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Masalah Sosial (PMKS) Lalinnya (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Masalah Sosial (PMKS) Lalinnya (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lalinnya (KAT) dan Penbandayaan Rekembagaan Pembandunan Menangkanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lalinnya (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lalinnya (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lalinnya (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) (KAT) dan Penyandangan Kesejahteraan Sosial (PMKS) (KAT) dan Penyandangan Kesejahteraan Sosial (PMKS) (KAT) dan Penyandangan Kesejahteraan Sosial (PMKS) (KAT) (KA		Kinerja		OPD yang	
Percentase pendudikan kesejahteran Sosial   Percentase pendudikan kesejahteran Sosial   Program Pengembangan Milayah   Persentase pendudik bekerja yang membanganan Kesejahteran Masalah Sosial (Sosial Kesejahteran Masalah Sosial (PMKS)   Rata-rata rumah tangga miskin yang mendapat bantuan bedah rumah (RTM) (APD-APBN)   Dinas Sosial dan PMD (RTM) (RTM) (RTM) (RTM)   Dinas Sosial dan PMD (RTM) (RTM) (RTM) (RTM)   Dinas Sosial dan PMD (RTM) (RTM) (RTM) (RTM)   Dinas Sosial dan PMD (RTM) (RTM) (RTM) (RTM) (RTM) (RTM)   Dinas Sosial dan PMD (RTM)	No	Program Pembangunan	Indikator	Target	
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adal Teppencil (KAT) dan Penyandang Keegiahteraan Masalah Sosial (PMKS) alar-ata rumah tangga miskin yang Keegiahteraan Masalah Sosial (PMKS) alar-ata rumah tangga miskin yang mendapat bantuan bedah rumah (RTM) (APB-D-APBN) alar-ata rumah tangga miskin yang mendapat bantuan bedah rumah (RTM) (APB-D-APBN) alar-ata rumah tangga miskin yang mendapat bantuan bedah rumah (RTM) (APB-D-APBN) alar-ata rumah tangga miskin yang mendapat bantuan Sosial and PMD Persentase PMKS yang mendapat bantuan Sosial dan PMD Persentase penduduk bekerja yang mendapat yang dipatat yang mendapat yang yang persentase kesiapan pembangunan kPB  Program pengendalian penduduk Malarga Berencana  Program pengendalian penduduk Malarga Berencana  Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengapan Hapapan (%) Jurusan Pendapan yang dipatah yang mengikuti program KB (ribu jiwa)  Pengapatan Cadangan Pangan (ton) 185,00  Dinas P3A dan P2KB Pengapatan Cadangan Pangan (ton) 185,00  Dinas Pangan dan Perikanan Pangan Pengapan pengenbangan kawa dipatah yang dibina pendapan yang pengapan pengapan yang pengapan yang dibina pendapan yang diterima	3		rekonstruksi fasilitas umum yang di	65,00	BPBD
Terpenci (kAT) dan Penyandang Terpenci (kAT) dan Penyandang Terpenci (kAT) dan Penyandang Terpenci (kAT) dan Penyandang Rata-rata rumah tangga miskin yang mendapat bantuan bedah rumah (RTM) (kAPD-APBN) Penyanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase penungangan yang resposif difabel Persentase penungangan yang resposif difabel Persentase penungangan yang resposif difabel Persentase penungangang kesejahteraan Sosial yang mendapat Bantuan Sosial Persentase penungangang yang resposif difabel Persentase penungangang kesejahteraan Sosial yang berpartisipsa dalam peningkatan kesejahteraan Sosial Persentase penduduk bekerja yang membayar zakat melalui Bazruan Persentase penduduk bekerja yang membayar yakat pentungan Persentase penduduk bendian penduduk derima pentungan Persentase penduduk bekerja yang membayar yakat pentungan Persentase penduduk bendian penduduk derima pentungan Persentase penduduk betar penduduk derima pentungan Persentase penduduk bendian penduduk derima pentungan	F	Urusan Sosial			
Kesejahteraan Masalah Sosial (PMKS)   Rata-rata truman langgar mism, yang mendapat bahuan bedah rumah (KTM) (APBO-APBN)	4		Sosial (standar 66 Orang)	100,00	Diago Contal day DMD
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Presentase gedung/fasum yang resposif difabel Persentase gedung/fasum yang resposif difabel Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial yang berpartisipasi dalam Sosial yang berpartisipasi dalam PMD Persentase penduduk bekerja yang membagan Kesejahteraan Sosial Persentase penduduk bekerja yang membagan Kesejahteraan Sosial Persentase penduduk bekerja yang membagar zakat melalui Baznas 8.00 Dinas Sosial dan PMD Persentase Penduduk bekerja yang membagan Zenat melalui Baznas Persentase Penduduk Dekerja yang membagan Zenat Persentase kesiapan pembangunan KPB Dinas Pandan Persentase Keluarga Sejahtera (%) 93.19 Dinas Pandan Persentase Keluarga Pangan (ton) 185.00 Dinas Katahanan Pangan Cadangan Pangan (ton) 185.00 Dinas Katahanan Pangan Cadangan Pangan (ton) 185.00 Dinas Kertahanan Persentase Persentase Kelersediaan Dermaga Sampan Bermotor yang layak (3 33.33 Dinas Perhubungan Dermaga Sampan Bermotor yang layak (3 33.33 Dinas Perhubungan Pergaman Pendangan Kemindasi dan Persentase Perbubungan Pergaman Pendangan Kemindasi dan Unduk Pergaman Pendangan Kemindasi dan Unduk Pergaman Peningkatan Kemasaran Hasil Produksi Pertanian Persentasan Hasil Meningkatnya indek harga yang	1	Kesejahteraan Masalah Sosial (PMKS)	mendapat bantuan bedah rumah (RTM) (APBD+APBN)	109,00	Dinas Sosiai dan PMD
Persentase gedung/fasum yang resposed ifdabel resposed ifdabel persentase gedung/fasum yang perpartispasi dalam peningkatan kesejahteraan Sosial yang berpartispasi dalam peningkatan kesejahteraan Sosial yang berpartispasi dalam peningkatan kesejahteraan Sosial yang membayar zakat melalui Baznas penduduk bekerja yang membayar zakat melalui Baznas pengengangan Wilayah Persentase kesiapan pembangunan XPB yangan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Pergam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Pergam pemberdayaan dan kesejahteraan Meningkatnya Keluarga Sejahtera (%) 93,19 Dinas P3A dan P2KB yangam pembardayaan dan kesejahteraan yangan Usia subur yang mengkuti program KB (ribu jiwa) 30,474 Dinas P3A dan P2KB yangam Pengam Peningkatan Ketahanan Pangan Penganan Usia subur yang mengkuti program KB (ribu jiwa) 30,474 Dinas P3A dan P2KB yangam Pengam Peningkatan Ketahanan Pangan Pengasian Skor Pola Pangan Harapan (%) Pengaran Peningkatan Ketahanan Pangan Persentase Ketersediaan Dermaga Sampan Bermotor yang layak (3 33,33 Dinas perhubungan Prasarana Perhubungan Persentase Ketersediaan Dermaga Sampan Bermotor yang layak (3 33,33 Dinas perhubungan Dinas Perdagangan Pergam pembinaan pedagang kaki lima yang dibina garan perdagangan Pe	2	,		35,00	Dinas Sosial dan PMD
Sosial yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan Sosial masyarakat   Persentase penduduk bekerja yang membayar zakat melalul Baznas   8,00   Persentase penduduk bekerja yang membayar zakat melalul Baznas   8,00   Persentase penduduk bekerja yang membayar zakat melalul Baznas   8,00   Persentase penduduk bekerja yang membayar zakat melalul Baznas   8,00   Persentase kesiapan pembangunan   20,00   Dinas Tenaga Kerja dar Transmigrasi   Program Pengembangan Wilayah   Persentase kesiapan pembangunan   20,00   Dinas Tenaga Kerja dar Transmigrasi   Program pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak   Persentase kesiapan pembangunan   20,00   Dinas Tenaga Kerja dar Transmigrasi   Program pemberdayaan dan kesejahteraan   Meningkatnya Keluarga Sejahtera (%)   93,19   Dinas P3A dan P2KB   Pergam pengendalian penduduk   Pengapanan   Usia subur yang mengikuti program KB (ribu jiwa)   30,474   Dinas P3A dan P2KB   Pengaman Pengangan   Pengapan   Pengapanan   Persentase Ketersediaan Dermaga   33,33   Dinas Perhubungan   Dinas Perhubungan   Pergaman Penbangunan Sarana dan   Persentase Ketersediaan Dermaga   33,33   Dinas Perhubungan   Pergaman Penbangunan   Pergaman Penbangunan   Pergaman Penbangunan   Pergaman Penbangunan   Pergamananan   Pergamanananan   Pergamananan   Pergamanananananananananananananananananana		Sosial	resposif difabel	20,00	Billao Gosiai dali i WB
membayar zakat melalui Baznas   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	3		Sosial yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan Sosial masyarakat	3,00	Dinas Sosial dan PMD
Pergram Pengembangan Wilayah   Persentase kesiapan pembangunan   20,00   Dinas Tenaga Kerja dar Transmigrasi		, in the second		8,00	
H Urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	G				
Program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Berencana   Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   Jumlah Pasangan Usia subur yang mengkutip program KB (ribu jiwa)   30.474   Dinas P3A dan P2KB   Jumlah Pasangan Usia subur yang mengkutip program KB (ribu jiwa)   30.474   Dinas P3A dan P2KB   Jumlah Pasangan Usia subur yang mengkutip program KB (ribu jiwa)   30.474   Dinas P3A dan P2KB   Jumlah Pasangan Usia subur yang mengkutip program KB (ribu jiwa)   30.474   Dinas P3A dan P2KB   Jumlah Pasangan Usia subur yang mengkutip program KB (ribu jiwa)   30.474   Dinas P3A dan P2KB   Jumlah Pasangan Usia subur yang mengkutip program KB (ribu jiwa)   30.474   Dinas P3A dan P2KB   Jumlah Pasangan Usia subur yang mengkutip program KB (ribu jiwa)   468.28   Dinas Katahanan pangan dan Perikanan Parasaran Perhubungan   Persentase Ketersediaan Dermaga Sampan Bermotor yang layak (3 33,33   Dinas perhubungan   Dinas Perdagangan   D	1	Transmigrasi	KPB	20,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
I Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   Jumlah Pasangan Usia subur yang mengengalian penduduk   Jumlah Pasangan Usia subur yang mengengalian penduduk   Jumlah Pasangan Usia subur yang mengengan   Jumlah Pasangan Usia subur yang mengengan katahanan pangan dan Perikanan   Jumlah Pasangan Pangan (ton)   Jumlah Pasangan Pangan (ton)   Jumlah Pasangan Pangan (ton)   Jumlah Pasangan Pamangan (ton)   Jumlah Pasangan Pamangan Barmotor yang layak (3	Н	Urusan pemberdayaan Perempuan dan Perl	indungan anak		
1 Program pengendalian penduduk Jumlah Pasangan Usia subur yang mengikuti program KB (ribu jiwa) 30.474 Dinas P3A dan P2KB  J Urusan Pangan  Program Peningkatan Ketahanan Pangan Harapan (%) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (%) Penguatan Cadangan Pangan (ton) 185,00  K Urusan Perhubungan  Program Pembangunan Sarana dan Parsarana Perhubungan Prasarana Perhubungan Dermaga Sampan Bermotor yang layak (3 Dermaga)  L Urusan Komunikasi dan Informatika  Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Jumlah blank spot di area pemukiman Informatika Informatika Program pembinaan pedagang kaki lima Informatika Imaha pedagang kakil lima yang dibina Rata-rata RTM penerima bantuan usaha ekonomi di bidang perdagangan  N Urusan Pertanjah Pertanjah Pergram Peningkatan Kesejahteraan Petani Nilai Tukar Petani 100,00 Dinas Pertanjah Dinas Pertanjah Produksi Pertanjan/Perkebunan diterima petani 112,21  Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Petrenianan/Perkebunan diterima petani Meningkatnya indek harga yang diterima petani Produksi Peternakan Pembangunan Menurunkan Angka Kemiskinan 6,92 Bappeda	1		Meningkatnya Keluarga Sejahtera (%)	93,19	Dinas P3A dan P2KB
Trusan Pengangan  Program Peningkatan Ketahanan Pangan  Pencapaian Skor Pola Pangan  Pengangan Peningkatan Ketahanan Pangan  Pengangan Pengangan (%)  Penguatan Cadangan Pangan (ton)  Persentase Ketersediaan Dermaga Sampan Bermotor yang layak (3 Dermaga)  Dinas Katahanan pangan dan Perikanan  Prasarana Perhubungan  Persentase Ketersediaan Dermaga Sampan Bermotor yang layak (3 Dermaga)  Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan  Dinas Komunikasi dan Informatika  Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa  Murusan Perdagangan  Program pembinaan pedagang kaki lima  Program pembinaan pedagang kaki lima  Dinas Komunikasi dan Informatika Importatika Importati	1	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluar	ga Berencana		
Pencapaian Skor Pola Pangan 68,28 Penguatan Cadangan Pangan (ton) 185,00    Penguatan Cadangan Pangan (ton) 185,00   Penguatan Cadangan Pangan Penbangunan 100 penguatan Pangan Penguatan Pen	1	Program pengendalian penduduk		30.474	Dinas P3A dan P2KB
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	J	Urusan Pangan			
Penguatan Cadangan Pangan (ton)   185,00	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		68,28	
Program Pembangunan Sarana dan Persentase Ketersediaan Dermaga Sampan Bermotor yang layak (3 Dermaga)  L Urusan Komunikasi dan Informatika  1 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa  M Urusan Perdagangan  1 Program pembinaan pedagang kaki lima  1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Petanian/Perkebunan  3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan  4 Program Penenaganan Pembangunan  Dinas Perdagangan perindustrian, Koperasi dan UMKM  Dinas Perdagangan perindustrian, Koperasi dan UMKM  Dinas Perdagangan perdagangan perindustrian, Koperasi dan UMKM  Dinas Perdagangan perdagangan pernasi perdagangan perindustrian, Koperasi dan UMKM  Dinas Perdagangan perdagangan pernasi petani  Dinas Pertanian			Penguatan Cadangan Pangan (ton)	185,00	Famigani aanii aanii
1 Program Permoangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan  Sampan Bermotor yang layak (3 Dermaga)  Sampan Bermotor yang layak (3 Sermaga)  33,33 Dinas perhubungan  Dinas perhubungan  Jumlah blank spot di area pemukiman la Lokasi Informatika  Jumlah blank spot di area pemukiman la Lokasi Informatika  M Urusan Perdagangan  Program pembinaan pedagang kaki lima  Jumlah pedagang kakil lima yang dibina  Rata-rata RTM penerima bantuan usaha ekonomi di bidang perdagangan  N URUSAN PERTANIAN  Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan  Meningkatnya indek harga yang diterima petani  Program Penerananan Pembangunan  Meningkatnya indek harga yang diterima petani  Menurunkan Angka Kemiskinan  Menurunkan Angka Kemiskinan  Menurunkan Angka Kemiskinan	K	Urusan Perhubungan	I		
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa  Jumlah blank spot di area pemukiman  To Lokasi  Dinas Komunikasi dan Informatika  M Urusan Perdagangan  Jiumlah pedagang kakil lima yang dibina  Rata-rata RTM penerima bantuan usaha ekonomi di bidang perdagangan  Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan  Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan  Meningkatnya indek harga yang diterima petani  Menurunkan Angka Kemiskinan  6,92  Bappeda	1		Sampan Bermotor yang layak (3	33,33	Dinas perhubungan
M Urusan Perdagangan  Program pembinaan pedagang kaki lima    Program pembinaan pedagang kaki lima	L	Urusan Komunikasi dan Informatika			T
Jumlah pedagang kakil lima yang dibina  Program pembinaan pedagang kakil lima  Rata-rata RTM penerima bantuan usaha ekonomi di bidang perdagangan  N URUSAN PERTANIAN  Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan  Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan  Meningkatnya indek harga yang diterima petani  Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UMKM  Meningkatnya indek harga yang diterima petani  Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UMKM	1		Jumlah blank spot di area pemukiman	10 Lokasi	
1 Program pembinaan pedagang kaki lima Rata-rata RTM penerima bantuan usaha ekonomi di bidang perdagangan  N URUSAN PERTANIAN  1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani 100,00  Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Neningkatnya indek harga yang diterima petani	M	Urusan Perdagangan	1		I
usaha ekonomi di bidang perdagangan 20,00 dan UMKM  N URUSAN PERTANIAN  1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Nilai Tukar Petani 100,00  2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan diterima petani 112,21  3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Meningkatnya indek harga yang diterima petani 107,11  O Urusan Perencanaan Pembangunan Menurunkan Angka Kemiskinan 6,92  Bappeda	1	Program namhingan nodagang kaki lima	dibina	100,00	
N       URUSAN PERTANIAN         1       Program Peningkatan Kesejahteraan Petani       Nilai Tukar Petani       100,00         2       Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan       Meningkatnya indek harga yang diterima petani       112,21         3       Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan       Meningkatnya indek harga yang diterima petani       107,11         0       Urusan Perencanaan Pembangunan       Menurunkan Angka Kemiskinan       6,92         1       Program Perencanaan Pembangunan       Menurunkan Angka Kemiskinan       6,92	ı	Program pembinaan pedagang kaki lima	usaha ekonomi di bidang	20,00	
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Meningkatnya indek harga yang diterima petani  Produksi Pertanian/Perkebunan  Meningkatnya indek harga yang diterima petani  Meningkatnya indek harga yang diterima petani  Meningkatnya indek harga yang diterima petani  O Urusan Perencanaan Pembangunan  Program Perencanaan Pembangunan  Menurunkan Angka Kemiskinan  6,92  Bappeda	N	URUSAN PERTANIAN			
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya indek harga yang diterima petani 112,21  Program Peningkatan Pemasaran Hasil Meningkatnya indek harga yang diterima petani 107,11  Urusan Perencanaan Pembangunan Menurunkan Angka Kemiskinan 6,92  Bappeda	1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	100,00	Dinas Pertanian
Produksi Peternakan diterima petani 107,11  O Urusan Perencanaan Pembangunan  Program Perencanaan Pembangunan Menurunkan Angka Kemiskinan 6,92  Bappeda	2			112,21	
Program Perencanaan Pembangunan Menurunkan Angka Kemiskinan 6,92 Bappeda	3			107,11	
Program Perencanaan Pembangunan Menurunkan Angka Kemiskinan 6,92 Bappeda	0	Urusan Perencanaan Pembangunan			
Bappeda			Menurunkan Angka Kemiskinan	6.92	
monarament iniginal original out of	1		Menurunkan Angka Pengangguran	5,70	Bappeda

NI-	Durante Daniela anno an	Kinerja		OPD yang
No	Program Pembangunan	Indikator	Target	bertanggung Jawab
		Keluar dari status daerah tertinggal (belum/sudah)	belum	
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Nagari Tertinggal Daerah Tertinggal (Tahun 2019)	28,21	
2		Tercapainya Universal Access Tahun 2019 (100-0-100)		Bappeda
		- Akses Air minum layak (%)	72,00	
		- Pemukiman Kumuh (lokasi)	2,00	
		- Akses Sanitasi Layak (%)	53,55	
3	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase pencapaian target RAD SDGs	90,00	Bappeda
Р	Urusan Penunjang Pelayanan Pemerintahar			
1	Fasilitasi dan Koordinasi Sosial dan Budaya	persentase penyaluran beras raskin	100,00	Kecamatan

# BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berpijak kepada Visi dan Misi Daerah dilanjutkan dengan Prioritas serta Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 dan capaian kinerja RPJMD sampai tahun 2016, sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya serta perkiraan perkembangan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017, maka disusunlah matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Berdasarkan OPD/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan. Selengkapnya disajikan pada Tabel 5.1.

187

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019
BERDASARKAN OPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN	4	5	6	7
1	1.01	OLAHRAGA URUSAN PENDIDIKAN			22,309,902,994	22,310,002,99
	1.01	Program Pelayanan Administrasi			17,070,418,994	17,855,642,99
	1.01-1	Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100	1,753,320,396	1,753,320,39
	1.01-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon,	12 bulan 12 bulan	3,000,000 50,400,000	3,000,00 50,400,00
	1.01-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	6,600,000	6,600,00
	1.01-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 paket	809,250,000	809,250,00
	1.01-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	2 orang	15,840,000	15,840,00
	1.01-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	6,600,000	6,600,00
	1.01-1.10					
		Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	48,500,000	48,500,00
	1.01-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan	12 Bulan	35,000,000	35,000,00
	1.01-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan komponen listrik	12 Bulan	5,500,000	5,500,00
	1.01-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor yang representatif untuk pelayanan	12 Bulan	6,000,000	6,000,00
	1.01-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu dinas	12 Bulan	49,850,000	49,850,00
	1.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam danluar daerah	12 Bulan	423,780,396	423,780,39
	1.01-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Terpenuhinya jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	12 Bulan	273,600,000	273,600,0
	1.01-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	4,400,000	4,400,0
	1.01-1.22	Penyedian jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah jabatan	Tersedianya jasa jewa gedung/ Kantor	12 Bulan	15,000,000	15,000,00
	1.01-1.23	Penyediaan Jasa Penyebarluasan Informasi	Tersedianya jasa penyebarluasan Informasi*)	12 Bulan	-	
	1.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100	199,997,100	199,997,1
	1.01-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dinas pendidikan	1 unit	24,497,100	24,497,10
	1.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	175,500,000	175,500,0
	1.01-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	75,139,000	75,139,0
	1.01-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	75,139,000	75,139,0
	1.01-15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi PAUD (%) bersertifikasi	72.12	925,524,250	925,524,25
		.5	Jumlah guru TK bersertifikasi	26.46	, , , , ,	, .
	1.01-15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat bermain edukatif	25 paket	110,000,000	110,000,00
	1.01-15.42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	2 paket	50,000,000	50,000,0
	1.01-15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terselenggaranya pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD	40 Orang	27,500,000	27,500,0
	1.01-15.59	Penyelenggaraan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk TK, SD/MI dan SMP/MTs	Terlaksananya penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk TK, SD/MI dan SMP/MTs (TKN)	8 TK	277,474,250	277,474,2
	1.01-15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Tersusunnya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	3 dokumen	40,000,000	40,000,00
	1.01-15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Terpenuhinya operasioal kegiatan Forum PAUD	1 tahun	58,260,000	58,260,00
	1.01-15.68	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terpenuhinya jumlah peserta workshop Pengembangan Mutu dan Pembelajaran PAUD	30 orang	48,890,000	48,890,00
	1.01-15.76	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan PAUD	8 paud	313,400,000	313,400,00

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
1	1.01-16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK - SD/MI - SMP/MTS APM - SD/MI - SMP/MTS Rasio Siswa dan guru - SD/MI - SMP/MTS Rasio Siswa dan guru - SD/MI - SMP/MTS Angka Kelulusan (%) - SD/MI - SMP/MTS - SD/MI - SD/MI - SD/MI - SMP/MTS	5  112.84 109.33 98.69 81.31 55.51 56.69 100.00 100.00 57.00 100.	8,160,748,548	8,945,972,548
			- % sekolah yang memiliki Laboratorium IPA SMP/MI Persentase Sekolah yang menerapkan proses belajar dengan menggunakan TIK	80.55 20.00		
	1.01-16.9	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksananya pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	30 paket	-	300,000,000
	1.01-16.12	Pembangunan pepustakaan sekolah	Terlaksananya Pembangunan pepustakaan sekolah	2 ruang pustaka	-	400,000,000
	1.01-16.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	1 unit	-	85,224,000
	1.01-16.58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Terlaksananya pelatihan kompetensi siswa berprestasi	25 orang	71,230,700	71,230,700
	1.01-16.66	Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	terlaksanaya monitoring dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	1 laporan	31,250,000	31,250,000
	1.01-16.67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	terselenggara pelaksanaan paket A setara SD	1 kegiatan	30,000,000	30,000,000
	1.01-16.68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	terselenggaranya paket B setara SMP	1 kegiatan	30,000,000	30,000,000
	1.01-16.70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	50 orang	200,400,000	200,400,000
	1.01-16.72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Terlaksananya pelatihan operator Dapodik PAUD dan Dikmas	206 orang	75,000,000	75,000,000
	1.01-16.78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya ujian try out dan Ujian Semester siswa	5828 orang	1,050,981,848	1,050,981,848

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	1.01-16.92	Penyediaan Sarana dan Prasarana SD dan SMP (DAK)	Terlaksananya rehab/ pembangunan RKB, RKL, perpustakaan, Labor IPA dan Mobiler SD dan SMP	23 ruang	6,341,066,000	6,341,066,000
	1.01-16.107	Pengadaan Mobiler SD	Terlaksananya penyediaan mobiler sekolah	1000 set	100,000,000	100,000,000
	1.01-16.114	Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD dan SMP	terlaksanaya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD dan SMP	100 orang	92,400,000	92,400,000
	1.01-16.115	Validasi Dokumen Kurikulum Sekolah Dasar	Terlaksananya validasi dokumen kurikulum sekolah dasar	1 dokumen	34,000,000	34,000,000
	1.01-16.116	Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Dasar	Terlaksananya akreditasi Pendidikan Dasar	20 sekolah	24,420,000	24,420,000
	1.01-16.117	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum	100 orang	80,000,000	80,000,000
	1.01-17	Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan	APK SMA/SMK/MA APM SMA/SMK/MA	94.80 72.82	25,000,000	25,000,000
	1.01-17.63	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Terlaksananya Paket C setara SMU	1 kegiatan	25,000,000	25,000,000
	1.01-18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (%) Jumlah penyelenggara pendidikan Non Formal (KF, dan Pengelola PKBM) (unit)	98.36 14.00	209,200,000	209,200,000
	1.01-18.1	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Terlaksananya Pemberdayaan tenaga pendidik non formal yang dilatih	20 orang	40,000,000	40,000,00
	1.01-18.4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terlaksananya pendidikan keaksaraan	110 orang	66,700,000	66,700,00
	1.01-18.5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terlaksananya pendidikan kecakapan hidup	110 orang	60,000,000	60,000,00
	1.01-18.7	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Tersedianya dta dan informasi pendidikan non formal	1 dokumen	27,500,000	27,500,00
	1.01-18.20	Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal	Terlaksananya akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal	3 lembaga	15,000,000	15,000,00
	1.01-20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SD/MI - SMP/MTs Nital Rata-Rata Kompetensi Guru - TK - SD/MIN/SDLB - SMP/MTs % guru yang bersertifikasi pendidik - TK - SD/MIN/SDLB - SMP/MTs Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang	82.59 96.82 63.86 61.57 63.66 26.37 70.34 74.10	571,542,050	571,542,05
	1.01-20.1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	berprestasi tingkat provinsi (orang) meningkatnya jumlah guru bersertifikasi	100 orang	43,239,050	43,239,05
	1.01-20.1	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan	Terlaksananya uji kompetensi pendidik dan tenaga	950 orang		
		tenaga kependidikan	kependidikan Terlaksananya pembinaan kelompok kerja guru	, i	28,200,000	28,200,00
	1.01-20.4	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)  Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	(KKG) Terlaksananya workshop peningkatan kompetensi bagi guru dan Kepala Sekolah	1 kegiatan 80 orang	33,000,000	33,000,00
	1.01-20.16	Penyelenggaraan Monitoring dan Verifikasi Guru Profesional	Terlaksananya monitoring dan verifikasi Guru Profesional	750 orang	72,103,000	72,103,00
		Guru i Toresional	Ketersediaan kurikulum nasional dan lokal	100.00		
	1.01-22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Keterlaksanaan kurikulum nasional dan lokal % lulusan pendidikan vocasional yang diterima pada dunia usaha, industry dan mandiri (Akademi Komunitas)	100.00 80.00	4,054,157,650	4,054,157,650
			Jumlah SD yang menerapkan pendidikan inklusi	4.00		
			Jumlah SMP yang menerapkan pendidikan inklusi	5.00		
	1.01-22.1	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	Terlaksananya penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Guru	1 dokumen	95,000,000	95,000,000
	1.01-22.2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	1 kerjasama	989,500,000	989,500,00
	1.01-22.3	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penerapan azaz Efisiensi dan efektivitas Pengguna	1 tahun	17,597,250	17,597,25
	1.01-22.5	Pembinaan Dewan Pendidikan	Terlaksananya pembinaan dewan pendidikan	1 tahun	25,500,000	25,500,00
		Pembinaan Komite Sekolah	Terlaksananya pembinaan komite sekolah	1 tahun	75,000,000	75,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN FROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHON 2016)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	1.01-22.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 laporan	125,000,000	125,000,000
	1.01-22.25	Penyelenggaran Penyediaan Dana Pengembangan SD/MI dan SMP/MTs	Terlaksananya pelayanan pendidikan bagi UPTD, SDN dan SMPN Solok Selatan	1 tahun	2,414,235,400	2,414,235,400
	1.01-22.26	Penyelenggaraan UPT SKB Solok Selatan	Terselenggaranya admonistrasi dan pelayanan UPT SKB Solok Selatan	1 tahun	45,000,000	45,000,000
	1.01-22.33	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pencapaian sekolah dan Kinerja Bidang Pendidikan	Terlaksananya evaluasi hasil pencapaian sekolah dan kinerja bidang pendidikan	1 laporan	17,325,000	17,325,000
	1.01-22.34	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di sekolah	9 sekolah	150,000,000	150,000,000
	1.01-22.35	Pengembangan Data dan Informasi	Terlaksananya pengembangan Data dan Informasi	1 dokumen	100,000,000	100,000,000
			Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam POPDA	7.00		
			Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam O2SN	11.00		
	1.01-23	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan	Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam O2SN	6.00	1,002,790,000	1,002,790,000
		Olahraga *)	SMP Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam O2SN	7.00	1,002,100,000	.,002,.00,000
			SMA Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam O2SN SMK	13.00		
	1.01-23.14	Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga	Terlaksananya identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	1 kegiatan	105,510,000	105,510,000
	1.01-23.15	Penyelenggaraan Kompetensi Olah Raga	terselenggaranya ivent olahraga tingkat pelajar dan ikut sertanya kabupaten solok selatan dalam ivent olahraga	5 ivent olahraga	747,600,000	747,600,000
	1.01-23.17	Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	Terlaksananya kegiatan olimpiade Olahraga pelajar luar biasa (O2SN SLB)	1 ivent olahraga	53,180,000	53,180,000
	1.01-23.21	Peringatan Hari Olah Raga Nasional	Terpenuhinya upacara dan kegiatan dalam rangka HAORNAS tahun 2018 di Kab. Solok Selatan	1 kegiatan	96,500,000	96,500,000
	1.01-24	Program Peningkatan Pengamalan Nilai Agama *)	% guru TPA/MDA bersertifikasi % TPA/MDA terakreditasi	12 12	93,000,000	93,000,000
	1.01-24.1	Pembinaan Kelembagaan TPA/MDA	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan TPA/MDA	50 TPA/MDA	93,000,000	93,000,000
	2.04	URUSAN PERTANAHAN			785,124,000	
	2.04-16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya lahan tanah untuk pembangunan sekolah baru	1 Lokasi	785,124,000	-
	2.04-16.3	Perencanaan Pengadaan Tanah*)	Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah	1 lokasi	60,000,000	-
	2.04-16.4	Persiapan Pengadaan Tanah*)	Terlaksananya persiapanpengadaan tanah	1 lokasi	30,324,000	-
	2.04-16.5	Pelaksanaan Pengadaan Tanah *)	Terlaksananya pengadaan pendidikan dasar	4632 meter	694,800,000	-
	2.13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			4,454,360,000	4,454,360,000
	2.13-15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase pengurus remaja masjid dibina	36.00	235,000,000	235,000,000
	2.13-15.5	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan	Persentase organisasi kepemudaan aktif Terlaksananya pembinaan lembaga remaja mesjid	15.00 40 lembaga	235,000,000	235,000,000
	2.13-16	kepemudaan Program peningkatan peran serta	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi	30 orang	347,540,000	347,540,000
		kepemudaan				
	2.13-16.1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pelatihan Anggota PASKIBRA Tk.	20 lembaga	46,340,000	46,340,000
	2.13-16.2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Kabupaten	70 orang	301,200,000	301,200,000
	2.13-17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah wirausahawan baru yang dipelopori oleh pemuda	10 Wirausahawa n	29,700,000	29,700,000
	2.13-17.1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan usaha pemuda produktif	50 orang	29,700,000	29,700,000
	2.13-20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Nagari yang memiliki gelanggang/sarana olahraga (minimal 1 sarana)	89	50,000,000	50,000,000
	2.13-20.7	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	1 paket	50,000,000	50,000,000
	2.13-21	Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga	Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam PORPROV Atlet Kabupaten Solok Selatan yang berprestasi Tingkat provinci	10 50.00	3,792,120,000	3,792,120,000
	2.13-21.1	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Tingkat provinsi Terlaksananya Event Motor Trail dan Fun Bike	1 event	56,500,000	56,500,000
	10 21.1	. s.igs.iibaiigaii Siaiiiaga Nekieasi	Tonansarianya Evont Motor Hall dali Full Dike	. 540111	30,300,000	30,300,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2016)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	2.13-21.2	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Keikutserataan kabupaten Solok Selatan dalam Porprov sumatera Barat	1 event	1,744,300,000	1,744,300,000
	2.13-21.3	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	Terlaksananya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	7 cabang	119,000,000	119,000,000
	2.13-21.4	Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	90 orang	1,772,320,000	1,772,320,000
	2.13-21.5	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi	Terlaksananya pelatihan wasit dan pelatih cabang olahraga	30 orang	100,000,000	100,000,000
2		DINAS KESEHATAN			36,434,937,000	50,066,000,000
	1.02	URUSAN KESEHATAN			36,434,937,000	50,066,000,000
	1.02-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.0	1,737,000,000	2,391,000,000
	1.02-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	2,000,000	4,000,000
	1.02-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Untuk Pembayaran Listrik, Telepon dan Air	12 Bulan	60,000,000	60,000,000
	1.02-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	35,000,000	60,000,000
	1.02-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honor pengelola keuangan	12 bulan	250,000,000	300,000,000
	1.02-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	12 bulan	6,000,000	6,000,000
	1.02-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	12 bulan	5,000,000	8,000,000
	1.02-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis untuk administrasi kantor	12 Bulan	75,000,000	100,000,000
	1.02-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan foto copy	12 Bulan	35,000,000	50,000,000
	1.02-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor	12 Bulan	8,000,000	10,000,000
	1.02-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Unit	25,000,000	50,000,000
	1.02-1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6 Lusin	2,000,000	2,000,000
	1.02-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 Bulan	20,000,000	20,000,000
	1.02-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terikutinya Rapat Koordinasi di Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	400,000,000	900,000,000
	1.02-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya tenaga administrasi perkantoran	1 Tahun	800,000,000	800,000,000
	1.02-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan	8,000,000	8,000,000
	1.02-1.23	Penyediaan Jasa Penyebarluasan Informasi	Terlaksananya Dokumentasidan Publikasi kegiatan	12 Bulan	6,000,000	13,000,000
	1.02-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	280,000,000	380,000,000
	1.02-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	250,000,000	350,000,000
	1.02-2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	30,000,000	30,000,000
	1.02-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang mendapat sosialisasi	60 orang	30,000,000	40,000,000
	1.02-5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan tenaga kesehatan	3 Peraturan	30,000,000	40,000,000
	1.02-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	40,000,000	130,000,000
	1.02-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan kinerja Tahunan	1 Dokumen	20,000,000	70,000,000
	1.02-6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan tahunan	1 Dokumen	20,000,000	60,000,000
	1.02-15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	% Ketersediaan obat	100.00	2,031,552,000	4,900,000,000
	1.02-15.1	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan BMHP	1 Tahun	1,836,552,000	4,500,000,000
	1.02-15.5	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Puskesmas yang melaksanakan kefarmasian sesuai standar	9 Puskesmas	25,000,000	50,000,000
	1.02-15.6	Monitoring dan evaluasi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya pembinaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Solok Selatan	9 Puskesmas	20,000,000	50,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	1.02-15.7	Fasilitasi Gudang Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan obat dan alat kesehatan pada tingkat Puskesmas	12 bulan	150,000,000	300,000,000
	1.02-16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kunjungan rata-rata masyarakat ke pelayanan kesehatan (visite rate) % Praktek tenaga kesehatan swasta yang	2.00	16,108,396,000	23,580,000,000
			memenuhi standar kesehatan		,,,	.,,,
	1.02-16.1	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di	Meningkatnya umur harapan hidup Tersedianya pelayanan kesehatan pada masyarakat	68,19 100 persen	25,000,000	F0 000 000
		puskesmas jaringannya Peningkatan pelayanan dan penanggulangan	miskin			50,000,000
	1.02-16.12	masalah kesehatan	Terlaksananya upaya penanggulangan bencana	1 Tahun	25,000,000	60,000,000
	1.02-16.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan kesehatan daerah terpencil	Terlaksananya monev pelayanan dasar Terlaksananya pelayanan kesehatan daerah	12 bulan 3 Nagari	10,000,000 20,000,000	50,000,000 30,000,000
			terpencil Tersedianya operasional pelayanan Puskesmas	-		
	1.02-16.17	Operasional Puskesmas Pakan Rabaa	Pakan Rabaa	12 bulan	87,300,000	300,000,000
	1.02-16.18	Operasional Puskesmas Muara Labuh	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas muara labuh	12 bulan	87,300,000	300,000,000
	1.02-16.19	Operasional Puskesmas Pakan Salasa	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas pakan salasa	12 bulan	87,300,000	250,000,000
	1.02-16.20	Operasional Puskesmas Lubuk Gadang	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	87,300,000	300,000,000
	1.02-16.21	Operasional Puskesmas Bidar Alam	lubuk gadang Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	87,300,000	300,000,000
			bidar alam Tersedianya operasional pelayanan puskesmas			
	1.02-16.22	Operasional Puskesmas Talunan	Talunan	12 bulan	87,300,000	250,000,000
	1.02-16.23	Operasional Puskesmas Mercu	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas mercu	12 bulan	87,300,000	250,000,000
	1.02-16.24	Operasional Puskesmas Abai	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas abai	12 bulan	87,300,000	250,000,000
	1.02-16.26	Pelayanan kesehatan swasta	Terlaksananya pemeriksaan terhadap pelayanan	100 persen	15,000,000	50,000,000
	1.02-16.27	Kapitasi jaminan kesehatan masyarakat	kesehatan swasta Tersedianya jaminan terhadap pelayanan kesehatan (masyarakat yang memiliki asuransi kesehatan)	90 persen	8,225,696,000	15,000,000,000
	1.02-16.28	Pelayanan P3K kegiatan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan P3K pada kegiatan	1 Tahun	35,000,000	70,000,000
	1.02-16.29	-	PEMDA			
		Manajemen BOK	Tersedianya manajemen kesehatan di Puskesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat	1 Tahun	20,000,000	70,000,000
	1.02-16.35	Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Masyarakat	umum	90 persen	900,000,000	1,500,000,000
	1.02-16.36	Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	Terlaksananya perkesmas pada puskesmas	9 Puskesmas	50,000,000	150,000,000
	1.02-16.37	Jaminan Persalinan	Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan	12 bulan	1,622,000,000	800,000,000
	1.02-16.39	Operasional Puskesmas Lubuk Ulang Aling	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	87,300,000	300,000,000
	1.02-16.40	Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan	Lubuk Ulang Aling Terlaksanaya monitoring jasa retribusi pelayanan	12 bulan	30,000,000	90,000,000
	02 10.40	Pengembangan Pelayanan Kesehatan	kesehatan	Dalail	50,000,000	30,000,000
	1.02-16.41	(Fasyankes) Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Pecandu Narkotika yang aktif	Puskesmas yang melaksanakan wajib lapor (IPWL)	30 persen	25,000,000	60,000,000
	1.02-16.43	Penyelenggaraan Bantuan Operasional	Terlaksananya upaya promotif dan prefentif pada	12 bulan	4,220,000,000	3,000,000,000
		Kesehatan (DAK Non Fisik dan DAU)	pada puskesmas Terlaksananya operasional pelayanan primer pada		, .,,	
	1.02-16.44	Fasilitasi BLUD Kesehatan Pelayanan Primer	puskesmas % Toko obat, apotik dan toko komestik yang	9 puskesmas	100,000,000	100,000,000
	1.02-17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	memenuhi standar kesehatan	100.00	110,000,000	245,000,000
		. regram renganasan essar aan mananan	% Industri rumah tangga yang memenuhi standar kesehatan	95.00	0,000,000	0,000,000
	1.02-17.2	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan	sekolah yang mendapatkan pengawasan pangan	50 persen	40,000,000	65,000,000
	1.02-17.5	bahan berbahaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	dan napza Terlaksananya monev pada rumah tangga	12 bulan	15,000,000	50,000,000
		Pengawasan dan Pembinaan Apotik, Toko Obat	penghasil produk industri Terlaksananya pengawasan terhadap pendistribusi			
	1.02-17.6	dan Kosmetik Pengawasan dan Pengendalian keamanan	obat dan kosmetik	100 persen	25,000,000	65,000,000
	1.02-17.7	Pengawasan dan Pengendalian keamanan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian terhadap produksi rumah tangga	95 persen	30,000,000	65,000,000
	1.02-18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Bahan baku yang dihasilkan dan dipergunakan untuk industri farmasi	1 produk	350,000,000	900,000,000
	1.02-18.7	Fasilitasi Pelaksanaan P4TO	Tersedianya operasional pengembangan program P4TO	1 unit	350,000,000	900,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DALKAI DAKI KOGKAM/KEGIATAK	INDIKATOR	TARGET	(TATION 2010)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	1.02-19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	% Kebijakan PHBS % Desa yang memamfaatkan dana desa 10% untuk UKBM	20.00	345,000,000	710,000,000
	1.02-19.1	Pengembangan media promosi dan informasi	Persentase Nagari siaga  Terlaksananya penyediaan promosi kesehatan	23.4 10 indikator	25,000,000	25,000,000
	1.02-19.2	sadar hidup sehat Penyuluhan kesehatan masyarakat	Terlaksananya penyebaran informasi kesehatan	1 tahun	30,000,000	50,000,000
	1.02-19.6	Pengembangan Posyandu	jumlah posyandu yang mandiri	75 persen	25,000,000	60,000,000
	1.02-19.7	Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Terlaksananya pembinaan PHBS terhadap rumah tangga	69 persen	20,000,000	60,000,00
	1.02-19.8	Pengembangan dan pemantapan forum desa siaga	Jumlah nagari siaga	24 Nagari	25,000,000	50,000,00
	1.02-19.9	Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Persentase pembinaan terhadap UKS sekolah	100 persen	25,000,000	35,000,00
	1.02-19.10	Pelaksanaan Saka Bakti Husada	Terlaksananya pelaksanaan sakha bhakti husada	1 gugus depan	30,000,000	50,000,00
	1.02-19.11	Pemantapan PKPR bagi guru UKS dan remaja di sekolah lanjutan	puskesmas yang melaksanakan PKPR	7 puskesmas	25,000,000	50,000,00
	1.02-19.14	Fasilitasi Bulan Bakti Kesehatan dan Profesi Kesehatan di Kabupaten	Terlaksananya kegiatan bulan bakti dan profesi kesehatan	5 kegiatan	90,000,000	250,000,000
	1.02-19.15	Pengembangan Keluarga Sehat	Tersedianya pembinaan terhadap keluarga	69 persen	50,000,000	80,000,00
			% Gizi buruk % Balita stunting	0,03 9.00		
			% Ibu hamil KEK	0,11		
	4 00 00	B	% Ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah	90.00	205 202 202	202 202 204
	1.02-20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	% Bayi usia kurang 6 bulan yang mendapat ASI eklusif	89.00	205,000,000	330,000,000
			% Remaja putri yang mendapat tablet tambah darah	25.00		
			% BBLR	0,68		
	1.02-20.3	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Terlaksananya penanganan masalah gizi pada balita	100 persen	50,000,000	80,000,00
	1.02-20.4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat tentang gizi	30 persen	30,000,000	60,000,00
	1.02-20.7	Terapi pemulihan gizi buruk klinis dan gangguan gizi mikro lainnya pada balita *)	Terlaksananya terapi terhadap gangguan gizi pada balita	100 persen	40,000,000	60,000,00
	1.02-20.9	Pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P) pada balita gizi buruk dan balita gizi kurang *)	terlaksanaya 'Pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P) pada balita gizi buruk dan balita gizi kurang	100 persen	40,000,000	50,000,000
	1.02-20.11	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gizi Remaja dan Lansia *)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gizi Remaja dan Lansia	100 persen	20,000,000	30,000,00
	1.02-20.12	Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK*)	Terlaksananya Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK	100 persen	25,000,000	50,000,00
	1.02-21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	% Pendudukakses jamban sehat % Pendudukakses air minum sehat % tempat pengelolaan makanan yang memenuhi standar kesehatan	81,3 90.00 75.00	1,275,000,000	1,505,000,000
			% jorong ODF	41,2		
	1.02-21.1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Terlaksananya pemantauan permasalahan lingkungan	3 lingkungan	35,000,000	100,000,00
	1.02-21.5	Monitoring dan Evaluasi program pamsimas bidang kesehatan *)	Terlaksananya pembinaan pada lokasi pamsimas	1 tahun	25,000,000	50,000,00
	1.02-21.6	Pembinaan dan pengawasan tempat umum dan tempat pengolahan makanan *)	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap TTU dan TPM	72 persen	35,000,000	60,000,00
	1.02-21.7	Pembinaan dan pengawasan kualitas air minum , sanitasi dan perumahan *)	Terlaksananya pembinaan dan pengasawan sanitasi rumah	71 persen	35,000,000	70,000,00
	1.02-21.8	Pengembangan dan fasilitasi Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) *)	Terlaksananya pembinaan STBM	43 persen	20,000,000	75,000,00
	1.02-21.10	Gerakan 1000 jamban *)	Terlaksananya pembangunan jamban sehat	500 unit	1,000,000,000	1,000,000,00
	1.02-21.11	Fasilitas Forum Kabupaten Sehat *)	Terlaksananya fasilitasi forum kabupaten sehat	1 tahun	125,000,000	150,000,00
			% Puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui program MTBS % Keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif	100.00		
	1.02-22	Program Pencegahan dan Penanggulangan	(Success Rate)		484,000,000	755,000,000
	1.02-22	Penyakit Menular	% Anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	96.00	484,000,000	755,000,000
			Angka Penemuan Acude Flacid Paralysis (per 100.000 penduduk usia < 15 Tahun)	1,9		
			Prevalensi Kasus HIV < 0,4 per 1.000 penduduk	0.13		
	1.02-22.9	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Terlaksananya pemantauan kejadian penyakit	75 persen	35,000,000	60,000,00
	1.02-22.13	Pelayanan imunisasi pada anak balita, anak sekolah, ibu hamil dan calon jemaah haji *)	Terlaksananya pelayanan imunisasi	9 puskesmas	100,000,000	130,000,00
	1.02-22.14	Penatalaksanaan penanggulangan	Terlaksananya penanggulangan KLB	100 persen	60,000,000	70,000,00
	1	wabah/kejadian luar biasa (KLB) *)	1 ·			

KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN MAJU
	DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
2	3	4	5	6	7
1.02-22.18	TBC *)	Terlaksananya upaya pencegahan kasus TB	33 kasus	35,000,000	80,000,000
1.02-22.19	IMS, HIV/AIDS *)	Terlaksananya penatalaksanaan ODHA	100 persen	100,000,000	150,000,000
1.02-22.20	Infeksi Saluran Pencernaan *)	ISP	20 permil	22,000,000	40,000,000
1.02-22.21	Pheumonia pada Balita *)	penemuan kasus pneumonia	46 kasus	22,000,000	25,000,000
1.02-22.23	DBD *)	DBD	62 kasus	30,000,000	60,000,000
1.02-22.24	Kecacingan *)	Terlaksananya pencegahan dan penanganan kasus kecacingan	9 puskesmas	20,000,000	40,000,000
1.02-22.25	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria *)	Terlaksananya penanganan kasus malaria	10 kasus	30,000,000	50,000,000
1.02-22.26	Pencegahan dan Penanggulangan Rabies *)	Terlaksananya penatalaksanaan kasus gigitan hewan penebab rabies pada manusia	100 persen	30,000,000	50,000,000
1.02-23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	% Puskesmas yang terakreditasi	100.00	130,000,000	250,000,000
1.02-23.2	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya pengembangan puskesmas yang sesuai standar	9 Puskesmas	30,000,000	50,000,000
1.02-23.9	Fasilitasi Akreditasi Fasilitasi Pelayanan Dasar	Tersedianya puskesmas yang terakreditasi	10 Puskesmas	100,000,000	200,000,000
		% Puskesmas rawatan	100.00		
	Program pengadaan, peningkatan dan		1,69		4,000,000,000
1.02-25	perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/	Rasio Ketersediaan Puskesmas Pembantu (Per	1,37	4,017,487,000	
	pasternas perinsarita dan jarnigannya	Rasio Ketersediaan Poskesdes (Per.2.500 Penduduk)	2,3		
1.02-25.25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya DAK	Terlaksananya pemngembangan puskesmas dan jaringannya	100 persen	4,017,487,000	4,000,000,000
1.02-28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	% masyarakat yang mempunyai jaminan	90.00	8,788,502,000	9,000,000,000
1.02-28.9	Fasilitasi jamkesda / Kemitraan Asuransi	persentase penduduk yang memiliki jaminan	58%	8,788,502,000	9,000,000,000
1.02-30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	% jorong yang memiliki posyandu santun lansia	40.00	35,000,000	80,000,000
1.02-30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	7 Puskesmas	20,000,000	50,000,000
1.02-30.3	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan (pelatihan Pelayanan pemeliharaan kesehatan	puskesmas yang mendapat pelatihan perawatan			
	lansia)	kesehaatan lansia	4 Puskesmas	15,000,000	30,000,000
			4 Puskesmas 5,1	15,000,000	30,000,000
		kesehaatan lansia  Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup  Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100,000		15,000,000	30,000,000
1.02-32		kesehaatan lansia  Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup  Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100,000 <u>Kelahiran Hidup</u> Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan	5,1	15,000,000 195,000,000	30,000,000
1.02-32	lansia) Program peningkatan keselamatan ibu	kesehaatan lansia  Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup  Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100,000  Kelahiran Hidup  % Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan kompilasi (P4K)  % Ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	5,1 160,8 80.00		
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	kesehaatan lansia  Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup  Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100,000  Kelahiran Hidup  % Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanan persalinan dan penceqahan kompilasi (P4K)  % Ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)  % Kunjungnan neonatal lengkap	5,1 160,8 80.00 85,2 93,4	195,000,000	315,000,000
1.02-32 1.02-32.4 1.02-32.5	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Audit Maternal perinatal	kesehaatan lansia  Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup  Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100,000  Kelahiran Hidup  % Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan kompilasi (P4K)  % Ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)  % Kunjungnan neonatal lengkap  Terlaksananya Audit Maternal perinatal  Terlaksananya pelatihan dalam upaya penanganan	5,1 160,8 80.00 85,2 93,4 2 kali		
1.02-32.4	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  Audit Maternal perinatal Pelatihan penanganan asfiksia pada BBL Pertemuan Validasi Data Kesehatan Ibu dan	kesehaatan lansia  Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup  Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100,000 Kelahiran Hidup % Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan kompilasi (P4K) % Ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) % Kunjungnan neonatal lengkap Terlaksananya Audit Maternal perinatal Terlaksananya pelatihan dalam upaya penanganan asfiksia dan bbll Terlaksananya monev kegiatan kesehatan ibu dan	5,1 160,8 80.00 85,2 93,4	195,000,000 30,000,000	<b>315,000,000</b> 70,000,000
1.02-32.4 1.02-32.5 1.02-32.9	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  Audit Maternal perinatal Pelatihan penanganan asfiksia pada BBL Pertemuan Validasi Data Kesehatan Ibu dan Kespro Pelatihan Tenaga Kesehatan Puskesmas	kesehaatan lansia  Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup  Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100,000  Kelahiran Hidup  % Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan kompilasi (P4K)  % Ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)  % Kunjungnan neonatal lengkap  Terlaksananya Audit Maternal perinatal Terlaksananya pelatihan dalam upaya penanganan asfiksia dan bbll Terlaksananya monev kegiatan kesehatan ibu dan anak  Terlaksananya puskesmas yang mampu tatalaksana	5,1 160,8 80.00 85,2 93,4 2 kali 16 orang 1 Tahun	30,000,000 40,000,000 10,000,000	315,000,000 70,000,000 60,000,000 30,000,000
1.02-32.4 1.02-32.5 1.02-32.9 1.02-32.10	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  Audit Maternal perinatal Pelatihan penanganan asfiksia pada BBL Pertemuan Validasi Data Kesehatan Ibu dan Kespro Pelatihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Mampu Tata Laksana Kekerasan Terhadap Anak	kesehaatan lansia  Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup  Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100,000  Kelahiran Hidup % Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanan persalinan dan pencegahan kompilasi (P4K) % Ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) % Kunjungan neonatal lengkap Terlaksananya Audit Maternal perinatal Terlaksananya pelatihan dalam upaya penanganan asfiksia dan bbll Terlaksananya monev kegiatan kesehatan ibu dan anak Terlaksananya puskesmas yang mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak	5,1 160,8 80.00 85,2 93,4 2 kali 16 orang 1 Tahun 5 Puskesmas	30,000,000 40,000,000 10,000,000 35,000,000	70,000,000 60,000,000 30,000,000 50,000,000
1.02-32.4 1.02-32.5 1.02-32.9 1.02-32.10	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  Audit Maternal perinatal Pelatihan penanganan asfiksia pada BBL Pertemuan Validasi Data Kesehatan Ibu dan Kespro Pelatihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Mampu Tata Laksana Kekerasan Terhadap Anak Pengembangan Kelas Ibu Hamil	kesehaatan lansia  Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup  Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100,000  Kelahiran Hidup % Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan penceqahan kompilasi (P4K) % Ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) % Kunjungnan neonatal lengkap Terlaksananya Audit Maternal perinatal Terlaksananya pelatihan dalam upaya penanganan asfiksia dan bbll Terlaksananya monev kegiatan kesehatan ibu dan anak Terlaksananya puskesmas yang mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	5,1 160,8 80.00 85,2 93,4 2 kali 16 orang 1 Tahun 5 Puskesmas	30,000,000 40,000,000 10,000,000 40,000,000 40,000,000	315,000,000 70,000,000 60,000,000 30,000,000 50,000,000
1.02-32.4 1.02-32.5 1.02-32.9 1.02-32.10	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  Audit Maternal perinatal Pelatihan penanganan asfiksia pada BBL Pertemuan Validasi Data Kesehatan Ibu dan Kespro Pelatihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Mampu Tata Laksana Kekerasan Terhadap Anak	kesehaatan lansia  Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup  Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100,000  Kelahiran Hidup  % Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan kompilasi (P4K)  % Ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)  % Kunjungnan neonatal lengkap  Terlaksananya Audit Maternal perinatal  Terlaksananya pelatihan dalam upaya penanganan asfiksia dan bbil  Terlaksananya monev kegiatan kesehatan ibu dan anak  Terlaksananya puskesmas yang mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak  puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil  Puskesmas yang dibina kesehatan ibu, anak dan reproduksi	5,1 160,8 80.00 85,2 93,4 2 kali 16 orang 1 Tahun 5 Puskesmas	30,000,000 40,000,000 10,000,000 35,000,000	70,000,000 60,000,000 30,000,000 50,000,000
1.02-32.4 1.02-32.5 1.02-32.9 1.02-32.10	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  Audit Maternal perinatal Pelatihan penanganan asfiksia pada BBL Pertemuan Validasi Data Kesehatan Ibu dan Kespro Pelatihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Mampu Tata Laksana Kekerasan Terhadap Anak Pengembangan Kelas Ibu Hamil Pembinaan Kesehatan Ibu, Anak dan	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup  Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100,000 Kelahiran Hidup  % Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan penceqahan kompilasi (P4K) % Ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) % Kunjungnan neonatal lengkap Terlaksananya Audit Maternal perinatal Terlaksananya pelatihan dalam upaya penanganan asfiksia dan bbil Terlaksananya monev kegiatan kesehatan ibu dan anak Terlaksananya puskesmas yang mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Puskesmas yang dibina kesehatan ibu, anak dan reproduksi % Puskesmas yang melaksanakan pengendalian penyakit Tidak Menular % Tempat belajar mengajar (sekolah) yang	5,1 160,8 80.00 85,2 93,4 2 kali 16 orang 1 Tahun 5 Puskesmas 9 puskesmas 9 puskesmas	30,000,000 40,000,000 10,000,000 40,000,000 40,000,000	315,000,000 70,000,000 60,000,000 30,000,000 50,000,000
1.02-32.4 1.02-32.5 1.02-32.9 1.02-32.10 1.02-32.11 1.02-32.12	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  Audit Maternal perinatal Pelatihan penanganan asfiksia pada BBL Pertemuan Validasi Data Kesehatan Ibu dan Kespro Pelatihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Mampu Tata Laksana Kekerasan Terhadap Anak Pengembangan Kelas Ibu Hamil Pembinaan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi  Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa *)	kesehaatan lansia  Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup  Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100,000  Kelahiran Hidup % Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan kompilasi (P4K) % Ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) % Kunjungnan neonatal lengkap Terlaksananya Pelatihan dalam upaya penanganan asfiksia dan bbll Terlaksananya monev kegiatan kesehatan ibu dan anak Terlaksananya puskesmas yang mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak  puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil % Tempat belajar mengajar (sekolah) yang mempunyai peraturan dan bukti Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	5,1 160,8 80.00 85,2 93,4 2 kali 16 orang 1 Tahun 5 Puskesmas 9 puskesmas	30,000,000 40,000,000 10,000,000 35,000,000 40,000,000	70,000,000 60,000,000 50,000,000 50,000,000 55,000,000
1.02-32.4 1.02-32.5 1.02-32.9 1.02-32.10 1.02-32.11 1.02-32.12	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  Audit Maternal perinatal Pelatihan penanganan asfiksia pada BBL Pertemuan Validasi Data Kesehatan Ibu dan Kespro Pelatihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Mampu Tata Laksana Kekerasan Terhadap Anak Pengembangan Kelas Ibu Hamil Pembinaan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi  Program Pencegahan dan Penanggulangan	kesehaatan lansia  Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup  Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100,000  Kelahiran Hidup % Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanan persalinan dan penceqahan kompilasi (P4K) % Ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) % Kunjungnan neonatal lengkap Terlaksananya Audit Maternal perinatal Terlaksananya pelatihan dalam upaya penanganan asfiksia dan bbil Terlaksananya monev kegiatan kesehatan ibu dan anak  Terlaksananya puskesmas yang mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Puskesmas yang melaksanakan hengendalian penyakit Tidak Menular % Tempat belajar mengajar (sekolah) yang mempunyai peraturan dan bukti Kebijakan	5,1 160,8 80.00 85,2 93,4 2 kali 16 orang 1 Tahun 5 Puskesmas 9 puskesmas 9 puskesmas	30,000,000 40,000,000 10,000,000 35,000,000 40,000,000	70,000,000 60,000,000 50,000,000 50,000,000 55,000,000
	1.02-22.18 1.02-22.19 1.02-22.20 1.02-22.21 1.02-22.24 1.02-22.25 1.02-22.26 1.02-23 1.02-23.9 1.02-25 1.02-25.25 1.02-25.25 1.02-25.25 1.02-25.25 1.02-25.25 1.02-25.25	2 3 1.02-22.18 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC *) 1.02-22.29 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit IMS, HIV/AIDS *) 1.02-22.20 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan *) 1.02-22.21 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan *) 1.02-22.23 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Pheumonia pada Balita *) 1.02-22.24 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kecacingan *) 1.02-22.25 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kecacingan *) 1.02-22.26 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria *) 1.02-23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02-23.2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02-23.9 Fasilitasi Akreditasi Fasilitasi Pelayanan Dasar  Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya  1.02-25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya  1.02-28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya  1.02-28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya  1.02-28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya  1.02-28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya  1.02-28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya  1.02-28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya  1.02-29 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya  1.02-29 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya  1.02-29 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya  1.02-29 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN  INDIKATOR  2	DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN   INDIKATOR   TARGET	No.   No.

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
			Rasio tenaga medis dan tenaga paramedis per 100.000 penduduk (puskesmas, pustu, dan poskesdes)  - Dokter	10,2		
	4 00 07	Brancon Combas Bass Manusia Kasabatan	- Perawat	47,5	400 000 000	200 000 000
	1.02-37	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Bidan	43,8	190,000,000	380,000,000
			% Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (kesling, kefarmasian, gizi, kesehatan masyarakat, dan analisi kesehatan)	100.00		
	1.02-37.1	Penilaian Angka-angka Kredit Jabatan Fungsional	Tersedianya angka kredit jabatan fungsional	2 kali	50,000,000	60,000,000
	1.02-37.3	Fasilitasi Pelatihan Jabatan Fungsional *)	Tersedianya tenaga jabatan fungsional	5 orang	25,000,000	30,000,000
	1.02-37.4	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	Tersedianya tenaga kesehatan yang terlatih dalam APN	4 orang	40,000,000	90,000,000
	1.02-37.5	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga	Terlaksananya pelatihan kompetensi bagi tenaga	2 pelatihan	60,000,000	120,000,000
	1.02-37.6	Kesehatan Fasilitasi mampu melaksanakan perencanaan	kesehatan di puskesmas Tersedianya perencanaan analisa kebutuhan	9 puskesmas	15,000,000	80,000,000
		kebutuhan SDMK	tenaga di puskesmas % puskesmas yang mengadakan kegiatan			
	1.02-38	Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga	olahraga	100.00	20,000,000	100,000,000
	1.02-38.1	Pengembangan pelayanan kesehatan kerja	puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	9 puskesmas	10,000,000	50,000,000
	1.02-38.2	Pengembangan pelayanan kesehatan olah raga	puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga	9 puskesmas	10,000,000	50,000,000
3		RUMAH SAKIT DAERAH			31,149,921,577	32,716,962,314
	1.02	URUSAN KESEHATAN			31,149,921,577	32,716,962,314
	1.02-1	Program Pelayanan Administrasi	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.0	2,459,921,577	2,828,462,314
		Perkantoran				
	1.02-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air	12 Bulan	9,438,000	10,381,800
	1.02-1.2	dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	Listrik Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan	12 Bulan	500,000,000	575,000,000
	1.02-1.3	kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa pemeliharaan dan Perizinan	12 Bulan	100,000,000	115,000,000
	1.02-1.6	kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	39,600,000	45,540,000
	1.02-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Adminstrasi Keuangan	12 Bulan	229,046,400	263,403,360
	1.02-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	550,000,000	632,500,000
	1.02-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	180,000,000	207,000,000
	1.02-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Penggandaan	12 Bulan	100,000,000	115,000,000
	1.02-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	80,000,000	92,000,000
	1.02-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	81,993,177	94,292,154
	1.02-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	29,964,000	34,458,000
	1.02-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan makanan dan minuman	12 Bulan	82,500,000	94,875,000
	1.02-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan	12 Bulan	350,000,000	402,500,000
	1.02-1.22	daerah Penyedian jasa Sewa Gedung Kantor dan	konsultasi keluar dan dalam daerah Terlaksananya Penyediaan jasa sewa gedung	12 Bulan	115,500,000	132,850,000
	1.02-1.23	Rumah jabatan*) Penyediaan Jasa Penyebarluasan Informasi*)	kantor/ rumah jabatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penyebarluasan	12 Bulan	11,880,000	13,662,000
	1.02-1.23		Informasi Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	12 Dulai1	11,880,000	13,002,000
	1.02-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	655,000,000	753,250,000
	1.02-2.5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya mobil operasional	1 unit	320,000,000	368,000,000
	1.02-2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mobileur kantor	1 paket	85,000,000	97,750,000
	1.02-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	250,000,000	287,500,000
	1.02-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang mendapat sosialisasi	55 Orang	110,000,000	126,500,000
	1.02-5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Petugas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	53 Orang	100,000,000	115,000,000
	1.02-5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Petugas yang mengikuti sosialisasi peraturan	2 Orang	10,000,000	11,500,000
		, , and garage	perundang-undangan Persentase persediaan darah di rumah sakit	100.00		,,
	1.02-16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Ketersediaan opersional BLUD untuk	100.00	17,550,000,000	20,182,500,000
	1.02-16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	memaksimalkan pelayanan rumah sakit Tersedianya stok darah dirumah sakit	100%	50,000,000	57,500,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(1 AHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	1.02-19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase informasi kesehatan yang diselenggarakan	100.00	75,000,000	86,250,000
	1.02-19.1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Terlaksananya media promosi dan informasi sadar hidup sehat	1 paket	75,000,000	86,250,000
	1.02-26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	persentase ketersediaan sarana prasarana rumah sakit sesuai dengan standar rumah sakit tipe B	80.00	7,205,000,000	5,180,750,000
	1.02-26.1	Pembangunan rumah sakit	Terlaksananya pembangunan Gedung	1 unit	3,000,000,000	345,000,000
	1.02-26.17	Rehabilitasi bangunan rumah sakit	Terlaksananya rehab bangunan Rumah Sakit	2 Unit	500,000,000	575,000,000
	1.02-26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya alat kesehatan Rumah Sakit	1 paket	750,000,000	862,500,000
	1.02-26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	ketersediaan Obat-obatan Rumah Sakit	100 Persen	600,000,000	690,000,000
	1.02-26.20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Terlaksananya pengadaan Ambulance	1 Unit	500,000,000	575,000,000
	1.02-26.21	Pengadaan mebeuleur rumah sakit	terlsedianya peralatan mebeleur rumah sakit	1 paket	120,000,000	138,000,000
	1.02-26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Tersedianya Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	1 Tahun	85,000,000	97,750,000
	1.02-26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Tersedianya Makan minum Pasien dan Petugas	1 Tahun	1,500,000,000	1,725,000,000
	1.02-26.25	Pengembangan tipe rumah sakit	Persentase kesiapan Dokumen yang harus dipenuhi	60 Persen	150,000,000	172 500 000
	1.02-20.25	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	menuju tipe B	ou reiseii	150,000,000	172,500,000
	1.02-27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	persentase ketersediaan sarana prasarana rumah sakit sesuai dengan standar rumah sakit tipe B	80.00	595,000,000	684,250,000
	1.02-27.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Terlaksananya pemeliharaan gedung RS	1 Tahun	200,000,000	230,000,000
	1.02-27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terlaksananya 'pemeliharaan alat kesehatan	1 Tahun	175,000,000	201,250,000
	1.02-27.18	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Terlaksananya pemeliharaan mobil ambulance	1 Tahun	220,000,000	253,000,000
	1.02-35	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit *)	Persentase pemenuhan tenaga kesehatan di rumah sakit tipe B - Dokter spesialis (25 orng) - Dokter umum (21 Orang) - Perawat/Bidan ( 200 orang) kesiapan Akreditasi JCI (%)	68.00 70.00 100.00 100.00	2,500,000,000	2,875,000,000
	1.02-35.1	Pengadaan Tenaga Non PNS, Dokter Reveral, Program Dokter Jaga dan Perawat Kontrol *)	Terpenuhan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit	1 Tahun	2,500,000,000	2,875,000,000
4		DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERTANAHAN			195,000,000,000	193,309,244,800
	1.03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN			163,227,480,000	167,679,244,800
	1.03-1	PENATAAN RUANG Program Pelayanan Administrasi	Porcontaco polavanan administraci Porkantoran	100	2,767,480,000	2,784,394,800
	1.03-1	Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon,		2,707,480,000	2,704,394,000
	1.03-1.2	dan listrik	air	1 tahun	42,000,000	42,420,000
	1.03-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	507,780,000	512,857,800
	1.03-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 tahun 1 tahun	14,000,000 100,000,000	14,140,000 101,000,000
	1.03-1.10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan	1 tahun	40,000,000	40,400,000
	1.03-1.12	Penyediaan komponen instalasi	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan komponen	1 tahun	5,000,000	5,050,000
	1.03-1.13	listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	listrik Terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor yang	1 paket	120,000,000	121,200,000
	1.03-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	representatif untuk pelayanan Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	1 tahun	22,700,000	22,927,000
	1.03-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	dinas Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	840,000,000	848,400,000
		daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	dalam dan luar daerah Terpenuhinya jasa Tenaga Pendukung Administrasi	1 tahun		
	1.03-1.19	Administrasi Kantor *)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kantor Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	1 tanun	1,076,000,000	1,076,000,000
	1.03-2	Aparatur	aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	1,575,000,000	1,606,500,000
	1.03-2.3	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembanunan gedung kantor OPD	1 Unit	1,275,000,000	1,300,500,000
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala	4 Tabua	300,000,000	306,000,000
	1.03-2.24	dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	300,000,000	300,000,000
	1.03-2.24 1.03-5		kendaraan dinas/operasional jumlah aparatur yang mendapat pelatihan sesuai tupoksi	75 orang	500,000,000	500,000,000

No.	KODE	E SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	tan)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DALKAH DAN FROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHON 2016)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	1.03-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	20,000,000	20,000,000
	1.03-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000
		IKITUSAI TEANSASI KITELJA SKED	Panjang Jalan Kabupaten yang dibangun (KM)	10.00		
	1.03-15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun (Unit)	5.00	118,985,000,000	120,174,850,000
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Jalan Kabupaten Yang ditingkatkan Menjadi Jalan Aspal	18.92	.,,	, ,,
	1.03-15.1	Perencanaan pembangunan jalan	Tersedianya perencanaan pembangunan jalan	25 Dokumen	1,000,000,000	1,010,000,000
,	1.03-15.4	Perencanaan pembangunan jembatan	Tersedianya perencanaan pembangunan jembatan	5 Dokumen	930,000,000	939,300,000
	1.03-15.5	Pembangunan jembatan	Terlaksanaya pembangunan jembatan	21 unit	23,055,000,000	23,285,550,000
ŀ	1.03-15.8	Peningkatan ruas jalan (DAK Infrastruktur jalan dan DAU)	Terlaksananaya peningkatan Ruas Jalan (DAK)	44 Km	94,000,000,000	94,940,000,000
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan	Persentase Jalan Kabupaten Dengan Kondisi	45.41		
ľ	1.03-18	jembatan	Baik Persentase Jembatan Kabupaten dengan	CO 20	1,775,000,000	3,402,500,000
		December of the bilities in a second	kondisi baik	60.28		
	1.03-18.2	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan	10 unit	1,275,000,000	1,402,500,000
=	1.03-18.3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Program peningkatan sarana dan prasarana	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana	10 Km	500,000,000	2,000,000,000
·	1.03-23	kebinamargaan	kebinamargaan	30.00	1,000,000,000	1,000,000,000
	1.03-23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	1 tahun	1,000,000,000	1,000,000,000
		Program Pengembangan dan Pengelolaan	Persentase Daerah Irigasi Kondisi baik (%)	55.00		
ľ	1.03-24	Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Perkuatan Tebing (Titik) Pengendalian Banjir (Titik)	8.00 8.00	22,085,000,000	22,085,000,000
	1.03-24.1	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Terlaksananya 'Perencanaan Bidang PSDA	15 Dokumen	200,000,000	200,000,000
	1.03-24.10	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/pemeli haraan jaringan irigasi	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemelihara an Jaringan Irigasi (DAK)	1538 Ha	19,210,000,000	19,210,000,000
	1.03-24.14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan	18 titik	1,975,000,000	1,975,000,000
_	1.03-24.15	sungai Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah	normalisasi saluran sungai Terlaksananya optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi	50 Ha	700,000,000	700,000,000
	1.03-24.13	dibangun Program Pengembangan Wilayah Strategis	yang telah di Bangun	30 T Ia	700,000,000	700,000,000
	1.03-29	dan Cepat Tumbuh	Keluar dari status daerah tertinggal	belum	1,550,000,000	3,100,000,000
	1.03-29.2	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Terlaksananya pembangunan/peningkatan infrastruktur	3 Lokasi	1,550,000,000	3,100,000,000
	1.03-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Penambahan jalan Non Status yang dibangun (Km)	57.00	11,735,000,000	11,735,000,000
	1.03-30.2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Terlaksananya pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	57 Km	11,735,000,000	11,735,000,000
			Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	1.00		
	1.03-32	Program Penataan Ruang	RDTR/RRTR Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang		1,040,000,000	800,000,000
			RTBL Terlaksananya rapat koordinasi tentang rencana	1.00		
	1.03-32.10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	tata ruang	1 tahun	30,000,000	50,000,000
<u> </u>	1.03-32.11	Revisi rencana tata ruang	Tersusunnya revisi rencana tata ruang	1 Dokumen	800,000,000	500,000,000
	1.03-32.16	Fasilitasi badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) *)	Terlaksananya fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	1 tahun	35,000,000	50,000,000
	1.03-32.19	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL *)	Terlaksananya Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	2 Perda	175,000,000	200,000,000
	1.03-33	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum	100.00	90,000,000	276,000,000
,		Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan	yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum Terlaksananya 'penyusunan kebijakan perizinan	100.00 1 Peraturan	90,000,000	
	1.03-33		yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum			276,000,000 100,000,000 100,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
			INDIKATOR	TARGET	(**************************************	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	1.03-34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan tata ruang Ketersediaan PPNS Penataan Ruang	65.00 1.00	105,000,000	195,000,000
	1.03-34.1	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Terlaksananya penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	1 tahun	50,000,000	50,000,000
	1.03-34.4	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Terlaksananya pelatihan aparatur dalam pengendalian pemanfaatan ruang	3 orang	25,000,000	65,000,000
	1.03-34.5	Pengawasan pemanfaatan ruang	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang	1 tahun	30,000,000	80,000,000
	2.04	URUSAN PERTANAHAN			5,630,000,000	5,630,000,000
	2.04-16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kesediaan lahan untuk pembangunan	100	5,630,000,000	5,630,000,000
	2.04-16.3	Perencanaan Pengadaan Tanah*)	Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah	10 lokasi	100,000,000	100,000,000
	2.04-16.4	Persiapan Pengadaan Tanah*)	Terlaksananya persiapan pengadaan tanah	10 lokasi	500,000,000	500,000,000
	2.04-16.5	Pelaksanaan Pengadaan Tanah *)	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan tanah	10 lokasi	5,000,000,000	5,000,000,000
	2.04-16.6	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah *)	Terlaksananya penyerahan hasil pengadaan tanah	10 lokasi	30,000,000	30,000,000
	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			26,142,520,000	20,000,000,000
	4.01-38	Program Peningkatan Keagamaan	Persentase Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan (Full Desain)	50.00	26,142,520,000	20,000,000,000
	4.01-38.13	Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Solok Selatan (Tahun Jamak)	Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan	1 Unit	26,142,520,000	20,000,000,000
5		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			18,180,484,211	32,766,000,000
	1.04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			14,200,484,211	25,821,000,000
	1.04-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100	734,534,211	1,071,000,000
	1.04-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun	5,000,000	5,750,000
	1.04-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa layanan komunikasi, air dan listrik	1 Tahun	44,000,000	35,000,000
	1.04-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pelaksana administrasi keuangan	1 Tahun	175,000,000	141,500,000
	1.04-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	1 Tahun	15,000,000	20,000,000
	1.04-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk kegiatan kantor	1 Tahun	25,000,000	50,000,000
	1.04-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	20,000,000	35,000,000
	1.04-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan untuk kantor	1 Tahun	5,000,000	7,000,000
	1.04-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	50,000,000	100,000,000
	1.04-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum untuk rapat kantor	1 Tahun	25,000,000	63,000,000
	1.04-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	300,000,000	550,000,000
	1.04-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya tenaga pembantu administrasi dan keuangan kantor	1 Tahun	64,800,000	39,000,000
	1.04-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kebersihan kantor	1 Tahun	5,734,211	24,750,000
	1.04-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	350,500,000	2,300,000,000
	1.04-2.3	Pembangunan gedung kantor	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor	1 Dokumen	50,000,000	2,000,000,000
	1.04-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	1 Tahun	65,500,000	100,000,000
	1.04-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan operasional kantor	1 Tahun	235,000,000	200,000,000
	1.04-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya PPNS Lingkungan Hidup	5 Orang	50,000,000	150,000,000
	1.04-5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	50,000,000	150,000,000
		·	Penataan perumahan dan kawasan permukiman (Kawasan)	2.00		
	4.04.4=	B	Pengembangan infrastruktur dan kawasan permukiman (lokasi)	25.00	0.045	44.050.000.00
	1.04-15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Lampu PJU yang diberi meteran (Titik)	7.00	6,015,450,000	11,250,000,000
		K T	Rata-rata rumah tangga miskin yang mendapat bantuan bedah rumah (RTM)	300.00	-	
	1.04-15.3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	12 Laporan	150,000,000	100,000,000
	1.04-15.6	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Peningkatan jumlah rumah tangga miskin (RTM) penerima bantuan bedah rumah	100 Unit	100,000,000	200,000,000
		Fasilitasi dan stimulasi pembangunan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan Peningkatan jumlah rumah tangga miskin (RTM)	12 Laporan		

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
			INDIKATOR	TARGET		(TAHUN 2019)
1	2	3 Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman	4 Peningkatan luas kawasan permukiman kumuh	5	6	7
	1.04-15.9	Kumuh	yang tertangani	10 Ha	300,000,000	2,000,000,000
	1.04-15.10	Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	Terlaksananya pembangunan infrastruktur pedesaan	30 Unit	600,000,000	2,500,000,000
	1.04-15.11	Meterisasi Lampu PJU	Jumlah lampu PJU termeterisasi	7 Kawasan	365,450,000	450,000,000
	1.04-15.12	Perawatan dan Pemeliharaan Lampu PJU	Terlaksananya pemeliharaan lampu PJU Terlaksananya pengadaan lampu PJU/ Kegiatan penambahan lampu PJU	1 Tahun 2 Lokasi	850,000,000	1,000,000,000
	1.04-15.13	Pembayaran Rekening Listrik PJU	Terlaksananya pembayaran rekening lampu PJU	1 Tahun	3,650,000,000	5,000,000,000
	1.04-17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rata-rata persentase Swadaya masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar	10.00	6,200,000,000	6,000,000,000
	1.04-17.2	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat (Swakelola/ Pemberdayaan)	Terlaksanya program PAMSIMAS, SLBM/SANIMAS	15 Nagari	6,200,000,000	6,000,000,000
	1.04-20	Program pengelolaan areal pemakaman	Terlaksananya pengelolaan areal pemakamam umum	1 lokasi	850,000,000	5,050,000,000
	1.04-20.6	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Terlaksananya pembangunan prasarana dan sarana pemakaman serta TPU	1 Paket	600,000,000	5,000,000,000
	1.04-20.7	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Terlaksananya proses pemeliharaan prasarana dan	1 Paket	250,000,000	50,000,000
	2.05	pemakaman URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	sarana pemakaman		3,980,000,000	6,945,000,000
		Program Pengembangan Kinerja	lumlah timbulan sampah yang dikolola (M2)	28,000		
	2.05-15	Pengelolaan Persampahan	Jumlah timbulan sampah yang dikelola (M3)  Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	45.00	1,800,000,000	4,715,000,000
	2.05-15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan	Meningkatnya layanan persampahan	45 Persentase	1,200,000,000	1,500,000,000
	2.05-15.11	prasarana dan sarana persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya jumlah Bank Sampah aktif	14 Kelompok	35,000,000	50,000,000
	2.05-15.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya dokumen evaluasi pengelolaan persampahan	1 Dokumen	45,000,000	45,000,000
	2.05-15.13	Pelatihan dan Pengelolaan Sampah Bagi	Terlaksananya pelatihan dan Pengelolaan Sampah	75 Orang	75,000,000	75,000,000
	2.05-15.14	Masyarakat dan Sekolah Gerakan Budaya Bersih (Gerakan Solok Selatan Bersih)	Bagi Masyarakat dan Sekolah TerlaksananyaGerakan Budaya Bersih (Gerakan Solok Selatan Bersih)	7 Kecamatan	45,000,000	45,000,000
	2.05-15.15	Penyediaan Prasarana dan Sarana	Tersedianya prasarana dan sarana persampahan	4 Paket	400,000,000	3,000,000,000
		Persampahan	Penghargan Adipura Persentase Usaha/Kegiatan yang memiliki izin	70.00		
	2.05-16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	lingkungan % Tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	100.00	415,000,000	395,000,000
	2.05-16.4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan penaatan hukum lingkungan (PROPER)	10 Usaha dan/atau Kegiatan	50,000,000	50,000,000
	2.05-16.11	Pengembangan produsi ramah lingkungan	Tersedianya produk ramah lingkungan	1 Unit	30,000,000	45,000,000
	2.05-16.12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Ketersediaan peraturan-peraturan daerah dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	1 Regulasi	155,000,000	60,000,000
	2.05-16.13	Koordinasi penyusunan kajian AMDAL/ UKL- UPL/SPPL dan perizinan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan koordinasi penyusunan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dan Perizinan	5 Usaha dan/atau Kegiatan	50,000,000	65,000,000
	2.05-16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terlaksananya tindaklanjut pengaduan masyarakat terhadap kejadian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	2 Tindaklanjut Pengaduan	35,000,000	45,000,000
	2.05-16.16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	30 Usaha dan/atau Kegiatan	50,000,000	85,000,000
	2.05-16.19	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan limbah B3 dan Limbah Medis	18 Usaha dan/atau Kegiatan	45,000,000	45,000,000
	2.05-17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase nagari yang mengikuti program kampung iklim (PROKLIM) jumlah kawasan DAS yang ditangani Jumlah objek penggunan jasa lingkungan	7.00 1 1	340,000,000	420,000,000
	2.05-17.1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Tersedianya buku data (DAS, kualitas sunga, dan kelas sungai)/ Inventarisasi sungai	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000
	2.05-17.4	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Terlaksananya p'engembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	3 Kawasan	50,000,000	85,000,000
	2.05-17.5	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah nagari yang mengikuti program kampung iklim (PROKLIM)	3 Nagari	50,000,000	85,000,000
	2.05-17.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Keikutsertaan masyarakat sebagai penggiat dan peduli lingkungan hidup aktif	45 Kelompok	45,000,000	45,000,000
	2.05-17.15	Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi	8 Kawasan	45,000,000	55,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN FROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	2.05-17.17	Inventarisasi Kerusakan Lahan Akibat Produksi Biomassa	Tersedianya informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah akibat produksi biomassa	30 Persentase	50,000,000	50,000,000
	2.05-18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah kawasan yang direhabilitasi	1	300,000,000	-
	2.05-18.2	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tersusunnya dokumen perencanaan SDA dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	300,000,000	-
	2.05-19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	% Sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi Persentase Ketersediaan data pokok LH	13.00 60.00	350,000,000	170,000,000
	2.05-19.1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Peningkatan keikutsertaan sekolah adiwiyata, kalpataru, dan pemerhati lingkungan	38 Sekolah/Orang	70,000,000	75,000,000
	2.05-19.2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya buku status lingkungan hidup daerah (SLHD)	1 Dokumen	30,000,000	45,000,000
	2.05-19.4	Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	Tersedianya situs/website lingkungan hidup daerah	1 Paket	200,000,000	-
	2.05-19.6	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Terlaksananya agenda kegiatan peringatan hari lingkungan	1 Agenda	50,000,000	50,000,000
	2.05-20	Program peningkatan pengendalian polusi	Ambang baku kualitas udara Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air	65.00 90.00	140,000,000	160,000,000
	2.05-20.2	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Persentase pengujian emisi/polusi udara akibat aktifitas industri	90 Persentase	35,000,000	50,000,000
	2.05-20.3	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Terlaksananya pelayanan pencegahan pencemaran air	90 Persentase	75,000,000	75,000,000
	2.05-20.7	Pengujian Udara Ambient	Terlaksananya uji udara ambient pada suatu lokasi (spot)	24 Spot/Titik	30,000,000	35,000,000
	2.05-24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH Kabupaten	1	635,000,000	1,085,000,000
	2.05-24.5	Penataan RTH	Terlaksananya penataan RTH dengan baik	5 Kawasan	85,000,000	35,000,000
	2.05-24.6	Pemeliharaan RTH	Terlaksananya pemeliharaan RTH	5 Kawasan	50,000,000	50,000,000
	2.05-24.11	Pembangunan RTH	Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)	1 lokasi	500,000,000	1,000,000,000
6		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			6,570,636,289	6,711,920,000
	1.05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6,570,636,289	6 714 020 000
		OMOW DAN PERLINDONGAN WASTARARAT			0,570,030,209	6,711,920,000
	1.05-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100	725,000,000	774,000,000
	<b>1.05-1</b> 1.05-1.1	Program Pelayanan Administrasi	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai	100 12 bulan		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			725,000,000	<b>774,000,000</b> 7,000,000
	1.05-1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai	12 bulan	<b>725,000,000</b> 7,000,000	774,000,000
	1.05-1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan	12 bulan 12 bulan	<b>725,000,000</b> 7,000,000 40,000,000	<b>774,000,000</b> 7,000,000 44,000,000
	1.05-1.1 1.05-1.2 1.05-1.6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan 12 bulan 12 bulan	<b>725,000,000</b> <b>7,000,000</b> <b>40,000,000</b> <b>20,000,000</b>	774,000,000 7,000,000 44,000,000 20,000,000
	1.05-1.1 1.05-1.2 1.05-1.6 1.05-1.7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya perbaikan peralatan dan perlengkapan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	725,000,000 7,000,000 40,000,000 20,000,000 150,000,000	774,000,000 7,000,000 44,000,000 20,000,000 150,000,000
	1.05-1.1 1.05-1.2 1.05-1.6 1.05-1.7 1.05-1.9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	725,000,000 7,000,000 40,000,000 20,000,000 150,000,000	774,000,000 7,000,000 44,000,000 20,000,000 150,000,000 20,000,000
	1.05-1.1 1.05-1.2 1.05-1.6 1.05-1.7 1.05-1.9 1.05-1.10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	725,000,000 7,000,000 40,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000	774,000,000 7,000,000 44,000,000 20,000,000 150,000,000 20,000,000 40,000,000 30,000,000
	1.05-1.1 1.05-1.2 1.05-1.6 1.05-1.7 1.05-1.9 1.05-1.10 1.05-1.11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan jasa surat menyurat  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional  Penyediaan jasa administrasi keuangan  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Penyediaan alat tulis kantor  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Penyediaan komponen instalasi	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor yang representatif untuk pelayanan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan	725,000,000 7,000,000 40,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000	774,000,000 7,000,000 44,000,000 20,000,000 150,000,000 20,000,000 40,000,000 30,000,000
	1.05-1.1 1.05-1.2 1.05-1.6 1.05-1.7 1.05-1.9 1.05-1.10 1.05-1.11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor yang representatif untuk pelayanan Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu dinas	12 bulan	725,000,000 7,000,000 40,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000 7,000,000	774,000,000 7,000,000 44,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000 7,000,000
	1.05-1.1 1.05-1.2 1.05-1.6 1.05-1.7 1.05-1.9 1.05-1.10 1.05-1.11 1.05-1.12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor yang representatif untuk pelayanan Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu dinas Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan 11 paket	725,000,000 7,000,000 40,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000 7,000,000	774,000,000 7,000,000 44,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000 7,000,000
	1.05-1.1 1.05-1.2 1.05-1.6 1.05-1.7 1.05-1.9 1.05-1.10 1.05-1.11 1.05-1.12 1.05-1.13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan jasa surat menyurat  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional  Penyediaan jasa administrasi keuangan  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Penyediaan alat tulis kantor  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  Penyediaan makanan dan minuman  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung  Administrasi Kantor	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor yang representatif untuk pelayanan Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu dinas Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	725,000,000 7,000,000 40,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000 45,000,000 30,000,000	774,000,000 7,000,000 44,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000 30,000,000 35,000,000
	1.05-1.1 1.05-1.2 1.05-1.6 1.05-1.7 1.05-1.9 1.05-1.10 1.05-1.11 1.05-1.12 1.05-1.13 1.05-1.13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan jasa surat menyurat  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional  Penyediaan jasa administrasi keuangan  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Penyediaan alat tulis kantor  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  Penyediaan makanan dan minuman  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor yang representatif untuk pelayanan Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu dinas Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terpenuhinya jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor Tersedianya Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	12 bulan 11 paket 12 Bulan	725,000,000 7,000,000 40,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000 45,000,000 30,000,000 30,000,000	774,000,000 7,000,000 44,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 7,000,000 30,000,000 35,000,000 350,000,000
	1.05-1.1 1.05-1.2 1.05-1.6 1.05-1.7 1.05-1.9 1.05-1.10 1.05-1.11 1.05-1.12 1.05-1.13 1.05-1.17 1.05-1.18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan jasa surat menyurat  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional  Penyediaan jasa administrasi keuangan  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Penyediaan alat tulis kantor  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  Penyediaan makanan dan minuman  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor  Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor yang representatif untuk pelayanan Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu dinas Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terpenuhinya jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor Tersedianya Alat kebersihan dan Bahan Pembersih Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	12 bulan	725,000,000 7,000,000 40,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000 7,000,000 45,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000	774,000,000 7,000,000 44,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000 30,000,000 35,000,000 36,000,000 5,000,000
	1.05-1.1 1.05-1.2 1.05-1.6 1.05-1.7 1.05-1.9 1.05-1.10 1.05-1.11 1.05-1.12 1.05-1.13 1.05-1.17 1.05-1.18 1.05-1.19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor yang representatif untuk pelayanan Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu dinas Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terpenuhinya jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor Tersedianya Alat kebersihan dan Bahan Pembersih Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas	12 bulan 112 Bulan 12 Bulan	725,000,000 7,000,000 40,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 7,000,000 45,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 5,000,000	774,000,000 7,000,000 44,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000 30,000,000 35,000,000 36,000,000 5,000,000
	1.05-1.1 1.05-1.2 1.05-1.6 1.05-1.7 1.05-1.9 1.05-1.10 1.05-1.11 1.05-1.12 1.05-1.13 1.05-1.18 1.05-1.19 1.05-1.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor yang representatif untuk pelayanan Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu dinas Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terpenuhinya jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor Tersedianya Alat kebersihan dan Bahan Pembersih Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan Terlaksananya pengadaan Kendaraan	12 bulan	725,000,000 7,000,000 40,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 7,000,000 45,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 5,000,000	774,000,000 7,000,000 44,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 7,000,000 35,000,000 35,000,000 5,000,000 835,000,000
	1.05-1.1 1.05-1.2 1.05-1.6 1.05-1.9 1.05-1.10 1.05-1.11 1.05-1.12 1.05-1.13 1.05-1.18 1.05-1.19 1.05-1.20 1.05-2 1.05-2.5 1.05-2.9 1.05-2.10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan jasa surat menyurat  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional  Penyediaan jasa administrasi keuangan  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  Penyediaan peralatan dan minuman  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung  Administrasi Kantor  Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan  Pembersih  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur  pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor yang representatif untuk pelayanan Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu dinas Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terpenuhinya jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor Tersedianya Alat kebersihan dan Bahan Pembersih Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan Terlaksananya pengadaan Kendaraan dinas/operasional	12 bulan 11 paket 12 Bulan 12 Bulan 11 paket 12 Bulan 11 Bulan 11 Bulan 11 Bulan 11 Bulan 11 Bulan 11 Bulan	725,000,000 7,000,000 40,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000 45,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,00	774,000,000 7,000,000 44,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000 50,000,000 50,000,000 30,000,000
	1.05-1.1 1.05-1.2 1.05-1.6 1.05-1.7 1.05-1.9 1.05-1.10 1.05-1.11 1.05-1.12 1.05-1.13 1.05-1.18 1.05-1.19 1.05-1.20 1.05-2 1.05-2.5 1.05-2.9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan jasa surat menyurat  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional  Penyediaan jasa administrasi keuangan  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Penyediaan alat tulis kantor  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  Penyediaan makanan dan minuman  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor  Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  pengadaan Kendaraan dinas/operasional  Pengadaan peralatan gedung kantor  Pengadaan mebeleur	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor yang representatif untuk pelayanan Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu dinas Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terpenuhinya jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor Tersedianya Alat kebersihan dan Bahan Pembersih Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan Terlaksananya pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya Peralatan Gedung Tersedianya Peralatan Gedung Tersedianya Mobeluer gedung kantor	12 bulan 11 Bulan 11 Bulan 11 Bulan 11 Bulan 11 Bulan	725,000,000 7,000,000 40,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000 45,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,00	774,000,000 7,000,000 44,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000 5,000,000 550,000,000
	1.05-1.1 1.05-1.2 1.05-1.6 1.05-1.9 1.05-1.10 1.05-1.11 1.05-1.12 1.05-1.13 1.05-1.18 1.05-1.19 1.05-1.20 1.05-2 1.05-2.5 1.05-2.9 1.05-2.10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan jasa surat menyurat  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  Penyediaan peralatan dan minuman  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung  Administrasi Kantor  Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan  Pembersih  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  pengadaan Kendaraan dinas/operasional  Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya jasa surat menyurat dan materai Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, air Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor yang representatif untuk pelayanan Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu dinas Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya Alat kebersihan dan Bahan Pembersih Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan Terlaksananya pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya Peralatan Gedung Tersedianya mobeluer gedung kantor	12 bulan 11 Bulan 12 Bulan 11 Bulan 11 Bulan 11 Bulan	725,000,000 7,000,000 40,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000 45,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,00	774,000,000 7,000,000 44,000,000 20,000,000 150,000,000 40,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000 50,000,000 50,000,000 30,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHON 2016)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	1.05-3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 paket	-	50,000,000
	1.05-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang mendapat pelatihan sesuai tupoksi	12 orang	25,000,000	50,000,000
	1.05-5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	12 orang	25,000,000	50,000,000
		Program peningkatan keamanan dan	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	100		
	1.05-15	kenyamanan lingkungan	Rasio Ketersediaan Satpol PP (Standar minimal 150 Orang)	100	1,938,145,000	1,945,000,000
	1.05-15.1	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedinya personil Satpol PP sesuai kebutuhan	135 orang	1,455,000,000	1,455,000,000
	1.05-15.5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Operasi SK 4 ( pekat, judi, miras, prostitusi)	12 kali	50,000,000	50,000,000
	1.05-15.13	Pengamanan Kegiatan Hari-hari Besar,Kegiatan PEMDA dan Pengawalan Pejabat	Terlaksananya pengamanan pelaksanaan kegiatan hari besar, Kegiatan Pemda, pengawalan Pejabat dan tamu VVIP	7 kegiatan	68,145,000	75,000,000
	1.05-15.14	Pengamanan tempat-tempat penting dan strategis	Terlaksananya pengamanan tempat-tempat penting dan strategis	5 lokasi	365,000,000	365,000,000
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan	Rasio Ketersediaan PPNS (minimal 10 Orang)	60		
	1.05-16	pencegahan tindak kriminal	Cakupan Patroli Siaga Tibum dan Tranmas	2	170,000,000	457,920,000
	1.05-16.3	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	(kali/hari) Terlaksananya diklat PPNS, Satpol PP, dan Kompetensi Satpol PP	12 orang	40,000,000	150,000,000
	1.05-16.4	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka	Terlaksananya Operasi Rutin Perda, Perkat, dan	12 bulan	130,000,000	307,920,000
	1.05-18	pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	PKL, Fasilitas Umum Rata-rata Parsentase keikut sertaan Satpol PP dalam pelaksanaan kemah bakti sosial	100	65,000,000	100,000,000
	1.05-18.5	Pelaksanaan HUT Satpol PP dan Pemadam Kebakaran tingkat Provinsi dan Kabupaten	Terselenggaranya HUT Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	3 Kegiatan	65,000,000	100,000,000
	1.05-19	Program pemberdayaan masyarakat untuk	Persentase Ketersediaan Satlinmas	100.00	15,000,000	55,000,000
		menjaga ketertiban dan keamanan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di	Persentase Satlinmas yang terlatih	40.00	.,,	, ,
	1.05-19.1	masyarakat	Tersedianya satlinmas nagari yang terlatih	39 orang	-	30,000,000
	1.05-19.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan laporan satlinmas kabupaten	1 laporan	15,000,000	25,000,000
	1.05-20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase kasus Penyakit Masyarakat yang tertangani Persentase penanganan dan penyelesaian	100 100	35,000,000	45,000,000
	1.05-20.2	Penyuluhan pencegahan berkembangnya	konflik sosial Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban dalam	1 tahun	25,000,000	30,000,000
	1.05-20.8	praktek prostitusi Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Masyarakat Terlaksananya operasi pekat	12 bulan	10,000,000	15,000,000
	1.05-24	Program peningkatan kesiagaan dan	Cakupan Layanan (%)	85	3,402,491,000	2,400,000,000
		pencegahan bahaya kebakaran	Respon time (menit)	20	0,102,101,000	2,100,000,000
	1.05-24.1	Sosialisasi norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya Sosialisasi norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran	60 orang	-	180,000,000
	1.05-24.2	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	10 orang	30,000,000	70,000,000
	1.05-24.3	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Ploting Pump) dan Posko Damkar	1 Paket	1,620,000,000	-
	1.05-24.4	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terpeliharanya Sarana Prasarana Armada pemadaman Api	1 tahun	52,491,000	150,000,000
	1.05-24.5	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	5 posko	1,700,000,000	2,000,000,000
7		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3,668,258,545	4,903,870,790
	1.06	URUSAN SOSIAL Program Pelayanan Administrasi			2,356,601,348	2,472,209,080
	1.06-1	Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100	994,751,375	1,058,501,580
	1.06-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Terpenuhinya jasa surat menyurat	12 Bulan	2,899,575	2,899,575
	1.06-1.2	dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tersedianya Jasa Komunikasi air dan listrik Terlaksananya pemeliharaan kendaraan	12 Bulan	18,269,270	16,269,670
	1.06-1.6	kendaraan dinas/operasional	dinas/operasional	12 Bulan	9,660,105	9,660,105
	1.06-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya admiinistrasi keuangan	12 Bulan	125,200,000	151,679,304
	1.06-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12,000,000	1,000,000
-	1.06-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	3,597,550	3,597,550
-	1.06-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	30,000,000	30,000,000
	1.06-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	20,850,000	20,850,000
	1.06-1.12	listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	3,031,875	3,031,875

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
			INDIKATOR	TARGET	, ,	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	1.06-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan kantor	1 Paket	45,000,000	49,000,000
	1.06-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	20,500,000	22,050,00
	1.06-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi kedalam dan luar daerah	12 Bulan	340,000,000	416,320,53
	1.06-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Terlaksananya jasa tenaga pendukung administrasi kantor	12 Bulan	321,600,000	290,000,00
	1.06-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya alat kebersihan kantor	12 Bulan	1,968,000	1,967,963
	1.06-1.22	Penyedian jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah jabatan	Tersedianya jasa sewa gudang kantor	12 Bulan	40,175,000	40,175,00
	1.06-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100	214,000,000	247,707,50
	1.06-2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeuleur Kantor	1 Paket	30,000,000	48,000,00
	1.06-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	26,000,000	20,000,00
	1.06-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksannya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	158,000,000	179,707,50
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan	Ketersediaan tenaga Pendamping Sosial (standar 66 Orang)	100.00		
	1.06-15	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rata-rata rumah tangga miskin yang mendapat bantuan bedah rumah (RTM) (APBD+APBN)	109.00	350,000,000	305,000,000
	1.06-15.3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Terlaksannya pendampingan manajemen usaha bagi KUBE FM	295 Kelompok	200,000,000	150,000,00
	1.06-15.8	Operasional Program Keluarga Harapan	Tersedianaya Operasional Program Keluarga Harapan	3176 RTSM	150,000,000	155,000,00
	1.06-16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi	Persentase PMKS yang mendapat Bantuan Sosial	35.00	674 640 000	706 000 000
	1.06-16	Kesejahteraan Sosial	Persentase gedung/fasum yang resposif difabel	20.00	674,610,000	706,000,00
	1.06-16.7	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Tersalurkannya bantuan sosial bagi PMKS	50 Orang	399,640,000	420,000,00
	1.06-16.9	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terlaksannya verifikasi/validasi data program penanggulangan Kemiskinan	1 Laporan	89,970,000	98,000,00
	1.06-16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Tertanggulanginya Korban Bencana alam dan sosial	100 %	185,000,000	188,000,00
	1.06-21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan Sosial masyarakat	3.00	123,239,973	155,000,000
			Persentase penduduk bekerja yang membayar zakat melalui Baznas	8.00		
	1.06-21.2	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya kerjasama pelaku-pelaku kesejahteraan sosial	3 Lembaga	61,139,973	75,000,00
	1.06-21.4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Meningkatnya peran ORSOS dalam usaha kesejahteraan sosial	1 Orsos	62,100,000	80,000,00
	2.07	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			1,311,657,197	2,431,661,71
			Persentase Rata -Rata Alokasi Dana Desa	10.00		
	2.07-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Perbandingan Teknologi tepat guna yang dimamfaatkan dan dihasilkan (%) % Kelompok BP-SPAM Aktif	20.00 80.00	358,150,097	653,724,30
	2.07-15.4	Pemanfaatan Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN)	Jumlah sarjana pemberdayaan masyarakat nagari	19 Orang	12,072,800	23,059,71
	2.07-15.6	Fasilitasi Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Terlaksananya Kuliah kerja nyata	7 Perguruan tinggi	25,500,000	97,344,00
	2.07-15.7	Fasilitasi Keberlanjutan PAMSIMAS	Jumlah Lokasi PAMSIMAS yang difasilitasi	108 Lokasi	66,330,000	108,160,00
	2.07-15.9	Pelatihan Pengurus LPMN dan KPM	Terlaksananya pelatihan LPMN dan KPM	78 Orang	75,351,000	185,255,36
	2.07-15.10	Pekan Inovasi Desa/ nagari dan Gelar Peningkatan, Penerapan, Pemanfaatan dan Sentuhan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Tersedianya Posyantek di Nagari	1 Unit	80,724,000	99,905,22
	2.07-15.11	Penilaian KAN Terbaik	Terlaksananya Penilaian KAN terbaik	1 KAN	28,599,000	60,000,00
	2.07-15.12	pemberdayaan masyarakat dalam menunjang TMMD/N	Terlaksananya pembukaan TMMN/D 2018	1 kali	69,573,297	80,000,00
	2.07-16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	ersemase Kerompok Swaudaya masyarakat aktif % KJKS Aktif % Kelompok SPP Aktif	100.00 100.00	99,583,520	169,995,28
			Persentase Nagari yang memiliki Badan Usaha Milik Nagari	51.28		
	2.07-16.7	Monitoring dan Evaluasi Kredit Mikro Nagari	Terlaksannya Monev Kredit Mikro Nagari	23 KJKS	23,329,000	60,000,00

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DALKAIT DANT KOOKAM/KESIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TATION 2010)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	2.07-16.8	Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif	Terlaksananya pembinaan usaha ekonomi produktif	256 Nasabah	24,440,000	41,995,283
	2.07-16.9	Pemberdayaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari( BUMNAG )	Terbentuknya BUMNAG di Nagari	20 BUMNAG	51,814,520	68,000,000
	2.07-17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari	Persentase minimal Dana Nagari yang digunakan dengan pola partisipatif	60.00	233,923,580	658,717,120
	2.07-17.5	Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong	1 Event	71,687,000	142,717,120
	2.07-17.9	Fasilitasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa( P3MD)	Persentasi Nagari yang mendapat dampingan	100 %	71,036,580	416,000,000
	2.07-17.12	Fasilitasi Komunikasi dengan Perantau	Terfasilitasinya komunikasi dengan perantau Persentase aparatur nagari yang memperoleh	1 Kali	91,200,000	100,000,000
	2.07-18	Program peningkatan kapasitas aparatur	pelatihan sesuai tupoksi	100.00	288,000,000	366,225,000
		pemerintah desa	Jumlah Aparatur Nagari yang berprestasi tingkat Provinsi (orang)	1.00	, ,	, ,
	2.07-18.6	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pelatihan manajemn, pengelolaan keuangan dan asset bagi aparatur	156 Orang	203,000,000	246,225,000
	2.07-18.7	Penilaian Kompetensi Aparatur Nagari	Terlaksananya penilaian kompetensi aparatur Persentase Nagari yang menyusun APB tepat	14 Orang	85,000,000	120,000,000
	2.07-20	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan	waktu	100.00	144,000,000	217,000,000
		Keuangan desa	Persentase Nagari yang menyusn Laporan Keuangan tepat waktu	100.00	,,	,,,,,,,,,
	2.07-20.1	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan aset Nagari	Terlaksannya Pembinaan administrasi dan pengelolaan asset nagari	39 Nagari	28,000,000	28,000,000
	2.07-20.2	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Nagari	Terlaksananya evaluasi produk perna	39 Nagari	68,000,000	90,000,000
	2.07-20.3	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tersusunnya Pedoman Pengelolaan Keuangan	4 Perbup	48,000,000	99,000,000
	2.07-21	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan	Nagari Persentase Terlaksananya Profil Nagari Berbasis IT	100.00	188,000,000	366,000,000
		Nagari Fasilitasi Penataan Nagari dan jorong/	Nagari Berprestasi Tingkat Provinsi	1.00		
	2.07-21.1	Pemekaran Nagari dan Jorong	Terlaksananya penataan dan pemekaran nagari	6 Nagari	38,000,000	100,000,000
	2.07-21.2	Evaluasi Perkembangan Nagari	Terlaksananya lomba nagari berprestasi	7 Nagari	60,000,000	60,000,000
	2.07-21.4	Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi Pemerintahan Nagari dengan Pemerintahan Daerah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan	Terlaksananya Rapat koordinasi pemerintah nagari dan pemda	4 Kali	54,000,000	156,000,000
	2.07-21.5	I	Terlaksananya Monev kinerja pemerintahan nagari	39 Nagari	36,000,000	50,000,000
		Nagari			00,000,000	30,000,000
8		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			1,884,650,712	1,936,650,712
8	2.01 2.01-1	DINAS TENAGA KERJA DAN	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100		
8		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi			1,884,650,712 1,294,650,712	1,936,650,712 1,331,650,712
8	2.01-1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100	1,884,650,712 1,294,650,712 526,650,712	1,936,650,712 1,331,650,712 526,650,712
8	<b>2.01-1</b> 2.01-1.1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Surat-Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Belanja Jasa Pemeliharaan dan	<b>100</b> 12 Bulan	1,884,650,712 1,294,650,712 526,650,712 3,999,000	1,936,650,712 1,331,650,712 526,650,712 3,999,000
8	2.01-1 2.01-1.1 2.01-1.2	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Surat-Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	100 12 Bulan 12 Bulan	1,884,650,712 1,294,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000	1,936,650,712 1,331,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000
8	2.01-1 2.01-1.1 2.01-1.2 2.01-1.6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Surat-Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Belanja Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	100 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1,884,650,712 1,294,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000	1,936,650,712 1,331,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000
8	2.01-1.1 2.01-1.2 2.01-1.6 2.01-1.7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Surat-Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Belanja Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1,884,650,712 1,294,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000	1,936,650,712 1,331,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000
8	2.01-1.1 2.01-1.2 2.01-1.6 2.01-1.7 2.01-1.8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Surat-Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Belanja Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya kondisi kantor yang bersih dan rapi	100 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1,884,650,712 1,294,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 80,000,000 24,000,000	1,936,650,712 1,331,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 80,000,000 24,000,000
8	2.01-1.1 2.01-1.2 2.01-1.6 2.01-1.7 2.01-1.8 2.01-1.9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Surat-Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Belanja Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya kondisi kantor yang bersih dan rapi Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik	100 12 Bulan	1,884,650,712 1,294,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 80,000,000 24,000,000	1,936,650,712 1,331,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 80,000,000 24,000,000 10,000,000
8	2.01-1.1 2.01-1.2 2.01-1.6 2.01-1.7 2.01-1.8 2.01-1.9 2.01-1.10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Surat-Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Belanja Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya kondisi kantor yang bersih dan rapi Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1,884,650,712 1,294,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 80,000,000 24,000,000 10,000,000 20,000,000	1,936,650,712 1,331,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 24,000,000 24,000,000 20,000,000
8	2.01-1.1 2.01-1.1 2.01-1.6 2.01-1.7 2.01-1.8 2.01-1.9 2.01-1.10 2.01-1.11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Surat-Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Belanja Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya kondisi kantor yang bersih dan rapi Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Alat-alat Penerangan Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan	100 12 Bulan	1,884,650,712 1,294,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 80,000,000 24,000,000 10,000,000 20,000,000 5,000,000	1,936,650,712 1,331,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 80,000,000 24,000,000 10,000,000 20,000,000 5,000,000
8	2.01-1 2.01-1.1 2.01-1.2 2.01-1.6 2.01-1.7 2.01-1.8 2.01-1.9 2.01-1.10 2.01-1.11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Surat-Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Belanja Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya kondisi kantor yang bersih dan rapi Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Alat-alat Penerangan Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Tersedianya Dana untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar DaerahDalam dan	100 12 Bulan	1,884,650,712 1,294,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 24,000,000 10,000,000 20,000,000 5,000,000	1,936,650,712 1,331,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 80,000,000 24,000,000 10,000,000 20,000,000 5,000,000 20,000,000
8	2.01-1 2.01-1.1 2.01-1.2 2.01-1.6 2.01-1.7 2.01-1.8 2.01-1.9 2.01-1.10 2.01-1.11 2.01-1.12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Surat-Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Belanja Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya kondisi kantor yang bersih dan rapi Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Alat-alat Penerangan Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Tersedianya Dana untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar DaerahDalam dan Luar Daerah	100 12 Bulan	1,884,650,712 1,294,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 24,000,000 24,000,000 20,000,000 5,000,000 20,000,000	1,936,650,712 1,331,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 80,000,000 24,000,000 10,000,000 20,000,000 5,000,000 20,000,000
8	2.01-1 2.01-1.1 2.01-1.2 2.01-1.6 2.01-1.7 2.01-1.8 2.01-1.9 2.01-1.10 2.01-1.11 2.01-1.12 2.01-1.12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Surat-Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Belanja Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya kondisi kantor yang bersih dan rapi Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik Tersedianya Paralatan Kerja yang Baik Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat-alat Penerangan Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Tersedianya Dana untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar DaerahDalam dan Luar Daerah Tersedianya Jasa Pegawai Harian Kantor	100 12 Bulan	1,884,650,712 1,294,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 24,000,000 10,000,000 20,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00	1,936,650,712 1,331,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 24,000,000 20,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00
8	2.01-1 2.01-1.1 2.01-1.2 2.01-1.6 2.01-1.7 2.01-1.8 2.01-1.9 2.01-1.10 2.01-1.11 2.01-1.12 2.01-1.17 2.01-1.18 2.01-1.19	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Surat-Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Belanja Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya kondisi kantor yang bersih dan rapi Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat-alat Penerangan Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Tersedianya Dana untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar DaerahDalam dan Luar Daerah Tersedianya Jasa Pegawai Harian Kantor Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100 12 Bulan	1,884,650,712 1,294,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 24,000,000 20,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00	1,936,650,712 1,331,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 24,000,000 20,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00
8	2.01-1.1 2.01-1.1 2.01-1.6 2.01-1.7 2.01-1.8 2.01-1.9 2.01-1.10 2.01-1.11 2.01-1.12 2.01-1.17 2.01-1.18 2.01-1.19 2.01-1.19 2.01-2.5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Surat-Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Belanja Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya kondisi kantor yang bersih dan rapi Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik Tersedianya Alat-Tulis Kantor Tersedianya Alat-alat Penerangan Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Tersedianya Dana untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar DaerahDalam dan Luar Daerah Tersedianya Jasa Pegawai Harian Kantor Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan Kendaraan	100 12 Bulan 110 Bulan 110 Bulan	1,884,650,712 1,294,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 80,000,000 24,000,000 10,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00	1,936,650,712 1,331,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 24,000,000 20,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 20,3151,712 114,000,000 185,000,000
8	2.01-1 2.01-1.1 2.01-1.2 2.01-1.6 2.01-1.7 2.01-1.8 2.01-1.9 2.01-1.10 2.01-1.11 2.01-1.12 2.01-1.17 2.01-1.18 2.01-1.19	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Surat-Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Belanja Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya kondisi kantor yang bersih dan rapi Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Alat-alat Penerangan Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Tersedianya Dana untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar DaerahDalam dan Luar Daerah Tersedianya Jasa Pegawai Harian Kantor Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100 12 Bulan 11 Bulan 12 Bulan 11 Bulan 11 Bulan 11 Bulan 11 Bulan 11 Bulan	1,884,650,712 1,294,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 80,000,000 24,000,000 20,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00	1,936,650,712 1,331,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 24,000,000 24,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00
8	2.01-1.1 2.01-1.1 2.01-1.6 2.01-1.7 2.01-1.8 2.01-1.9 2.01-1.10 2.01-1.11 2.01-1.12 2.01-1.17 2.01-1.18 2.01-1.19 2.01-1.19 2.01-2.5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya Administrasi Surat-Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Belanja Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya kondisi kantor yang bersih dan rapi Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik Tersedianya Peralatan Kerja yang Baik Tersedianya Alat-Tulis Kantor Tersedianya Alat-alat Penerangan Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Tersedianya Dana untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar DaerahDalam dan Luar Daerah Tersedianya Jasa Pegawai Harian Kantor Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan Kendaraan	100 12 Bulan 110 Bulan 110 Bulan	1,884,650,712 1,294,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 80,000,000 24,000,000 10,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00	1,936,650,712 1,331,650,712 526,650,712 3,999,000 35,000,000 6,500,000 24,000,000 20,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 20,3151,712 114,000,000 185,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAW/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHON 2016)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
			jumlah peserta keterampilan menjahit	16 orang		
	2.01-15.6	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi	Jumlah peserta pendidikan dan keterampilan Las SMAW 3 G	16 orang	213,000,000	220,000,000
		pencari kerja	Jumlah peserta pendidikan dan keterampilan tata boga	16 orang		
	2.01-15.13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenaga Kerjaan	Tersedianya perencanaan gedung Work Shop	1 unit	75,000,000	85,000,000
	2.01-16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya tingkat partisipasi angakatan kerja (TPAK) (%)	68,68	220,000,000	245,000,000
			Menurunkan tingkat pengangguran (%) Tersedianya informasi bursa kerja bagi perusahaan	5.64		
	2.01-16.2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	dan pencaker	12 Bulan	45,000,000	45,000,000
	2.01-16.6	Pemberian fasilitasi pendanaan berbasis masyarakat	Terlaksananya kegiatan padat karya produktif	1 Paket	175,000,000	200,000,000
	2.01-17	Program Perlindungan dan Pengembangan	% Kasus perselisihan tenaga kerja yang diselesaikan	100.00	50,000,000	55,000,000
	2.01-17	Lembaga Ketenagakerjaan	% Kasus peselisihan hubungan industrial	3,5	30,000,000	33,000,000
	2.01-17.2	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan hubungan industrial	12 Bulan	20,000,000	25,000,000
	2.01-17.4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan	Terlaksananya sosialisasi sistim manajemen k3	20 perusahaan	30,000,000	30,000,000
	2.04	tentang ketenagakerjaan URUSAN PERTANAHAN			-	-
	2.04-16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya tanah untuk pembangunan Gedung BLK	1 lokasi	-	-
	2.04-16.3	Perencanaan Pengadaan Tanah*)	Terlaksananya perencaan pengadaan tanah untuk bangunan Gedung BLK	1 lokasi	-	-
	2.04-16.4	Persiapan Pengadaan Tanah*)	Terlaksananya Persiapan pengadaan tanah	1 lokasi	-	-
	2.04-16.5	Pelaksanaan Pengadaan Tanah *)	Tersedianya tanah untuk pelaksanaan	1 lokasi	_	
		,	pembangunan			
	2.04-16.6	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah *)	Terlaksananya penyerahan hasil pengadaan tanah	1 lokasi	-	
	3.08	URUSAN TRANSMIGRASI Program Pengembangan Wilayah	Persentse lembaga ekonomi di wilayah		590,000,000	605,000,000
	3.08-18	Transmigrasi	transmigrasi aktif	100.00	590,000,000	605,000,000
	3.08-18.5	Peningkatan Kualitas Lembaga Ekonomi Warga Transmigrasi	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Lembaga Ekonomi Warga Transmigrasl	7 kelompok	70,000,000	75,000,000
	3.08-18.6	Penyusunan Rencana Teknis tentang Ketransmigrasian	Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP)	1 lokasi	390,000,000	400,000,000
	3.08-18.7	Sosialisasi Perencanaan dan Pembangunan	Terlaksananya sosialisasi perencanaan dan	60 orang	30,000,000	30,000,000
	3.08-18.8	Transmigrasi Penyusunan Ranperda Penetapan Peruntukan Lahan Program Transmigrasi Baru (PTB)	pembangunan Transmigrasi Tersusunnya ranperda penetapan peruntukan lahan PTB	1 dokumen	50,000,000	50,000,000
	3.08-18.9	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Tersedianya lahan bersertifikat untuk kegiatan	1 lokasi	50,000,000	50,000,000
9	0.00 10.0	Masyarakat Untuk Lahan Transmigrasi  DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	transmigrasi	· ioidoi	2,444,692,052	3,206,860,000
J	2.10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			2,334,692,052	2,986,860,000
		Program Pelayanan Administrasi				
	2.10-1	Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100	493,692,052	681,860,000
	2.10-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Terlaksananya jasa surat-menyurat selama Terpenuhinya kebutuhan akan jasa komunikasi, air	1 Tahun	2,500,000	3,000,000
	2.10-1.2	dan listrik	dan listrik	1 Tahun	12,832,052	17,000,000
	2.10-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	2,500,000	3,000,000
	2.10-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi pengelola keuangan	1 Tahun	85,660,000	85,660,000
	2.10-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya Jasa kebersihan kantor	1 Tahun	37,800,000	37,800,000
	2.10-1.9 2.10-1.10	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 Tahun 1 Tahun	4,000,000 10,000,000	5,000,000 20,000,000
	2.10-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	10,000,000	25,000,000
	2.10-1.12	Penyediaan komponen instalasi	Tersedianya komponen instalasi listrik dan	1 Tahun	3,000,000	4,000,000
	2.10-1.13	listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penerangan kantor  Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	25,000,000	80,000,000
	2.10-1.13	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	12,000,000	30,000,000
	2.10-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	200,000,000	280,000,000
	2.10-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya jasa Tenaga pendukung admin kantor	1 Tahun	86,400,000	86,400,000
	2.10-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Tahun	2,000,000	5,000,000
	2.10-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas	100.00	78,000,000	255,000,000
		Aparatur	dan kegiatan			

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
			INDIKATOR	TARGET	,	(TAHUN 2019)
1	2	3	4 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung	5	6	7
	2.10-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kantor	1 Tahun	10,000,000	60,000,000
	2.10-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1 Tahun	60,000,000	95,000,000
	2.10-15	Program Pengembangan Komunikasi,	OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi layanan publik berbasis IT	6.00	1,318,000,000	1,350,000,000
		Informasi dan Media Massa	Jumlah blank spot di area pemukiman	10.00	1,010,000,000	1,555,555,555
	2.10-15.8	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	Jumlah Menara Telekomunikasi Yang dibina dan Memenuhi Syarat dan Ketentuan	30 BTS	60,000,000	70,000,000
	2.10-15.16	Pembinaan dan pengawasan jasa pos dan telekomunikasi	Jumlah Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi Yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan	2 Jasa pos dan Titipan	18,000,000	30,000,000
	2.10-15.17	Pembangunan Jaringan Lokal Area Network (LAN) antar SKPD	Jumlah SKPD yang terhubung dalam LAN (Local Area Network)	33 SKPD/OPD	1,200,000,000	1,200,000,000
	2.10-15.18	Perbaikan dan penggantian komponen jaringan	Jumlah Jaringan LAN SKPD Dalam Kondisi Baik	33 SKPD/OPD	40,000,000	50,000,000
	2.10-17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Prersentase Aplikasi Informasi data yang diimplentasikan	100	10,000,000	20,000,000
	2.10-17.1	Pendidikan dan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah Tersedianya SDM di bidang komunikasi dan Informatika dalam menuju pengelolaan pemerintahan berbasis e-Government	2 Orang	10,000,000	20,000,000
	2.10-19	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik *)	Persentasi pelayanan publik yang bisa diakses oleh masyarakat	100	320,000,000	460,000,000
	2.10-19.1	Peningkatan dan pengembangan website Kab. Solok Selatan	Jumlah Website SKPD Yang Telah Dilakukan Updating Secara Berkala	6 SKPD/OPD	60,000,000	80,000,000
	2.10-19.2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah layanan data pembangunan kabupaten Solok Selatan	33 SKPD/OPD	85,000,000	150,000,000
	2.10-19.3	Pengoperasian gedung studio radio pemerintah daerah	Jumlah Layanan akses informasi interaktif masyarakat secara berkala	365 Hari	125,000,000	150,000,000
	2.10-19.4	Fasilitasi kampung digital	Jumlah Jorong atau nagari yang terhubung secara	1 Lokasi	50,000,000	80,000,000
	2.10-20	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan media masa *)	TI dengan pusat pemerintahan  Cakupan pembinaan Kelompok Informasi  Masyarakat	100	85,000,000	130,000,000
	2.10-20.1	Pelaksanaan diseminasi informasi dan partisipasi pameran/ expo	Jumlah Jenis Media Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi	2 Kali	50,000,000	60,000,000
	2.10-20.2	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)	Jumlah Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	4 KIM	35,000,000	70,000,000
	2.10-21	Program pengelolaan persandian daerah	Persentase OPD yang menyusun SOP Persandian	75.00	30,000,000	90,000,000
	2.10-21.2	Monitoring dan evaluasi pengelolaan	Pengawasan dan penilaian pengelolaan persandian	1 Tahun	30,000,000	90,000,000
	2.14	persandian daerah URUSAN STATISTIK	daerah		110,000,000	220,000,000
	2.14-15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral yang dipublikasikan	100.00	110,000,000	220,000,000
	2.14-15.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tesedianya Buku Solok Selatan Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka Solok Selatan	2 Dokumen	35,000,000	70,000,000
	2.14-15.3	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Tersedianya Buku PDRB Solok Selatan	1 Dokumen	40,000,000	70,000,000
	2.14-15.9	Kerjasama penyusunan dokumen statistik sektoral	Tersedianya Dokumen NTP Solok Selatan	1 Dokumen	35,000,000	80,000,000
10		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			3,089,347,566	3,105,255,000
	2.12	URUSAN PENANAMAN MODAL			3,089,347,566	3,105,255,000
	2.12-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100	663,469,560	825,255,000
	2.12-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	600 Lembar	2,400,000	2,400,000
	2.12-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	20,000,000	30,000,000
	2.12-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	15 Orang	110,000,000	121,560,000
	2.12-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	12,000,000	12,000,000
	2.12-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	3,019,560	2,820,000
	2.12-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000	35,000,000
	2.12-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	49,575,000	35,000,000
	2.12-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	3,075,000	3,075,000
	2.12-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	15,000,000	15,000,000
	2.12-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	250,000,000	400,000,000
	2.12-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor *)	12 Bulan	98,400,000	98,400,000
	2.12-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Alat kebersihan dan Bahan Pembersih *)	12 Bulan	3,000,000	3,000,000
	2.12-1.22	Penyedian jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah jabatan	Tersedianya jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah jabatan*)	2 Unit	67,000,000	67,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAW/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHON 2016)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	2.12-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100	629,545,256	270,000,000
	2.12-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	283,277,690	100,000,000
	2.12-2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meja Kerja Pejabat, Kursi Pejabat, Lemari Arsip Keuangan, Filling Kabinet Besi, Kursi Tamu dll	1 Paket	250,347,566	70,000,000
	2.12-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	95,920,000	100,000,000
	2.12-15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumah investor yang yang menanamkan investasi	2 investor	395,000,000	470,000,000
	2.12-15.1	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan UMKM/IKM dengan PMDN/PMA	5 MoU	70,000,000	60,000,000
	2.12-15.6	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Nilai realisasi investasi swasta dalam kerjasama penyediaan infrastruktur sarana dasar (Rp.Milyar)	1 Laporan	65,000,000	60,000,000
	2.12-15.8	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	3 Laporan	50,000,000	50,000,000
	2.12-15.9	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Pelayanan Prima	50 Orang	50,000,000	100,000,000
	2.12-15.10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya promosi peluang unggulan	3 kali	160,000,000	200,000,000
	2.12 10.10	- onyolonggaraan ramolan mrootadi	investasi(cetak dan elektronik) peningkatan Realisasi Investasi per tahun PMDN		100,000,000	200,000,000
	2.12-16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	(Rp.juta) peningkatan Realisasi Investasi per tahun PMDN	180,000	1,051,332,750	1,020,000,000
			PMA(\$ ribu)	76,922		
	2.12-16.2	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Terfasilitasinya Operasional Forum Komunikasi CSR	1 Laporan	60,000,000	60,000,000
	2.12-16.3	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi sms gate way perizinan	Tersedia dan termanfaatkannya Aplikasi SMS gate way	1 Aplikasi	10,000,000	15,000,000
	2.12-16.4	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Tersedia dan termanfaatkannya Website Perizinan	1 Aplikasi	135,000,000	120,000,000
	2.12-16.5	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi	Terlaksananya Aplikasi SIPPADU	1 Paket	130,000,000	70,000,000
	2.12-16.7	SIPADU	Tersedianya Regulasi daerah tentang SOP dan	2 Dokumen		
	2.12-16.9	Kajian kebijakan penanaman modal  Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Juknis Perizinan  Terlaksananya pengawasan ketertiban pendirian	2 Laporan	210,000,000	185,000,000 350,000,000
	2.12-16.20	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan	perizinan, serta survey tingkat kepuasan masyarakat Terlaksananya pelayanan perizinan prima	1 tahun	181,332,750	170,000,000
	2.12-16.21	Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Langsung di Lapangan	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Langsung di	1 Laporan	45,000,000	50,000,000
	2.12-16.21		Lapangan	т цароган	45,000,000	50,000,000
	2.12-17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Jumlah dokumen potensi investasi	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000
	2.12-17.1	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Tersedianya Dokumen dan Audio Visual Peluang Investasi daerah	1 Paket	100,000,000	100,000,000
	2.12-18	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi terbaru dan Terbarukan	persentase kelompok pemamfaatan energi terbarukan aktif	71.00	250,000,000	420,000,000
	2.12-18.1	Pembinaan dan Pengawasan Energi Baru Terbarukan	Terlaksananya Pembinaan, pengawasan pemanfaatan energi baru terbarukan pada Kelompok masyarakat	1 Laporan	75,000,000	170,000,000
	2.12-18.2	Pengembangan Potensi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung	Tersedianya Kajian Potensi Panas Bumi	1 Dokumen	175,000,000	250,000,000
11		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			1,313,041,391	4,833,400,000
	2.17	URUSAN PERPUSTAKAAN			937,521,391	4,228,400,000
	2.17-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100	464,521,391	635,900,000
	2.17-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	2,500,000	3,000,000
	2.17-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	22,041,391	27,600,000
	2.17-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	4,680,000	10,000,000
	2.17-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan	12 Bulan	3,100,000	3,800,000
	2.17-1.7	kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan	kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	55,000,000	95,000,000
	2.17-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	3,700,000	10,000,000
	2.17-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	20,000,000	25,000,000
	2.17-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	19,500,000	30,000,000
	2.17-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	2,500,000	5,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
			INDIKATOR	TARGET	, ,	(TAHUN 2019)
1	2 2.17-1.13	3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 1 Paket	<b>6</b> 25,000,000	<b>7</b> 45,000,000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan			
	2.17-1.15	perundang-undangan	perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000	11,500,000
	2.17-1.17	Penyediaan makanan dan minuman  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Tersedianya makanan dan minuman  Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	10,000,000	10,000,000
	2.17-1.18	daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	ke luar daerah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	12 Bulan	200,000,000	250,000,000
	2.17-1.19	Administrasi Kantor	Kantor *)	12 Bulan	84,000,000	102,000,000
	2.17-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Alat kebersihan dan Bahan Pembersih *)	12 Bulan	7,500,000	8,000,000
	2.17-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100	128,000,000	3,060,000,000
	2.17-2.3	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya 'Pembangunan gedung kantor (Depo Arsip)	1 Paket	-	2,700,000,000
	2.17-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya 'Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	20,000,000	100,000,000
	2.17-2.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya Pengadaan mebeleur	1 Paket	25,000,000	125,000,000
	2.17-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	15,000,000	50,000,000
	2.17-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/ Operasional	12 Bulan	52,000,000	65,000,000
	2.17-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan Kantor	12 Bulan	16,000,000	20,000,000
	2.17-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	jumlah aparatur yang mendapat pelatihan sesuai	10 orang	20,000,000	35,000,000
	2.17-5.1	Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal	tupoksi  Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	20,000,000	35,000,000
	2.17-15	Program Pengembangan Budaya Baca dan	Meningkatnya angka melek huruf	99.26	325,000,000	497,500,000
		Pembinaan Perpustakaan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada	Terlaksananya Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi			
	2.17-15.1	Perpustakaan . Lomba Perpustakaan Terbaik se Kabupaten	pada Perpustakaan Terlaksananya lomba Perpustakaan Terbaik se	15 pustaka	165,000,000	200,000,000
	2.17-15.2	Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan	1 event	30,000,000	50,000,000
	2.17-15.3	Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan	Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Derah dan Keliling	12 Bulan	35,000,000	65,000,000
	2.17-15.4	Kegiatan Pemeran dan Bazar Buku	Terlaksananya Pemeran dan Bazar Buku	1 event	15,000,000	45,000,000
	2.17-15.5	Forum Group Discusion bagi Pengelola Perpustakaan Sekolah SMK, SMA, SMP dan Nagari	Terselenggaranya Forum Group Discusion	120 orang	50,000,000	72,500,000
	2.17-15.7	Lomba bercerita tingkat SD/MI se-Kabupaten Solok Selatan	Terselenggaranya Lomba Bercerita untuk 40 Orang Siswa SD/Mi se Kabupaten Solok Selatan	12 Bulan	30,000,000	65,000,000
	2.18	URUSAN ARSIP			375,520,000	605,000,000
	2.18-15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Implementasi data base informasi kearsipan (e-arsip)	sudah	98,335,000	150,000,000
	2.18-15.8	Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan	Tersedianya Database dan Aplikasi Kearsipan	1 Aplikasi	98,335,000	150,000,000
		Dinamis (E-arsip)	berbasis Komputer  Jumlah Arsip daerah yang diselamatkan dan	25.00		
	2.18-16	Program penyelamatan dan pelestarian	didokumentasikan Persentase OPD yang telah menerapkan Arsip	40.00	277,185,000	455,000,000
		dokumen/arsip daerah	Secara baku Persentase Nagari yang telah merapkan Arsip	69.00		,
	0.40.40.4	Pengadaan sarana pengolahan dan	Secara baku Tersedianya Peralatan untuk Pengolahan dan			
	2.18-16.1	penyimpanan arsip Pendataan dan penataan dokumen/arsip	Penyimpanan Arsip	12 Bulan	55,000,000	100,000,000
	2.18-16.2	daerah	Arsip OPD tertata dengan baik	13 OPD	35,000,000	70,000,000
	2.18-16.5	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Kearsipan	Tersusunnya peraturan Bupati tentang Kearsipan	1 Perbup	35,000,000	70,000,000
	2.18-16.9	Fasiltasi dan Penataan Arsip Nagari	Terlaksananya Fasiltasi dan Penataan Arsip Nagari	39 Nagari	40,000,000	45,000,000
	2.18-16.10	Forum Group Discussion Arsip Dinamis, Statis dan Arsip Aset	Terlaksananya FGD Kearsipan	1 Laporan	50,000,000	95,000,000
	2.18-16.14	Kegiatan Retensi Arsip	Terlaksananya Penataan Arsip Statis sesuai dengan Klasifikasi Arsip	12 Bulan	62,185,000	75,000,000
12		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			2,847,091,361	3,210,110,321
	2.03	URUSAN PANGAN			1,634,286,361	1,898,110,321
	2.03-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100	642,866,361	1,004,735,321
	2.03-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat kantor	12 bulan	3,996,000	5,200,000
	2.03-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terrsedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	60,000,000	60,000,000
	2.03-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	110,520,000	155,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DALKAH DAN PROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHON 2016)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	2.03-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	29,000,000	52,000,000
	2.03-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	6,585,321	6,585,321
	2.03-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	20,013,040	52,000,000
	2.03-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	20,362,000	20,000,000
	2.03-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	56,950,000	56,950,000
	2.03-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	10,000,000	12,000,000
	2.03-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah	12 bulan	249,440,000	455,000,000
	2.03-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (orang)	12 bulan	72,000,000	125,000,000
	2.03-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	12 bulan	4,000,000	5,000,000
	2.03-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100	209,775,000	205,775,000
	2.03-2.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya Pengadaan mebeleur	1 Paket	30,775,000	30,775,000
	2.03-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Perkantoran	1 paket	25,000,000	25,000,000
	2.03-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 bulan	154,000,000	150,000,000
	2.03-16	dinas/operasional Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kendaraan Operasional  Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan sesuai tupoksi	5 orang	35,000,000	40,000,000
	2.03-16.3	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Fungsional	5 orang	35,000,000	40,000,000
	2.03-18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (%)	68.28	746,645,000	647,600,000
			Penguatan Cadangan Pangan (ton)	185.00	, ,	
	2.03-18.1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	7 Kecamatan	55,480,000	120,000,000
	2.03-18.2	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	Tersusunnya dokumen data Base dan Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen	40,010,000	27,500,000
	2.03-18.3	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Tersusunnya dokumen Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	1 Dokumen	37,870,000	5,100,000
	2.03-18.4	Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	Tersusunnya dokumen Kajian rantai pasokan dan Pemasaran Pangan	1 Dokumen	28,320,000	24,000,000
	2.03-18.5	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok penerima manfaat pengembangan pangan pekarangan	7 kelompok	149,575,000	50,000,000
	2.03-18.6	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	7 kecamatan	100,000,000	21,000,000
	2.03-18.7	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan	5 Nagari	37,075,400	60,000,000
	2.03-18.8	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Pelaku Usaha dan Pasar Dalam Pegawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	30 Pelaku Usaha	80,349,600	210,000,000
	2.03-18.9	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Tersedianya Media dan Informasi Mutu Pangan Masyarakat, Terlaksananya pemantauan ketersediaan harga dan pasokan di Pasar	3 Media Cetak dan Dokumen	169,190,000	60,000,000
	2.03-18.12	Koordinasi Pengembangan Ketahanan Pangan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan	10 Laporan	48,775,000	70,000,000
	3.01	Daerah URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	kerawanan pangan (pertemuan)		1,212,805,000	1,312,000,000
	3.01-20	Program pengembangan kawasan budidaya perikanan	Meningkatnya produksi budidaya sebesar 20%/ tahun (ton)	1,340.00	778,225,000	915,000,000
			Rata-rata RTM penerima bantuan usaha ekonomi di bidang perikanan	20.00		
	3.01-20.1	Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah produksi benih ikan unggul	1400000 Ekor	427,785,000	450,000,000
	3.01-20.8	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah peserta bimbingan Teknis Petugas BBI dan UPR	15 Orang	128,520,000	195,000,000
	3.01-20.9	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pendampingan pengembangan sarana dan prasarana budi daya dan gerakan pakan mandiri dari APBN	10 Pokdakan	221,920,000	270,000,000
	3.01-23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Meningkatnya tingkat konsumsi ikan dan jaminan keamanan pangan produk perikanan (kg/kapita)	21.50	315,870,000	225,000,000
	3.01-23.2	Gerakan Peningkatan Konsumsi makan ikan	Terlaksananya Gerakan Memasyarakatkan makan ikan mulai usia dini dan terciptanya kreatifitas menu olahan bahan baku ikan	4 Event	165,870,000	200,000,000
	3.01-23.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan	Terlaksananya pembuatan Kios Mini Ikan Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	1 Paket	150,000,000	25,000,000
	3.01-24	Pogram Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan air Tawar	Meningkatnya luas wilayah pengembangan perikanan (Ha)	1.00	43,710,000	60,000,000
	3.01-24.2	Pengembangan Kawasan Mina Padi	Luas demplot mina padi	1 Ha	43,710,000	60,000,000
	3.01-25	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Meningkatnya kelompok budidaya perikanan	14 Pokmaswas	75,000,000	112,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	3.01-25.1	Restocking Perairan Umum	Terlaksananya restocking Perairan Umum	14 sungai	75,000,000	112,000,000
13		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			2,488,637,024	3,966,928,967
	2.06	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			2,488,637,024	3,966,928,967
	2.06-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100	848,712,200	1,184,185,437
	2.06-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	5,554,000	8,200,000
	2.06-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan	12 bulan	42,100,000	55,800,000
	2.06-1.3	dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	listrik Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	45,950,000	150,000,000
		kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan			
	2.06-1.6	kendaraan dinas/operasional	kendaraan	12 bulan	6,900,000	7,500,000
	2.06-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	94,920,000	105,320,000
	2.06-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	15,600,000	20,000,000
	2.06-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	29,760,000	35,300,000
	2.06-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	38,800,000	82,918,289
	2.06-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	30,000,000	34,000,000
	2.06-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	4,546,000	7,200,000
	2.06-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan minum	12 Bulan	37,920,000	38,920,000
	2.06-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Tersedianya biaya perjalanan Dinas kedalam dan	12 Bulan	327,199,200	455,564,148
	2.06-1.19	daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	luar daerah Tersedianya jasa tenaga pendukung Administrasi Kantor	12 Bulan	164,400,000	176,400,000
	2.06-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan	Tersedianya Alat alat kebersihan dan bahan	12 Bulan	5,063,000	7,063,000
	2.06-2	Pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	pembersih Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100	168,807,150	203,256,651
	2.06-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	19,827,150	33,000,000
	2.06-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Terpelihara kendaraan dinas roda empat dan roda	12 Bulan	148,980,000	170,256,651
		dinas/operasional	dua Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian		140,000,000	
	2.06-3	Program peningkatan disiplin aparatur	dinas	100	-	28,000,000
	2.06-3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dlnas beserta perlengkapannya	50 Stel	-	28,000,000
	2.06-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang mendapat pelatihan sesuai tupoksi	6 orang	-	40,000,000
	2.06-5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya Pakaian Dlnas beserta perlengkapannya	6 Orang	-	40,000,000
	2.06-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	20,950,474	20,950,474
	2.06-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Terlaksananya pengembangan sistem laporan	2 Dokumen	20,950,474	20,950,474
	2.00 0.1	ikhtisar realisasi kinerja SKPD	capaian kinerja OPD Cakupan penerbitan kartu keluarga (%)	100.00	20,000,11	20,000,
		December Devetors Administrati	Cakupan penerbitan KTP elektronik (%)	82.00		
	2.06-15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran (%)	75.00	1,450,167,200	2,490,536,405
			Cakupan penerbitan kutipan akta perkawinan (%)	75.00		
	2.06-15.2	Pelatihan tenaga pengelola ADMINDUK	Jumlah Tenaga Pengelola SIAK yang terlatih	35 Orang	50,864,000	90,000,000
	2.06-15.3	Implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Perangkat	Terlaksananya pembangunan ,pengembangan dan pemeliharaan perangkat SIAK	9 Sentra layanan	371,996,400	750,000,000
	2.06-15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersedianya Basis data yang Valit dan akurat	1 Laporan	12,588,000	90,000,000
	2.06-15.8	Pengembangan data base kependudukan	Tersedianya Profil Perkembangan penduduk sebagai acuan dalam membuat kebijakan	1 Dokumen	30,000,000	75,000,000
	2.06-15.11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan(Bidan,Jorong,Walinagari,Camat,SK PD terkait	150 Orang	62,304,000	185,000,000
	2.06-15.21	Pelayanan Prima Akta Perkawinan dan Akta	Terlaksananya penerbitan akte perkawinan dan	55 lembar	20,000,000	40,000,000
	2.06-15.22	Perceraian Penataan Kearsipan Dokumen Capil	perceraian masyarakat non muslim Tertatanya arsip dokumen pencatatan sipil	12 Bulan	50,000,000	40,000,000
	2.06-15.25	Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun (Nawacita Pertama 2015- 2019)	Terlaksananya penerbitan Akta kelahiran Anak usia 0-18 Tahun	7500 Akta	115,000,000	40,000,000
	2.06-15.29	Penyediaan Informasi yang dapat di Akses masyarakat	Tersedianya informasi yang akurat tentang pelayanan Administrasi Kependudukan	12 Bulan	86,180,000	90,536,405
	2.06-15.30	Pemutakhiran Data kepemilikan akta kelahiran	Meningkatnya persentase kepemilikan akte kelahiran secara signifikan	1500 Akta	17,000,000	50,000,000
	•	•				

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	2.06-15.31	Pelayanan dan penerbitan dokumen catatan sipil	Terlaksananya penerbitan dokumen pencatatan sipil	7500 Akta	224,132,000	200,000,000
	2.06-15.32	pelayanan prima akta kematian	Terlayani permohonan penerbitan akta kematian masyarakat	100 Akta	16,540,000	50,000,000
	2.06-15.33	pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan	Terlaksananya pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan	1 tahun	200,000,000	350,000,000
	2.06-15.34	Pelayanan KTP elektronik keliling	Terlaksananya pelayanan KTP elektronik keliling	1 tahun	83,562,800	155,000,000
	2.06-15.35	Pelayanan mutasi penduduk dan orang asing	Terlaksananya pelayanan mutasi penduduk dan orang asing	1 tahun	50,000,000	165,000,000
	2.06-15.36	Pemutakhiran data penduduk	Terlaksananya pemutakhiran data penduduk	1 dokumen	60,000,000	120,000,000
14		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4,581,820,364	4,866,370,364
	2.02	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1,826,970,000	1,887,970,000
	2.02-15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase ketersediaan Perda/ Perbup/ SK KDH mengenai Pelaksanaan PUG dan Pemenuhan Hak Anak	45.00	10,000,000	11,000,000
	2.02-15.5	Perumusan Kebijakan Kabupaten Layak Anak	TerlaksananyaPembuatan Perda Kabupaten layak anak	1 perda	10,000,000	11,000,000
	2.02-16	Program Pengarusutamaan Gender dan Anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	72.28	53,000,000	70,000,000
	2.02-16.1	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Terlaksananya sosialisasi PUG	60 orang	8,000,000	20,000,000
	2.02-16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Terlaksananya operasional pendampingan korban kekerasan	12 orang / petugas	30,000,000	33,000,000
	2.02-16.13	Fasilitasi Forum Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan	Terlaksananya Fasilitasi Forum anak Penyelesaian kasus kekerasan terhadap	1 lembaga	15,000,000	17,000,000
	2.02-17	Perlindungan Perempuan	perempuan	80.00	7,000,000	50,000,000
	2.02-17.5	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi tenaga kerja perempuan	60 orang	7,000,000	50,000,000
	2.02-18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	43.89	790,090,000	790,090,000
	2.02-18.8	Fasilitasi kegiatan GOW Kab. Solok Selatan	Terlaksanya Fasilitasi kegiatan GOW	12 bulan	469,830,000	469,830,000
	2.02-18.9	Fasilitasi kegiatan DWP Kab. Solok Selatan	Terlaksanya kegiatan dharmawanita	12 bulan	160,260,000	160,260,000
	2.02-18.10	Fasilitasi kegiatan IKA DPRD Kab. Solok Selatan	Terlaksanya kegiatan IKA DPRD	12 bulan	160,000,000	160,000,000
	2.02-20	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Keluarga Sejahtera (%)	93.19	966,880,000	966,880,000
	2.02-20.1	Pelaksanaan Jambore Kader PKK Tk.Kabupaten dan Provinsi	Terlaksananya Jambore kader PKK	2 kali kegiatan	202,374,000	202,374,000
	2.02-20.2	Kegiatan dan Lomba 10 Program Pokok PKK	Terlaksananya lomba 10 program pokok pkk	1 lomba	475,006,000	475,006,000
	2.02-20.3	Bulan Bhakti Dasa Wisma	Terlaksananya sosialisasi dan evaluasi bagi kader dasawisma	100 orang	23,700,000	23,700,000
	2.02-20.4	Pelatihan Gerakan PKK dan Pelatihan Dasawisma	Terlaksananya pelatihan gerakan PKK dan pelatihan dasawisma	50 orang	78,780,000	78,780,000
	2.02-20.5	Pembinaan Sikap dan Perilaku Melelui Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pembinaan sikap dan perilaku melalui peran keluarga dalam upaya pencegahan dan penyallahgunaan narkoba	140 orang	15,190,000	15,190,000
	2.02-20.6	Sosialisasi PKDRT dan Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak	Terlaksananya sosialisasi PKDRT dan gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak	115 orang	12,915,000	12,915,000
	2.02-20.7	Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Keluarga Sakinah	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi pola asuh anak dan keluarga sakinah	150 orang	16,100,000	16,100,000
	2.02-20.9	Sosialisasi Pengembangan UP2K dan BKB	Terlaksananya kegiatan pengembangan UP2K dan BKB	100 orang	12,150,000	12,150,000
	2.02-20.10	Soasialisasi Pembibitan Tanaman dan Sosialisasi Makanan B2SA	Terlaksananya sosialisasi pembibitan tanaman dan sosialisasi makanan B2SA	145 orang	28,555,000	28,555,000
	2.02-20.11	Pelaksanaan Kegiatan Kesatuan Gerak PKK,KB dan Kesehatan	Terlaksananya kegiatan kesatuan gerak PKK, KB dan Kesehatan	1 lomba	32,550,000	32,550,000
	2.02-20.12	Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu, Penyakit Menular, Soaialisasi Iva Test, Germas, Peningkatan Gizi Bumil,Bayi dan Balita	Terlaksananya kegiatan revitalisasi gerakan sayang ibu, penyakit menular, sosialisasi iva test, germas, peningkatan gizi bumil, bayi dan balita	610 orang	69,560,000	69,560,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	2.08	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2,754,850,364	2,978,400,364
	2.08-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	682,510,364	694,560,364
	2.08-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 bulan	500,000	550,000
	2.08-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Belanja air, Telepon dan Listrik	12 Bulan	2,000,000	2,000,000
	2.08-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksanya belanja STNK, KIR	12 Bulan	10,000,000	10,000,000
	2.08-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Honor Pengelola Keuangan	12 Bulan	144,456,480	144,456,480
	2.08-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	12 bulan	1,000,000	12,000,000
	2.08-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan dan peralatan kantor	12 Bulan	1,000,000	2,000,000
	2.08-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	10,000,000	10,000,000
	2.08-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000
	2.08-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu	12 bulan	10,000,000	10,000,000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar			
	2.08-1.18	daerah	daerah	12 bulan	273,553,884	273,553,884
	2.08-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	12 bulan	220,000,000	220,000,000
	2.08-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	85,000,000	85,000,000
	2.08-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksanya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	85,000,000	85,000,000
	2.08-15	Program Keluarga Berencana	% ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB	100.00	1,592,400,000	1,593,900,000
	2.08-15.6	Pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)	1 Paket	1,093,000,000	1,093,000,000
	2.08-15.8	Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	Terlaksananya Harganas tingkat Nasional	1 kali	15,000,000	16,500,000
	2.08-15.12	Biaya Operasional Keluarga Berencana ( DAK BOK KB )	Tersedianya operasional PLKB di 7 UPTD tujuh Kecamatan	12 bulan	484,400,000	484,400,000
	2.08-17	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase pasasangan usia subur sebagai akseptor KB melalui program pemerintahan	55.00	30,000,000	63,400,000
	2.08-17.3	Pengadaan alat kontrasepsi dan Side Efek Implant	Terlaksananya pengadaan alkont dan side efek implan KB	1 paket	6,000,000	36,600,000
	2.08-17.5	Pelayanan Safari KB Melalui Bhakti IBI, BHAYANGKARA, TMKK, HKG PKK *)	Terlaksananya pelayanan KB bagi masyarakat pada safari KB	8 kali	24,000,000	26,800,000
	2.08-18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase PUS sebagai Akseptor KB melalui program mandiri	45.00	309,940,000	421,940,000
	2.08-18.1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat	Terlaksananya pembentukan kelompok masyarakat	9 kelompok	8,000,000	25,000,000
	2.08-18.2	Pengadaan Operasional PKKBD dan Sub	peduli KB Terlaksanaya pemberian transportasi bagi Kader	392 orang	264,940,000	264,940,000
		PKKBD Jambore IPKB dan IMP tk Kabupaten dan	PPKBD dan sub PPKBD Terlaksananya Jambore IPKB dan IMP tk	_		
	2.08-18.3	Provinsi*) Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam	Kabupaten dan Provinsi Terlaksananya pembinaan peran serta masyarakat	2 kali 14 kelompok	5,000,000	22,000,000
	2.08-18.5	Pelayanan KB/Bina Keluarga Balita  Pembentukan,Sosialisasi/Pelatihan dan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan	dalam pelayanan KB/bina keluarga balita  Terlaksananya sosialisasi/pelatihan dan pembinaan	15 kelompok	5,000,000	50,000,000
	2.00 10.0	Keluarga Sejahtera ( UPPKS )	UPPKS	To Relemper	0,000,000	
	2.08-18.6	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan Keluarga Sejahtera/Bina Keluarga Lansia ( BKL )	Terlaksananya pembinaan peran serta masyarakat kelompok bina keluarga lansia	7 kelompok	5,000,000	25,000,000
	2.08-20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling Remaja KRR*)	persentase remaja 10 s/d pra nikah dan keluarga remaja yang mendapat pelayanan informasi dan konseling	40.00	47,000,000	70,800,000
	2.08-20.4	Pembentukan, Sosialisasi/Pelatihan dan Pembinaan Generasi Berencana ( GENRE )	Terlaksananya sosialisasi genre dan terpilihnya duta genre tingkat kabupaten	50 orang	20,000,000	22,000,000
	2.08-20.5	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Bina	Terlaksananya pembinaan kelompok BKR di tingkat	30 kelompok	6,000,000	26,600,000
	2.08-20.6	Keluarga Remaja Jambore PIK Remaja dan Saka Kecana	SLTA dan SLTP Terlaksananya jambote PIK remaja dan saka kencana	20 orang	21,000,000	22,200,000
	2.08-24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Terbentuknya dan terbinanya Kelompok BKB Posyandu PADU di setiap Nagari (Kelompok)	80.00	8,000,000	48,800,000
	2.08-24.1	Pengembangan model operasional BKB- Posyandu-PADU dan Temu Kader BKB- Posyandu-PADU	Terlaksananya sosialisasi BKB-Posyandu-PADU	33 orang	8,000,000	48,800,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN Maju
		DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
15		DINAS PERHUBUNGAN			5,178,715,472	16,253,200,000
	2.09	URUSAN PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi			5,178,715,472	16,253,200,000
	2.09-1	Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	1,219,000,000	1,675,200,000
	2.09-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat selama	12 bulan	3,000,000	3,000,000
	2.09-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Air,Listrik telephone dan Internet	12 bulan	20,000,000	47,500,000
	2.09-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksanannya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	19 unit	15,000,000	41,000,000
	2.09-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayar nya Honor / Jasa administrasi keuangan	1 Tahun	116,000,000	136,500,000
	2.09-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya kebutuhan perbaikan perlatan kerja	12 bulan	6,000,000	31,000,000
	2.09-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediaannya Alat Tulis Kantor	12 bulan	17,000,000	42,000,000
	2.09-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak karcis dan blangko	12 bulan	14,000,000	16,500,000
	2.09-1.12	Penyediaan komponen instalasi	Terpenuhinya kebutuhan penyediaan komponen	12 Bulan	3,500,000	8,250,000
		listrik/penerangan bangunan kantor	dan instalasi Listrik kantor Terpenuhinya kebutuhan belanja jasa peralatan dan			
	2.09-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	perlengkapan kantor	12 bulan	23,000,000	38,500,000
	2.09-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum Rapat	12 Bulan	15,000,000	45,150,000
	2.09-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi keluar daerah	12 bulan	300,000,000	550,000,000
	2.09-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersediaannya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	12 bulan	672,000,000	700,800,000
	2.09-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersediaanya Peralatan dan bahan pembersih kantor	12 Bulan	14,500,000	15,000,000
	2.09-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kediatan	100.00	194,000,000	342,000,000
	2.09-2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur Kantor	1 paket	14,000,000	22,000,000
	2.09-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung	12 bulan	30,000,000	100,000,000
	2.09-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan	12 Bulan	150,000,000	220,000,000
		dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber	dinas operasional jumlah aparatur yang mendapat perlatihan			
	2.09-5	Daya Aparatur	sesuai tupoksi	10 orang	60,000,000	175,000,000
	2.09-5.1	Pendidikan dan pelatihan formal Seleksi pendaftaran/penerimaan calon Taruna	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal  Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi Taruna	10 Orang	30,000,000	120,000,000
	2.09-5.26	STTD Perhubungan (SIPENCATAR)	perhubungan	20 Orang	30,000,000	55,000,000
	2.09-15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1 Dokumen	20,000,000	-
	2.09-15.1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1 Dokumen	20,000,000	-
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan	'% Prasarana dan Fasilitas Transportasi dan	55.00		
	2.09-16	Prasarana dan Fasilitas LLAJ	LLAJ dalam kondisi baik % Terminal yang beroperasi	50	150,000,000	1,420,000,000
	2.09-16.4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	2 paket	125,000,000	1,300,000,000
	2.09-16.5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas	Terlaksananya rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas*)	50 Buah	25,000,000	120,000,000
	2.09-17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Rasio Ketersediaan Angkutan umum (per 10.000)	1.34	646,715,472	1,416,000,000
	2.09-17.14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Terlaksannnya kegiatan sosialisasi ketertiban berlalu lintas	2 Sekolah	30,000,000	35,000,000
	2.09-17.15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah AKUT yang terpilih	2 orang	20,000,000	25,000,000
	2.09-17.16	Forum Lalu Lintas Angkutan	Meningkatnya keselamatan dan ketertiban lalu lintas	1 Tahun	50,000,000	55,000,000
	2.09-17.18	Pengoperasian Bus Sekolah	Tersediannya angkutan untuk anak sekolah	1 Unit	50,000,000	55,000,000
	2.09-17.19	Pengoperasian Terminal Muara Labuh dan Padang Aro	Terlaksanannya pengoperasian terminal Muara Labuh	2 Unit	25,000,000	150,000,000
	2.09-17.20	Pengoperasian/Pemeliharaan Dermaga Phionton/Bus Air*)	Jumlah dermaga photon yg beroperasi	1 unit	30,000,000	150,000,000
	2.09-17.21	Pengamanan Lalu Lintas Pasar Tradisional dan Asuransi Personil Lapangan	Pengamanan Lalu lintas pasar tradisional, PAM sekolah, PAM Khusus, dan PAM Car Free Day	12 BUlan	250,000,000	500,000,000
	2.09-17.22	Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan	Terlaksanannya pengamanan angkutan Lebaran,	3 Event	46,715,472	65,000,000
	2.09-17.25	Tahun Baru Persiapan Wahana Tata Nugraha	natal dan tahun baru Jumlah Penghargaan	1 Piagam	55,000,000	120,000,000
	2.09-17.26	Razia Gabungan dengan Instansi terkait	Terlaksananya Razia Gabungan dengan Instansi terkait	12 kali/Tahun	30,000,000	60,000,000
	2.09-17.30	Pemilihan dan Pembinaan Pelajar Pelopor	Terlaksananya Pemilihan dan Pembinaan Pelajar	10 Orang	30,000,000	66,000,000
-	2.09-17.32	Keselamatan Lalu Lintas Pelatihan Juru Parkir	Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Terlaksananya Pelatihan Juru Parkir		30,000,000	
	2.08-17.32	relatifiati Julu FafKif	Terlaksananya Pelatihan Juru Parkir	10 Orang	30,000,000	135,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
			% Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			
	2.09-18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	- 'Terminal Angkutan Orang (4 Terminal)	50.00	1,919,500,000	8,375,000,000
			- Halte (15 Halte) - Dermaga Sampan Bermotor (3 Dermaga)	39.90 33.33		
	2.09-18.2	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Tersediannya dana untuk pembangunan Halte	2 Unit	50,000,000	675,000,000
	2.09-18.5	Pengadaan Lampu Solar Cell (DAK & DAU)*)	tersediannya dana untuk pengadaan lampu solar	1 Paket	100,000,000	1,500,000,000
	2.09-18.6	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ *)	Cell Jumlah RPPJ yang terpasang	20 Buah	100,000,000	700,000,000
	2.09-18.8	Pengadaan kendaraan bermotor Perintas (DAK)	Jumlah kendaraan bermotor perintis	2 unit	900,000,000	4,700,000,000
	2.09-18.9	Pengadaan Tambatan Perahu (DAK)	Jumlah Tambatan perahu yang tersedian	1 paket	769,500,000	800,000,000
	2.09-19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Solok Selatan	60.00	699,500,000	2,015,000,000
	2.09-19.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah Rambu - rambu yang tersedia	1 Paket	100,000,000	380,000,000
	2.09-19.2	Pengadaan marka jalan	Tersedianya dana untuk pengadaan marka jalan	1 Paket	100,000,000	385,000,000
	2.09-19.5	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan (DAK & DAU)	cermin tikungan yang terpasang	1 Paket	99,500,000	450,000,000
	2.09-19.6	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (DAK &	Tersediannya dana untuk kegiatan Pengadaan	1 Paket	100,000,000	330,000,000
	2.09-19.7	DAU) Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (DAK &	Guadrail Deliniator terpasang dijalan Kabupaten	1 Paket	100,000,000	170,000,000
	2.03-13.7	DAU)		11 aket	100,000,000	170,000,000
	2.09-19.8	Pengamanan Pelaksanaan Tour De Singkarak	Terlaksanannya kegiatan pengamananTour De Singkarak	3 Hari	200,000,000	300,000,000
	2.09-20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase angkutan umum yang melaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor	60.00	270,000,000	835,000,000
	2.09-20.5	Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di gedung PKB	Terlaksananya Pengujian kendaraan bermotor di gedung PKB	10 kendaraan/hari	200,000,000	750,000,000
	2.09-20.6	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Transportasi/ Uji Keliling	Tersedianya dana untuk uji keliling di 2 Kecamatan	2 Kecamatan	70,000,000	85,000,000
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			40, 400, 000, 750	
16		DINAG I AKIMOATA DAK KEBODATAAK			13,402,260,752	14,755,486,872
16	2.16	URUSAN KEBUDAYAAN			1,624,660,752	1,787,126,872
16	2.16		% KAN yang dibina % LKAAM yang dibina % Bundo kanduang dibina	100.00 100.00 100.00		
16		URUSAN KEBUDAYAAN	% LKAAM yang dibina	100.00	1,624,660,752	1,787,126,872 287,529,000
16	<b>2.16-15</b> 2.16-15.1	Program Pengembangan Nilai Budaya  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	% LKAAM yang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok	100.00 100.00 1 paket	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000
16	2.16-15	URUSAN KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya	% LKAAM yang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga	1,624,660,752 261,390,000	1,787,126,872 287,529,000
16	2.16-15 2.16-15.1 2.16-16	Program Pengembangan Nilai Budaya  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam	% LKAAM yang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 755,000,000	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000
16	2.16-15.1 2.16-16.1 2.16-16.1	Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	% LKAAM yang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam pengelolaan budaya	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00 2.00	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 755,000,000 445,000,000	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000 489,500,000
16	2.16-15 2.16-15.1 2.16-16 2.16-16.1 2.16-16.4	Program Pengembangan Nilai Budaya  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya  Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	% LKAAM yang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00 2.00 1 Tahun 60 orang	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 755,000,000 445,000,000	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000 489,500,000 88,000,000
16	2.16-15.1 2.16-16.1 2.16-16.1 2.16-16.4 2.16-16.12	Program Pengembangan Nilai Budaya  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya  Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah  Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	% LKAAM yang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah Jumlah karya tulis yang terdokumentasi	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00 2.00 1 Tahun 60 orang 1 dokumen	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 755,000,000 445,000,000 80,000,000 60,000,000	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000 489,500,000 88,000,000
16	2.16-15 2.16-15.1 2.16-16 2.16-16.1 2.16-16.4	Program Pengembangan Nilai Budaya  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya  Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	% LKAAM yang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya peestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah Jumlah karya tulis yang terdokumentasi Terlaksananya Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang Solok Selatan	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00 2.00 1 Tahun 60 orang 1 dokumen 1 event	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 755,000,000 445,000,000	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000 489,500,000 88,000,000 66,000,000
16	2.16-15 2.16-15.1 2.16-16 2.16-16.1 2.16-16.4 2.16-16.12 2.16-16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang	% LKAAM yang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah Jumlah karya tulis yang terdokumentasi Terlaksananya Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang Solok Selatan jumlah Lomba/Festival	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00 2.00 1 Tahun 60 orang 1 dokumen	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 755,000,000 445,000,000 80,000,000 170,000,000	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000 489,500,000 66,000,000 187,000,000
16	2.16-15.1 2.16-16.1 2.16-16.1 2.16-16.4 2.16-16.12	Program Pengembangan Nilai Budaya  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya  Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah  Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	% LKAAM yang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah Jumlah karya tulis yang terdokumentasi Terlaksananya Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang Solok Selatan jumlah Lomba/Festival Jumlah cagar budaya yang ditetapkan Persentase nagari yang meiliki Medan nan	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00 2.00 1 Tahun 60 orang 1 dokumen 1 event	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 755,000,000 445,000,000 80,000,000 60,000,000	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000 489,500,000 66,000,000 187,000,000
16	2.16-15 2.16-15.1 2.16-16 2.16-16.1 2.16-16.4 2.16-16.12 2.16-16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya  Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah  Pengelolaan karya cetak dan karya rekam  Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang	% LKAAM yang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah Jumlah karya tulis yang terdokumentasi Terlaksananya Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang Solok Selatan jumlah Lomba/Festival Jumlah cagar budaya yang ditetapkan Persentase nagari yang meiliki Medan nan Bapaneh Bantuan sanggar seni dan alat kesenian Kajian regulasi dan pengelolaan medan nan	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00 2.00 1 Tahun 60 orang 1 dokumen 1 event 4.00 5.00	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 755,000,000 445,000,000 80,000,000 170,000,000	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000 489,500,000 66,000,000 187,000,000
16	2.16-15 2.16-15.1 2.16-16 2.16-16.1 2.16-16.12 2.16-16.15 2.16-17	Program Pengembangan Nilai Budaya  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya  Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah  Pengelolaan karya cetak dan karya rekam  Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang  Program Pengelolaan Keragaman Budaya  Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah  Fasilitasi perkembangan keragaman budaya	% LKAAM yang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah Jumlah karya tulis yang terdokumentasi Terlaksananya Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang Solok Selatan jumlah Lomba/Festival Jumlah cagar budaya yang ditetapkan Persentase nagari yang meiliki Medan nan Bapaneh Bantuan sanggar seni dan alat kesenian	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00 2.00 1 Tahun 60 orang 1 dokumen 1 event 4.00 5.00 20.00	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 755,000,000 445,000,000 80,000,000 170,000,000 608,270,752	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000 489,500,000 66,000,000 187,000,000 669,097,872
16	2.16-15  2.16-15.1  2.16-16  2.16-16.1  2.16-16.4  2.16-16.15  2.16-17.1  2.16-17.1	Program Pengembangan Nilai Budaya  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah  Pengelolaan karya cetak dan karya rekam  Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang  Program Pengelolaan Keragaman Budaya  Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah  Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah  Fasilitasi perkembangan keragaman budaya	% Bundo kanduang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah Jumlah karya tulis yang terdokumentasi Terlaksananya Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang Solok Selatan jumlah Lomba/Festival Jumlah cagar budaya yang ditetapkan Persentase nagari yang meiliki Medan nan Bapaneh Bantuan sanggar seni dan alat kesenian Kajian regulasi dan pengelolaan medan nan bapaneh Terbinanya kesenian anak nagari	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00 2.00 1 Tahun 60 orang 1 dokumen 1 event 4.00 5.00 20.00 3 paket 1 paket	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 755,000,000 445,000,000 60,000,000 170,000,000 608,270,752 245,000,000 70,000,000	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000 489,500,000 66,000,000 187,000,000 669,097,872 269,500,000
16	2.16-15.1  2.16-16.1  2.16-16.1  2.16-16.4  2.16-16.15  2.16-17.1  2.16-17.1  2.16-17.4  2.16-17.5	Program Pengembangan Nilai Budaya  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya  Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah  Pengelolaan karya cetak dan karya rekam  Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang  Program Pengelolaan Keragaman Budaya  Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah  Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah  Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	% Bundo kanduang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah Jumlah karya tulis yang terdokumentasi Terlaksananya Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang Solok Selatan jumlah Lomba/Festival Jumlah cagar budaya yang ditetapkan Persentase nagari yang meliliki Medan nan Bapaneh Bantuan sanggar seni dan alat kesenian Kajian regulasi dan pengelolaan medan nan bapaneh Terbinanya kesenian anak nagari Terlaksananya festival budaya daerah	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00 2.00 1 Tahun 60 orang 1 dokumen 1 event 4.00 5.00 20.00 3 paket 1 paket 30 kali 2 Event	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 755,000,000 445,000,000 60,000,000 170,000,000 608,270,752 245,000,000 70,000,000 204,000,000	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000 489,500,000 66,000,000 187,000,000 669,097,872 269,500,000 77,000,000 224,400,000
16	2.16-15  2.16-15.1  2.16-16  2.16-16.1  2.16-16.4  2.16-16.15  2.16-17.1  2.16-17.1	Program Pengembangan Nilai Budaya  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah  Pengelolaan karya cetak dan karya rekam  Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang  Program Pengelolaan Keragaman Budaya  Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah  Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah  Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah  Study Kelayakan Cagar Budaya Daerah	% Bundo kanduang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah Jumlah karya tulis yang terdokumentasi Terlaksananya Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang Solok Selatan jumlah Lomba/Festival Jumlah cagar budaya yang ditetapkan Persentase nagari yang meiliki Medan nan Bapaneh Bantuan sanggar seni dan alat kesenian Kajian regulasi dan pengelolaan medan nan bapaneh Terbinanya kesenian anak nagari	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00 2.00 1 Tahun 60 orang 1 dokumen 1 event 4.00 5.00 20.00 3 paket 1 paket 30 kali	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 755,000,000 445,000,000 60,000,000 170,000,000 608,270,752 245,000,000 70,000,000	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000 489,500,000 66,000,000 187,000,000 669,097,872 269,500,000
16	2.16-15.1  2.16-16.1  2.16-16.1  2.16-16.1  2.16-16.15  2.16-17.1  2.16-17.1  2.16-17.4  2.16-17.5  2.16-17.10	Program Pengembangan Nilai Budaya  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya  Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah  Pengelolaan karya cetak dan karya rekam  Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang  Program Pengelolaan Keragaman Budaya  Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah  Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah  Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah  Study Kelayakan Cagar Budaya Daerah	% Bundo kanduang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah Jumlah karya tulis yang terdokumentasi Terlaksananya Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang Solok Selatan jumlah Lomba/Festival Jumlah cagar budaya yang ditetapkan Persentase nagari yang meliliki Medan nan Bapaneh Bantuan sanggar seni dan alat kesenian Kajian regulasi dan pengelolaan medan nan bapaneh Terbinanya kesenian anak nagari Terlaksananya festival budaya daerah	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00 2.00 1 Tahun 60 orang 1 dokumen 1 event 4.00 5.00 20.00 3 paket 1 paket 30 kali 2 Event	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 755,000,000 445,000,000 60,000,000 170,000,000 608,270,752 245,000,000 70,000,000 204,000,000 89,270,752	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000 489,500,000 66,000,000 187,000,000 77,000,000 224,400,000 98,197,872 12,968,360,000
16	2.16-15  2.16-16  2.16-16.1  2.16-16.4  2.16-16.15  2.16-17.1  2.16-17.1  2.16-17.1  2.16-17.4  2.16-17.5  2.16-17.10  3.02	Program Pengembangan Nilai Budaya  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya  Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah  Pengelolaan karya cetak dan karya rekam  Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang  Program Pengelolaan Keragaman Budaya  Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah  Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah  Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah  Study Kelayakan Cagar Budaya Daerah  URUSAN PARWISATA  Program Pelayanan Administrasi  Perkantoran  Penyediaan jasa surat menyurat	% EkAAM yang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah Jumlah karya tulis yang terdokumentasi Terlaksananya Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang Solok Selatan jumlah Lomba/Festival Jumlah cagar budaya yang ditetapkan Persentase nagari yang meiliki Medan nan Bapaneh Bantuan sanggar seni dan alat kesenian Kajian regulasi dan pengelolaan medan nan bapaneh Terlaksananya festival budaya daerah Terlaksananya study kelayakan cagar budaya Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00 2.00 1 Tahun 60 orang 1 dokumen 1 event 4.00 5.00 20.00 3 paket 1 paket 30 kali 2 Event 1 Paket	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 755,000,000 445,000,000 80,000,000 170,000,000 608,270,752 245,000,000 70,000,000 204,000,000 89,270,752 11,777,600,000	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000 489,500,000 66,000,000 187,000,000 77,000,000 224,400,000 98,197,872 12,968,360,000 1,191,360,000
16	2.16-15  2.16-16  2.16-16.1  2.16-16.4  2.16-16.15  2.16-17.1  2.16-17.1  2.16-17.1  2.16-17.1  3.02  3.02-1	Program Pengembangan Nilai Budaya  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah  Pengelolaan karya cetak dan karya rekam  Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang  Program Pengelolaan Keragaman Budaya  Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah  Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah  Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah  Study Kelayakan Cagar Budaya Daerah  URUSAN PARIWISATA  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Bundo kanduang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah Jumlah karya tulis yang terdokumentasi Terlaksananya Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang Solok Selatan jumlah Lomba/Festival Jumlah cagar budaya yang ditetapkan Persentase nagari yang meliliki Medan nan Bapaneh Bantuan sanggar seni dan alat kesenian Kajian regulasi dan pengelolaan medan nan bapaneh Terlaksananya festival budaya daerah Terlaksananya festival budaya daerah Terlaksananya study kelayakan cagar budaya Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00 2.00 1 Tahun 60 orang 1 dokumen 1 event 4.00 5.00 20.00 3 paket 1 paket 30 kali 2 Event 1 Paket	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 755,000,000 445,000,000 80,000,000 170,000,000 70,000,000 204,000,000 89,270,752 11,777,600,000 1,082,600,000	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000 489,500,000 66,000,000 187,000,000 77,000,000 224,400,000 98,197,872 12,968,360,000 1,191,360,000 3,630,000
16	2.16-15  2.16-16.1  2.16-16.4  2.16-16.15  2.16-17.1  2.16-17.1  2.16-17.1  2.16-17.1  3.02  3.02-1.1	Program Pengembangan Nilai Budaya  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah  Pengelolaan karya cetak dan karya rekam  Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang  Program Pengelolaan Keragaman Budaya  Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah  Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah  Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah  Study Kelayakan Cagar Budaya Daerah  URUSAN PARIWISATA  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan jasa surat menyurat  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	% LKAAM yang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah Jumlah karya tulis yang terdokumentasi Terlaksananya Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang Solok Selatan jumlah Lomba/Festival Jumlah cagar budaya yang ditetapkan Persentase nagari yang meiliki Medan nan Bapaneh Bantuan sanggar seni dan alat kesenian Kajian regulasi dan pengelolaan medan nan bapaneh Terbinanya kesenian anak nagari Terlaksananya festival budaya daerah Terlaksananya study kelayakan cagar budaya  Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00 2.00 1 Tahun 60 orang 1 dokumen 1 event 4.00 5.00 20.00 3 paket 1 paket 30 kali 2 Event 1 Paket 100.00	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 445,000,000 80,000,000 170,000,000 608,270,752 245,000,000 70,000,000 204,000,000 89,270,752 11,777,600,000 1,082,600,000 3,300,000	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000 489,500,000 66,000,000 187,000,000 77,000,000 224,400,000 98,197,872 12,968,360,000 1,191,360,000 3,630,000 121,000,000
16	2.16-15  2.16-16  2.16-16.1  2.16-16.4  2.16-16.15  2.16-17.1  2.16-17.4  2.16-17.5  2.16-17.10  3.02  3.02-1  3.02-1.1	Program Pengembangan Nilai Budaya  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah  Pengelolaan karya cetak dan karya rekam  Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang  Program Pengelolaan Keragaman Budaya  Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah  Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah  Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah  Study Kelayakan Cagar Budaya Daerah  URUSAN PARIWISATA  Program Pelayanan Administrasi  Perkantoran  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	% LKAAM yang dibina % Bundo kanduang dibina Terlaksananya pelestarian cagar budaya Terlaksananya pembinaan lembaga adat di Solok Selatan jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional Terfasilitasinya partisifasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah Jumlah karya tulis yang terdokumentasi Terlaksananya Pemilihan Uda Uni Duta Budaya Minang Solok Selatan jumlah Lomba/Festival Jumlah cagar budaya yang ditetapkan Persentase nagari yang meiliki Medan nan Bapaneh Bantuan sanggar seni dan alat kesenian Kajian regulasi dan pengelolaan medan nan bapaneh Terbinanya kesenian anak nagari Terlaksananya festival budaya daerah Terlaksananya study kelayakan cagar budaya  Persentase pelayanan administrasi Perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00 100.00 1 paket 3 Lembaga 5.00 2.00 1 Tahun 60 orang 1 dokumen 1 event 4.00 5.00 20.00 3 paket 1 paket 30 kali 2 Event 1 Paket 100.00 12 bulan 12 Bulan	1,624,660,752 261,390,000 261,390,000 755,000,000 445,000,000 80,000,000 170,000,000 70,000,000 204,000,000 89,270,752 11,777,600,000 1,082,600,000 3,300,000 110,000,000	1,787,126,872 287,529,000 287,529,000 830,500,000 489,500,000 66,000,000 187,000,000 77,000,000 224,400,000 98,197,872

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHON 2016)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	3.02-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	20,500,000	22,550,000
	3.02-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	3,500,000	3,850,000
	3.02-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	145,000,000	159,500,000
	3.02-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum tamu/rapat	12 Bulan	48,000,000	52,800,000
	3.02-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rakor ke luar daerah dan ke dalam daerah	12 Bulan	350,000,000	385,500,000
	3.02-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya jasa pendukung administrasi kantor	12 Bulan	196,800,000	216,480,000
	3.02-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	12 Bulan	6,000,000	6,600,000
	3.02-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	377,000,000	426,700,000
	3.02-2.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	155,000,000	170,500,000
	3.02-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpelihanya secara rutin dan berkala gedung kantor	1 Tahun	5,000,000	5,500,000
	3.02-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	160,000,000	188,000,000
	3.02-2.51	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Tahun	57,000,000	62,700,000
	3.02-3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100.00	18,000,000	19,800,000
	3.02-3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	40 Orang	18,000,000	19,800,000
		Program pengembangan pemasaran	event nasional diikuti	2.00		
	3.02-15	pariwisata	event internasional diikuti kunjungan wisatawan domestik (orang)	2.00 4,000	1,080,000,000	1,188,000,000
		Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	kunjungan wisatawan Internasional (orang) Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi	600		
	3.02-15.2	dalam pemasaran pariwisata	dalam pemasaran pariwisata	1 Tahun	230,000,000	253,000,000
	3.02-15.5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya promosi nusantara di dalam dan di luar negeri	4 event	680,000,000	748,000,000
	3.02-15.15	Pemilihan dan Pemberdayaan Uda Uni Solok Selatan	Terlaksananya pemilihan uda uni wisata solok selatan	1 event	170,000,000	187,000,000
	3.02-16	Program pengembangan destinasi pariwisata	objek wisata unggulan objek wisata yang dikelola oleh Nagari/Pokdarwis	3.00 16.00	7,860,000,000	8,646,000,000
	3.02-16.1	Perencanaan Pengembangan Objek Wisata	Terlaksananya perencanaan pengembangan objek wisata	7 dokumen	840,000,000	924,000,000
	3.02-16.3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan (DAK)	Terlaksananya penegmbangan objek wisata unggulan	1 Tahun	2,050,000,000	2,255,000,000
	3.02-16.15	Pembangunan dan Pengembangan serta Pemeliharaan Objek Wisata	Terlaksananya pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan objek wisata	13 paket	4,615,000,000	5,076,500,000
	3.02-16.16	Operasional UPT Hot Water Boom	Tersedianya operasional UPT Hot Water Boom	1 Tahun	355,000,000	390,500,000
	3.02-17	Program pengembangan Kemitraan	Jumlah pokdarwis objek wisata yang dikelola oleh Nagari/Pokdarwis	30.00 16.00	300,000,000	330,000,000
	3.02-17.3	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Terlaksananya pengembangan SDM dan terpilihnya pokdarwis terbaik di solok selatan	1 paket	150,000,000	165,000,000
	3.02-17.4	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Terbinanya pokdarwis	30 unit	50,000,000	55,000,000
	3.02-17.7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Terlaksananya pengembangan SDM dan profesionalisme penggerak pariwisata	1 paket	100,000,000	110,000,000
	3.02-20	Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial	Tanah objek wisata yang bersertifikat	7,6 Ha	1,060,000,000	1,166,500,000
	3.02-20.1	Perencanaan Pengadaan Tanah	Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah	1 dokumen	50,000,000	55,000,000
	3.02-20.2	Persiapan Pengadaan Tanah	Terlaksananya persiapan pengadaan tanah	1 lokasi	15,000,000	17,000,000
	3.02-20.3	Pelaksanaan Pengadaan Tanah Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan tanah	7,6 hektar	975,000,000	1,072,500,000
17	3.02-20.4	DINAS PERTANIAN	Terlaksananya penyerahan hasil pengadaan tanah	1 lokasi	20,000,000 <b>12,541,778,936</b>	13,548,276,830
	3.03	URUSAN PERTANIAN			12,541,778,936	13,548,276,830
	3.03-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	1,739,000,000	1,760,420,000
	3.03-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan benda pos lainnya	1 Tahun	2,000,000	220,000
	3.03-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhi pembayaran air, listrik dan jasa komunikasi	1 Tahun	90,000,000	99,000,000
	3.03-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	150,000,000	15,500,000
	3.03-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	280,000,000	308,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2016)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	3.03-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengaandaan pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	60,000,000	65,000,000
	3.03-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	1 Tahun	7,000,000	7,700,000
	3.03-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu kantor	1 Tahun	16,000,000	17,600,000
	3.03-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	1 Tahun	600,000,000	660,000,000
	3.03-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran	1 Tahun	432,000,000	475,200,000
	3.03-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	1 Tahun	10,000,000	11,000,000
	3.03-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	889,778,936	912,256,830
	3.03-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	12 Bulan	49,778,936	49,756,830
	3.03-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpelihara dan terawatnya operasional mobil dinas	12 Bulan	210,000,000	231,000,000
	3.03-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpelihara peralatan kantor	12 Bulan	15,000,000	16,500,000
	3.03-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Paket	615,000,000	615,000,000
	3.03-3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100.00	45,000,000	49,500,000
	3.03-3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	120 Orang	45,000,000	49,500,000
	3.03-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang mendapat sesuai tupoksi	10 orang	40,000,000	44,000,000
	3.03-5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pengiriman aparatur mengikuti kursus, pelatihan dan bimbingan teknis	10 Orang	40,000,000	44,000,000
	3.03-15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	100.00	335,000,000	368,500,000
	3.03-15.1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Petani Kebun)	Terlaksananya pelatihan bagi petani dan pelaku agribisnis (Petani kebun)	50 Orang	35,000,000	38,500,000
	3.03-15.3	Peningkatan kemampuan lembaga petani (penyuluh)	Terlaksananya pelatihan, penilaian kelas dan pembinaan kelembagaan petani se Kabupaten Solok Selatan Terlaksananya pelatihan dan pembinaan KTNA di 7 Kecamatan terlaksannya pembinaan kelompok GPP di 7 kecamatan	1898 Kelompok	100,000,000	110,000,000
	3.03-15.9	Peningkatan kemampuan lembaga petani (BSP)	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kelembagaan petani (PUAP)	39 Gapoktan	200,000,000	220,000,000
	3.03-16	Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terjaminnya kecukupan pangan (swasembada pangan) (ton)	81,251	1,527,000,000	1,666,000,000
	3.03-16.1	Penanganan daerah rawan pangan	Terlaksananya pembinaan prasarana dan sarana pertanian melalui dana Tugas Pembantuan APBN	1 Tahun	200,000,000	220,000,000
	3.03-16.13	Pengembangan cadangan pangan daerah melalui pembinaan prasarana dan sarana pertanian	Terlaksananya Pengembangan cadangan pangan daerah melalui pembinaan prasarana dan sarana pertanian	1 kegatan	300,000,000	330,000,000
	3.03-16.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan (tanaman pangan)	Terlaksananya pengembangan kawasan pertanian organik di Kabupaten Solok Selatan	2 Kawasan	137,000,000	137,000,000
	3.03-16.27	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan BBI Hortikultura	1 BBI	350,000,000	385,000,000
	3.03-16.29	Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian (hortikultura/ buah)	Bertambahnya luas lahan baku kawasan manggis dan pisang roti, terbina dan terpelihara kawasan tanaman buah komoditihortikultura, Terlaksananya pembinaan terhadap petani dan kelembagaan petani komoditi hortikultura di Kabupaten Solok Selatan	12 Ha	200,000,000	220,000,000
	3.03-16.47	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Terlaksananya sosialisasi/pelatihan pemasaran komoditi hasil pertanian, Pertemuan kemitraan pemasaran komoditi hasil pertanian dan Fasilitasi Untuk pengembangan pemasaran komoditi hasil pertanian di kelompok pemasaran komoditi hasil pertanian	4 Kelompok	60,000,000	66,000,000
	3.03-16.48	Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian (Perkebunan)	Terlaksananya pengamatan dan pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan	7 Kecamatan	90,000,000	99,000,000
	3.03-16.49	Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian (Hortikultura/sayuran/tanaman obat)	Meningkatnya luas lahan baku kawasan bawang merah dan cabe	2 Ha	190,000,000	209,000,000
	3.03-17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya indek harga yang diterima petani	112.21	150,000,000	150,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAW/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2016)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	3.03-18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produktifitas pertanian dan perkebunan unggulan Padi (ton/ha) Jagung (ton/ha) Kopi (ton/ha) Tanaman Karet (ton/ha)	5.02 3.71 0.71 0.8	460,000,000	506,000,000
			Tanaman Sawit (ton/ha)	1.39		
	3.03-18.3	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terpenuhinya operasional RPH dan pasar ternak	1 Unit	70,000,000	77,000,000
	3.03-18.4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	4 Kelompok	40,000,000	44,000,000
	3.03-18.6	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam (kopi)	Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) bagi petani kebun tanaman kopi	50 Orang	50,000,000	55,000,000
	3.03-18.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya data statistik 4 (empat) sub sektor pertanian	4 Laporan	100,000,000	110,000,000
	3.03-18.11	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ perkebunan tepat guna	Jumlah peserta Bintek pelaku usaha peternakan	15 Orang	50,000,000	55,000,000
	3.03-18.14	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) bagi petani kebun tanaman pangan	3 Kelompok	150,000,000	165,000,000
	3.03-19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan unggulan (ton) Produksi Padi Produksi Jagung Produksi Kopi Produksi Tanaman Karet Produksi Tanaman Sawit	143,625 59,088 1,775 13,142 2,816	5,776,000,000	6,353,600,000
	3.03-19.2	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (Tanaman Pangan)	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan	100 Ha	250,000,000	275,000,000
	3.03-19.3	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan (Perkebunan)	Terlaksananya pengembangan bibit unggul perkebunan (Pengembangan tanaman karet, kelapa sawit dan kakao	144 Ha	935,000,000	1,028,500,000
	3.03-19.5	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Tersedianya data luas baku lahan sawah di Kecamatan KPGD, Sungai Pagu dan Pauh Duo	4 Kecamatan	250,000,000	275,000,000
	3.03-19.7	Penyediaan Operasional UPTD Pertanian, BBI dan Puskeswan	Tersedianya dana operasional dan pengadaan sarana dan prasarana UPTD, BBI dan Puskeswan Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan	11 Unit	250,000,000	275,000,000
	3.03-19.9	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (BSP (DAK+DAU)	Pembangunan Embung Konstruksi Dam Parit Pembangunan Long Strorage Pembangunan pintu air Perbaikan pintu air	10 Km	3,991,000,000	4,390,100,000
	3.03-19.11	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan (Hortikultura)	Terlaksananya pengembangan bibit unggul Hortikultura	2 Penangkar	100,000,000	110,000,000
	3.03-20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	% Ketersediaan Peyuluh pertanian	56,76	600,000,000	660,000,000
	3.03-20.1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Terealisasinya pertemuan temu teknis, temu tugas dan evaluasi penyuluh serta supervis dan penilaian penyuluh berprestasi	1 Tahun	250,000,000	275,000,000
	3.03-20.3	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terealisasinya penyusunan program /programa penyuluhan dan RDKK/RDK	1 Tahun	150,000,000	165,000,000
	3.03-20.19	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlengkapan Penyuluh	Terealisasinya perlengkapan kebutuhan kerja penyuluh untuk satu tahun	1 Tahun	100,000,000	110,000,000
	3.03-20.20	Fasilitasi Penerapan Metodologi Penyuluhan	Terealisasinya penerapan metodologi penyuluhan sebanyak 3 metoda	1 Tahun	100,000,000	110,000,000
	3.03-21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan di masyarakat dan menurunnya penyakit ternak menular	100.00	300,000,000	330,000,000
	3.03-21.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Berjalannya pelayananan pada Pusat Kesehatan Hewan ditingkat kecamatan	5000 Ekor	160,000,000	176,000,000
	3.03-21.3	Pemusnahan hewan penular penyakit endemik	Terlaksananya eleminasi 400 ekor anjing di 7 kecamatan wilayah Kab. Solok Selatan	7 Kecamatan	90,000,000	99,000,000
	3.03-21.7	Surveillance Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Berjalannya pelayananan laboratorium dan pemetaan penyakit Hewan	5 Sampel	50,000,000	55,000,000
	3.03-22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah ternak besar (ekor) jumlah ternak kecil (ekor)	18,179 8,813	400,000,000	440,000,000
	3.03-22.2	Pembibitan dan perawatan ternak (pelaksanaan inseminasi buatan)	jumlah Unggas (ekor) Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Magang Petugas dan Peternak dalam penyelenggaraan inseminasi buatan	<b>121,264</b> 700 Ekor	140,000,000	154,000,000
	3.03-22.3	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Peternakan dan peningkatan populasi ternak.	1070 Ekor	120,000,000	132,000,000
	3.03-22.4	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat petani (anggaran sinergisitas dana APBN TP)	Terfasilitasinya sinergi dengan APBN dan Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Magang Petugas dan Peternak	10 Kelompok	90,000,000	99,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	3.03-22.8	Pengembangan agribisnis peternakan	Kelompok pengembangan integrasi ternak dengan tanaman sawit	10 Kelompok	50,000,000	55,000,000
	3.03-23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya indek harga yang diterima petani	107.11	80,000,000	88,000,000
	3.03-23.5	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah (Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Terlaksananya keikutsertaan dalam event promosi hasil produksi pertanian unggulan daerah	1 Event	80,000,000	88,000,000
	3.03-25	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan*)	Jumlah Produksi Daging (ton/tahun)	480.4	200,000,000	220,000,000
	3.03-25.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Telur (ton/tahun) Terpeliharanya secara rutin dan berkala sarana dan prasarana peternakan (Rumah Potong Hewan)	4 UPJA	200,000,000	220,000,000
18		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			3,733,495,879	12,482,610,650
	2.11	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			1,699,495,879	2,517,110,650
	2.11-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	885,052,445	979,900,000
	2.11-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun	5,000,000	5,000,000
	2.11-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik	1 Tahun	34,000,000	46,000,000
	2.11-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinzn kendaraan dinas dan kantor	1 Tahun	5,400,000	6,000,000
	2.11-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	1 Tahun	136,000,000	136,000,000
	2.11-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	1 Tahun	25,519,353	29,000,000
	2.11-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	30,465,092	36,000,000
	2.11-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	5,400,000	7,000,000
	2.11-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan perkantoran	2 Paket	94,000,000	25,000,000
	2.11-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan minuman kantor	1 Tahun	32,208,000	32,000,000
	2.11-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	365,660,000	506,000,000
	2.11-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Kantor	1 Tahun	148,400,000	148,400,000
	2.11-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersdianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	1 Tahun	3,000,000	3,500,000
	2.11-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	294,028,184	182,000,000
	2.11-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	155,000,000	20,000,000
	2.11-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	125,028,184	146,000,000
	2.11-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Tahun	14,000,000	16,000,000
	2.11-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang mendapat pelatihan sesuai dengan tupoksi	10 orang	20,000,000	35,000,000
	3.03-5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	20,000,000	35,000,000
	2.11-15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Jumlah UMKM yang dibina	50.00	40,000,000	70,000,000
	2.11-15.2	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi	50 UMKM	40,000,000	70,000,000
	2.11-17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) *)	Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan	50.00	220,204,600	850,000,000
	2.11-17.6	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Sarana Pemasaran yang tersedia	50 UMKM	100,000,000	500,000,000
	2.11-17.9	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	Jumlah Pameran yang dilaksanakan/diikuti	10 Event	120,204,600	350,000,000
	2.11-18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	persentase koperasi aktif	60.00	240,210,650	400,210,650
	2.11-18.1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan program pembangunan Koperasi	1 Laporan	75,000,000	120,000,000
	2.11-18.5	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	Teciptanya Kelembagaan Koperasi yang sehat dan berkulitas dan berprestasi	40 Persen	80,210,650	80,210,650
	2.11-18.6	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah Koperasi yang mengembangkan usaha ekonomi selain simpan pinjam, jumlah usaha yang bermitra dengan koperasi, jumlah yang di fasilitasi dan dimonev perkuatan modal,	17 Koperasi	85,000,000	200,000,000

1 2 3 4 5 6  3.06 URUSAN PERDAGANGAN 5,06-15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan ditangani 100.00 250,000,000 3,27  3.06-15.6 White melalui tera ulang alat UTTP 1, ketersedian sarana tera, 1,000,000 2,000,000 3,16  3.06-15.8 Monitoring dan Evaluasi Peredaran Barang Bersubsidi dan Bahan Pokok Cakupan Wilayah yang dimonitoring dan dievaluasi. 7 Kecamatan 100,000,000 10	7 70,000,000 65,000,000 00,000,000
3.06-15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan ditangani Jumlah Pedagang wajib Tera, sosialisasi, jumlah Toketersedian sarana tera, Jumlah Pedagang wajib Tera, sosialisasi, jumlah Toketersedian sarana tera, 3.06-15.8 Program peningkatan efisiensi perdagangan Cakupan Wilayah yang dimonitoring dan dievaluasi. 7 Kecamatan 150,000,000 3,16    3.06-18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Jumlah Pedagang wajib Tera, sosialisasi, jumlah 7 Kecamatan 150,000,000 3,16    Cakupan Wilayah yang dimonitoring dan dievaluasi. 7 Kecamatan 100,000,000 10    Jumlah pasar yang representatif (Pasar 2 Pasar 850,000,000 4,900    Jumlah Pasar yang di Revitalisasi, Operasionalisasi pembinaan Penertiban dan pengelolaan pedagang pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi 2 Pasar 850,000,000 4,900    Pengembangan pasar dan distribusi pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi 2 Pasar 850,000,000 4,900	<b>70,000,000 70,000,000</b> 65,000,000 05,000,000
3.06-15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan  3.06-15.6 Pelaksanaan tertib ukur melalui tera ulang alat UTTP  3.06-15.8 Monitoring dan Evaluasi Peredaran Barang Bersubsidi dan Bahan Pokok  3.06-18 Program peningkatan efisiensi perdagangan  Jumlah Pedagang wajib Tera, sosialisasi, jumlah UTTP, ketersedian sarana tera, UT	<b>70,000,000</b> 65,000,000 05,000,000
3.06-15.6 Pelaksanaan tertib ukur melalui tera ulang alat UTTP, ketersedian sarana tera. VETP, ketersedian sarana tera. VETP	05,000,000 05,000,000 00,000,000
3.06-18.8 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri  3.06-18.3 Pengembangan pasar dan distribusi perangkatan Pasar dan distribusi pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi pasar (2 Pasar 850,000,000 4,90 pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi pasar (2 Pasar 850,000,000 4,90 pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi pasar pasa	05,000,000 <b>00,000,000</b>
3.06-15.8 Monitoring dan Evaluasi Peredaran Barang Bersubsidi dan Bahan Pokok  3.06-18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri  Jumlah pasar yang representatif (Pasar Kabupaten)  Jumlah Pasar yang di Revitalisasi, Operasionalisasi pembinaan Penertiban dan pengelolaan pedagang pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi  2 Pasar 850,000,000 4,900	00,000,000
3.06-18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Jumlah pasar yang representatif (Pasar 2 Pasar 850,000,000 4,90    Jumlah pasar yang di Revitalisasi,Operasionalisasi pembinaan Penertiban dan pengelolaan pedagang pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi 2 Pasar 850,000,000 4,90    Pengembangan pasar dan distribusi pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi 2 Pasar 850,000,000 4,90    Pengembangan pasar dan distribusi pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi 2 Pasar 850,000,000 4,90    Pengembangan pasar dan distribusi pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi 2 Pasar 850,000,000 4,90    Pengembangan pasar dan distribusi pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi 2 Pasar 850,000,000 4,90    Pengembangan pasar dan distribusi pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi 2 Pasar 850,000,000 4,90    Pengembangan pasar dan distribusi pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi 2 Pasar 850,000,000 4,90    Pengembangan pasar dan distribusi pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi 2 Pasar 850,000,000 4,90    Pengembangan pasar dan distribusi pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi 2 Pasar 850,000,000 4,90    Pengembangan pasar dan distribusi pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi 2 Pasar 850,000,000 4,90    Pengembangan pasar dan distribusi pasar dan distribusi pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi 2 Pasar 850,000,000 4,90    Pengembangan pasar dan distribusi pasar dan d	· ,
Jumlah Pasar yang di Revitalisasi,Operasionalisasi pembinaan Penertiban dan pengelolaan pedagang pasar, cakupan operasi pasar murah dan subsidi 2 Pasar 850,000,000 4,900	)0,000,000
sembako menghadapi hari lebaran serta bimbingan teknis pengelolaan Pasar	
3.06-19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan jumlah pedagang kakil lima yang dibina 100.00 Rata-rata RTM penerima bantuan usaha ekonomi di bidang perdagangan 20.00 di bidang perdagangan	0,000,000
3.06-19.2 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin Terlaksananya penyuluhan terhadap pedagang kaki pedagang kakilima dan asongan Terlaksananya penyuluhan terhadap pedagang kaki 100 0rang 54,000,000 10	00,000,000
3 06-10 3 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang 2 Lokasi 75 000 000 20	00,000,000
pedagang kakilima dan asongan ditata	95,500,000
lumlah IKM 502.00	13,300,000
	31,000,000
3.07-16.1 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya jumlah IKM yang terfasilitasi pendampingan manajemen uasaha dan mengikuti magang 30 IKM 120,000,000 18 pengolahan sumber daya di lembaga diklat	81,000,000
3.07-16.7 Fasilitasi dan Dukungan Kerjasama Lembaga Pemerhati dan Pecinta Produk Daerah Jumlah kerjasama kegiatan yang terlaksana 1 Lembaga 300,000,000 28	80,000,000
3.07-16.8 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan IKM Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi 1 Tahun 120,000,000 12	20,000,000
Jumlah IKM yang difasilitasi dalam peningkatan kemampuan teknologinya 5.00	
3.07-17 Program peningkatan kemampuan teknologi Hygiene Practices (GHP)  Program peningkatan kemampuan teknologi Hygiene Practices (GHP)  2.00  175,000,000  76	4,500,000
industri Jumlah IKM yang telah mendapat HAKI 20.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Jumlah IKM yang telah mendapat Sertifikat Halal 29.00	
3.07-17.1 Pembinaan kemampuan teknologi industri Jumlah IKM yang mendapat pelatihan 20 IKM 75,000,000 54	44,500,000
3.07-17.2 Pengembangan dan pelayanan teknologi dan felayanan teknologi dan fasilitasi sertifikat halal bagi IKM 25 IKM 100,000,000 22	20,000,000
3.07-19 Program pengembangan sentra-sentra Jumlah dokumen Database Industri Kabupaten 1 Dokumen 90,000,000 15	50,000,000
industri potensial Tertatanya kawasan industri 1 Kawasan	0,000,000
3.07-19.2 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Jumlah dokumen profil data base industri Kabupaten 1 Dokumen 40,000,000	30,000,000
3.07-18.2 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri Penyediaan sarana maupun prasarana klaster (lanjutan Program Kemakmuran Hijau) 2 unit 50,000,000 7	70,000,000
	23,000,000
	60,000,000 60,000,000
4 01.1 Program Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan administrasi Persentase pelayanan administrasi Persentase pelayanan administrasi Persentase pelayanan administrasi	50,000,000
40,000,000 Factor Repatraget Koordinasi dan Konsultasi ke luar Terlaksana Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 40,000,000 Factor Repatraget Koordinasi dan Konsultasi Albari Repatraget Koordinasi dan Ko	50,000,000
Iular dan dalam daeran   Iular dan daeran   Iular dan daeran   Iular dan dalam daeran   Iular dan daeran   Iular	40,000,000
dan kegiatan  4.01-2.24   Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan   Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala   12 bulan   20,000,000   4 dinas/operasional   dinas/operasional   20,000,000   4 dinas/operasional   2 d	40,000,000
Program peningkatan pelayanan kedinasan Persentase layanan kedinasan KDH yang  100.00 174.031.978 23	0,000,000
керана daeran/waкн керана daeran Nilai LKPJ dan LKPD Tinggi	, ,
4.01-16.7 Penyusunan LKPJ dan LKPD Kepala Daerah Terlaksananya Penyusunan LKPJ dan LPPD Kepala 3 Dokumen 112,031,978 13	30,000,000
Facilitaci Beringatan Hari, hari Bacar Terlaksananya Fasilitasi Peringatan Hari-Hari Besar	40,000,000
4.01-16.14 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemerintahan 2 Kali 40,000,000 6	

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
			INDIKATOR	TARGET	· ·	(TAHUN 2019)
1	2	3 Program Peningkatan Kerjasama Antar	4 persentase kerjasama antar pemerintah yang	5	6	7
	4.01-25	Pemerintah Daerah	ditindaklanjuti	60%	40,000,000	125,000,000
	4.01-25.1	Fasilitasi/pembentukan kerjasama Daerah	Terlaksananya Terfasilitasinya Pembentukan Kerjasama Daerah	10 MOU	40,000,000	125,000,000
	4.01-27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah segmen batas kecamatan dan Dokumen batas	7.00	108,700,000	315,000,000
	4.01-27.3	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Terlaksananya Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah administrasi antar daerah (Kabupaten/kecamatan/Provinsi)	1 Segmen 7 Kecamatan	98,000,000	280,000,000
	4.01-27.5	Pembakuan Nama Rupabumi Wilayah Administrasi Kab. Solok Selatan	Terlaksanya Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Wilayah Administrasi Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen	10,700,000	35,000,000
	4.01-47	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Peringkat Camat Berprestasi tingkat provinsi	3.00	115,000,000	225,000,000
	4.01-47.1	Pembinaan Aparatur Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan	7 Kecamatan	85,000,000	90,000,000
	4.01-47.2	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1 Laporan	10,000,000	50,000,000
	4.01-47.3	Koordinasi Pelaksana PATEN di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksana PATEN di Kecamatan	2 Kali	20,000,000	85,000,000
	4.01-49	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Administrasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah*)	Persentase pencapaian kinerja SKPD	95.00	35,000,000	575,000,000
	4.01-49.3	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan serta Monitoring Pelaksanaan Tugas Urusan Trantibhum Linmas dan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penyusunan dan Perumusan Kebijakan serta Monitoring Pelaksanaan Tugas Urusan Trantibum Linmas dan Penanggulangan Bencana	1 tahun dan Laporan	14,000,000	200,000,000
	4.01-49.4	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan serta monitoring pelaksanaan tugas urusan Perpustakaan dan Kearsipan	Terlaksananya Koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan	1 tahun dan Laporan	11,000,000	175,000,000
	4.01-49.5	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan serta Monitoring Pelaksanaan Tugas urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan, Perempuan dan keluarga berencana, dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penyusunan dan Perumusan Kebijakan serta evaluasi atas Pelaksanaan Tugas Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan, Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun dan Laporan	10,000,000	200,000,000
19.2		BAGIAN HUKUM			500,000,000	820,000,000
	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			500,000,000	820,000,000
	4.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	50,000,000	450,000,000
		reikalitolali			30,000,000	150,000,000
	4.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	50,000,000	
	4.01-1.18 4.01-2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan			150,000,000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas	12 Bulan	50,000,000	150,000,000
	<b>4.01-2</b> 4.01-2.24	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan  Terpeliharanya Kendaraan Operasional  Terfasilitasinya penyusunan Produk hukum	12 Bulan	50,000,000 <b>40,000,000</b> 40,000,000	150,000,000
	4.01-2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan  Terpeliharanya Kendaraan Operasional  Terfasilitasinya penyusunan Produk hukum daerah Prestasi Kelompok Sadar Hukum tingkat	12 Bulan 100.00	50,000,000 <b>40,000,000</b>	150,000,000 60,000,000 60,000,000
	<b>4.01-2</b> 4.01-2.24	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Penataan Peraturan Perundang-	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan  Terpeliharanya Kendaraan Operasional  Terfasilitasinya penyusunan Produk hukum daerah	12 Bulan 100.00 12 bulan 100.00	50,000,000 <b>40,000,000</b> 40,000,000	60,000,000 60,000,000 610,000,000
	4.01-2 4.01-2.24 4.01-26	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan  Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan  Penyelesaian Perkara/Memberikan Bantuan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan  Terpeliharanya Kendaraan Operasional  Terfasilitasinya penyusunan Produk hukum daerah Prestasi Kelompok Sadar Hukum tingkat provinsi  Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundangundangan , Penyuluhan Hukum dan RANHAM  Persentase gugatan yang ditangani danJumlah	12 Bulan 100.00 12 bulan 100.00 5.00 50 Orang	50,000,000 <b>40,000,000</b> 40,000,000 <b>410,000,000</b>	150,000,000 60,000,000 60,000,000 610,000,000
	<b>4.01-2 4.01-2.24 4.01-26 4.01-26.4</b>	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan  Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan  Terpeliharanya Kendaraan Operasional  Terfasilitasinya penyusunan Produk hukum daerah Prestasi Kelompok Sadar Hukum tingkat provinsi  Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundangundangan , Penyuluhan Hukum dan RANHAM	12 Bulan 100.00 12 bulan 100.00 5.00 50 Orang	50,000,000 <b>40,000,000</b> 40,000,000 <b>410,000,000</b> 50,000,000	150,000,000 60,000,000 60,000,000 610,000,000 170,000,000
	<b>4.01-2</b> 4.01-2.24 <b>4.01-26</b> 4.01-26.4 4.01-26.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan  Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan  Penyelesaian Perkara/Memberikan Bantuan Hukum	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan  Terpeliharanya Kendaraan Operasional  Terfasilitasinya penyusunan Produk hukum daerah Prestasi Kelompok Sadar Hukum tingkat provinsi  Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundangundangan , Penyuluhan Hukum dan RANHAM  Persentase gugatan yang ditangani danJumlah pendapat hukum yang diberikan.  Jumlah Nagari yang dilakukan monitoring produk hukum nagari danJumlah Peraturan Nagari yang	12 Bulan 100.00 12 bulan 100.00 5.00 50 Orang 100 Persentase 39 Nagari 1 Dokumen Publikasi	50,000,000 40,000,000 40,000,000 410,000,000 50,000,000	150,000,000 60,000,000 610,000,000 50,000,000 170,000,000 60,000,000
	4.01-2.24 4.01-26 4.01-26.4 4.01-26.9 4.01-26.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  Program Penataan Peraturan Perundang-undangan  Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan  Penyelesaian Perkara/Memberikan Bantuan Hukum  Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Nagari  *)	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan  Terpeliharanya Kendaraan Operasional  Terfasilitasinya penyusunan Produk hukum daerah Prestasi Kelompok Sadar Hukum tingkat provinsi  Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan , Penyuluhan Hukum dan RANHAM  Persentase gugatan yang ditangani danJumlah pendapat hukum yang diberikan.  Jumlah Nagari yang dilakukan monitoring produk hukum nagari danJumlah Peraturan Nagari yang dievaluasi.  Operasional Aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) dan Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinventarisasi dan dicetak	12 Bulan 100.00 12 bulan 100.00 5.00 50 Orang 100 Persentase 39 Nagari 1 Dokumen	50,000,000 40,000,000 40,000,000 410,000,000 50,000,000 120,000,000	150,000,000 60,000,000 610,000,000 50,000,000 170,000,000 170,000,000
19.3	4.01-2.24 4.01-2.6 4.01-26.4 4.01-26.9 4.01-26.10 4.01-26.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Penyelesaian Perkara/Memberikan Bantuan Hukum Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Nagari *) Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan  Terpeliharanya Kendaraan Operasional  Terfasilitasinya penyusunan Produk hukum daerah Prestasi Kelompok Sadar Hukum tingkat provinsi  Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan , Penyuluhan Hukum dan RANHAM  Persentase gugatan yang ditangani danJumlah pendapat hukum yang diberikan.  Jumlah Nagari yang dilakukan monitoring produk hukum nagari danJumlah Peraturan Nagari yang dievaluasi.  Operasional Aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) dan Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinventarisasi dan dicetak  Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun dan	12 Bulan 100.00 12 bulan 100.00 5.00 50 Orang 100 Persentase 39 Nagari 1 Dokumen Publikasi 300 Dokumen Perda,Perbup,	50,000,000 40,000,000 410,000,000 50,000,000 120,000,000 60,000,000	150,000,000 150,000,000 60,000,000 60,000,000 50,000,000 170,000,000 170,000,000 160,000,000
19.3	4.01-2.24 4.01-2.6 4.01-26.4 4.01-26.9 4.01-26.10 4.01-26.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan  Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan  Penyelesaian Perkara/Memberikan Bantuan Hukum  Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Nagari  *)  Publikasi Peraturan Perundang-undangan  Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan  Terpeliharanya Kendaraan Operasional  Terfasilitasinya penyusunan Produk hukum daerah Prestasi Kelompok Sadar Hukum tingkat provinsi  Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan , Penyuluhan Hukum dan RANHAM  Persentase gugatan yang ditangani danJumlah pendapat hukum yang diberikan.  Jumlah Nagari yang dilakukan monitoring produk hukum nagari danJumlah Peraturan Nagari yang dievaluasi.  Operasional Aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) dan Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinventarisasi dan dicetak  Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun dan	12 Bulan 100.00 12 bulan 100.00 5.00 50 Orang 100 Persentase 39 Nagari 1 Dokumen Publikasi 300 Dokumen Perda,Perbup,	50,000,000 40,000,000 410,000,000 50,000,000 120,000,000 60,000,000 100,000,000	150,000,000 60,000,000 610,000,000 50,000,000 170,000,000 170,000,000 160,000,000
19.3	4.01-2.24 4.01-2.6 4.01-26.4 4.01-26.9 4.01-26.10 4.01-26.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan  Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan  Penyelesaian Perkara/Memberikan Bantuan Hukum  Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Nagari  )  Publikasi Peraturan Perundang-undangan  Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan  BAGIAN KESRA	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan  Terpeliharanya Kendaraan Operasional  Terfasilitasinya penyusunan Produk hukum daerah Prestasi Kelompok Sadar Hukum tingkat provinsi  Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan , Penyuluhan Hukum dan RANHAM  Persentase gugatan yang ditangani danJumlah pendapat hukum yang diberikan.  Jumlah Nagari yang dilakukan monitoring produk hukum nagari danJumlah Peraturan Nagari yang dievaluasi.  Operasional Aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) dan Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinventarisasi dan dicetak  Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun dan	12 Bulan 100.00 12 bulan 100.00 5.00 50 Orang 100 Persentase 39 Nagari 1 Dokumen Publikasi 300 Dokumen Perda,Perbup,	50,000,000 40,000,000 410,000,000 50,000,000 120,000,000 80,000,000 100,000,000 2,126,485,104	150,000,000 60,000,000 610,000,000 50,000,000 170,000,000 170,000,000 160,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2016)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	4.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	40,000,000	40,000,000
	4.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan	40,000,000	40,000,000
	4.01-49	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Administrasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah*)	Persentase pencapaian kinerja SKPD	100.00	160,000,000	340,000,000
	4.01-49.1	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Serta Monitoring Pelaksanaan Tugas Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	terlaksanaya koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan urusan kesehatan,sosial,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 tahun	30,000,000	190,000,000
	4.01-49.2	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan serta monitoring pelaksanaan tugas urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	terlaksanaya koordiansi monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas urusan kesehatan,sosial,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 tahun	30,000,000	50,000,000
	4.01-49.11	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Urusan Budparpora, Perpustakaan, dan Kearsipan	Terlaksananya koordinasi,monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas urusan	1 tahun	100,000,000	100,000,000
	4.01-50	Program Peningkatan Pemahaman Penghayatan Pengalaman dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama*)	Tuan rumah MTQ Nasional tingkat provinsi Jumlah kegiatan lomba-lomba keagaamaan  Jumlah masyarakat yang berprestasi dibidang keagamaan tingkat provinsi	6.00 2.00	1,876,485,104	13,378,000,000
	4.01-50.1	Pengkaderan Da`i, Khatib, Imam Masjid dan Pandito	Pembinaan da`i,khatib,imam mesjid dan pandito	60 orang	60,000,000	230,000,000
		andio	Jumlah cabang lomba yng di perlombakan, jumlah	6 cabang		
	4.01-50.2	Fasilitasi Lomba-Lomba Keagamaan	peserta lomba ynag di beri penghargaan Jumlah Kafilah yang diberi penghargaan di bidang	2 orang	100,000,000	600,000,000
	4.01-50.3	Fasilitasi Pesantren Kilat Ramadhan	keagamaan jumlah pelaksana pesantren kilat per nagari	35 Mesjid dan	50,000,000	200,000,000
	4.01-50.4	Pelatihan Manajemen Masjid	jumlah pengurus mesjid yang mengikuti pelatihan	Sekolah 40 orang	50,000,000	200,000,000
	4.01-50.5	Fasilitasi Pembentukan Pembinaan Rumah	terfasilitasinya pembentukan rumah tahfdz dan	6 Pondok	60,000,000	400,000,000
	4.01-50.6	Tahfiz dan Pondok Alqur`an  Fasilitasi Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi	pondok al-qur`an Persiapan Pelaksanaan Sarana dan prasarana Tuan Rumah MTQ TK.Propinsi Sumatera Barat Terlaksananaya MTQ Tingkat Kabupaten Solok	1 paket	400,000,000	10,000,000,000
			Selatan	10 cabang		
	4.01-50.7	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam	jumlah peringatan hari besar islam yang di peringati jumlah mesjid/mushallayang di kunjungi dalam bulan	11 kali	270,000,000	280,000,000
	4.01-50.8	Faslitasi Safari Ramadhan	jumlah mesjumushalayang di kunjungi dalam bulah ramadhan jumlah mesjid/mushalla yang dikunjungi dan di berikan bantuan material pembangunan tempat berwudu	35 Mesjid 7 Mesjid	560,000,000	880,000,000
	4.01-50.9	Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jema`ah Haji	pemberangkatan dan pemulangan jama`ah haji	2 kali	120,000,000	190,000,000
	4.01-50.10	Fasilitasi Lembaga-lembaga keagamaan	Terlaksananya fasilitasi lembaga keagamaan (MUI,bkmt,Kelompok yasinan,lds,lasqi dll)	6 Lembaga/Orga nisasi	60,000,000	120,000,000
	4.01-50.11	Fasilitasi Peningkatan Keimanan Ketaqwaan Aparatur Kabupaten Solok Selatan	Jumlah pelaksanaan wirid pengajian Jumlah Tausiyah Bulan Ramadhan	12 bulan 12 Kali	56,485,104	78,000,000
	4.01-50.12	Pelaksanaan Kegiatan Magrib Mengaji	jumlah tempat pelaksanaan tempat kunjungan mesjid magrib mengaji	35 Mesjid dan Mushalla	50,000,000	100,000,000
	4.01-50.13	Kegiatan Subuh Mubarrokah	jumlah tempat pelaksanaan kunjungan mesjid subuh mubarrokah	35 Mesjid dan Mushalla	40,000,000	100,000,000
19.4		BAGIAN HUMAS	- Control of the Cont	doridila	1,798,000,000	2,410,000,000
	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			1,798,000,000	2,410,000,000
	4.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	593,000,000	610,000,000
	4.01-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa koran Harian dan Mingguan	25 media	593,000,000	610,000,000
	4.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	40,000,000	50,000,000
	4.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya operasional kendaraan dinas	12 bulan	40,000,000	50,000,000
	4.01-42	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	persentase media lokal yang bekerjasama dengan pemerintah daerah Persentase kegiatan pemerintah daerah yang	100.00	1,065,000,000	1,110,000,000
	4.01-42.1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	terpublikasi Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	100.00 5 media	430,000,000	450,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	4.01-42.8	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksanannya publikasi informasi pembangunan daerah ke masyarakat luas	25 media	575,000,000	580,000,000
	4.01-42.9	Rapat dan Koordinasi Bidang Kehumasan	Tercapainya rapat dan koordinasi dibidang kehumasan	12 bulan	60,000,000	80,000,000
	4.01-43	Program Pelayanan Protokoler Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya acara keprotokoleran	100.00	60,000,000	580,000,000
	4.01-43.3	Fasilitasi Keprotokolan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya pelayanan keprotokolan kepada pimpinan dan OPD	96 kali	60,000,000	580,000,000
	4.01-56	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasi	100.00	40,000,000	60,000,000
	4.01-56.1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya pelatihan SDM dibidang jurnalistik	100 orang	40,000,000	60,000,000
19.5		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA			500,000,000	1,190,000,000
	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi			500,000,000	1,190,000,000
	4.01-1	Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	50,000,000	200,000,000
	4.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	50,000,000	200,000,000
	4.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	40,000,000	60,000,000
	4.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional	12 Bulan	40,000,000	60,000,000
	4.01-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen standar satuan biaya	1 Dokumen	100,000,000	75,000,000
	4.01-6.7	Penyusunan Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	Tersusunnya dan Terbitnya Satuan Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	50 Buku	100,000,000	75,000,000
	4.01-49	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Administrasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Persentase pencapaian kinerja SKPD	100%	310,000,000	855,000,000
	4.01-49.6	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan serta Monitoring Pelaksanaan Tugas Urusan Pengendalian Ekonomi Makro, Perbankan dan BUMD	Terlaksananya penyusunan, perumusan, monitoring dan evaluasi urusan pengendalian ekonomi makro, perbankan dan BUMD	7 Laporan	140,000,000	305,000,000
	4.01-49.7	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan serta Monitoring Pelaksanaan Tugas Urusan Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan ESDM	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan urusan koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan ESDM	4 Laporan	85,000,000	250,000,000
	4.01-49.8	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan serta Monitoring Pelaksanaan Tugas Urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan perikanan	Terlaksananya koordinasi penyusunan, perumusan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan	4 Laporan	85,000,000	300,000,000
19.6		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			500,000,000	1,090,000,000
	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			500,000,000	1,090,000,000
	4.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	50,000,000	100,000,000
	4.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	50,000,000	100,000,000
	4.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	30,000,000	80,000,000
	4.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional	12 bulan	30,000,000	80,000,000
	4.01-49	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Administrasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah*)	Persentase pencapaian kinerja SKPD	100.00	167,000,000	570,000,000
	4.01-49.9	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan serta Monitoring Pelaksanaan Tugas Urusan PUTR, Pertanahan, Perkim dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi serta perumusan kebijakan urusan PUTR, Pertanahan, Perkim dan Lingkungan Hidup	1 tahun	85,000,000	320,000,000
	4.01-49.10	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan serta Monitoring Pelaksanaan Tugas Urusan Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan perumusan serta monitoring dan evaluasi urusan perhubungan, kominfo, statistik, dan persandian	1 tahun	82,000,000	250,000,000
	4.01-52	Program Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa *)	Pembinaan terhadap asosiasi penyedia jasa kontruksi	1 Asosiasi	80,000,000	140,000,000

	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN FROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2016)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
4	4.01-53	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LAKIP / SAKIP	В	173,000,000	200,000,000
4	4.01-53.4	Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa	Terlaksananya Penyusunan Buku Standar Harga Satuan Barang dan Jasa	100 buku	86,000,000	100,000,000
4	4.01-53.5	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Terlaksananya monitoring, dan evaluasi penyerapan realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 tahun	87,000,000	100,000,000
19.7		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			572,158,215	1,040,000,000
4	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			572,158,215	1,040,000,000
4	4.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	50,000,000	50,000,000
4	4.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	12 bulan	50,000,000	50,000,000
4	4.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	40,000,000	40,000,000
	4.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	1 Tahun	40,000,000	40,000,000
4	4.01-23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah penghargaan untuk mencapai ISO (17 Penghargaan)	17.00	228,868,000	300,000,000
4	4.01-23.3	Penguatan Kelembagaan Standarisasi Kelembagaan LPSE	Jumlah Penghargaan Untuk Mencapai ISO ( 17 Penghargaan )	17 Penghargaan	228,868,000	300,000,000
			Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa			
		Program Pengembangan Pengadaan Barang	Lelang	100.00		
4	4.01-52	dan Jasa *)	Pengadaan Langsung	100.00	253,290,215	650,000,000
			Penunjukan langsung Swakelola	100.00 100.00		
			E-Catalog	100.00		
2	4.01-52.1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Lelang OPD	Jumlah Paket Lelang OPD Melalui ULP	150 Paket	196,440,000	500,000,000
4	4.01-52.2	Koordinasi Kebijakan Terkait dengan Barang dan Jasa	Perumusan Kebijakan Terkait Dengan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	56,850,215	150,000,000
19.8		BAGIAN ORGANISASI			1,260,125,000	1,740,000,000
	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi			1,260,125,000	1,740,000,000
	4.01-1	Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	831,157,000	1,050,000,000
	4.01-1.18	daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi  Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	12 Bulan	831,157,000	1,050,000,000
4	4.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	30,000,000	40,000,000
4	4.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional	12 Bulan	30,000,000	40,000,000
4	4.01-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	40,000,000	60,000,000
4	4.01-6.5	Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Daerah	Tersusunnya Dokumen RKA dan Renja Setda Tahun 2019	2 Dokumen	40,000,000	60,000,000
4	4.01-27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Perangkat Daerah tepat Struktur dan tepat Fungsi	100.00	128,968,000	190,000,000
4	4.01-27.6	Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Daerah	Jumlah Perbup Tupoksi yang dievaluasi	100 Persentase	70,000,000	120,000,000
4	4.01-27.8	Penyusunan Grand Desain Reformasi Birokrasi	Dokumen Grand Desain RB	1 Dokumen	58,968,000	70,000,000
4	4.01-48	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat *)	Persentase Pengaduan yang tertangani	100.00	40,000,000	70,000,000
4	4.01-48.1	Pembentukan unit khusus penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan yang tertangani	100 Persentase	40,000,000	70,000,000
	4.01-53	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penetapan SOP pelayanan OPD	100.00	140,000,000	230,000,000
			Nilai LAKIP/SAKIP	В		
			Tersusunnya Dokumen LKJ Pemerintah Daerah			
4	4.01-53.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018	2 Dokumen	90,000,000	160,000,000
	4.01-53.1 4.01-53.3		Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja	2 Dokumen 33 Perangkat Daerah	90,000,000	70,000,000
		ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi SOP Perangkat Daerah	Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Jumlah SKPD yang telah disusun SOP nya Rata-rata Persentase Pencapaian SPM per	33 Perangkat		
2		ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi SOP	Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Jumlah SKPD yang telah disusun SOP nya Rata-rata Persentase Pencapaian SPM per urusan Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap	33 Perangkat Daerah		
2	4.01-53.3	ikhtisar realisasi kinerja SKPD  Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi SOP Perangkat Daerah  Program Penataan dan Penyempurnaan	Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018  Jumlah SKPD yang telah disusun SOP nya  Rata-rata Persentase Pencapaian SPM per urusan	33 Perangkat Daerah 80.00	50,000,000	70,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	MAJU
			INDIKATOR	TARGET	(1A110N 2010)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
19.9		BAGIAN UMUM			17,670,624,703	16,065,000,000
	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi			11,960,624,703	10,800,000,000
	4.01-1	Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	4,265,624,703	5,485,000,000
	4.01-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat dengan baik	12 Bulan	20,000,000	25,000,000
	4.01-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi Sumber Daya Air, dan listrik	12 bulan	190,624,703	200,000,000
	4.01-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	80,000,000	120,000,000
	4.01-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya perizinan dan pajak kendaraan dinas	12 bulan	40,000,000	50,000,000
	4.01-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honor bagi pengelola keuangan di Sekretariat Daerah	12 Bulan	390,000,000	370,000,000
	4.01-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 Bulan	370,000,000	400,000,000
	4.01-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja yang memadai	12 Bulan	60,000,000	70,000,000
	4.01-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor	12 Bulan	90,000,000	100,000,000
	4.01-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	80,000,000	160,000,000
		Penyediaan komponen instalasi	mendukung kegiatan Tersedianya komponen instalasi listrik dan			
	4.01-1.12	listrik/penerangan bangunan kantor	Penerangan kantor	12 Bulan	65,000,000	90,000,000
	4.01-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan	12 Bulan	400,000,000	500,000,000
	4.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 Bulan	1,100,000,000	2,000,000,000
	4.01-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya tenaga pendukung administrasi kantor	12 Bulan	1,280,000,000	1,300,000,000
	4.01-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih untuk cs Kantor Bupati	1 Tahun	70,000,000	70,000,000
	4.01-1.22	Penyedian jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah jabatan	Tersedianya rumah jabatan Sekda	1 Tahun	30,000,000	30,000,000
	4.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	6,630,000,000	4,080,000,000
	4.01-2.3	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya pagar kantor yang memadai.	1 Paket	2,000,000,000	
	4.01-2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Jabatan/ Operasional Setda	4 Unit	1,650,000,000	600,000,000
	4.01-2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah jabatan untuk Sekda	1 Paket	150,000,000	200,000,000
	4.01-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat Daerah	1 Paket	1,200,000,000	1,300,000,000
	4.01-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor bupati dengan baik	1 Tahun	100,000,000	100,000,000
	4.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Mobil Jabatan/dinas dengan baik	12 Bulan	1,200,000,000	1,500,000,000
	4.01-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya Kantor Setda dengan baik	12 Bulan	200,000,000	200,000,000
	4.01-2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan jabatan/dinas Bagian Umum dengan baik	12 Bulan	100,000,000	150,000,000
	4.01-2.50	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Terlaksanannya invetarisasi seluruh Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000
	4.01-3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian	100.00	50,000,000	50,000,000
	4.01-3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta	dinas Tersedianya pakaian dinas Sekretariat Daerah	1 Paket	50,000,000	50,000,000
		perlengkapannya				
	4.01-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	180,000,000	150,000,000
	<b>4.01-6</b> 4.01-6.6	pelaporan capaian kinerja dan keuangan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan	dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terverifikasinya pertanggungjawaban keuangan	2 dokumen 12 kali	<b>180,000,000</b>	<b>150,000,000</b>
		pelaporan capaian kinerja dan keuangan	dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			150,000,000
	4.01-6.6	pelaporan capaian kinerja dan keuangan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan	dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terverifikasinya pertanggungjawaban keuangan Setda Persentase layanan kedinasan KDH yang	12 kali	180,000,000	
	4.01-6.6 <b>4.01-16</b>	pelaporan capaian kinerja dan keuangan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  Terverifikasinya pertanggungjawaban keuangan Setda  Persentase layanan kedinasan KDH yang terfasilitasi	12 kali	180,000,000 <b>760,000,000</b>	150,000,000 1,035,000,000 35,000,000
	4.01-6.6 <b>4.01-16</b> 4.01-16.8	pelaporan capaian kinerja dan keuangan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Penyusunan Pidato Bupati Solok Selatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non	dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  Terverifikasinya pertanggungjawaban keuangan Setda  Persentase layanan kedinasan KDH yang terfasilitasi  Tersusunnya Pidato Bupati Solok Selatan  Terlayaninya Kunjungan Kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non	12 kali 100.00 1 Dokumen	180,000,000 <b>760,000,000</b> 35,000,000	150,000,000 1,035,000,000 35,000,000 250,000,000
	4.01-6.6 4.01-16 4.01-16.8 4.01-16.12	pelaporan capaian kinerja dan keuangan  Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah  Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah  Penyusunan Pidato Bupati Solok Selatan  Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri  Fasilitasi Peringatan Hari - hari Besar Nasional/Daerah  Fasilitasi Pelaksanaan Tour De Singkarak	dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  Terverifikasinya pertanggungjawaban keuangan Setda  Persentase layanan kedinasan KDH yang terfasilitasi  Tersusunnya Pidato Bupati Solok Selatan  Terlayaninya Kunjungan Kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri  Terlaksananya kegiatan-kegiatan peringatan harihari besar nasional dan daerah  Terlaksananya kegiatan Tour De Singkarak	12 kali 100.00 1 Dokumen 12 Bulan	180,000,000 <b>760,000,000</b> 35,000,000 175,000,000	150,000,000 1,035,000,000 35,000,000 250,000,000
	4.01-6.6 4.01-16 4.01-16.8 4.01-16.12 4.01-16.13	pelaporan capaian kinerja dan keuangan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Penyusunan Pidato Bupati Solok Selatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Fasilitasi Peringatan Hari - hari Besar Nasional/Daerah	dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  Terverifikasinya pertanggungjawaban keuangan Setda  Persentase layanan kedinasan KDH yang terfasilitasi  Tersusunnya Pidato Bupati Solok Selatan  Terlayaninya Kunjungan Kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri  Terlaksananya kegiatan-kegiatan peringatan harihari besar nasional dan daerah	12 kali 100.00 1 Dokumen 12 Bulan 4 Hari Besar	180,000,000 <b>760,000,000</b> 35,000,000 175,000,000	150,000,000 1,035,000,000 35,000,000 250,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
		KDH/WKDH			5,710,000,000	5,265,000,000
	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi			5,710,000,000	5,265,000,000
	4.01-1	Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	2,945,000,000	3,465,000,000
	4.01-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat dengan baik	12 Bulan	15,000,000	20,000,000
	4.01-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi Sumber Daya Air, dan listrik	12 Bulan	180,000,000	200,000,000
	4.01-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	70,000,000	85,000,000
	4.01-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya perizinan dan pajak kendaraan dinas	12 Bulan	20,000,000	25,000,000
	4.01-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja yang memadai	12 Bulan	40,000,000	40,000,000
	4.01-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor	12 Bulan	70,000,000	75,000,000
	4.01-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan mendukung kegiatan	12 Bulan	100,000,000	125,000,000
	4.01-1.12	Penyediaan komponen instalasi	Tersedianya komponen instalasi listrik dan	12 Bulan	60,000,000	70,000,000
	4.01-1.15	listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Penerangan kantor Tersedianya bahan bacaan berupa buku dan	12 Bulan	25,000,000	25,000,000
		perundang-undangan	peraturan perundang-undangan			
	4.01-1.17	Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Tersedianya Makan dan minum tamu dan rapat Terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	12 Bulan	750,000,000	800,000,000
	4.01-1.18	daerah Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan	dan dalam daerah.	12 Bulan	1,400,000,000	1,750,000,000
	4.01-1.20	Pembersih	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000
	4.01-1.22	Penyedian jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah jabatan	Tersedianya rumah jabatan untuk KDH/WKDH	1 Tahun	185,000,000	220,000,000
	4.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	2,380,000,000	1,660,000,000
	4.01-2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan dan peralatan rumah dinas.	12 Bulan	1,100,000,000	100,000,000
	4.01-2.7 4.01-2.20	Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya rumah jabatan KDH/WKDH	12 Bulan 1 Paket	450,000,000 100,000,000	700,000,000 120,000,000
	4.01-2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan jabatan KDH/WKDH	12 Bulan	700,000,000	700,000,000
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah	dengan baik	1 Paket		
	4.01-2.27	jabatan/dinas	Tersedianya peralatan rumah tangga KDH/WKDH  Persentase ketersediaan pakaian dinas		30,000,000	40,000,000
	4.01-3	Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta	KDH/WKDH	100.00	135,000,000	140,000,000
	4.01-3.2	perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi KDH/WKDH	25 Stel	85,000,000	90,000,000
	4.01-3.4 4.01-16	Pengadaan pakaian KORPRI Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tersedianya pakaian Korpri KDH/WKDH Persentase pelatihan wajib yang diikuti oleh KDH/WKDH	15 Stel	50,000,000 <b>250,000,000</b>	50,000,000
	4.01-16.11	Fasilitasi Bimbingan Teknis bagi KDH/WKDH	Jumlah Pimpinan Daerah yang mengikuti Bimbingan Teknis	1 Orang	250,000,000	-
20		SEKRETARIAT DPRD	Tokino		15,059,913,245	18,574,118,138
	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			15,059,913,245	18,574,118,138
	4.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	3,319,404,900	3,467,686,928
	4.01-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	7,500,000	8,500,000
	4.01-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediaanya Jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	154,064,500	169,470,950
	4.01-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya Pajak dan KIR Kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	49,900,000	54,890,000
	4.01-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	224,520,000	246,972,000
	4.01-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	252,150,000	277,365,000
	4.01-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Kerja	12 Bulan	44,500,000	48,950,000
	4.01-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	57,433,230	63,176,553
	4.01-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	304,811,300	335,292,430
	4.01-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Llstrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	35,460,000	39,006,000
	4.01-1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tanggga	12 Bulan	186,200,000	204,820,000
	4.01-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	121,360,000	133,496,000
	4.01-1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik kantor	12 Bulan	174,613,950	192,075,345
	4.01-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan tamu	12 Bulan	438,870,000	482,757,000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinas dan	12 Bulan	491,877,920	369,417,500

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DALKAT DAN I KOGKAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(1741014 2010)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	4.01-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor *)	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	12 Bulan	495,000,000	544,500,000
	4.01-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan	48,965,000	33,900,250
	4.01-1.22	Penyedian jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah jabatan	Tersedianya Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	12 Bulan	66,045,000	66,500,000
	4.01-1.23	Penyediaan Jasa Penyebarluasan Informasi	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	12 Bulan	65,089,000	71,597,900
	4.01-1.25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD (Medical Chek Up)	12 Bulan	101,045,000	125,000,000
	4.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	2,516,001,795	3,475,493,210
	4.01-2.3	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	1 unit	184,470,295	680,000,000
	4.01-2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit	250,000,000	1,000,000,000
	4.01-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	540,160,000	127,441,710
	4.01-2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeluer kantor yang memadai	1 paket	100,000,000	98,855,000
	4.01-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung Kantor	3 gedung	228,350,000	251,185,000
	4.01-2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil iabatan	1 tahun	244,205,000	268,625,500
	4.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	1 tahun	415,846,500	439,386,000
	4.01-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan sedang/berat gedung kantor	3 gedung	470,470,000	490,000,000
	4.01-2.43	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	3 unit	39,000,000	45,000,000
	4.01-2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	4 unit	43,500,000	75,000,000
	4.01-3	dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin DPRD dan aparatur dalam	100.00	373,580,000	410,938,000
	4.01-3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	berpakaian dinas Tersedianya pakaian dinas pinmpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD dan	295 stel	373,580,000	410,938,000
	4.01-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	perlengkapannya persentase aparatur yang mendapat pelatihan	70%	412,170,000	180,000,000
	4.01-5.1	Daya Aparatur	dan sosialisasi sesuai tupoksi Jumlah peserta mengikuti bimtek atau sosialisasi	1 tahun	, ,	
	4.01-5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	pada Sekretariat DPRD	i tanun	412,170,000	180,000,000
	4.01-15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Presentase Jumlah Ranperda usulan Pemda yang dibahas DPRD yang menjadi Perda	100.00	8,438,756,550	11,040,000,000
			Presentase Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD yang menjadi Perda (target 2 pertahun)	100.00		
	4.01-15.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah dan Peraturan lainnya	Terlaksananya Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainya	12 Perda	2,481,210,550	3,500,000,000
	4.01-15.2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Terlaksananya Hearing/Dialog dengan tokoh masyarakat/tokoh agama dengan pemerintah daerah	6 Kali Pertemuan	102,500,000	200,000,000
	4.01-15.3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	6 kali pembahasan	341,350,000	390,000,000
	4.01-15.4	Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna	6 Kali Rapat	352,995,000	450,000,000
	4.01-15.5	Kegiatan Reses	Terlaksanaya Reses Penjaringan Aspirasi Masyarakat	3 kali pertahun	519,306,000	600,000,000
	4.01-15.6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD	3 kali pertahun	1,928,181,000	2,500,000,000
	4.01-15.7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Tersedianya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	3 kali 1 tahun	1,625,244,000	2,000,000,000
	4.01-15.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan	5 kali 1 Tahun	1,087,970,000	1,400,000,000
21		Kepemerintahan dan Kemasyarakatan *) KECAMATAN KOTO PARIK GADANG	Anggota DPRD		1,130,989,910	884,473,910
	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			1,130,989,910	884,473,910
	4.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	421,676,110	421,676,110
	4.01-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 tahun	4,500,000	4,500,000
	4.01-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan	1 tahun	19,000,000	19,000,000
	4.01-1.7	dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan	listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 tahun	53,280,000	53,280,000
	4.01-1.7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1 tahun	10,000,000	10,000,000
	4.01-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	20,779,110	20,779,110
	4.01-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	13,200,000	13,200,000
		<b>.</b>			+	
	4.01-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	4,137,000	4,137,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN MAJU
			INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	4.01-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	3,000,000	3,000,000
	4.01-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 tahun	22,800,000	22,800,000
	4.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	130,000,000	130,000,000
	4.01-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor *)	16 orang	130,000,000	130,000,000
	4.01-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	1 tahun	980,000	980,000
	4.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	98,425,000	98,425,000
	4.01-2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	1 paket	14,150,000	14,150,000
	4.01-2.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksedianya mebeleur kantor	1 paket	20,775,000	20,775,000
	4.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan dan operasional kendaraan operasional kantor	1 Tahun	63,500,000	63,500,000
	4.01-17	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan*	Persentase penyelesaian masalah-masalah pemerintahan kecamatan	100.00	89,310,000	89,310,000
	4.01-17.1	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar	2 kali	52,890,000	52,890,000
			nasional	-		
	4.01-17.2	Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan  Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan	Terlaksananya rapat koordinasi kecamatan	8 kali	19,320,000	19,320,000
	4.01-17.3	Pemerintahan Nagari	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	4 NAGARI	17,100,000	17,100,000
	4.01-19	Program Fasilitasi dan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan*)	Persentase penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan pembangunan	100.00	4,144,000	4,144,000
	4.01-19.1	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 kali	4,144,000	4,144,000
	4.01-20	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat*)	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	100.00	71,200,000	71,200,000
	4.01-20.2	Pembinaan dan Lomba Nagari Rancak	Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Nagari Rancak	4 Nagari	11,200,000	11,200,000
	4.01-20.3	Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan PKK	Terlaksananya 'Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan PKK	1 Tahun	60,000,000	60,000,000
	4.01-21	Program Fasilitasi dan Koordinasi Sosial Budaya	Persentase pelaksanaan kegiatan sosial budaya tingkat kecamatan	100.00	423,134,800	176,618,800
	4.01-21.1	,	Persentase penyaluran beras raskin	100.00	300,000,000	20,000,000
		Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan  Koordinasi dan Pembinaan Pemuda dan Olah	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan  Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pemuda	1 event		30,000,000
	4.01-21.3	raga	dan Olah raga	1 Tahun	12,884,000	36,368,000
	4.01-21.4	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	2 Kegiatan	110,250,800	110,250,800
	4.01-22	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*)	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan tingkat kecamatan	100.00	23,100,000	23,100,000
	4.01-22.1	Pelaksanaan PATEN*)	Terlaksananya penyelenggaraan PATEN	1 tahun	23,100,000	23,100,000
22		KECAMATAN SUNGAI PAGU			814,409,400	1,052,483,310
	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			814,409,400	1,052,483,310
	4.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	345,909,400	397,795,810
	4.01-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	1 tahun	1,500,000	1,725,000
	4.01-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Nasional Muara Labuh	1 tahun	11,000,000	12,650,000
	4.01-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya kegiatan jasa administrasi dan keuangan	1 tahun	53,040,000	60,996,000
	4.01-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	1 tahun	12,000,000	13,800,000
	4.01-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	1 tahun	10,759,400	12,373,310
	4.01-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	10,000,000	11,500,000
	4.01-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor, rumah dinas	1 tahun	2,785,000	3,202,750
	4.01-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	3,000,000	3,450,000
	4.01-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan minum tamu dan rapat	1 tahun	7,425,000	8,538,750
	4.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dinas ke luar dan dalam daerah	1 tahun	169,000,000	194,350,000
	4.01-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya tenaga jasa tenaga kontrak daerah	1 tahun	62,400,000	71,760,000
	4.01-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	1 tahun	3,000,000	3,450,000

No.	KODE	DE SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN MAJU
			INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	4.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	90,000,000	123,500,000
	4.01-2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya AC, tempat tidur lengkap dan meja makan rumah dinas Camat	3 paket	-	20,000,000
	4.01-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Laptop/Notebook	1 paket	12,000,000	13,800,000
	4.01-2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya kursi eselon kecamatan sungai pagu	1 paket	22,000,000	25,300,000
	4.01-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pengecatan kantor dan rumah dinas	1 paket	7,000,000	8,050,000
	4.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional	1 tahun	45,000,000	51,750,000
	4.01-2.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya jasa service/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	4,000,000	4,600,000
	4.01-3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100.00	11,550,000	29,700,000
	4.01-3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta	Tersedianya pakaian dinas untuk ASN	33 stel	-	13,200,000
	4.01-3.5	perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu untuk ASN dan TKD	33 stel	11,550,000	16,500,000
	4.01-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan	3 Orang	-	15,000,000
	4.01-5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	sesuai tupoksi Terlaksananya pendidikan dan latihan formal	3 orang	-	15,000,000
	4.01-17	Program Fasilitasi dan Koordinasi	Persentase penyelesaian masalah-masalah	100.00	111,450,000	128,167,500
	4.01-17.1	Pemerintahan*  Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	pemerintahan kecamatan Terlaksananya peringatan hari besar	5 kali	65,000,000	74,750,000
		-	nasional/daerah Terlaksananya rapat koordinasi pemerintahan			
	4.01-17.2	Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan  Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan	kecamatan Terlaksananya Monitoring dan evaluasi	4 kali	11,450,000	13,167,500
	4.01-17.3	Pemerintahan Nagari Program Fasilitasi dan Koordinasi	penyelenggaraan pemerintahan nagari Persentase penyelesaian masalah-masalah	11 nagari	35,000,000	40,250,000
	4.01-18	Ketentraman dan Ketertiban*)	ketentraman dan ketertiban	100.00	3,000,000	5,000,000
	4.01-18.1	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban	Fasilitasi dan Koordinasi penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban	1 kegiatan	3,000,000	5,000,000
	4.01-19	Program Fasilitasi dan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan*)	Persentase penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan pembangunan	100.00	39,650,000	45,597,500
	4.01-19.1	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan	1 kali	10,150,000	11,672,500
	4.01-19.2	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan	1 kegiatan	3,000,000	3,450,000
	4.01-19.3	Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Monumen	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Monumen*)	1 tahun	26,500,000	30,475,000
	4.01-20	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat*)	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	100.00	45,850,000	53,422,500
	4.01-19.1	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Nagari	Terlaksananya koordinasi musrenbang Kecamatan	11 Nagari	700,000	1,500,000
	4.01-20.2	Pembinaan dan Lomba Nagari Rancak	Terlaksananya pembinaan dan lomba nagari rancak	1 kali	10,150,000	11,672,500
	4.01-20.3	Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan	1 tahun	35.000.000	40,250,000
	4.01-21	PKK Program Fasilitasi dan Koordinasi Sosial Budaya	dan pembinaan PKK Persentase pelaksanaan kegiatan sosial budaya tingkat kecamatan	100.00	127,000,000	208,300,000
	4.01-21.1	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	Persentase penyaluran beras raskin Terlaksananya kegiatan keagamaan	100.00 5 kegiatan	35,000,000	40,250,000
	4.01-21.2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Terlaksananya koordinasi bidang pendidikan dan kesehatan	2 kegiatan	5,000,000	5,750,000
	4.01-21.3	Koordinasi dan Pembinaan Pemuda dan Olah raga	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	1 kegiatan	5,000,000	60,000,000
	4.01-21.4	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi bidang kesejahteraan sosial	2 kegiatan	75,000,000	86,250,000
	4.01-21.5	Fasilitasi Festival Sarantau Sasurambi	Terfasilitasinya kontingen kecamatan dalam festival sarantau sasurambi	1 kali	7,000,000	8,050,000
	4.01-21.6	Fasilitasi Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terfasilitasinya kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1 tahun	-	8,000,000
	4.01-22	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*)	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan tingkat kecamatan	100.00	40,000,000	46,000,000
	4.01-22.1	PATEN	kegiatan PATEN di Sungai Pagu	1 tahun	40,000,000	46,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	tan)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DALIVAN DAN I NOSIKAM/NEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(1741014 2010)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
23	4.01	KECAMATAN SANGIR URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			714,872,960 714,872,960	1,230,678,620 1,230,678,620
	4.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	276,403,240	343,150,900
	4.01-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	1 Tahun	1,440,000	1,512,000
	4.01-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya belanja air, telepon dan listrik	1 Tahun	9,240,000	11,180,400
	4.01-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Belanja Administrasi Keuangan	1 Tahun	53,040,000	53,040,000
	4.01-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	12,000,000	12,000,000
	4.01-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1 Tahun	1,500,000	2,160,000
	4.01-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	13,127,240	13,000,000
	4.01-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	12,000,000	11,800,000
	4.01-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	500,000	1,098,500
	4.01-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	20,000,000	25,000,000
	4.01-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	1 Tahun	4,356,000	2,760,000
	4.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	100,000,000	164,736,000
	4.01-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	TersedianyaJasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	6 orang	48,000,000	44,000,000
	4.01-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan	Tersedianya Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	1 Tahun	1,200,000	864,000
	4.01-2	Pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	45,700,000	222,482,000
	4.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6 unit	45,700,000	72,482,000
	4.01-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		-	150,000,000
	4.01-3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian		-	10,800,000
	4.01-3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	dinas Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian	25 stel	-	10,800,000
	4.01-17	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan*	Persentase penyelesaian masalah-masalah	100.00	43,270,000	75,432,000
	4.01-17.1	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	pemerintahan kecamatan Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional dan daerah	2 kali	26,622,000	38,336,000
	4.01-17.2	Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi kecamatan	4 kali	4,668,000	12,096,000
	4.01-17.3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	4 nagari	11,980,000	25,000,000
	4.01-18	Pemerintahan Nagari Program Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	nagari Persentase penyelesaian masalah-masalah ketentraman dan ketertiban	100.00	4,470,000	10,000,000
	4.01-18.1	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban	Terlaksananya fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban	1 Tahun	4,470,000	10,000,000
	4.01-19	Program Fasilitasi dan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan pembangunan	100.00	11,835,000	22,100,000
	4.01-19.1	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 kali	8,355,000	12,100,000
	4.01-19.2	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan koordinasi masalah ekonomi dan pembangunan	4 kali	3,480,000	10,000,000
	4.01-20	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	100.00	58,207,000	69,700,000
	4.01-20.1	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Nagari	Terlaksananya musrenbang nagari	4 nagari	-	5,000,000
	4.01-20.2	Pembinaan dan Lomba Nagari Rancak	Terlaksananya kegiatan lomba nagari rancak	4 nagari	5,580,000	10,000,000
	4.01-20.3	Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan PKK	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	3 keg	52,627,000	54,700,000
	4.01-21	Program Fasilitasi dan Koordinasi Sosial Budaya	Persentase pelaksanaan kegiatan sosial budaya tingkat kecamatan persentase penyaluran beras raskin	100.00	229,987,720	425,013,720
	4.01-21.1	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan	5 keg	64,252,000	139,000,000
	4.01-21.2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	2 keg	5,580,000	36,000,000
	4.01-21.3	Koordinasi dan Pembinaan Pemuda dan Olah raga	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pemuda dan Olah raga	1 tahun	40,062,000	93,000,000
_	4.01-21.4	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	4 keg	109,053,720	142,013,720
			Terlaksananya Fasilitasi Festival Sarantau	1 event		

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN MAJU (TAHUN 2019)
			INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	
1	2	3	4	5	6	7
	4.01-22	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan tingkat kecamatan	100.00	45,000,000	52,000,000
24	4.01-22.1	PATEN KECAMATAN SANGIR JUJUAN	Penyelenggaraan PATEN	1 Tahun	45,000,000	52,000,000
24	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			693,365,392 693,365,392	777,662,380 777,662,380
	4.01-1	Program Pelayanan Administrasi	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	350,663,012	
		Perkantoran				392,860,000
	4.01-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Materai dan Prangko Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	12 bulan 12 bulan	1,200,000 3,800,000	2,000,000 3,800,000
	4.01-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Belanja Administrasi Keuangan	12 bulan	53,040,000	53,040,000
	4.01-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor; Kertas, tinda konputer, map, dll	12 bulan	15,000,000	15,000,000
	4.01-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	8,000,000	9,000,000
	4.01-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Litrik dan penerangan kantor	12 bulan	3,000,000	3,000,000
	4.01-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersesianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	14,723,012	35,000,000
	4.01-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	12 bulan	1,800,000	1,920,000
	4.01-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 bulan	14,000,000	14,000,000
	4.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dalam dan luar daerah	12 bulan	170,000,000	190,000,000
	4.01-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan	Tersedianya Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	7 orang	63,600,000	63,600,000
	4.01-1.20	Pembersih	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih  Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	12 bulan	2,500,000	2,500,000
	4.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	76,600,000	100,500,000
	4.01-2.3	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gudang Arsip/Gedung kantor	1 Unit	-	15,000,000
	4.01-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	14,000,000	18,000,000
	4.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / Operasional	1 Tahun	57,600,000	60,000,000
	4.01-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	5,000,000	7,500,000
	4.01-17	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan*	Persentase penyelesaian masalah-masalah pemerintahan kecamatan	100.00	77,000,000	93,000,000
	4.01-17.1	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional dan daerah	4 kegiatan	62,000,000	65,000,000
	4.01-17.2	Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	1 Tahun	3,000,000	3,000,000
	4.01-17.3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Program Fasilitasi dan Koordinasi Ekonomi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pemerinatahan Nagari	12 bulan	12,000,000	25,000,000
	4.01-19	dan Pembangunan	Persentase penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan pembangunan	100.00	8,000,000	10,000,000
	4.01-19.1	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 Kali	8,000,000	10,000,000
	4.01-20	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	100.00	33,500,000	40,000,000
	4.01-20.1	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Nagari	Terlaknanya Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Nagari	5 Nagari	1,500,000	5,000,000
	4.01-20.3	Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan PKK	Terciptanya PKK yang handal dan mandiri	1 Tahun	32,000,000	35,000,000
	4.01-21	Program Fasilitasi dan Koordinasi Sosial Budaya	Persentase pelaksanaan kegiatan sosial budaya tingkat kecamatan Persentase Penyuluran Beras Raskin	100.00 100.00	107,602,380	101,302,380
	4046::	Bullian and Karlata at			00.000.00	00.000
	4.01-21.1	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan  Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang	Terciptanya masyarakat yang islami dan agamais  Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan kegiatan	1 Tahun	62,000,000	30,000,000
	4.01-21.2	Pendidikan dan Kesehatan	bidang pendidikan dan kesehatan	2 kegiatan	5,300,000	6,000,000
	4.01-21.3	Koordinasi dan Pembinaan Pemuda dan Olah raga	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Peuda dan olah raga	3 kegiatan	15,000,000	40,000,000
	4.01-21.4	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Lancarnya Pendistribusian Beras Raskin (RTM)	393 KK	20,302,380	20,302,380
	4.01-21.5	Fasilitasi Festival Sarantau Sasurambi  Program Pelayanan Administrasi Terpadu	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Adat dan Budaya  Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan	1 kegiatan	5,000,000	5,000,000
	4.01-22	Kecamatan*)	tingkat kecamatan	100.00	40,000,000	40,000,000
	4.01-22.1	PATEN	Mudahnya Akses masyarakat dalam kepengurusan surat-surat Izin	1 Tahun	40,000,000	40,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DALKAN DAN I KOGKAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TATION 2010)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
25		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI			706,239,900	762,077,500
	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			706,239,900	762,077,500
	4.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	291,540,000	306,040,000
	4.01-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	1,500,000	1,650,000
	4.01-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan	12 Bulan	6,000,000	6,600,000
	4.01-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	53,040,000	53,040,000
	4.01-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	14,400,000	14,400,000
	4.01-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	2,000,000	2,500,000
	4.01-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	8,500,000	15,000,000
	4.01-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	5,000,000	5,500,000
	4.01-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	5,500,000	6,050,000
	4.01-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	15,000,000	3,000,000
	4.01-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	12 Bulan	2.000.000	2 500 000
		perundang-undangan	perundang-undangan		,,	2,500,000
	4.01-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	6,000,000	12,000,000
	4.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	102,000,000	112,200,000
	4.01-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	TersedianyaJasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor *)	12 Bulan	69,600,000	69,600,000
	4.01-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan	Tersedianya Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan	1,000,000	2,000,000
	4.01-2	Pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas	100.00	73,207,000	108,000,000
	4.01-2.5	nongadaan Kandaraan dinas/anarasianal	dan kegiatan  Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2	1 Unit	28,000,000	28,000,000
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	·		28,000,000	
	4.01-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	-	25,000,000
	4.01-2.24	dinas/operasional	Jasa servis, suku cadang BBM, Pajak Kendaraan	12 Bulan	45,207,000	55,000,000
	4.01-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan sesuai tupoksi	4 orang	10,000,000	10,000,000
	4.01-5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal	4 orang	10,000,000	10,000,000
	4.01-17	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan*	Persentase penyelesaian masalah-masalah pemerintahan kecamatan	100.00	71,000,000	71,300,000
	4.01-17.1	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	6 Kali	28,000,000	24,000,000
	4.01-17.2	Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kecamatan	4 Kali	10,000,000	11,000,000
	4.01-17.3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang dimonitoring dan Dievaluasi	7 Nagari	33,000,000	36,300,000
	4.01-18	Program Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase penyelesaian masalah-masalah ketentraman dan ketertiban	100.00	8,000,000	10,000,000
	4.01-18.1	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban	1 tahun	8,000,000	10,000,000
	4.01-19	Program Fasilitasi dan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan pembangunan	100.00	20,500,000	24,000,000
	4.01-19.1	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 Dok	15,000,000	16,500,000
	4.01-19.2	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 Kali	5,500,000	7,500,000
	4.01-20	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat*)	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	100.00	38,500,000	48,550,000
	4.01-20.1	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Nagari	Terlaksananya 'Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Nagari	7 Nagari	2,000,000	8,500,000
	4.01-20.2	Pembinaan dan Lomba Nagari Rancak	Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Nagari Rancak	7 Nagari	5,500,000	6,050,000
	4.01-20.3	Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan PKK	Terlaksananya 'Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan PKK	1 Tahun	31,000,000	34,000,000
	4.01-21	Program Fasilitasi dan Koordinasi Sosial Budaya*)	Persentase pelaksanaan kegiatan sosial budaya tingkat kecamatan Persentase Penyuluran Beras Raskin	100.00 100.00	157,792,900	148,487,500
	4.01-21.1	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan	5 Keg	60,167,900	39,000,000
	4.01-21.2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	2 Keg	9,000,000	12,000,000
		Pendidikan dan Kesehatan Koordinasi dan Pembinaan Pemuda dan Olah	Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pemuda	3 Keg	25,125,000	27,637,500
	4.01-21.3	raga	dan Olah raga	5 Reg	23,123,000	21,001,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DALKAT DAN I KOGKAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TATION 2010)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	4.01-21.5	Fasilitasi Festival Sarantau Sasurambi	Terlaksananya Fasilitasi Festival Sarantau Sasurambi	1 Keg	8,500,000	9,350,000
	4.01-22	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan tingkat kecamatan	100.00	35,700,000	35,700,000
	4.01-22.1	PATEN	Penyelenggaraan PATEN	12 Bulan	35,700,000	35,700,000
26		KECAMATAN PAUH DUO			779,020,140	1,056,885,000
	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi			779,020,140	1,056,885,000
	4.01-1	Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	350,340,000	405,735,000
	4.01-1.1 4.01-1.2	Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Terlaksananya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan	1 tahun 1 tahun	2,000,000 10,200,000	3,500,000 11,000,000
		dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	listrik			
	4.01-1.3	kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	25,200,000	4,900,000
	4.01-1.7 4.01-1.8	Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun 1 tahun	47,040,000 8,400,000	47,040,000 12,000,000
	4.01-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa kebersinan kantoi  Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1 tahun	2,000,000	3,600,000
	4.01-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	11,640,000	16,000,000
	4.01-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	8,000,000	14,150,000
	4.01-1.12	Penyediaan komponen instalasi	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	1 tahun	3,000,000	5,200,000
		listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan			
	4.01-1.15	perundang-undangan	perundang-undangan	1 tahun	2,400,000	4,575,000
	4.01-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	1 tahun	18,100,000	17,750,000
	4.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	120,160,000	160,000,000
	4.01-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	1 tahun	91,200,000	102,120,000
	4.01-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	1 tahun	1,000,000	3,900,000
	4.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	61,000,000	86,250,000
	4.01-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	1 unit	6,000,000	15,000,000
	4.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional kantor yang dipelihara	6 unit	55,000,000	71,250,000
	4.01-17	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan*	Persentase penyelesaian masalah-masalah pemerintahan kecamatan	100.00	60,000,000	140,750,000
	4.01-17.1	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	1 kali	30,000,000	86,000,000
	4.01-17.2	Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	4 kali	10,000,000	22,000,000
	4.01-17.3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	4 nagari	20,000,000	32,750,000
	4.01-18	Pemerintahan Nagari Program Fasilitasi dan Koordinasi	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Persentase penyelesaian masalah-masalah	100.00	3,000,000	10,000,000
	4.01 10	Ketentraman dan Ketertiban*)	ketentraman dan ketertiban  Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi	100.00	0,000,000	10,000,000
	4.01-18.1	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban	Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban	1 kali	3,000,000	10,000,000
	4.01-19	Program Fasilitasi dan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan pembangunan	100.00	12,415,000	25,000,000
	4.01-19.1	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 kali	12,415,000	25,000,000
	4.01-20	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	100.00	52,695,000	81,150,000
	4.01-20.1	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Nagari	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Nagari	4 nagari	1,000,000	10,000,000
	4.01-20.2	Pembinaan dan Lomba Nagari Rancak	Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Nagari Rancak	4 nagari	6,000,000	14,000,000
	4.01-20.3	Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan PKK	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan PKK	3 Kegiatan	45,695,000	57,150,000
	4.01-21	Program Fasilitasi dan Koordinasi Sosial Budaya	Persentase pelaksanaan kegiatan sosial budaya tingkat kecamatan Persentase Penyuluran Beras Raskin	100.00	201,470,140	248,000,000
	4.01-21.1	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan	5 kegiatan	51,480,000	7,500,000
	4.01-21.2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	1 tahun	10,000,000	39,500,000
	4.01-21.3	Koordinasi dan Pembinaan Pemuda dan Olah	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pemuda	3 Kegiatan	47,000,000	88,000,000
	4.01-21.4	raga*) Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan	dan Olah raga Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang	1 Kegiatan	85,990,140	95,000,000
		Sosial  Facilitaci Factival Sarantau Sacurambi	Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Fasilitasi Festival Sarantau			
	4.01-21.5	Fasilitasi Festival Sarantau Sasurambi	Sasurambi	1 event	7,000,000	18,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DALIAN DART ROOKAM/REGIATAR	INDIKATOR	TARGET	(TATION 2010)	(TAHUN 2019)
1	2	3 Program Pelayanan Administrasi Terpadu	4 Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan	5	6	7
	4.01-22	Kecamatan*)	tingkat kecamatan	100.00	38,100,000	60,000,000
	4.01-22.1	PATEN	Penyelenggaraan PATEN	1 tahun	38,100,000	60,000,000
27		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO			692,639,650	742,800,000
	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			692,639,650	742,800,000
	4.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	292,639,650	316,800,000
	4.01-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan Benda	12 Bulan	1,800,000	1,800,000
	4.01-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	'Tersedianya Jasa telpon, listrik dan Air	12 Bulan	3,600,000	3,600,000
	4.01-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedia Belanja jasa pengelola kegiatan dan keuangan	12 Bulan	53,040,000	53,040,000
	4.01-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 Bulan	12,000,000	12,000,000
	4.01-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	12 Bulan	2,000,000	3,000,000
	4.01-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12,339,650	12,500,000
	4.01-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedia biaya cetak dan penggandaan	12 Bulan	9,000,000	9,000,000
	4.01-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Belanja komponen listrik/penerangan kantor	12 Bulan	2,500,000	3,000,000
	4.01-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	12,500,000	15,000,000
	4.01-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang undangan	12 Bulan	2,860,000	2,860,000
	4.01-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya biaya makan minum rapat dan tamu	12 Bulan	12,000,000	12,000,000
	4.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi ke luar dan ke dalam Daerah	12 Bulan	120,000,000	140,000,000
	4.01-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	12 Bulan	48,000,000	48,000,000
	4.01-1.20	Administrasi Kantor Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan	Kantor	12 Bulan		
	4.01-1.20	Pembersih	Tersedianya alat pembersih dan bahan pembersih  Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	12 Bulan	1,000,000	1,000,000
	4.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	92,000,000	95,000,000
	4.01-2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mobeleur kantor	1 Paket	25,000,000	25,000,000
	4.01-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	10,000,000	10,000,000
	4.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ Operasional	12 Bulan	57,000,000	60,000,000
	4.01-17	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan	Persentase penyelesaian masalah-masalah pemerintahan kecamatan	100.00	67,000,000	77,000,000
	4.01-17.1	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	1 Kali	30,000,000	40,000,000
	4.01-17.2	Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	12 Bulan	12,000,000	12,000,000
	4.01-17.3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	4 Nagari	25,000,000	25,000,000
	4.01-18	Program Fasilitasi dan Koordinasi	Persentase penyelesaian masalah-masalah	100.00	6,000,000	6,000,000
		Ketentraman dan Ketertiban Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah	ketentraman dan ketertiban  Terlaksananya penyelesaian masalah ketentraman		3,555,555	0,000,000
	4.01-18.1	Ketentraman dan Ketertiban  Program Fasilitasi dan Koordinasi Ekonomi	dan ketertiban	12 Bulan	6,000,000	6,000,000
	4.01-19	dan Pembangunan	Persentase penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan pembangunan	100.00	15,000,000	16,000,000
	4.01-19.1	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan*)	1 Kali	10,000,000	10,000,000
	4.01-19.2	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan	12 Bulan	5,000,000	6,000,000
	4.01-20	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	100.00	63,000,000	68,000,000
	4.01-20.1	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Nagari	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Nagari*)	4 Nagari	4,000,000	4,000,000
	4.01-20.2	Pembinaan dan Lomba Nagari Rancak	Terlaksananya 'Pembinaan dan Lomba Nagari Rancak	4 Nagari	4,000,000	4,000,000
	4.01-20.3	Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan PKK	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan PKK	12 Bulan	55,000,000	60,000,000
	4.01-21	Program Fasilitasi dan Koordinasi Sosial Budaya	Persentase pelaksanaan kegiatan sosial budaya tingkat kecamatan Persentase Penyuluran Beras Raskin	100.00	117,000,000	124,000,000
	4.01-21.1	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	Memperkuat semnagat patriotisme dan cinta Islam	5 Kali	50,000,000	40,000,000
	4.01-21.2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Terlaksananya kegiatan bidadang pendidikan dan kesehatan	12 Bulan	7,000,000	8,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	4.01-21.3	Koordinasi dan Pembinaan Pemuda dan Olah raga	Terciptanya Pemuda yang terhindar dari PEKAT dan mencintai Olahraga	1 Kali	20,000,000	30,000,000
	4.01-21.4	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya kegiatan bidadang kesejahteraan sosial dan Penyaluran Raskin	12 Bulan	35,000,000	40,000,000
	4.01-21.5	Fasilitasi Festival Sarantau Sasurambi	Terlaksananya Peringatan Festival Sarantau Sasurambi	1 Kali	5,000,000	6,000,000
	4.01-22	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan tingkat kecamatan	100.00	40,000,000	40,000,000
	4.01-22.1	PATEN	Terlaksananya Pelayanan yang prima	12 Bulan	40,000,000	40,000,000
28		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA			2,378,924,929	2,182,180,000
20		DAERAH				
	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			1,211,674,000	1,107,180,000
	4.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	667,880,000	682,180,000
	4.01-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya administrasi surat menyurat	12 bulan	2,700,000	3,500,000
	4.01-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	18,000,000	20,000,000
	4.01-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adminstrasi keuangan	12 bulan	108,480,000	108,480,000
	4.01-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	15,600,000	15,600,000
	4.01-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	30,000,000	30,000,000
	4.01-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	20,000,000	20,000,000
	4.01-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya bahan untuk penerangan bangunan kantor	12 bulan	3,000,000	3,000,000
	4.01-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat maupun	12 bulan	7,000,000	8,500,000
	4.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	tamu Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	340,000,000	
		daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	keluar dan dalam daerah			350,000,000
	4.01-1.19	Administrasi Kantor	Terlaksananya Jasa Pegawai Harian /THL	13 orang	120,600,000	120,600,000
	4.01-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Bahan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	2,500,000	2,500,000
	4.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	478,794,000	360,000,000
	4.01-2.3	Pembangunan gedung kantor	lanjutan pembangunan gedung kantor	1 paket	150,000,000	100,000,000
	4.01-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9 peralatan	106,000,000	35,000,000
	4.01-2.19	Pengadaan Jasa Sewa Kantor	Tersedianya gudang peralatan bencana	12 bulan	30,000,000	30,000,000
	4.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	182,794,000	185,000,000
	4.01-2.28	dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	10,000,000	10,000,000
		kantor	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian			
	4.01-3	Program peningkatan disiplin aparatur	dinas	100.00	15,000,000	15,000,000
	4.01-3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian lapangan BPBD	30 stell	15,000,000	15,000,000
	4.01-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang mendapat pelatihan teknis sesuai tupoksi	10 orang	50,000,000	50,000,000
	4.01-5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Adanya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai	10 pelatihan / bintek	50,000,000	50,000,000
	1.05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		binek	1,167,250,929	1,075,000,000
	1.05-22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Nagari Tangguh Bencana	64,10	575,000,000	575,000,000
	1.05-22.6	Pelatihan Tim Reaksi Cepat	Terlaksananya pelatihan anggota TRC	30 orang	100,000,000	100,000,000
	1.05-22.11	Penebangan Pohon Yang Mengancam Fasilitas Umum dan Rumah Penduduk	Terlaksananya pohon yang mengancam fasilitas umum dan rumah penduduk	300 pohon	70,000,000	70,000,000
	1.05-22.16	Pembentukan Kelompok Siaga Bencana*)	terbentuknya kelompok siaga bencana	10 Nagari	120,000,000	120,000,000
	1.05-22.17	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Siaga Bencana	Terbinanya kelompok siaga bencana	5 kelompok siaga bencana	75,000,000	75,000,000
	1.05-22.18	Sosialisasi Bencana	tersosialisasikannya bencana kepada masyarakat /	2000 orang	110,000,000	110,000,000
	1.05-22.21	Kegiatan Forum Pengurangan Resiko Bencana	sekolah terbentuknya forum pengurangan resiko bencana	1 forum PRB	100,000,000	100,000,000
	00 22.21		to 25 mainty a forum pongulangan resiko berluaria	. AGIGIN I IND	100,000,000	100,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
			INDIKATOR	TARGET		(TAHUN 2019)
1	2	3 Program Peningkatan Kesiapsiagaan	4 persentase ketersediaan sarana dan prasarana	5	6	7
	1.05-25	Menghadapi Bencana Pusat Pengendalian Operasional	penanggulangan bencana		442,250,929	500,000,000
	1.05-25.1	penanggulangan Bencana	pusat informasi bencana	12 bulan	171,250,929	190,000,000
	1.05-25.2	Penanganan Bencana	Terlaksananya penanganan bencana	12 bulan	200,000,000	200,000,000
	1.05-25.3	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	2 alat	46,000,000	50,000,000
	1.05-25.4	Kegiatan Pembuatan Rambu-Rambu Bencana	Tersedianya rambu-rambu daerah bencana	15 rambu- rambu	25,000,000	60,000,000
	1.05-26	Program Rehabiltasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Pengendalian Banjir yang dibangun (Titik)	1 Titik	150,000,000	-
	1.05-26.1	Rehabiltasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksananya normalisasi sungai pinti kayu tanjuang nan IV pasia panjang	1 titik	150,000,000	-
29		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			1,177,990,100	2,211,370,785
	4.01	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			580,603,000	887,334,800
	4.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	492,353,000	594,300,000
	4.01-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	1 Tahun	3,000,000	5,400,000
	4.01-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1 Tahun	16,100,000	17,350,000
	4.01-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Adminstrasi Jasa Keuangan Kantor	1 Tahun	56,400,000	59,400,000
	4.01-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Tenaga untuk kebersihan kantor	1 Tahun	22,200,000	30,000,000
	4.01-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor	1 Tahun	26,753,000	32,200,000
	4.01-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung kegiatan	1 Tahun	15,500,000	17,250,000
	4.01-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan Penerangan kantor	1 Tahun	2,000,000	5,750,000
	4.01-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan / minuman untuk rapat staf dan tamu kantor	1 Tahun	16,000,000	20,250,000
	4.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya informasi dalam mengikuti dan mengaktualisasikan kebijakan daerah	1 Tahun	254,500,000	299,800,000
	4.01-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya Adminstrasi Kantor	1 Tahun	48,000,000	72,600,000
	4.01-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Kantor	1 Tahun	5,100,000	5,900,000
	4.01-1.22	Penyedian jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah jabatan	Tersedianya Jasa Sewa Gedung/ Kantor Rumah Jabatan	1 Tahun	26,800,000	28,400,000
	4.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	73,250,000	254,034,800
	4.01-2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	2 unit	-	50,000,000
	4.01-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana gedung kantor	1 paket	-	100,000,000
	4.01-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	25,000,000	45,284,800
	4.01-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	3,000,000	6,500,000
	4.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala untuk kendaraan dinas / Operasional Kantor	1 Tahun	45,250,000	52,250,000
	4.01-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang mendapat pelatihan sesuai tupoksi	100.00	15,000,000	39,000,000
	4.01-5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kapasitas Sumbet Daya Aparatir	1 Tahun	15,000,000	39,000,000
	1.05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			597,387,100	1,324,035,985
	1.05-15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kriminalitas yang tertangani	53.00	255,848,000	353,117,200
	1.05-15.3	Sosialisasi Manajemen Penanganan Konflik	Terlaksananya sosialisasi manajemen penanganan konflik	1 Kegiatan	46,648,000	67,467,200
	1.05-15.4	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terlaksananya Kegiatan FKDM	77 Laporan	45,650,000	55,650,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
			INDIKATOR	TARGET		(TAHUN 2019)
1	2	3	4 Terlaksananya Kegiatan Komunitas Inteligen	5	6	7
	1.05-15.9	Komunitas Inteligen Daerah (KOMINDA)	Daerah (KOMINDA)	45 %	83,550,000	145,000,000
	1.05-15.16	Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Solok Selatan	Terlaksananya Kegiatan Tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kabupaten	30 Kasus	80,000,000	85,000,000
	1.05-18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Hari Besar Nasional yang diperingati ditingkat Kab, Kecamatan dan Nagari	56.75	90,218,000	125,079,785
	1.05-18.6	Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Peringatan Hari Bela Negara	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Peringatan HBN	150 Orang	44,288,000	61,288,000
	1.05-18.7	Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama	Terlaksananya Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	94 %	45,930,000	63,791,785
	1.05-20	Program peningkatan pemberantasan	Persentase kasus Penyakit Masyarakat yang	100.00	81,106,300	505,509,000
	1.05-20.13	penyakit masyarakat (pekat) Koordinasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran/ Penggunaan Narkoba/ Peringatan Hari Anti Narkoba (HANI)	tertangani Persentase Kasus Penyalahgunaan Narkoba yang tertangani	94 %	81,106,300	505,509,000
	1.05-21	Program peningkatan pendidikan politik masyarakat	Persentase ORMAS yang aktif	73.33	170,214,800	340,330,000
	1.05-21.6	Bimbingan Teknis Laporan Pertanggung Jawaban BANKEU PARPOL, Pengurus Parpol dan Verivikasi Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik	Terlaksananya Bimbingan Teknis Laporan Pertanggungjawaban BANKEU PARPOL Pengurus PARPOL dan Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik	11 Parpol	115,489,800	284,105,000
	1.05-21.9	Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM	Persentase Ormas yang aktif	22 Ormas	54,725,000	56,225,000
30		INSPEKTORAT DAERAH			1,721,393,000	2,742,880,000
	4.02 4.02-1	URUSAN PENUNJANG PENGAWASAN Program Pelayanan Administrasi	Porcontago nelevanon administraci Porkenteron	100.00	1,721,393,000 597,553,000	2,742,880,000 764,880,000
		Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran			
	4.02-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2,730,000	3,000,000
	4.02-1.2	dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik		16,200,000	17,000,000
	4.02-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Berjalannya Administrasi Keuangan	12 Bulan	87,480,000	80,880,000
	4.02-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Kebersihan Kantor	12 Bulan	23,543,000	24,000,000
	4.02-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	29,100,000	35,000,000
	4.02-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi	Terlaksananya Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	25,000,000	30,000,000
	4.02-1.12	listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	5,500,000	6,000,000
	4.02-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	10,000,000	15,000,000
	4.02-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Berjalannya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	345,000,000	500,000,000
	4.02-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	12 Bulan	48,000,000	48,000,000
	4.02-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan	12 Bulan	5,000,000	6,000,000
	4.02-2	Pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	161,940,000	381,000,000
	4.02-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kantor sebagai aset	1 Paket	10,000,000	100,000,000
	4.02-2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur sebagai Aset	1 Paket	-	100,000,000
	4.02-2.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan Komputer	2 Paket	10,000,000	25,000,000
	4.02-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	3,000,000	5,000,000
	4.02-2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan  Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan	12 Bulan	50,540,000	55,000,000
	4.02-2.24	dinas/operasional	Operasional	12 Bulan	83,400,000	90,000,000
	4.02-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor  Persentase ketersediaan auditor dan P2UPD	12 Bulan	5,000,000	6,000,000
	4.02-5	Daya Aparatur	sebagai Auditor	57,17	40,000,000	50,000,000
	4.02-5.22	Diklat Pembentukan dan Penjenjangan Auditor dan P2UPD	Terbentuknya aparatur bersertifikasi	8 Orang	40,000,000	50,000,000
		Program peningkatan sistem pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan.	60.00		
	4.02-20	internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah	WTP	851,000,000	1,427,000,000
		Pelaksanaan pengawasan Internal secara	Nilai LAKIP/SAKIP	В		
	4.02-20.1	berkala	Laporan Hasil Audit	64 LHP	400,000,000	600,000,000

No.	KODE	DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	.TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU (TAHUN 2019)
			INDIKATOR	TARGET		
1	2	3 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan	4	5	6	7
	4.02-20.2	pemerintah daerah	Laporan Hasil Audit	12 LHP	80,000,000	120,000,000
	4.02-20.6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terselenggaranya TLHP dan TPTGR	12 Kali	90,000,000	150,000,000
	4.02-20.9	Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pengendalian Manajemen Pelaksanaan	Laporan Hasil Audit	2 Laporan	16,000,000	32,000,000
	4.02-20.14	Kebijakan KDH	Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Terselenggaranya Inventarisasi Temuan	81 OPD	50,000,000	200,000,000
	4.02-20.15	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Pengawasan	10 Kali	20,000,000	50,000,000
	4.02-20.17	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Laporan Hasil Reviu	173 Laporan	195,000,000	275,000,000
	4.02-21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	III dengan catatan	50,900,000	75,000,000
	4.02-21.1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya Pelatihan bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	10 Orang	40,000,000	60,000,000
	4.02-21.3	Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP	Laporan Kapabilitas APIP	1 Laporan	10,900,000	15,000,000
	4.02-22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	100.00	20,000,000	45,000,000
	4.02-22.1	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1 Laporan	10,000,000	25,000,000
	4.02-22.3	Gelar Temuan Hasil Pemeriksaaan	Terlaksananya Gelar Temuan Hasil Pemeriksaan	64 LHP	10,000,000	20,000,000
31		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			4,827,736,000	4,866,872,800
	4.03	URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN Program Pelayanan Administrasi			4,442,736,000	4,462,622,800
	4.03-1	Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	868,203,000	911,613,150
	4.03-1.1 4.03-1.2	Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Terlaksananya urusan surat menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Bulan 12 Bulan	4,600,000 38,400,000	4,830,000 40,320,000
		dan listrik	dan Listrik			
	4.03-1.7 4.03-1.8	Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan 12 Bulan	146,640,000 34,200,000	153,972,000 35,910,000
	4.03-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	12 Bulan	5,000,000	5,250,000
	4.03-1.9	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	40,000,000	42,000,000
	4.03-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	25,000,000	26,250,000
	4.03-1.12	Penyediaan komponen instalasi	Tersedianya komponen installasi listrik kantor	12 Bulan	20,000,000	21,000,000
	4.03-1.13	listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	45,425,000	47,696,250
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-			
	4.03-1.15	perundang-undangan	undangan	12 Bulan	5,000,000	5,250,000
	4.03-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	12 Bulan	20,000,000	21,000,000
	4.03-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya 'Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	380,338,000	399,354,900
	4.03-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya Tenaga Adm. Kantor	12 Bulan	93,600,000	98,280,000
	4.03-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan	12 Bulan	10,000,000	10,500,000
	4.03-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	573,625,000	602,306,250
	4.03-2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional	3 Unit	51,425,000	53,996,250
	4.03-2.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 Unit	47,200,000	49,560,000
	4.03-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	150,000,000	157,500,000
	4.03-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Tahun	10,000,000	10,500,000
	4.03-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	1 Paket	300,000,000	315,000,000
	4.03-2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terlaksanaya rehab kendaraan operasional	3 Unit	15,000,000	15,750,000
	4.03-3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100.00	25,000,000	26,250,000
	4.03-3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya seragam khusus/ khas daerah	30 Stel	25,000,000	26,250,000
	4.03-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang mendapat pelatihan sesuai	10 orang	20,000,000	20,000,000
	4.03-5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	tupoksi Jumlah ASN yang akan mengikuti diklat	10 ASN	20,000,000	20,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
			INDIKATOR	TARGET		(TAHUN 2019)
1	2	3	A Paraentaga Kalangkanan Data dan Informasi	5	6	7
	4.03-15	Program pengembangan data/informasi	Persentase Kelengkapan Data dan Informasi untuk Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00	150,000,000	157,500,000
	4.03-15.3	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan daerah*)	Tersedianya dokumen data/informasi perencanaan	2 Dokumen	100,000,000	105,000,000
	4.03-15.5	Penyusunan profile daerah	Tersusunnya profil daerah tahun 2017	1 Dokumen	50,000,000	52,500,000
	4.03-16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Kerjasama Pembangunan antar lembaga dan swasta yang disepakati	5	60,000,000	63,000,000
	4.03-16.3	Kerjasama Pembangunan dengan Lembaga	Jumlah Kerjasama Pembangunan antar lembaga dan swasta yang disepakati	5 Lembaga	60,000,000	63,000,000
			Keluar dari status daerah tertinggal	belum		
			(belum/sudah) Persentase Nagari Tertinggal Daerah Tertinggal	28.21		
	4.03-18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	(Tahun 2019) Tercapainya Universal Access Tahun 2019 (100- 0-100)		545,000,000	564,750,000
			- Akses Air minum layak (%)	72.00		
			- Pemukiman Kumuh (lokasi) - Akses Sanitasi Layak (%)	2.00 53.55		
	4.03-18.6	Fasilitasi Percepatan Air Minum dan Sanitasi	Terfasilitasinya pencapaian access air minum dan sanitasi	72 Persen	150,000,000	150,000,000
	4.03-18.7	Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi untuk percepatan	11 Nagari	60,000,000	63,000,000
		Tertinggal Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang	pembangunan daerah tertinggal		20,000,000	
	4.03-18.8	Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terkoordinirnya fasilitasi dengan OPD	1 Tahun	100,000,000	105,000,000
	4.03-18.9	Review Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah ( RPIJM ) Tahun 2017-2021	Tersusunnya dokumen hasil review RPI2JM tahun 2018-2021	1 Dokumen	35,000,000	36,750,000
	4.03-18.10	Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemerintahan	Tersusunnya Kajian Perenc. Pengembangan Wil Pemerintahan	1 Dokumen	150,000,000	157,500,000
	4.03-18.18	penyusunan studi kelayakan (FS) lokasi KSCT	Tersusunya Dokumen Rencana Induk KSCT Tahun 2020-2025	1 Dokumen	50,000,000	52,500,000
	4.03-19	Program perencanaan kota-kota menengah dan besar*)	Jumlah Perencanaan Prasarana Wilayah Perkotaan (dokumen)	2	350,000,000	367,500,000
	4.03-19.2	Validasi Profil Infrastruktur Kabupaten	Tersedianya data infrastruktur yang valid	1 Dokumen	50,000,000	52,500,000
	4.03-19.12	Pemetaan Jaringan Pipa PDAM	Tersedianya dokumen pemetaan jaringan pipa PDAM	1 Dokumen	200,000,000	210,000,000
	4.03-19.13	Fasilitasi Penyusunan RP3KP Kabupaten Solok Selatan	Terlaksananya fasilitasi Pokja PKP dan RP3KP	1 Tahun	100,000,000	105,000,000
	4.03-20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan	Persentase dokumen perencanaan rutin SKPD yang tepat waktu	100	80,000,000	84,000,000
	4.03-20.3	Bimbingan teknis tentang perencanan	Terlaksananya Bintek bagi Aparatur Perencanaan	50 Orang	80,000,000	84,000,000
		pembangunan daerah	OPD Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat	100.00		
	4.02.24	Brogram neveneen nembengunen deerek	Waktu		705 009 000	625 702 400
	4.03-21	Program perencanaan pembangunan daerah	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Persentase pencapaian kinerja perencanaan	100.00	795,908,000	625,703,400
			daerah	90.00		
	4.03-21.2	Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021	Terlaksananya revisi RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021	1 Dokumen	200,000,000	-
	4.03-21.3	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang kabupaten	1 Kali	100,000,000	105,000,000
	4.03-21.4	Penetapan RKPD	Tersusunnya RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019	1 Dokumen	235,908,000	247,703,400
	4.03-21.5	Penetapan RKPD Perubahan	Tersusunnya RKPD Perubahan	1 Dokumen	60,000,000	63,000,000
	4.03-21.17	Monitoring dan evaluasi pengendalian pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan	100,000,000	105,000,000
	4.03-21.20	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Tahun	100,000,000	105,000,000
	4.03-22	Program perencanaan pembangunan	Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan Penganggaran	100	875,000,000	935,000,000
		ekonomi	Menurunkan Angka Kemiskinan	6.92	,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			Menurunkan Angka Pengangguran Tersusunnya Dokumen Road Map Peningkatan Nilai	5.7		
	4.03-22.3	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Tambah Komodity Pertanian (karet) Tersusunnya Dokumen Indek Geografis Komodity Pertanian (Kopi Robusta)	1 Dokumen 1 Dokumen	350,000,000	385,000,000
	4.03-22.4	koordinasi perencanaan pembangunan bidang	Terlaksananya koordinasi perencanaan	1 Tahun	100,000,000	105,000,000
		ekonomi	pembangunan bidang ekonomi		,,	,,000
		Penyusunan masterplan penanggulangan	Tersusunnya Master Plan Penanggulangan	1 Dokumen	200.000.000	210.000.000
	4.03-22.6		Tersusunnya Master Plan Penanggulangan Kemiskinan Terfasilitasinya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1 Dokumen 1 Tahun	200,000,000	210,000,000 155,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA INDIKATOR	TAN) TARGET	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU (TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	4.03-23	Program perencanaan sosial dan budaya	Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dengan Penganggaran Persentase pencapaian target RAD SDGs	100.00	100,000,000	105,000,000
	4.03-23.3	Koordinasi perencanaan sosial dan budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan sosial	1 Laporan	100,000,000	105,000,000
	4.06	URUSAN PENUNJANG PENELITIAN DAN	budaya	Laporan	385,000,000	404,250,000
	4.06-16	Program Penelitian dan Pengembangan pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah	100.00	385,000,000	404,250,000
	4.06-16.1	Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Terfasititasi dan Terkoordinirnya Penelitian dan Pengembangan di Kab. Solok Selatan	1 Tahun	85,000,000	89,250,000
	4.06-16.2	Kajian-kajian Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Kajian-kajian Penelitian dan Pengembangan	4 Kajian	300,000,000	315,000,000
32		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5,709,388,621	9,048,524,000
	4.04	URUSAN PENUNJANG KEUANGAN			5,709,388,621	9,048,524,000
	4.04-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	1,440,025,291	2,285,113,000
	4.04-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat	12 bulan	2,800,000	4,320,000
	4.04-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Tersedianya Telepone, Air, Listrik dan Internet	12 Bulan	200,000,000	335,000,000
	4.04-1.7	dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	422,040,000	470,375,000
	4.04-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	22,800,000	22,800,000
	4.04-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	30,000,000	48,840,000
	4.04-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	46,860,000	109,106,000
	4.04-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	12 Bulan	20,000,000	26,976,000
	4.04-1.12	Penyediaan komponen instalasi	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Bulan	10,000,000	22.500.000
		listrik/penerangan bangunan kantor	Bangunan Kantor	12 Dulan	10,000,000	22,500,000
	4.04-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	103,420,000	162,635,000
	4.04-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	12 Bulan	20,335,000	26,000,000
	4.04-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	350,370,291	800,400,000
	4.04-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	12 Bulan	146,400,000	146,400,000
	4.04-1.20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan	5,000,000	9,261,000
	4.04-1.22	Penyedian jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah jabatan	Tersedianya Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	12 Bulan	15,000,000	15,000,000
	4.04-1.24	Penyediaan Jasa Kearsipan dan Pemindahan Dokumen Negara	Tersedianya Jasa Kearsipan dan Pemindahan Dokumen Negara	12 Bulan	45,000,000	85,500,000
	4.04-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	260,317,000	320,000,000
	4.04-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor tempat bekerja	12 Bulan	10,000,000	20,000,000
	4.04-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	250,317,000	300,000,000
	4.04-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	jumlah aparatur yang mendapat pelatihan sesuai	10 orang	40,000,000	85,000,000
	4.04-5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	tupoksi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	10 orang	40,000,000	85,000,000
	4.04-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	50,000,000	85,000,000
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar			
	4.04-6.1	ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	50,000,000	85,000,000
		Program peningkatan dan pengembangan	Opini BPK Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran	WTP 100.00		
	4.04-17	pengelolaan keuangan daerah	Persentase pelaporan keuangan nagari dan PPKD yang sesuai aturan	100.00	3,919,046,330	6,273,411,000
	4.04.47.4	Penyaganan KIIA dan PRAS	Persentase pencapaian target PAD	100.00	420,000,000	420.000.000
	4.04-17.1 4.04-17.2	Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan	Tersusunnya KUA dan PPAS TAhun 2019 Tersusunnya KUA dan PPAS perubahan Tahun	2 Dokumen 2 Dokumen	120,000,000 120,000,000	120,000,000 120,000,000
		Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah	2018 Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah			
	4.04-17.3	daerah Penyusunan sistem dan prosedur tentang	daerah Tersusunnya sistem dan prosedur tentang	1 Dokumen	60,250,000	75,000,000
	4.04-17.4	pengelolaan keuangan daerah	pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	19,700,000	70,000,000
	4.04-17.5	Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Solok Selatan	Tersusunnya analisis standar belanja kabupaten solok selatan	1 Laporan	-	-

No.	KODE	DE SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN -	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
			INDIKATOR	TARGET	(TAHON 2016)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	4.04-17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	92,250,000	150,000,000
	4.04-17.13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	50,000,000	80,000,000
	4.04-17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	1 Laporan	58,000,000	125,000,000
	4.04-17.20	Kerja sama pendampingan penatausahaan belanja keuangan daerah tahun 2018 dengan Aplikasi SIMDA	Terlaksananya kerjasama pendampingan penatausahaan belanja keuangan daerah	1 Tahun	65,640,330	135,000,000
	4.04-17.23	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan daerah	Terlaksananya peningkatan pengelolaan administrasi keuangan daerah	1 Tahun	250,000,000	300,000,000
	4.04-17.24	Monitoring, evaluasi dan verifikasi tentang penatausahaan, Belanja daerah	Terlaksananya monev tentang penatausahaan, belanja daerah	1 laporan	30,000,000	60,000,000
	4.04-17.25	Penyusunan pergeseran peraturan KDH	Tersusunnya pergeseran peraturan KDH tentang	1 Dokumen	22,592,000	27,336,000
	4.04-17.27	tentang penjabaran APBD tahun 2018 Intensifikasi PBB P2, PBB P3 dan BPHTB	penjabaran APBD Terlaksananya intensifikasi PBB P2, PBB P3 dan	2 Milyar	352,000,000	450,000,000
			BPHTB Terlaksananya intensifikasi pajak daerah dan	-		
	4.04-17.28	Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penelitian dan pengesahan DPA dan DPPA	retribusi daerah Terlaksananya penelitian dan pengesahan DPA dan	8 Milyar	220,400,000	340,000,000
	4.04-17.29	SKPD tahun 2018	DPPA OPD	2 Dokumen	55,000,000	77,000,000
	4.04-17.30	Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan daerah	Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan OPD dan laporan keuangan daerah	120 orang	49,750,000	120,000,000
	4.04-17.31	Penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) triwulan dan semester daerah TA 2018	Tersusunnya laporan realisasi anggaran (LRA) triwulan dan semesteran	6 laporan	26,090,000	48,000,000
	4.04-17.34	Penghapusan/ pemindahan tangan asset daerah	Terlaksananya penghapusan dan pemindahan tangan aset daerah	1 Dokumen	98,150,000	200,000,000
	4.04-17.35	Bimtek OPD tentang penatausahaan asset daerah	Terlaksananya bimtek OPD tentang penatausahaan aset daerah	95 orang	74,455,000	250,000,000
	4.04-17.36	Rekonsiliasi data asset daerah dengan OPD	Terlaksananya rekon data aset daerah dengan OPD	1 laporan	100,175,000	40,000,000
	4.04-17.37	Penyusunan RKBD dan RKPBMD tahun 2018	Tersusunnya RKBD dan RKPBMD	2 Dokumen	60,000,000	75,000,000
	4.04-17.38	Kerjasama pendampingan penatausahaan BMD	Terlaksananya pendampingan penatausahaan BMD	1 Tahun	86,000,000	175,000,000
	4.04-17.40	berbasis aplikasi Pengamanan Barang Milik Daerah	berbasis aplikasi Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	1 Tahun	44,135,000	300,000,000
	4.04-17.44	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Daerah	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun daerah	1 Dokumen	175,550,000	200,000,000
	4.04-17.45	Peningkatan Manajemen Data Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah	Terlaksananya peningkatan manajemen data gaji PNS	1 laporan	58,000,000	80,000,000
	4.04-17.47	Penyusunan Ranperda tentang Pokok-pokok	Tersusunnya ranperda tentang pokok-pokok	1 Dokumen	57,500,000	100,000,000
	4.04-17.48	pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Standar Satuan Biaya Tahun 2018 dan 2019	pengelolaan keuangan daerah Tersusunnya standar satuan biaya Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen	50,000,000	55,694,000
	4.04-17.54	Pemuktahiran Data Piutang PBB-P2	Cakupan pemutakhiran data piutang PBB P2	15 Nagari	85,000,000	200,000,000
	4.04-17.56	Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer,	Terlaksananya monitoring dan penatausahaan dana	1 laporan	80,000,000	80,000,000
	4.04-17.57	DAK Pendayagunaan dan Pemanfaatan BMD	transfer, DAK Terlaksananya pendayagunaan dan pemanfaatan	1 Dokumen	58,950,000	85,000,000
			BMD Terlaksananya peningkatan pengelolaan keuangan			
	4.04-17.58	Peningkatan Pengelolaan Keuangan PPKD	PPKD	1 Tahun	30,000,000	165,000,000
	4.04-17.59	Rekonsilasi PAD, Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Pusat	Terlaksananya rekonsiliasi PAD, bagi hasil pajak provinsi dan bagi hasil pajak dan bukan pajak pusat	12 laporan	100,000,000	200,000,000
	4.04-17.60	Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerimaan PBB sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan	Terlaksananya monev terhadap penerimaan PBB sektor perhutanan, perkebunan dan pertambangan	4 laporan	70,000,000	350,000,000
	4.04-17.61	Lanjutan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH Tahun Anggaran 2018	Terlaksananya Lanjutan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahdan Peraturan KDH	2 Dokumen	161,834,000	220,000,000
	4.04-17.62	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan APBD Tahun 2018	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran APBD perubahan	2 Dokumen	300,000,000	374,000,000
	4.04-17.63	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2019	Tersusunnya PERDA tentang APBD dan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2019	2 Dokumen	300,000,000	374,000,000
	4.04-17.66	Kerjasama pendampingan pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Aplikasi	Terlaksananya kerjasama pendampingan pengelolaan pendapatan daerah berbasis aplikasi	1 Tahun	40,000,000	121,381,000
	4.04-17.67	Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan Anggaran berbasis Aplikasi.	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan penyusunan anggaran berbasis aplikasi	1 Laporan	176,625,000	210,000,000
	4.04-17.69	Kerjasama pendampingan pengelolaan keuangan daerah tahun 2018	Terlaksananya kerjasama pendampingan pengelolaan keuangan daerah	1 Tahun	121,000,000	121,000,000

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	TAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
			INDIKATOR	TARGET	, ,	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
33		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			5,474,127,906	8,794,000,000
	4.05	URUSAN PENUNJANG KEPEGAWAIAN DAN Program Pelayanan Administrasi			5,474,127,906	8,794,000,000
	4.05-1	Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi Perkantoran	100.00	767,200,000	1,217,000,000
	4.05-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	5,500,000	6,000,00
	4.05-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi rekening listrik dan air dalam 1 tahun	12 Bulan	30,000,000	40,000,00
	4.05-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor yang menunjang kegiatan operasional kantor	1 Paket	28,000,000	25,000,00
	4.05-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	7,000,000	8,000,000
	4.05-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	172,200,000	250,000,00
	4.05-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	3,500,000	5,000,00
	4.05-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	10,000,000	12,000,00
	4.05-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	25,000,000	28,000,00
	4.05-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	22,000,000	25,000,00
	4.05-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	6,000,000	6,500,00
	4.05-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	6,000,000	6,500,00
	4.05-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan	12 Bulan	400,000,000	750,000,00
	4.05-1.19	daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	konsultasi ke luar daerah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	12 Bulan	52.000.000	55,000,00
	4.03-1.19	Administrasi Kantor	Kantor *) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	12 Bulaii	32,000,000	33,000,00
	4.05-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan	100.00	150,000,000	265,000,00
	4.05-2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianyamobeleur kantor Pendukung Pelaksanaan Opersional kantor	1 Paket	25,000,000	25,000,00
	4.05-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	25,000,000	40,000,00
	4.05-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala kendaraan operasional dalam 1 tahun	12 Bulan	100,000,000	200,000,00
	4.05-4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	persentase aparatur purna tugas yang diberikan pembekalan	50.00	69,000,000	100 000 000
	4.05-4	i rogram rasintasi pinuan/purna tugas i no	Jumlah penyelesaian SK pensiun dan taspen	90.00	03,000,000	100,000,000
	4.05-4.5	Pengurusan SK Pensiun & Taspen	Terpenuhinya hak dan terlengkapi Administrasi Kepegawaian	90 Orang	69,000,000	100,000,00
			Persentase Aparatur yang Berijazah Sarjana dan			
	4.05-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Pasca Sarjana - S1	59.00	1,904,000,000	2,410,000,00
		Daya Aparatur	- S2	5,74		
	405.5.5	Don't I'll and In Debetter Devictory ODNOD	- \$3	0,14	4 500 000 000	2 222 222 22
	4.05-5.5	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD	CASN yang memenuhi persyaratan menjadi PNS	5 angkatan	1,500,000,000	2,000,000,00
	4.05-5.25	Penyelenggaraan ASN Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Wisuda	Terwujudnya SDM yang Handal dan Profesional	100 Orang	404,000,000	410,000,00
			Persentase eselonering yang telah mengikuti Diklat Struktural			
	4.05-30	Program Pendidikan Kedinasan	-Eselon II	57.00	114,000,000	1,620,000,00
			-Eselon III -Eselon IV	60.00 45.00		
	4.05-30.1	Diklat Penjejangan Struktural/Pengiriman	Persentase Esselonering yang telah mengikuti diklat	2 Angkatan	-	1,500,000,00
	4.05-30.4	Peserta Diklat PIM II, PIM III dan PIM IV Pendidikan dan Pelatihan Formal	Struktural Terlatihnya ASN	6 orang	25,000,000	30,000,00
	4.05-30.6	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Terlatihnya Pejabat Camat untuk Diklat Pemerintahan (kepamongan) sebanyak 2 Org, pola	2 Orang	89,000,000	90,000,00
		Program Pembinaan dan Pengembangan	kontribusi Persentase aparatur purna tugas yang diberikan pembekalan	50.00		
	4.05-31	Aparatur	Jumlah penyelesaian SK pensiun dan taspen	90.00	2,469,927,906	3,182,000,00
	4.05-31.1	Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)	Tersedianya ASN yang menunjang tupoksi OPD	200 Orang	655,000,000	895,000,00
	4.05-31.2	Pemberian Penghargaan pada ASN yang Berprestasi	Terlaksananya penetapan pegawai yang mengabdi berdasarkan masa kerja tertentu	88 Orang	85,000,000	160,000,00
	4.05-31.4	Pemberian Bantuan dan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan Ikatan Dinas Lainnya	Terwujudnya Kader Pemerintahan melalui Praja IPDN/STTD/STIS	10 Orang	75,000,000	120,000,00
	4.05-31.8	Pengurusan Karis/Karsu dan Karpeg	Terpenuhinya hak dan terlengkapi Administrasi	215 Dokumen	65,000,000	82,000,00
	4.05-31.11	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Kepegawaian Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	74,800,000	80,000,00
		J. J	. J		,000,000	30,000,00

No.	KODE	SKPD/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME PROGRAM/OUTPUT KEGIA	ATAN)	PAGU INDIKATIF (TAHUN 2018)	PERKIRAAN MAJU
		DAERAH DAN PROGRAM/REGIATAN	INDIKATOR	TARGET	(TAHUN 2018)	(TAHUN 2019)
1	2	3	4	5	6	7
	4.05-31.12	Pembangunan/Pengembangan SIMPEG Daerah	Tersedianya data ASN Kabupaten Solok Selatan	4220 Orang	75,000,000	100,000,000
	4.05-31.13	Pengawasan Disiplin PNS	Menurunya Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	95 Persen	100,000,000	100,000,000
	4.05-31.14	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	800 Orang	200,000,000	310,000,000
	4.05-31.15	Pembinaan Jabatan Fungsional	Terbinanya dan terkelolanya jabatan Fungsional PNS	14 Jabatan	29,000,000	75,000,000
	4.05-31.16	Fasilitasi kegiatan KORPRI kabupaten Solok Selatan	Terlaksananya Kegiatan KORPRI Kab. Solok Selatan	1 Tahun	50,000,000	60,000,000
	4.05-31.19	Pelantikan JPT, Administrator dan Pengawas	Terisinya Jabatan Struktural sesuai dengan Komptensi ASN	3 Kali	500,000,000	300,000,000
	4.05-31.22	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan	Peningkatan Sasaran Kinerja Aparatur	5 Kali	13,000,000	25,000,000
	4.05-31.23	Penyelesaian Kasus - kasus ASN	Penyelesaian Kasus-kasus ASN	95 Persen	80,000,000	275,000,000
	4.05-31.24	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Kepegawaian	ASN Yang bekerja sesuai dengan Peraturan Yang berlaku	200 Orang	32,127,906	50,000,000
	4.05-31.26	Penempatan ASN	Pengisian SOTK OPD	200 Orang	39,000,000	50,000,000
	4.05-31.27	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir ASN	Tersedianya jabatan yang dibutuhkan dalam SOTK	1 Dokumen	97,000,000	100,000,000
	4.05-31.28	Penilaian Kompetensi Aparatur	Peningkatan Sasaran Kinerja Pegawai	400 Orang	300,000,000	400,000,000
		TOTAL A	NGGARAN		434,160,808,278	519,599,157,057

## BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 disusun dengan mempedomani dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025. RKPD merupakan perencanaan operasional pembangunan untuk tahun 2018, dan merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan Renja OPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD Tahun 2018.

Tersusunnya dokumen ini melalui tahapan-tahapan sebagaimana telah diatur, serta koordinasi baik kepada instansi dalam lingkup Pemda Kabupaten Solok Selatan, instansi vertikal, masyarakat, ataupun dengan instansi pada Pemerintahan Provinsi dan Pusat. Koordinasi dilaksanakan dalam bentuk forum-forum, antara lain Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, serta Musrenbang Kabupaten. Forum-forum tersebut menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2021.

Diharapkan RKPD Kabupaten Solok Selatan ini mampu memberikan akselerasi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2021, dalam bentuk lebih terkoordinir dan terintegrasinya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

**BUPATI SOLOK SELATAN** 

**MUZNI ZAKARIA**